

ABSTRAK

DUDY IMANUDDIN EFFENDI Interpretasi Yusuf Qardhawi Tentang Kemiskinan di kalangan Masyarakat Islam dan Upaya Penanggulangannya.

Dalam khazanah pemikiran Islam, Qardhawi merupakan sosok cendekiawan Islam yang produktif dalam membangun karya-karyanya. Ia telah mengklaim dirinya sebagai pemikir moderat dalam menginterpretasikan ajaran ajaran Islam. Salah satunya adalah dalam menginterpretasikan tentang kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam dan kiat-kiat menanggulanginya. Dalam hal ini, Qardhawi mengkritik tajam paham kapitalisme dan sosialis-materialistik yang berkembang di dunia Islam. Menurutnya, dua paham itu betul-betul telah gagal dalam membawa kalangan masyarakat Islam pada pembangunan yang adil dan sejahtera. Bahkan paham-paham tersebut secara sosial telah melahirkan tirani kemewahan, tirani materialistik, kerakusan terhadap dunia, kesombongan dan berbangga diri, yang menghancurkan tatanan kemanusiaan masyarakat Islam. Tirani tirani ini, semakin lama semakin menjadi gurita jahat yang kaki-kakinya senantiasa menghisap kesejahteraan masyarakat Islam secara luas dan ujungnya mengarahkan pada jurang kemiskinan yang akut. Qardhawi menegaskan jika kaum muslimin menghendaki keluar dan masalah kemiskinan yang dideritanya saat ini maka harus kembali pada sistem Islam.

Diyakini oleh Qardhawi bahwa sistem Islam sangat tegas menolak konsep kapitalisme yang telah menganggap hak kepemilikan kekayaan dapat tertumpu pada seseorang yang kaya, tanpa ada hak orang lain sedikitpun. Begitupun, Islam menolak konsep sosialis-materialistik yang telah beranggapan bahwa sistem kepemilikan individu tidak ada atau sangat dibatasi. Dalam penafsiran Qardhawi, sistem Islam telah memandang bahwa harta kekayaan harus menjadi sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan di hadapan Tuhan dan pemiliknya. Sistem Islam sangat melarang untuk melakukan penindasan terhadap sesamanya. Oleh karena itu, sistem Islam menganjurkan kewajiban bagi manusia yang memiliki kekayaan terikat dengan intruksi pemiliknya (Allah), melaksanakan keputusan-Nya

dan tunduk terhadap arahan-arahan-Nya dalam memelihara dan mengembangkannya, dalam menginfakkan dan mendistribusikannya.

Sistem Islam dalam interpretasi Qardhawi dapat berfungsi sebagai kaidah normatif bagi adanya jaminan sosial rang yang miskin. Melalui bangunan akidah, ibadah dan akhlak, setiap muslim akan sadar bahwa dirinya harus saling tolong menolong (ta 'awun), saling mendukung (tanaasur) dan saling berkasih sayang (taraahum) dalam setiap permasalahan yang terjadi di antara mereka. Akan tetapi, jika salah satu bangunan sistem Islam tidak dilaksanakan secara komprehensif dan integral maka akan terjadi disfungsi sosial, yang pada praksisnya tidak akan menjadi solusi bagi permasalahan umat, termasuk dalam persoalan kemiskinan.

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kasuistik teoritik (theoretical case). Oleh karena itu, sifat masalah dalam penelitian ini dapat dikategorikan kepada "ex post facto", yaitu sifat penelitian yang menganalisis masalah sesudah terjadinya sesuatu "sebab". Jenis penelitian model seperti ini merupakan bagian dari penelitian ilmu-ilmu sosial yang berangkat dari suatu keadaan yang sudah terjadi dengan cara menggunakan kepustakaan dan sejumlah catatan yang ada (library reseach) Pengambilan jenis penelitian "ex post facto" digunakan sebagai jenis penelitian yang lebih diarahkan pada pengolahan data (sumber). Data yang dimaksud adalah literatur, buku-buku atau lainnya hasil pemikiran Qardhawi yang telah menjadi sumber informasi dan kajian untuk melakukan pembahasan penelitian ini berlangsung Informasi yang dimaksud adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan akar masalah kemiskinan, dampak dari sebab akar masalah, dan upaya penanggulangannya dalam interpretasi Qardhawi. Kemudian untuk kepentingan analisa penelitiannya adalah menggunakan pendekatan analisa struktur fungsional. Kemudian metode penelitiannya menggunakan pendekatan sejarah (historical approach) sebagai metode meneliti biografi Qardhawi dan analisis isi (content analysis).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Qardhawi patut untuk dimasukkan pada kategori pemikir sosiologi Islam menggunakan pendekatan metodologi struktur fungsional. Hal ini sangat berasal karena dalam setiap melakukan interpretasi tentang masyarakat Islam, beliau selalu mengemukakan bahwa ia adalah sebuah sistem, yang saling berhubungan, saling ketergantungan, selalu berkembang, memiliki keseimbangan orientasi secara holistik, dan mewakili sistem-sistem kebutuhan atau fungsi-fungsi pokok yang harus ada dan berjalan dalam sebuah komunitas manusia. Dalam hal ini, struktur serta sistem sosial merupakan representasi dari fungsi atau beberapa sistem kebutuhan pokok manusia berkelompok.

Dalam kitabnya "Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nasvudhuhu. Qardhawi telah menginterpretasikan bahwa masyarakat dan individu adalah satu sama lain saling mempengaruhi dan memiliki ketergantungan secara dominan. Masyarakat itu tidak lain kelompok individu-individu yang mana mereka terikat dengan ikatan tertentu. Kebaikan individu adalah suatu keharusan bagi kebaikan suatu masyarakat. Oleh karena itu, individu adalah bagaikan batu bata dalam suatu bangunan, jika tidak ada kebaikan pada bangunan maka batu batanya rapuh.

Tidak berfungsinya satu unsur dalam sistem masyarakat Islam atau bahkan digantinya sistem Islam oleh sistem yang lain, menurut penafsiran Qardhawi akan melahirkan al-khalal (kelemahan umat dari tujuan Islam). Inilah penyebab utama terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat Islam. Semakin merebaknya al-khalal tersebut, mengakibatkan umat Islam mengalami krisis kesadaran dan kehilangan identitasnya. Dalam hal ini bias-bias paham materialisme, kapitalisme, dan fatalisme telah ikut andil dalam tercerabut kekuatan masyarakat Islam dari akidah, penghambaan, akhlak dan kekuatan politik yang dapat menyelamatkan dan menyejahterakannya. Hegemoni paham paham tersebut akhirnya menjatuhkan umat Islam jauh dari harga dirinya dalam rupa kemiskinan yang akut.

Dalam interpretasi Qardhawi, untuk keluar dari kemiskinan, umat Islam harus kembali merealisasikan sistem Islam sebagai prasyarat utamanya, memaksimalkan peran pemerintah dalam menetapkan kaidah normatif ekonomi

Islam, dan menguatkan kembali kesadaran masyarakat Islam untuk berpartisipasi penuh dalam membantu saudaranya yang mengalami masalah kemiskinan.

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmanir rahiim

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam timbangan yang adil. Salam sejahtera semoga terlimpah atas rasul-rasul-Nya yang Terpilih. Yang awal dan yang terakhir, Muhammad Rasulullah. Allah telah memuliakan beliau dalam ukiran kalimat "Laa Ilaaha Illallah. Muhammad Rasulullah".

Kalimat yang dalam sejarah kemanusiaan telah melahirkan gerakan deklarasi bermakna revolusi terhadap para rezim yang lalim di muka bumi dan para thogut jahiliyah. Sebuah revolusi terhadap segala berhala dan tuhan-tuhan yang dinobatkan selain Allah Sebuah revolusi untuk menumbangkan setiap penindasan dan ketidakadilan social.

Kalimat yang dalam sejarah kemanusiaan telah membangkitkan sebuah konsepsi baru yang bukan produk rekayasa penguasa maupun filosof, ia merupakan konsep Allah yang mana wajah tidak pantas tertunduk kecuali kepadanya, hati tidak pantas patuh kecuali hukumnya dan tidak boleh takluk kecuali kepada kekuasaannya.

Kalimat yang dalam sejarah kemanusiaan telah membangkitkan gerakan proklamasi lahirnya sebuah masyarakat baru, yang berbeda dari masyarakat jahiliyah, yaitu sebuah masyarakat unik yang tampil beda dengan akidahnya, tampil beda dengan sistemnya yang tidak terdapat padanya rasialisme, regionalisme dan kastaisme. Model masyarakat yang hanya berafiliasi kepada Allah saja dan tidak mengenal loyalitas kecuali hanya kepada-Nya.

Akan tetapi sejarah pun telah memperlihatkan fakta hidup ketika renaissance merebak ke pelbagai wilayah dunia, termasuk ke wilayah-wilayah sosial Islam. Faham-fahamnya mengagresi kekuatan masyarakat Islam, baik itu kiblat kapitalis maupun sosialis-materialistik, luluh lantaklah masyarakat Islam yang terpesona dengan ajarannya. Umat mulai meninggal kekuatan kalimat tauhid dan jejak-jejak

nubuwah Rasulullah. Di kiranya dapat menjadikan masyarakat. Islam lebih makmur, sejahtera dan tertib dalam bersosial. Ternyata sebaliknya, justru mereka tertindas dan terjerumus dalam lembah kemiskinan yang akut.

Adalah sosok cedikiawan Islam, Qardhawi seorang pemikir dan pejuang ikhwanul muslimin menyerukan masyarakat untuk kembali ke haribaan sistem Islam. Yang dapat mengenalkan setiap insan untuk menjamin secara sosial satu sama lain. Dengan diawali mahabbah, kemudian berlanjut pada interaksi yang bernuansa ta'awun, tanaasur dan taraahum antara individu dengan individu yang lainnya. Tidak begitu mengekang seperti halnya sistem sosialis-materialistik dan juga tidak terlalu membebaskan seperti halnya sistem kapitalis dalam kepemilikan kekayaan

Inilah yang telah mengilhami peneliti untuk mencandra substansi pemikirannya, yang secara monumental telah menggambarkan sebuah keagungan dan kemuliaan agama Islam seperti masa Rasulullah liham ini telah mempengaruhi peneliti untuk menghadirkan orisinalitas pemikiran yang tercerahkan oleh sistem Islam di tengah-tengah kekalutan negara-negara berkembang yang selalu dirundung malapetaka kemiskinan

Selesainya tugas akademis ini tidak terlepas dari sumbangsih pelbagai pihak. Oleh karenanya, sudah sepatutnya peneliti menghaturkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada mereka. Hatur nuhun yang sedalam-dalamnya, peneliti sampaikan kepada pembimbing tesis, yaitu Prof.Dr. Nanat Fatah Natsir, MS dan Prof. Dr. Dadang Kahmad, MS. Dengan segala toleransi dan keramahannya telah menuntun peneliti pada penyelesaian secara revolusioner.

Ucapan terima kasih, peneliti sampaikan juga kepada Prof. Dr. H. Ahmad Hidayat, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN SGD Bandung Kepada Prof. Dr. Wardi Bachtiar, MS selaku ketua konsentrasi Studi Masyarakat Islam. Tidak lupa juga kepada Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA selaku motivator dalam proses penelitian ini.

Bakti terima kasih peneliti sampaikan kepada segenap dosen-dosen Program Pascasarjana IAIN SGD Bandung berikut segenap staf administarsinya.

Begitu juga kepada Drs. Ahmad Sarbini, M.Ag yang telah mendorong selalu peneliti pada kehidupan yang lebih cerdas dan maju.

Akhirnya ungkapan terima kasih, peneliti sampaikan kepada ibunda istriku, Hj. Een Qaniah yang begitu paham atas segala perjalanan hidupku, orang tuaku yang selalu memahami kesusahan hidupku, dan saudara-saudaraku yang telah ikut memberikan pelajaran hidup. Selanjutnya, rasa mahabbah, peneliti sampaikan kepada istri dan anakku tercinta yang selalu merangkul hatiku ketika dalam menghadapi setiap kegelisahan hidup.

Tidak ada harapan yang lebih baik, selain harapan yang optimis. Mudah mudahan tesis ini layak dan berguna bagi setiap kemajuan hidup kemanusiaan. Khususnya kemajuan peradaban masyarakat muslim.

Bandung, 26 Juni 2004

Dudy Imanuddin Effendi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendirian Islam terhadap problematika kemiskinan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan dua agama yang mendahuluinya, yakni Yahudi dan Nasrani.¹ Islam dengan syari'at-syari'at yang diwahyukan oleh Allah sangat tegas menganjurkan kaum muslimin untuk tidak melalaikan dan membiarkan golongan lemah atau miskin tersia-sia kehidupannya, tanpa adanya perhatian, perlindungan dan belas kasihan.²

Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada alam semesta melalui rasul-Nya adalah untuk memberi petunjuk dan kebahagiaan hidup manusia di dunia. Oleh karena itu, Islam memuat berbagai prinsip-prinsip dan nash nash yang dapat membangun sebuah masyarakat yang saling bertanggungjawab untuk berbagai masa dan bermacam-macam bangsa.³ Di antara prinsip-prinsip

¹ Dalam Musthafa Husni Assiba'i, *Kehidupan Sosial menurut Islam*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 1993), hal. 34-44. Bahwa dalam kitab Ulangan Agama Yahudi yang merupakan perpaduan Perjanjian Lama dan Baru hasil terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Allah telah mewasiatkan kepada Masa untuk ummatnya Bani Israil supaya bekerja dengan rajin agar terhindar dari kemiskinan hidup dan keharusan membela kepentingan orang-orang miskin. Hal ini telah dinyatakan sebagai berikut. "Barangsiapa bekerja dengan tangan malas, ialah akan kepapaan kelak, tetapi tangan orang rajin itu menjadikan kaya" (Surat Amsal Solaiman 10:4) Dan "Bukankah mulutmu serta berbicaralah dengan adil dan benarkanlah hal orang yang miskin lagi teraniaya" (Surat Amsal Solaiman 31:9). Kemudian kitab Perjanjian Baru Agama srani juga telah menganjurkan untuk berbuat belas kasihan kepada orang-orang yang dalam Nasrani kesukaran, orang-orang lemah dan kaum faqir miskin, sebagaimana telah dinyatakan dalam surat Matius ayat 57

² Assiba'i, *op.cit.*, hal 60. Bahkan dalam kaitan ini, Musa Asy'ari menyebutkan bahwa hampir semua agama rasanya telah menegaskan dan menetapkan kewajiban kepada pemeluknya untuk menolong serta memperhatikan nasib sesamanya, dan memberikan kelebihan yang dimilikinya untuk membantu orang lain yang kekurangan. Pada sisi ini, secara tegas bahwa agama beserta segenap institusinya harus senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat untuk memposisikan sebagai pusat pembelaan kaum yang tertindas dan menderita. Membela orang-orang miskin itu bukan hanya sekedar menyantuni, memberi sedekah dan menghiburnya, tetapi harus dengan berjihad agar kemiskinan dapat ditanggulangi (Jakarta: Lesfi, 1997), hal 30-31

³ Ajaran Islam mengandung ikhtiar, perjuangan dan gerakan ke arah perubahan sosial. Islam juga merupakan pandangan hidup yang pasti, yang memuat program-program umum kegiatan kemanusiaan. Semua ini dalam rangka rekonstruksi masyarakat Konsep-konsep membangun dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spritual, moral dan material. Oleh karena itu, model pembangunan apapun dalam Islam merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan

penting dalam Islam itu adalah tanggungjawab untuk menanggulangi problema kemiskinan. Dalam hal ini, Assiba'i menyatakan terdapat dua keistimewaan yang terkit dengan pandangan Islam tersebut, yakni⁴:

1. Islam tidak memandang bahwa problem kemiskinan adalah kesulitan yang berdiri sendiri, tetapi ia adalah berjalın kelindan dengan persoalan-persoalan kehidupan lainnya. Jadi untuk mengatasinya harus dihadapi secara keseluruhan dan sebaik-baiknya dalam segala bidang yang menyangkut dengan kehidupan serta kehidupan Fredur

2. Islam tidak merasa cukup dengan memberikan nasihat, wasiat-wasiat tentang budi pekerti saja, sebab cara demikian tidak akan membawa manfaat yang banyak pada sebagian besar ummat manusia. Tetapi harus disertai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang jelas dan terang Yang menetapkan batas-batas kewajiban, dan di belakangnya ada suatu kekuasaan yang melindunginya agar hukum-hukum itu tetap dapat dilaksanakan. Sementara itu kepada orang-orang yang melanggarnya harus diberi hukuman dengan paksaan kekuatan undang-undang yang telah ditetapkan. Ini adalah hal yang telah menjadi sunnah Allah di dalam menegakkan kehidupan dan menertibkan kemasyarakatan

Dalam perspektif teori sosiologi struktur fungsional, dua keistimewaan Islam di atas merupakan manifestasi dari fungsi identitas agama. Hal ini ditegaskan oleh Thomas F. O'dea, bahwa agama dapat mengidentifikasi individu dengan kelompok, menolong individu dalam ketidakpastian, menghibur ketika dilanda kecewa, mengaitkannya dengan tujuan-tujuan masyarakat, memperkuat moral, dan menyediakan unsur-unsur identitas lainnya. Begitupun agama dapat bertindak menguatkan kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung pengendalian

nilai, ditujukan untuk optimalisasi kesejahteraan ummat manusia dalam semua dimensinya. Aspek moral dan material, ekonomi dan sosial, spritual dan fisik tidak dapat dipisah-pisahkan. Kebahagiaan yang dicapai tidak hanya di dunia ini, tetapi juga jelak di akhirat. Dan di antara prinsip-prinsip sosial Islam yang dinamis adalah penekanannya pada pemanfaatan sumber apa yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia dan alam lingkungan seoptimal mungkin. Kemudian prinsip pemanfaatan melalui pembagian, peningkatannya harus secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Lihat: Kurshid Ahmad, dalam Ainur R Sophian (ed), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hal. 11-14.

⁴ Assiba'i, op.cit, hal. 61

sosial, menopang nilai-nilai dan tujuan yang mapan, dan menyediakan sarana untuk mengatasi kesalahan serta keterasingan.⁵

Pada situasi seperti di atas, kausalitas agama dengan kehidupan sosial nampak terjalin erat untuk sama-sama mengantisipasi setiap persoalan-persoalan kemanusiaan. Salah satu masalah kemanusiaan tersebut adalah kemiskinan yang senantiasa menggejala di dalam praxis kehidupan sosial saat ini, demikian menurut Ahmad Sanusi.⁶

Dalam hubungan dengan masalah kemanusiaan ini, kekuatan dan kontribusi agama akan nampak pada usaha ke arah keselamatan bagi semua umat manusia sesuai dengan nilai-nilai ajarannya serta motivasi yang diilhamkannya. Di satu pihak nilai ajaran tersebut akan semakin mempertajam alasan kemanusiaan yang sudah ada, di pihak lain, nilai-nilai ajaran itupun menunjukkan hubungan antara tujuan agama untuk keselamatan dengan tujuan hidup manusia. Oleh karena itu menurut Sanusi,⁷ cita-cita keselamatan harus menjadi nilai yang sepatutnya dicapai dan diusahakan oleh semua umat manusia, apapun kenyakinan agamanya.

Selanjutnya, bila misi utama agama telah dipandang memiliki tujuan keselamatan, maka agama juga harus mendorong dan membenarkan usaha-usaha yang dijalankan untuk mempertahankan, mencapai dan mengembangkan keselamatan tersebut. Oleh karena masalah kemanusiaan merupakan tantangan yang bersifat permanen dalam kehidupan manusia, maka fungsi agama tidak boleh tidak harus bersifat operasional. Realitasnya akan tetap dan tidak mungkin berhenti. Begitupun dalam konteks upaya keselamatan berarti juga bermakna membebaskan manusia dari kemelut, kekhawatiran dan ketakutan dari himpitan berbagai masalah

⁵ Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal 30

⁶ Ahmad Sanusi, *Agama dan Kemiskinan* (Jakarta: Logos, 1999), hal 7.

⁷ *Ibid.* hal 4.

kemanusiaan yang dihadapinya, seperti kebodohan, keterbelakangan, ketertindasan, peperangan, keterasingan, kemiskinan dan lain sebagainya.⁸

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Islam sebagai agama dalam memandang kemiskinan tidak berbeda dengan agama yang telah mendahuluinya.⁹ Akan tetapi secara sosial-ideologis, menurut Asiba'i, Islam mempunyai cara dan peraturan-peraturan tersendiri dalam menempuh jalan untuk tujuan keselamatan ummat manusia dari masalah kemiskinan tersebut.¹⁰

Cara dan peraturan-peraturan itu berbeda dengan faham kapitalisme dan komunisme. Dalam doktrin kapitalisme, bahwa kemaslahatan ummat dan masyarakat harus tunduk kepada kemaslahatan kapital. Kapitalisme dalam "hak-hak kepemilikan" telah memberikan kelonggaran yang amat besar kepada individu maupun satu lembaga sosial masyarakat tertentu. Menurut Jean Francois Revel, harus diakui bahwa pada awalnya kapitalisme dapat bersikap netral secara sosial Olch karena tujuannya hanya sekedar mengatur soal-soal produksi, laba, dan investasi Pada konteks inilah, dialektika distribusi kekayaan hanya terjadi pada sejarah kelompok borjuis. Sedangkan kelompok ploretariat hanya menjadi objek eksploitasi dari mereka.¹¹

Namun ketika muncul kesadaran bahwa ternyata ada kelas tertentu yang diuntungkan dari prosesnya, maka saat itu juga berubahlah kapitalisme menjadi ideologi. Masuk dalam jaring-jaring sistem kemasyarakatan, ke jantung kekuasaan, mengendalikan nilai-nilai kebudayaan. Di satu sisi, perti diakui Michael Beaud, kapitalisme memiliki kapasitas kreatif, cepat melakukan pembenahan-pembenahan dini dan melakukan hal-hal yang "spektakuler" sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Betapa masyarakat dunia terperangah dan terkagum menyaksikan kapitalisme mampu

⁸ Ignas Kleden, *Dialog Antar Agama: Kemungkinan dan Batas-batasnya* (Jakarta Dalam Prisma, LP3ES. No. 55/VII/1978), hal. 7

⁹ Yakni, *Agama Yahudi dan Nasrani*

¹⁰ *Ibid.* hal 60.

¹¹ Mulibudin M. Dahlan, (ed), *Sosialisme Religius* (Yogyakarta Kreasi Wacana, 2000), hal viii

mendemonstrasikan kemudahan-kemudahan materi buat manusia. Sekurangnya telah membawa masyarakat keluar dari kurun feodalisme menuju demokrasi dan emansipasi.¹²

Tapi di sisi lain, kemajuan ekonomi yang semula dirancang untuk kebutuhan manusia justru menghasilkan alat-alat yang mentasbihkan implikasi implikasi yang mubazir. Membanjirinya barang konsumsi tidak lagi mengantarkan manusia menjadi subjek kreatif tapi dikendalikan oleh kerangka alat (produksi) yang bekerja di luar dirinya. Bukan cuma itu, kapitalis destruktif itu juga bisa diamati dari implikasi sistem pemerintahan bentukannya. Menurut Milton Friedman, kapitalisme, mestinya bertanggung jawab karena telah turut aktif melahirkan hampir semua pemerintahan represif di Dunia Ketiga.¹³ Kemudian dalam doktrin sosialis-komunis pun dikutip oleh at star yang diciptakan Engels, telah menganggap bahwa hak milik itu bukan merupakan keaslian watak manusia. Oleh karena itu, hak milik perseorangan sangat dibatasi secara minimum oleh kekuasaan negara.¹⁴

Analisa di atas, dapat dibuktikan melalui perkembangan selanjutnya dari pemikiran-pemikiran bapak para sosialis, yakni Karl-Marx¹⁵, yang dikembangkan

¹² Ibid

¹³ Ibid. hal ix. Lebih lanjutnya, ketika kapitalisme menghasilkan gerak ekonomi yang diserahkan sepenuhnya kepada (persaingan) pasar, maka proses eksploitasi gila-gilaan itu tak lagi bisa dihindari. Bukan alam, bukan pula manusia. Pasarlah yang mengendalikan kebutuhan manusia. Lewat korporasi-korporasi raksasa seperti Bank Dunia, IMF, juga WTO. Mantra rekolonialisasi, penjajahan dan penindasan disenandungkan ke seluruh penjuru dunia. Dalam hal ini, Erich Fromm (1955) menyatakan bahwa "Kini manusia tidak berlutut dihadapan berhala materialisme, kediktatoran uang, anomistis, dan perbudakan. Materialisme fundamentalis telah menjebak manusia ke dalam belenggu alienasi (kesunyian, keterasingan manusia dari Tuhan, sesama manusia, lingkungan), dan sinisme.

¹⁴ Assiba'i, Op.Cit, hal 318. Lebih lanjut menurutnya dapat dilihat dalam salah satu isi UUD Rusia Fasal 7, sebagai berikut: "Undang-Undang membolehkan pembentukan perusahaan perpisahan perekonomian secara kecil dan khusus untuk bagi kaum petani, serta karyawan karyawan, asal saja perusahaan-perusahaan itu semata-mata atas usaha sendiri, dengan ketentuan bahwa mereka tidak menggunakan tenaga orang lain

¹⁵ Cita-cita awal Marx sesungguhnya adalah membebaskan manusia dari rantai ketergantungan, alienasi, dan perbudakan ekonomi" Erich Fromm, Masyarakat yang Sehat (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 47.

oleh Lenin dan Stalin menjadi "marxism-humanist", dan ditafsirkan menjadi semacam ideologi dan dogma politik.¹⁶ Dari sinilah marxisme berubah wajah menjadi gerakan politik revolusioner. Puncaknya adalah revolusi Oktober 1917 yang dilancarkan kaum Bolsyewik di Rusia. Suatu gerakan yang mampu mencengangkan mata dunia dengan menjadikan pertama kalinya sosialisme-komunis melembaga dalam bentuk negara dan mengembangkan kepemimpinan "diktator proletarian". Bagi Fromm, pembangunan "sosialis yang dilakukan tidak ada bedanya dengan pembangunan kapitalis, memakai negara untuk membangun monopoli industrial yang dipimpin oleh suatu organisasi birokrasi managerial dengan metode sentralistis dan industrial birokratis. Pada konteks inilah, siklus penguasa diktator-otoritarian berubah wujud dengan memanipulasi atas nama rakyat tertindas (baca proletariat).¹⁷

Menurut Khurshid Ahmad, pengintegrasian dan pengadaptasian paradigma sosiologi pembangunan masyarakat kapitalis maupun sosialis sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara berkembang¹⁸ (dunia ketiga) dalam rencana pengentasan kemiskinan tidak mungkin dapat menghasilkan perubahan yang signifikan. Terkecuali hanya melahirkan struktur sosial masyarakat yang bersifat eksploitatif dan tidak adil, bahkan memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Lebih jauhnya, justru makin menambah jurang perbedaan kelas sosial sampai pada titik konflik antara kaya dan miskin maupun rakyat dan penguasa.¹⁹

¹⁶ yang selanjutnya dikenal dengan komunisme-leninisme.

¹⁷ Dahlan, (ed). Op.C, hal xii. Ada tiga bentuk paradoks pasca revolusi itu dilangsungkan. Pertama, menolak kelompok lain yang tidak seialiran dengan jalan yang kejam dan bengis Para "begawan revolusi" itu menolak dengan tegas pluralisme (keanekaragaman ideologi) dan memberlakukan monisme (sistem ideologi tunggal). Kedua, pelaziman jalan kekerasan Ketiga, karena sifatnya monisme, maka semua aparaturnegara diabdikan penuh untuk memagari kekuasaan tunggal. Profesi ahli hukum, ilmuwan, wartawan, kehilangan otonominya, dikekang dalam skemata monotomi, keseragaman dalam selera.

¹⁸ Yang ujungnya kebanyakan negara-negara berpenduduk beragama Islam.

¹⁹ Ainur R. Sophiaan, (ed) Erika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam (Surabaya Risalah Gusti, 1997), hal.7 Hal ini disebabkan, nilai-nilai ketuhanan diasingkan dari sistem masyarakat sosialnya. Sehingga, etika apapun yang diciptakannya selalu bersumber pada akal an sich dan pengejaran materi saja

Dalam hal di atas, Qardhawi mengkritik tajam bahwa dua isme itu betul betul telah gagal dalam membawa manusia pada pembangunan yang adil dan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, sebaliknya justru yang lahir adalah suatu kecenderungan yang sangat keterlaluan dalam memandang materi dan nilai dunia. Ujung-ujungnya melahirkan tirani kemewahan, tirani materialistik, kerakusan terhadap dunia, kesombongan dan berbangga diri, yang menghancurkan tatanan sosial manusia. Tirani-tirani ini, semakin lama semakin menjadi gurita jahat yang kaki-kakinya senantiasa menghisap kesejahteraan masyarakat luas dan mengarahkan pada jurang kemiskinan yang akut.²⁰ Disebutkan pula oleh Qardhawi, bahwa kaum muslimin jika menghendaki keluar dari masalah-masalah kemiskinan saat ini maka harus kembali pada sistem Islam. Oleh karena, Islam sangat tegas menolak konsep kapitalisme yang telah menganggap hak kepemilikan kekayaan dapat tertumpu pada seseorang yang kaya, tanpa ada hak orang lain sedikitpun. Begitupun, Islam menolak konsep sosialis-materialistik yang telah beranggapan bahwa sistem kepemilikan individu tidak ada atau sangat dibatasi.²¹

Sistem Islam telah memandang bahwa harta kekayaan harus menjadi sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan di hadapan Tuhan dan pemiliknya, dilarang untuk melakukan penindasan terhadap sesamanya. Dalam sistem Islam, - wajib bagi manusia yang memiliki kekayaan terikat dengan intruksi pemiliknya (Allah) dan melaksanakan keputusan-Nya serta tunduk terhadap arahan-arahan-Nya dalam memelihara. dan mengembangkannya, dalam menginfakkan dan mendistribusikannya. Pada sisi inilah, sistem Islam mengakui hak kepemilikan individu sebagai manifestasi dari prinsip kemerdekaan dan kemanusiaan. Sedangkan sisi lain, hak kepemilikan individu itu harus didasarkan pada nilai keadilan yang menyebabkan adanya hak fakir miskin di dalam kepemilikannya tersebut.²²

²⁰ Qardhawi, Karakteristik Islam (Surabaya, Risalah Gusti, 2001), hal. 156-157.

²¹ Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta Gema Insani Pers, 1995), bal. 40-49

²² Qardhawi, Anatomi Masyarakat Islam (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), hal 183-200

Menurut Qardhawi,²³ karena sistem Islam bersifat integral maka pemilahan salah satu prinsip Islam untuk dilaksanakan dalam tatanan sosial akan mengalami kegagalan total. Salah satu contoh adalah penerapan sistem Islam oleh masyarakat yang asing terhadap Islam, misalnya zakat. Kegagalan ini dapat di indikasi sebagai berikut:

1) Zakat akan terkumpul sedikit sekali sehingga tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan atau berbagai masalah sosial yang ditimbulkannya. Terbatasnya penghasilan zakat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: a) lemahnya dorongan dan pengetahuan agama di kalangan masyarakat akibat invasi pemikiran asing. Kebanyakan orang pun enggan membayar zakat kepada pemerintah karena sudah terbebani jenis pajak. Mereka tidak menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang terbukti telah mengabaikan hukum Allah. Mereka memperkirakan bahwa zakat yang dipungut tidak akan didistribusikan menurut ketentuan syari'at seperti halnya pendistribusian hasil pajak telah diselewengkan, dan; b) karena mayoritas rakyat tidak mempunyai kekayaan dan penghasilan yang cukup sebagai sumber dana zakat. Sebab, gaya hidup kaum muslimin sekarang secara total meniru gaya hidup orang-orang kafir. Diungkapkan dalam sebuah hadis Nabi bahwa seandainya orang-orang kafir itu masuk ke lubang biawak, kaum muslimin pun akan mengikuti mereka. Gaya hidup tercela tersebut bersifat boros, mengutamakan kemewahan dan kecenderungan mengemari kegiatan hura-hura. Pemenuhan berbagai kesenangan yang diambil dari model gaya hidup orang-orang kafir itupun akhirnya menyedot kekayaan dan sumber daya umat Islam. Padahal, semua aktivitas itu tidak ada mainpaatnya.

2) Sebagian hasil zakat yang sedikit itu akan digunakan untuk membiayai pegawai, Mata laksana perkantoran, dan perlengkapan penanganan zakat. Akibat kelemahan administrasi dan kecenderungan hidup bermegah-megah, zakat itu pun habis sebelum sampai kepada mereka yang berhak.

²³ Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta. Gema Insani Pers, 1995), hal. 174-176

3) Ketika zakat didistribusikan, sering timbul kekacauan dan penyimpangan. Banyak mereka yang berhak tidak mendapat bagian, sementara mereka yang tidak berhak mendapat bagian Hal ini disebabkan oleh lemahnya iman dan minimnya hasil pendidikan agama, baik di kalangan pengurus zakat maupun kalangan masyarakat.

4) Akhimya, zakat tidak mampu berperan optimal kecuali terhadap sebagian kecil kaum miskin yang mendapat bantuan sangat sederhana. Setelah itu, timbullah keguncangan hati, keluhan dan cercaan terhadap zakat karena ketidak efektifannya. Hal ini menyebabkan tersebarinya benih-benih keraguan terhadap sistem Islam secara keseluruhan.

Contoh di atas menunjukkan bahwa mencampur-adukkan sistem asing dengan sistem Islam tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas Oleh karena itu, ditegaskan oleh Qardhawi bahwa syarat untuk dapat penyelesaian secara tuntas adalah hanya mungkin dipraktikkan dalam sistem masyarakat Islam.²⁴

Adalah sistem masyarakat Islam yang dapat menciptakan struktur sosial penuh dengan karakter kemanusiaan, selain bercirikan ketuhanan dan moral. Dalam pandangan sistem masyarakat Islam ini, perilaku birokrasi pemerintahan, lembaga lembaga sosial dan masyarakatnya harus sama-sama memikul kewajiban menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera berdasarkan kaidah-kaidah keselamatan (Islam). Misalnya, jika terjadi kepemilikan kekayaan oleh seseorang yang menindas orang lain atau tidak mau mengakui ada hak bagi fakir miskin dari kepemilikan kekayaannya tersebut, maka pemerintah atau negara berhak ikut campur untuk mengintervensi seseorang tersebut dalam konteks melaksanakan keadilan dan kesejahteraan manusia, demikian menurut Yusuf Qardhawi²⁵

Dalam konteks kemiskinan, Qardhawi berpandangan bahwa kaidah-kaidah Islam yang merupakan unit azasi sruktur sosial masyarakat Islam, dengan jelas telah menganjurkan nilai kasih sayang sesama manusia terutama kepada kaum yang

²⁴ Ibid, hal. 172.

²⁵ Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta Gema Insani Pers, 1997), hal. 57-58

lemah, anak yatim, orang miskin dan lain-lain. Melalui penerangan al-Qur'an dan as-Sunnah, norma-norma sosial masyarakat Islam tersebut menganjurkan untuk menjalankan kehidupan yang dipenuhi dengan etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia.²⁶

Dengan tegas, Qardhawi menyatakan bahwa untuk menanggulangi atau menghapus kemiskinan, menjamin kecukupan kaum fakir dan menutupi kebutuhan pokoknya, serta menjaga kehormatannya sebagai manusia, maka struktur sosial yang menjadi sarannya harus berpijak pada sistem masyarakat Islam. Oleh karena, sistem masyarakat Islam dapat melahirkan struktur sosial yang bersifat integral dan saling melengkapi.²⁷

Berpijak pada pendekatan analisa sosiologi struktur-fungsional, gagasan Qardhawi yang menarik adalah mengenai pemberdayaan struktur sosial masyarakat Islam hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, struktur social²⁸ yang dimaksud adalah meliputi: Pertama, kaidah-kaidah sosial yang terdapat dalam sistem Islam, seperti kaidah keadilan, kesejahteraan, tolong-menolong, persamaan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan lain-lain. Begitupun kaidah-kaidah sosial yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan, seperti hak kepemilikan dan perlindungan, hak konsumsi, hak sirkulasi, dan hak distribusi kekayaan bagi masyarakat Kedua, kewajiban pelaku birokrasi pemerintahan sebagai pengelola lembaga sosial masyarakat secara keseluruhan dalam membuat kebijakan pembangunan dan sarana-sarana menanggulangi serta menghapus kemiskinan Ketiga partisipasi masyarakat dalam upaya menghapuskan kemiskinan yang dialami dirinya sendiri ataupun yang dialami oleh masyarakat sekitarnya.²⁹

²⁶ Ibid

²⁷ Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta Gema Insani Pers, 1995), hal 172.

²⁸ Selo Soermarjan dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta, Rajawali Pers, 1990), hal. 21. Ia telah mendefinisikan struktur sosial sebagai keseluruhan jalinan unsur-unsur sosial yang meliputi kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.

²⁹ lihat: (<http://www.Yahoo 2001/10/artikel ridho shtml>)

Ketiga struktur sosial di atas, jika dapat berjalan secara sinergis maka diyakini mampu menanggulangi kemiskinan bangsa-bangsa berkembang, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sejarah telah membuktikan, dengan struktur sosial yang berpijak pada sistem masyarakat Islam ternyata mampu membangun partisipasi penguasa dan rakyat untuk mengerahkan segenap potensinya dalam menghilangkan kemiskinan dengan cara yang sangat adil dan sangat berpihak pada kesejahteraan rakyat.³⁰

Berbeda halnya dengan Qardhawi yang begitu yakin atas kekuatan struktur sosial dalam sistem masyarakat Islam dapat menyelamatkan ummat manusia dari fenomena kemiskinan secara universal. Weber,³¹ malah sebaliknya telah memandang pembentukan sistem masyarakat Islam tidak dapat melahirkan penyelamatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Asumsinya, bahwa Islam adalah agama dan "para prajurit. Di zaman Islam-awal "kelas prajurit" ini secara jelas telah membentuk suatu komunitas agama Jadi menurut Weber. Islam sesungguhnya adalah agama yang didukung oleh sekelompok status tertentu. Oleh karenanya sangat dapat dimengerti, bahwa "perang agama" bagi para prajurit ini adalah untuk mendapatkan harta rampasan, terutama berupa tanah. Sebab inilah kelas sosial dalam Islam tersebut sangat berorientasi pada "kepentingan feodal"³² Ditegaskan oleh Weber, bukanlah "keselamatan jiwa yang dikejar Islam dalam perang-perang sucinya, tetapi kekayaan.

Lebih lanjut menurut Weber, dengan mengalahkan dunia, si prajurit juga akan mendapatkan "prestise sosial. Jika begitu maka terciptanya struktur patrimonial dan negara Islam adalah kelanjutan yang logis saja. Bagi Weber, penguasa patrimonial adalah ancaman bagi struktur sosial yang secara tradisional

³⁰ Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta Gema Insani Pers, 1997), hal 72

³¹ Taupik Abdullah (eu). Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi (Jakarta: LP3ES 1993), hal. 18-27

³² Feodal dalam pengertian adanya jaringan sosial antara tuan tanah dan penyewa tanah (patron dan client)

dianggap sah, karena akan mengajukan bentuk baru dari nilai dan wewenang. Selanjutnya nilai dan wewenang ini makin lama makin memungkinkan bagi mereka untuk memperoleh daerah pajakan (fiefdom) sendiri. Dalam hal ini, logikanya, sementara si penguasa tunggal tetap memproyeksikan diri sebagai "bapak rakyat", proses pemiskinan massa pun berlanjut pula.

Akan tetapi secara umum, khususnya yang berkenaan dengan kepercayaan protestan, Weber memiliki keyakinan bahwa agama merupakan faktor perubahan sosial. Menurut Talcott Parsons,³³ perhatian utama Weber adalah agama sebagai sumber struktur masyarakat. Dalam konteks inilah, sepakat dengan Peter L. Berger (1991), bahwa sistem sosial³⁴ merupakan hasil dari proses objektifikasi ajaran agama. Sehingga ajaran agama harus dipahami tidak bersifat determinan terhadap kenyataan kenyataan sosial. Ajaran agama melalui proses eksternalisasi dan internalisasinya dapat mewujudkan pada sistem sosial yang mampu mengubah masalah-masalah pada kenyataan sosial, semisal masalah kemiskinan.

Contoh-contoh interpretasi di atas menantik untuk diteliti secara mendalam. Satu sisi, sebagian tokoh sosiologi struktur-fungsional memiliki relasi interpretasi yang selaras dengan Yusuf al-Qardhawi yang telah memandang bahwa paradigma agama memberikan formulasi syarat sistem agama dalam struktur sosial untuk menyelamatkan masyarakat dari problema sosial, khususnya fenomena kemiskinan. Sedangkan sisi lain ada yang berpandangan inkonsisten, seperti halnya Weber sebagai salah satu dari pemikir sosiologi struktur-fungsional, dengan pijakan paradigma fakta sosialnya yang sekaligus telah melatarbelakangi sosiologi

³³ Roland Robertson, (ed) Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, Terjemahan Ahmad Edyani (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada), hal. 56.

³⁴ Dalam perspektif sosiologi secara umum, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Sehingga setiap perilaku yang diperankan oleh individu dan kelompok akan terkait keberhasilannya dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Karena itu Wach lebih jauh beranggapan bahwa keagamaan yang bersifat subjektif, dapat diobjektifkan dalam pelbagai macam ungkapan, dan ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai struktur tertentu yang dapat dipahami. Lihat. Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung Rosdakarya, 2000), hal 53-54

motifnya dalam menegaskan bahwa sistem masyarakat Islam justru akan menjadi ancaman bagi struktur sosial. Yang implikasinya bukan melahirkan keselamatan bagi masyarakat, justru sebaliknya akan melahirkan proses pemiskinan massa secara masif. Akan tetapi, bersamaan dengan itu Weber dengan sikap subjektifitasnya terhadap kepercayaan protestan telah berpandangan bahwa agama merupakan sumber struktur dan faktor perubahan sosial.

Bertolak dari pandangan-pandangan di atas, maka peneliti tertantang untuk mengkaji dan menganalisa pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Islam, khususnya yang berhubungan dengan keharusan membumikan sistem masyarakat Islam. Betulkah Islam seperti apa yang digambarkan oleh Weber atau justru sebaliknya dapat menyelamatkan umat dalam setiap masalah yang dihadapinya? Dalam konteks inilah, ketertarikan peneliti atas pandangan Yusuf Al-Qardhawi adalah kepada konsep sistem masyarakat Islam, yang jika diberdayakan secara komprehensif oleh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim maka realitas kemiskinan dapat ditanggulangi. Pada sisi lain-pun, ketertarikan peneliti adalah keinginan untuk melakukan pengujian secara ilmiah terhadap pernyataan Yusuf Al-Qardhawi tersebut, yang interpretasinya akan memakai pendekatan teori struktur fungsional.

B. Masalah Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan di atas, ketertarikan penulis pada pemikiran Qardhawi adalah terletak pada usaha perealisasi sistem masyarakat Islam dalam elemen-elemen startegis sosial hubungannya dengan masalah kemiskinan. Dalam pandangan-pandangannya, Qardhawi sangat tegas berpendapat bahwa satu sistem sosial tertentu memiliki keterkaitan yang erat dalam melahirkan tingkat kesejahteraan masyarakat maupun munculnya fenomena kemiskinan di dalam suatu masyarakat tertentu. Secara interpretatif, maka pandangan Qardhawi ini menunjukkan adanya konsep hubungan kausalitas antara penggunaan satu sistem sosial dengan faktá sosial yang sedang terjadi pada satu wilayah masyarakat tertentu peningkatan kesejahteraan maupun terjadinya fenomena kemiskinan. mengenai

"Mengacu pada pemahaman di atas maka terdapat beberapa masalah pokok yang berkenaan dengan penelitian ini. Pertama, pandangan Qardhawi tentang keharusan negara berpenduduk mayoritas muslim untuk membumikan sistem masyarakat Islami sebagai antitesa dari sistem sosial kapitalisme, komunisme dan sekulerisme; Kedua, pandangan Qardhawi tentang lahirnya fenomena kemiskinan masyarakat Islam yang disebabkan kurang maksimalnya upaya pemberdayaan struktur sosial dalam sistem masyarakat Islam dan akibat terlalu banyak mengadopsi sistem sosial yang dikembangkan oleh kalangan Barat, dan; ketiga, pandangan Qardhawi tentang penegasan bentuk-bentuk kemiskinan yang terjadi di masyarakat Islam, baik itu standarisasi miskin ekonomi, politik, pendidikan bahkan kreatifitas kerja, pengolahan sumber daya alam dan manusia. Yang ditinjau dari aspek lain, akar penyebabnya adalah tidak direalisasikannya sistem masyarakat Islam. Sekaligus pada sisi inipun, Qardhawi telah menegaskan bahwa pembumian sistem masyarakat Islam dapat menjadi model dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam.

Ketiga hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian. Targetnya adalah untuk menguji tingkat validitas pandangan-pandangan Yusuf Qardhawi secara teoritik. Untuk kepentingan itu, pendekatan analisis yang akan dipakai adalah pendekatan interpretasi yang diambil dari teori-teori sosiologi struktur fungsional.

Sepakat dengan Weber, pemakaian pendekatan interpretasi ini adalah untuk melakukan penjelasan kausal atas tindakan sosial mengenai berbagai peristiwa beserta akibatnya. Bahkan lebih khusus, dalam pendekatan interpretasi itu ada yang disebut dengan *circumstantial*. Artinya, disamping menganalisis segala perubahan yang tampak juga ditambah dengan upaya memperhatikan berbagai kekuatan yang tidak tampak atau disadari tetapi berpengaruh terhadap perilaku sosial. Pendekatan ini bersifat *socio-genetik*, yakni penelaahan berbagai bentuk dan makna cara hidup

suatu masyarakat serta lingkungan yang mempengaruhi keberadaan perubahannya.³⁵

Berdasarkan argumentasi di atas, jika dikorelasikan dengan penelitian ini maka bentuk dan makna cara hidup adalah terdapat pada pandangan Qardhawi mengenai penggunaan sistem sosial yang ada di lingkungan masyarakat Islam yang mempengaruhi terjadi kemiskinan.

Berdasarkan uraian dan pembatasan masalah yang telah digambarkan di atas, maka fokus masalah penelitian ini dapat diidentifikasi berikut:

1. Bagaimana interpretasi Yusuf Qardhawi mengenai sebab-sebab terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat Islam?
2. Bagaimana interpretasi Yusuf Qardhawi mengenai bentuk-bentuk kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam?
3. Bagaimana interpretasi Yusuf Qardhawi mengenai upaya penanggulangan masalah kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini bermaksud untuk mengka mengenai interpretasi Qardhawi tentang sistem masyarakat Islam hubungannya dengan masalah kemiskinan. Oleh karenanya, penelitian ini akan dipusatkan pada maksud-maksud sebagai berikut:

1. Mengetahui interpretasi Qardhawi mengenai penyebab terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat Islam.
2. Mengetahui interpretasi Qardhawi mengenai Bentuk-bentuk kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam.
3. Mengetahui interpretasi Qardhawi mengenai upaya penanggulangan masalah kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam.

Adapun tujuan penelitiannya adalah menguji tingkat validitas keilmiahan konsep sistem masyarakat Islam dalam hubungan dengan masalah menanggulangi

³⁵ Ibid ,hal.82

kemiskinan yang telah diinterpretasikan oleh Qardhawi. Untuk kepentingan ini, peneliti telah mengajukan pendekatan analisa dengan memakai pendekatan argumentasi-argumentai sosiologi struktur-fungsional. Tujuannya sebagai upaya memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan lahir nilai guna yang signifikan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosiologi Islam, baik itu secara ilmiah (akademis) maupun amaliah (praktis). What aspek app pumaya ve abou Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu sosial. Yang secara triadik diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi teoritik mengenai akibat-akibat lahirnya kemiskinan yang disebabkan tidak dilaksanakannya sistem masyarakat Islam dalam konteks komunitas muslim. Dengan menggunakan penjelasan secara analitik-interpretatif melalui pendekatan teori-teori sosiologi struktur-fungsional atas implikasi kemiskinan yang disebabkan tidak direalisasikannya bentuk dan makna cara hidup berlandaskan Islam.

Sedangkan secara amaliah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang komprehensif tentang sistem masyarakat Islam hubungannya dengan masalah penanggulangan kemiskinan, khususnya untuk kepentingan dakwah Islamiyah dan pijakan bagi pemerintah dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang terkait dengan masalah pengentasan kemiskinan secara umum.

E. Tinjauan Pustaka

Secara umum, penelitian ini akan meninjau hubungan kausalitas antara sistem masyarakat, kemiskinan dengan suatu pijakan agama (dalam hal ini Islam), maka tinjauan pustaka yang diperlukan meliputi: hubungan kemiskinan dengan agama dan sistem masyarakat dengan agama.

1. Interelasi Antara Agama dan Masalah Kemiskinan

Pada dasarnya, agama berperan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang akan menghantarkannya ke jalan keselamatan"; di dunia kini dan di akhirat kelak. Karena itu agama merupakan suatu sistem yang total, meliputi seluruh sektor kehidupan manusia. Oleh karena itu pula agama akan senantiasa merelasikan dirinya dengan semua persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Dengan demikian, setiap tantangan masalah kemanusiaan yang selalu dihadapi manusia merupakan tantangan bagi agama untuk menghadapinya. Hingga tantangan tersebut bersifat permanen dan tidak pernah agama untuk tidak terpanggil dan dituntut aktif dalam menghadapi masalah kemanusiaan yang selalu dihadapi manusia.

Selanjutnya, jika "keselamatan" merupakan tujuan dari agama, maka agama mendorong dan membenarkan pada usaha-usaha yang dijalankan untuk mempertahankan, mencapai dan mengembangkan keselamatan. Di antara upaya ke arah keselamatan tersebut adalah juga berarti membebaskan manusia dari berbagai masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketertindasan dan lain sebagainya. Adanya tujuan ke arah pemecahan masalah kemanusiaan itu merupakan kekuatan serta kontribusi agama seperti tercantum dalam nilai-nilai ajaran yang dikandungnya, sebagai amanat yang bersifat mutlak dari Sang Pencipta untuk diwujudkan dalam kehidupan.³⁶ Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Soedjatmoko, agama lebih daripada ideologi sekuler, karena agama merupakan suatu sistem total dari perpaduan, yang mengandung otoritas dan kemampuan pengarahannya guna penataan kembali nilai dan tujuan, pengaturan kembali fungsi dan norma Substansinya adalah guna memberi pedoman mengenai pandangan tentang struktur dan makna yang dibutuhkan manusia untuk hidup sebagai manusia di dunia ini.³⁷

³⁶ Ignas Kleden, *Dialog Antar Agama: Kemungkinan dan Batas-Batasnya*, dalam Prisma (Jakarta LP3ES, No 5/VII/Juni, 1978), hal 7-8.

³⁷ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan* (Jakarta: LP3ES, 184), hal. 7-9.

Fungsi agama dalam menghadapi kemiskinan juga dapat dilihat dari peranannya pada proses pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang juga berarti menanggulangi masalah kemiskinan. Di antara peran agama dalam pembangunan, menurut Mukti Ali adalah sebagai: Faktor motivatif, kreatif, sublimatif, dan integratif. Faktor motivatif adalah yang mendorong, mendasari dan melandasi cita-cita serta amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ia merupakan syarat mutlak untuk tiap usaha yang ingin dilakukan secara bertanggungjawab. Tanpa motivasi yang jelas orang akan bekerja untung untungan, asal jadi dan tidak bergairah serta akan mudah menjadi oportunist. Faktor kreatif adalah yang mendorong dan menghasung manusia, bukan hanya untuk melakukan kerja produktif saja, melainkan juga karya kreatif dan baru.

Sedangkan fungsi agama sebagai faktor sublimatif adalah mengkoduskan segala perbuatan manusia, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat keduniaan. Dengan dasar dan sikap batin itu kehidupan manusia mempunyai makna dari nilai luhur sebagai ibadat kepada Tuhan. Kemudian dengan fungsi agama sebagai faktor integratif,³⁸ agama dapat memadukan segenap kegiatan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga terhindar dari bencana "kepribadian yang pecah dan mampu menghadapi tantangan serta resiko kehidupan.

Peranan agama dalam pembangunan juga dapat dilihat dari sudut pandang, bahwa titik sentral pembangunan adalah manusia, dan karena itu tujuan pembangunan adalah pengembangan potensi dan hidup manusia sehingga manusia secara individual maupun kolektif menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat yang luhur. Agama bisa dan seharusnya berperan sebagai pemberi makna pada kehidupan manusia, cita-cita dan kegiatannya Di antara inspirasi yang dapat dipetik dari agama bagi pembangunan manusia adalah melalui sejarah dan kehidupan para Nabi pembawa agama-agama besar. Dengan penuh kesungguhan,

³⁸ Ulama dan Pembangunan, Panitia Musyawarah Nasional 1, Majelis Ulama Seluruh Indonesia, Jakarta, 1976, hal 85-86,

mereka berusaha mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agamawi dalam kehidupan para pengikutnya, dengan penuh ketabahan menghadapi kejahatan dan kezaliman. Tanpa ragu-ragu mereka berada di pihak yang teraniaya dan menderita.³⁹

Tumbuhnya sikap yang tegar dalam membebaskan manusia dari berbagai masalah kemanusiaan sangat diperlukan dalam pembangunan tersebut. Dikatakan oleh J.Riberu, karena dilhami oleh paham-paham agamanya baik mengenai persaudaraan, pengabdian dan pengorbanan yang berdasarkan akan pentingnya dimensi horisontal iman, para penganut agama dapat mengabdikan diri di pelbagai bidang kehidupan dengan motivasi yang lebih mendalam.⁴⁰

Lebih lanjut, pengaruh agama bagi kehidupan manusia diuraikan Murtadha Muthahhari dalam bentuk menciptakan sikap optimisme, pencerahan hati, ketentraman hati dan kenikmatan ruhaniah serta tumbuhnya harapan akan terjadinya akibat-akibat baik dari amal perbuatan yang baik. Tidak ada yang melebihi agama dalam hal menghargai kebajikan, menganggap suci keadilan, melunakkan hati seseorang pada sesamanya, menciptakan rasa saling percaya satu sama lain antar individu menyebarkan kebajikan dan kerahiman yang lebih mengakar dalam kesadaran manusia; menghargai nilai-nilai moral dan menciptakan dorongan untuk melangkah melawan kekejaman dan menyatukan setiap orang sebagai anggota dari satu tubuh.⁴¹

Selama berabad-abad agama telah memberikan kepada manusia bukan saja ritus-ritus yang memberikan kelegaan emosi dan cara-cara untuk memperkokoh kepercayaan sehingga karenanya dia mampu melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi juga mengembangkan interpretasi-interpretasi intelektual yang membantu manusia dalam mendapatkan makna dari seluruh pengalaman hidupnya. Agama telah

³⁹ Djohan Effendi, Agama dan Pembangunan, dalam M. Sastrapratedja, et.al., Menguak Mitos Mitos Pembangunan (Jakarta Gramedia, 1986), hal 76-77

⁴⁰ J Riberu, Agama dan Pembangunan Masyarakat Pancasila, dalam TB Simatupang, et al. Peranan Agama-agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Negara Pancasila yang Membangun, (Jakarta BPK Gunung Mulis, 1987), hal. 86-91

⁴¹ Murthada Muthahhari, Manusia dan Agama, (Bandaung: Mizan, 1985), hal 86-89

membantu manusia untuk menjawab persoalan tentang mengapa hal yang tidak menguntungkan terjadi.⁴²

Tinjauan lebih jauh mengenai fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat, menurut teori fungsional adalah mengidentifikasikan individu dengan kelompok menolong individu dalam ketidakpastian, menghibur ketika dilanda kecewa, mengaitkannya dengan tujuan-tujuan masyarakat, memperkuat moral dan menyediakan unsur-unsur identitas. Agama bertindak menguatkan kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung pengendalian sosial, menopang nilai-nilai dan tujuan yang mapan, dan menyediakan sarana untuk mengatasi kesalahan dan keterasingan.⁴³

Dari beberapa pandangan mengenai fungsi atau peran agama bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, tampak jelas urgensinya bagi upaya pembangunan ke arah pembebasan manusia dari masalah-masalah kemiskinan. Pembudayaan nilai-nilai agama ini merupakan proses penciptaan etik sosial dan etos kerja yang membangun. Pada gilirannya akan menyediakan sarana yang hidup dan dasar yang kokoh bagi jalannya pembangunan. Dalam konteks ini, Soedjatmoko⁴⁴ mengatakan bahwa dalam usaha pembangunan, yang dibutuhkan bukan hanya pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada, tetapi juga kemampuan untuk menilai kenyataan sosial berdasarkan kriteria yang ditarik dari suatu sistem nilai. Agama dapat memberikan sumbangan dan berperan dalam menciptakan sistem nilai itu serta akan menghasilkan manusia pembangunan yang berani mengambil resikonya sebagai ikhtiar manusia yang diamanatkan dan ditirmankan Tuhan.

Usaha pembangunan pada hakekatnya merupakan perluasan amal untuk menghadapi kemiskinan dan keterbelakangan, bukan hanya pada tingkat individual, melainkan sebagai masalah struktural masyarakat. Maka karena imannya, manusia

⁴² Elizabeth K Nottingham, *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta Rajawali, 1985), hal 108.

⁴³ Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama* (Jakarta, Rajawali, 1985), hal 29-30

⁴⁴ Soedjatmoko, *op.cit*, hal. 273.

beragama terdorong untuk turut melaksanakan pembangunan. Karena imanlah yang dapat memberikan kepada manusia keberanian hidup, bersedia dan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan mencapai nafkah sendiri. Ia juga dapat memberikan kepada manusia keberanian dan kemantapan moril untuk menolak peluang-peluang yang gampang namun tidak mampu, biar pun kelihatannya aman dan biar pun dipakai orang banyak, serta untuk tetap mengambil jalan yang lurus, betapapun sulitnya jalan itu.⁴⁵

Sungguhpun beberapa pemikiran dan bukti sejarah telah memperlihatkan segi positif dari urgensinya peran agama dalam pembangunan dan kehidupan pada umumnya, namun beberapa kritik dan bukti sejarah sering pula memperlihatkan aspek negatif dari posisi dan peran agama dalam pembangunan, dan khususnya dalam menangani masalah kemiskinan Agama dipandang sebaagi faktor penghambat pembangunan karena sifatnya yang rigid, normatif, statis, konsevatif dan cenderung fatalistis.

Munculnya pandangan negatif terhadap agama tersebut, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang mengembangkan pemikiran filsafat yang mewarnai dan mendasari sistem pemikiran dalam pembangunan di tengah struktur ekonomi dan politik yang menekankan pada rasionalisme serta mengarah kepada proses sekularisme. Agama yang bertolak dari sifat penghayatan dan nilai-nilai sakral dipandang tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan kehidupan dibanding sistem pemikiran dan ideologi yang senantiasa bertolak dari realitas kehidupan manusia serta bersifat duniawi semata.⁴⁶

Dalam hubungan ini menarik apa yang disinyalir Peter L. Berger tentang pengaruh perkembangan ekonomi industrial kapitalistik terhadap agama, bahwa kehidupan ekonomi merupakan daerah yang sudah dibebaskan dari agama dan

⁴⁵ Ibid, hal, 271-272

⁴⁶ Fachry Ali, Islam Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural. (Bandung Mizan, 1984), hal, 59-82

merupakan sektor sekuler. Usaha-usaha dari pihak agama untuk menaklukkan kembali sektor itu atas nama tradisionalisme keagamaan akan selalu dianggap bahaya terhadap kelangsungan tata ekonomi itu sendiri. Telah terjadi krisis kredibilitas terhadap agama. Defenisi agama terhadap realitas tidak mendapat tempat lagi, sehingga agama berhenti sebagai kekuatan sejarah, sebagai sebuah variabel yang merdeka.⁴⁷

Keraguan terhadap peranan agama dalam masyarakat modern dan munculnya proses modernisasi di antaranya adalah karena melihat kedudukan agama dewasa ini mengalami marginalisasi peranan dan reduksi pengertiannya, di mana agama dilihat dalam peranan legitimasi dan instrumental. Peranan agama telah digantikan ilmu pengetahuan dan ideologi. Agama bersifat defensif dan hanya dipakai sepanjang agama mendukung tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh ilmu pengetahuan dan ideologi. Selain itu, kadang agama juga dilihat dari trauma sejarahnya di mana agama tidak hanya membawa rahmat, tetapi juga bencana, seperti dalam bentuk perang agama di Eropa, perang Salib dan beberapa atau konflik agama lainnya.

Demikian juga, kritik dan keraguan terhadap agama dalam menanggulangi masalah kemiskinan bertolak dari pandangan bahwa agama adalah sebagai faktor penyebab dan ikut bertanggungjawab karena kadang "membuat manusia lebih mudah menerima kemiskinan sebagai nasib yang tak terelakkan". Kecenderungan faham fatalis dalam pemikiran para penganut agama ini dalam agama Islam, di antaranya seperti yang disinyalir oleh Abdurrahman Wahid.

Besar sekali kecenderungan untuk memperlakukan masalah kemiskinan sebagai sesuatu yang telah menjadi suratan nasib dan kepastian yang tidak dapat ditolak lagi. Ayat Al-Qur'an "Telah ku bagi-bagikan antara mereka (bagian) hidup mereka di dunia, dan Aku tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain"

⁴⁷ Kontowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Yogyakarta Solahudin Press, 1985). hal. 51

dijadikan pegangan tentang langgengnya kemiskinan sebagai nasib manusia Hiburan dan dorongan yang diberikan agar manusia menerima nasibnya itu dengan tabah dan sabar. Disediakan janji muluk di akhirat kelak bagi kepedihan hidup di dunia...⁴⁸

Sedangkan dalam agama kristen, pandangan fatalis dan sikap yang dapat melestarikan kemiskinan diantaranya bersumber dari sabda Yesus dalam Perjanjian Baru, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai syurga" (Matius, 5:3) Sabda Yesus tersebut seolah-olah Yesus mengatakan, "Untunglah kamu orang-orang miskin, berduka cita, lapar dan haus serta seterusnya, karena kamu dicintai Allah Maka tetaplah demikian. Terimalah nasibmu dan pada suatu hari kamu akan berbahagia di syurga." Seolah-olah kemiskinan adalah suatu kebajikan yang harus dikembangkan atau sekurang-kurangnya dipertahankan.

Demikian juga sikap fatalis tersebut dapat ditemukan dalam agama Hindu dengan sistem kasta dan pandangannya yang menolak kehidupan dunia sebagai maya atau khayalan Pandangan keagamaan yang berkembang terutama di India ini telah menumbuhkan pola kehidupan dimana "pertapa yang papa didukung dan dipuja, tetapi eksploitasi ekonomi terhadap rakyat dan penghisapan oleh para lintah darat berlangsung tanpa kendali."⁴⁹

Secara interpretatif, adanya pandangan fatalis terhadap masalah kemiskinan dalam pandangan agama, dapat bersumber dari ajaran agama itu sendiri yang memang berpaham demikian atau karena pengaruh sistem sosial budaya dari para penganut agama yang telah menangkap pesan agama sesuai dengan kondisi sosial budaya atau keadaan pribadinya. Karena pada dasarnya keberagaman seseorang atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dalam menghayati pesan pesan ajaran agama yang dipeluknya. Hingga hubungannya dengan

⁴⁸ Abdurahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta LEPPENAS, 1981), hal. 76-77

⁴⁹ Elizabeth K. Nottingham, *op. cit.*, hal 130.

kemiskinan dapat dipakai untuk melegitimasi kemiskinannya tersebut, atau oleh orang yang mau supaya yang miskin tetap miskin.

Lebih tegas lagi dikatakan oleh John Kenneth Galbraith mengenai pengaruh doktrin agama terhadap sikap fatalis dalam menghadapi kemiskinan, bahwa sikap menerima nasib dan menyesuaikan diri dengan kemiskinan adalah berasal atau setidak-tidaknya sebagian dari ajaran-ajaran pokok agama-agama penting di dunia. Hal ini telah menimbulkan kecurigaan yang kemudian ditingkatkan oleh Marx, bahwa kenikmatan yang dijanjikan agama adalah suatu pola yang dibuat untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan-kenyataan adanya kelas dan pemerasan, agama menjadi candu bagi manusia. Ini merupakan resep untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kondisi keputusan.⁵⁰

Dari uraian mengenai fungsi atau peran agama dalam menghadapi masalah kemiskinan tersebut tampak bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah kemanusiaan yang menuntut peran aktif agama untuk mengahadapinya. Hal itu bertolak dari misi utama agama itu sendiri yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia, termasuk membebaskannya dari cengkeraman kemiskinan.

Meskipun nilai-nilai ajaran agama dapat berperan dalam upaya menangani kemiskinan dan masalah kemanusiaan lainnya, tetapi agama bukanlah satu-satunya sumber nilai dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia dalam kehidupan ini, bahkan sumber nilai lain di luar agama, seperti ideologi, kadang dinilai bersifat sakral dan dipercayai sebagaimana halnya agama. Hal ini biasa disebut sebagai "pseudo religion" (agama palsu) yang muncul dari fitrah manusia itu sendiri yang membutuhkan agama. Seperti apa yang dikatan Erich Fromm dalam bukunya, *Psycoanalysis Religion*, bahwa manusia itu tidak bisa menghindarkan diri dari satu atau lain bentuk agama, karena kebutuhan akan agama itu merupakan bagian yang instrinsik dalam eksistensi kemanusiaan. Kalau mereka tidak percaya

⁵⁰ John Kenneth Galbraith, *Hakikat Kemiskinan Massa*, terjemahan Tom Anwar, (Jakarta Sinar Harapan, 1983), hal 47.

pada agama wahyu, maka mereka akan cenderung menciptakan agamanya sendiri. Tidak ada seorangpun yang tanpa kebutuhan religius, yaitu suatu kebutuhan akan suatu kerangka orientasi dan objek pengabdian.⁵¹

Bertolak dari perspektif diatas, maka suatu hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai kemampuan agama untuk menemukan wawasan keagamaan yang menantang dan menarik serta mempunyai relevansi untuk memecahkan persoalan hidup yang nyata. Dalam hal ini, Soedjatmoko⁵² mengingatkan bahwa peran agama tidak cukup hanya berupa jawaban-jawaban yang sudah menjadi kebiasaan dan hanya refleksi moral semata-mata. Yang diperlukan adalah suatu refleksi moral yang ada pada suatu pihak di sinari kesadaran sejarah dan yang juga mampu untuk mencakup pengetahuan modern dan akan seluk beluk situasi historis manusia masa kini serta sanggup memberi pegangan yang relevan untuk pilihan-pilihan yang dihadapi umat manusia.

Dalam hal ini, Islam dengan kitab suci al-qur'annya telah menekankan perlunya manusia untuk beramal, agar dapat berbuat secara konkret berdasarkan azas kemanfaatan dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh karena itu, kemiskinan dalam Islam pada hakikatnya bukanlah "takdir Tuhan, akan tetapi kemiskinan terjadi karena kekuasaan dan kekayaan hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Dalam kaitan inilah, agama Islam dengan segala sistemnya dapat melakukan control terhadap peranan kehidupan ekonomi yang melewati batas-batas keberadaannya. Oleh karenanya, semangat agama Islam dapat ditumbuhkan sebagai kekuatan moral untuk dapat mengendalikan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan umat secara keseluruhan.⁵³

⁵¹ Dawam Raharjo, *op.cit*, hal. xi-xii

⁵² Soedjatmoko, *op.cit.*, hal 205

⁵³ Musa Asy'aric, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta Lesfi), hal 22-24

Dalam Islam, semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Dasar-dasar filosofis pembangunan yang Islami harus senantiasa berpijak pada (a) Tauhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan seimbang antara Allah dan manusia, serta manusia dengan sesamanya; (b) Rububiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya dapat mengatur model pembangunan yang berorientasi pada norma agama, (c) Khilafah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini akan lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial, dan; (e) Tazkiyah, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.⁵⁴

Menurut Quraish Shihab, konsep pembangunan Islam tidak lain merupakan konsep kesejahteraan sosial yang harus dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan aspek-aspek akidah dan etika pada masyarakat agar mengalami keseimbangan sosial. Konsep kesejahteraan sosial harus dimulai dengan "Islam", yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Berangkat dari kesadaran bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, setelah usaha maksimal adalah pilihan terbaik dan selalu mengandung hikmah.⁵⁵

Khilafah merupakan sistem kepemimpinan yang bertanggungjawab atas diri manusia itu sendiri, keluarga dan rakyat berdasarkan pengaturan yang berpijak pada norma agama (Rububiyah). Sistem kepemimpinan ini pada dataran praksisnya akan berkaitan dengan budi pekerti (akhlak) yang bersumber pada agama dan akan memegang peranan penting dalam melaksanakan mekanisme kekuasaan politik, khususnya dalam pengaturan terhadap pembangunan ummat. Salah satu contohnya

⁵⁴ Khurshid Ahmad dalam Ainur R. Sophiaan (ed), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. (Surabaya Risalah Gusti, 1997), hal 12-13.

⁵⁵ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hal 129.

adalah selalu insaf dan sadar bahwa Tuhan selalu mengawasinya. Sikap sadar atas pengawasan Tuhan, terutama dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan kebijakan hajat rakyat banyak adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar terlepas dari intervensi dan hegemoni hawa nafsu. Sikap sadar ini merupakan refleksi yang muncul dari kemuliaan budi pekerti agama. Dalam posisi sadar tersebut, menurut Khaldun, seorang pemimpin akan melaksanakan tugasnya hanya bertujuan mencari keridhaan Allah dan bukan untuk bermegah-megah atau karena haus kekuasaan tetapi untuk merealisasikan kebenaran agama dan kesejahteraan rakyat. Dengannya, seorang pemimpin akan terbebas dari keinginan untuk menimbun harta negara dan memeras harta rakyat demi memenuhi kemewahan pribadinya. Bahkan konsekwensi dari sikap ini dalam konteks menjalankan kekuasaannya akan berdampak pada keberanian untuk menindak semua perilaku negatif tersebut, baik dilakukan secara individual maupun kerjasama antar individu atau bisa disebut korupsi dan kolusi.⁵⁶

Landasan fundamental Islam di atas pada akhirnya akan melahirkan konsep penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut dimuka bumi. Dari tazkiyah menuju falah, yaitu sukses di dunia maupun akhirat. Secara interpretatif, jika dihubungkan dengan konsep pembangunan maka dapat diperjelas sebagai berikut: a) konsep pembangunan Islami memiliki sifat komprehensif dan mengandung unsur spritual, moral dan material. Pembangunan harus dipandang sebagai aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai, ditujukan untuk optimalisasi kesejahteraan ummat manusia dalam semua dimensinya.; b) fokus usaha dan jantung pembangunan itu sendiri adalah manusia. Hal ini berarti, pembangunan adalah pembangunan manusia dengan lingkungan sosio-kulturalnya. Agama Islam menegaskan bahwa wilayah pembangunan adalah manusia di dalam maupun di luar. Misalnya sikap-sikap manusia, insentif, selera, aspirasi sebanding dengan sumber daya fisik, modal, tenaga kerja, pendidikan, keterampilan, organisasi dan

⁵⁶Ibnu Khaldun dalam A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal 103-236

sebagainya. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia dengan konsekuensinya memperluas target dan instrumen dari model ekonomi yang hendak dikembangkan. Konsekuensi lainnya adalah sebanyak mungkin melibatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasi perencanaan pembangunan; c) pembangunan ekonomi adalah aktivitas yang multidimensional. Demikianlah kerangka Islam, karenanya semua usaha harus diarahkan kepada keseimbangan dari berbagai faktor dan tidak ada ketimpangan diantaranya; d) pembangunan ekonomi harus menimbulkan sejumlah perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif. Sekadar memperhatikan aspek kuantitatif, disadari atau tidak, telah menelantarkan aspek kualitatif, yang berarti mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Islam berusaha menghilangkan ketimpangan tersebut, dan; e) di antara prinsip-prinsip sosial Islam yang dinamis adalah menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan alam lingkungan seoptimal mungkin. Kemudian pemanfaatannya melalui pembagian (distribusi) dan peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan (adl).⁵⁷

2. Interelasi Antara Agama dan Masyarakat

Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Ia berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Sehingga setiap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Artinya, perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasinya.⁵⁸ Bahkan lebih jauhnya dapat memberikan sarana adaptasi atau mekanisme penyesuaian yang dibutuhkan oleh individu dalam kehidupan sosialnya

Menurut teori fungsional, agama menjadi penting sehubungan dengan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik

⁵⁷ Khursid Ahmad, *op.cit.*, hal. 13-15.

⁵⁸ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung Rosdakarya, 2000), hal. 53.

fundamental kondisi manusia. Dalam hal ini fungsi agama menyediakan dua hal. Pertama, menyediakan suatu cakrawala pandang tentang dunia liar yang tak terjangkau oleh manusia, dalam arti ketika deprivasi dan frustrasi dapat dialami sebagai sesuatu yang mempunyai makna. Kedua adalah sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal di luar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia mempertahankan moralnya.⁵⁹ Berdasarkan penyediaan dua hal di atas, teori fungsional telah menyebutkan enam fungsi agama, di antaranya:

- a) agama mendasarkan perhatiannya pada sesuatu di luar jangkauan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan. Dalam hal ini manusia memberikan tanggapan serta menghubungkan dirinya, sehingga agama mampu menyediakan bagi pemeluknya suatu dukungan, pelipur lara dan rekonsiliasi. Artinya, manusia membutuhkan dukungan moral di saat menghadapi ketidakpastian, pelipur lara di saat berhadapan dengan kekecewaan, membutuhkan rekonsiliasi dengan masyarakat bila diasingkan dari tujuan dan norma-normanya.
- b) agama menawarkan suatu hubungan transedental melalui pemujaan dan upacara ibadat. Dalam hal ini akan memberikan dasar emosional bagi rasa aman baru dan identitas yang lebih kuat di tengah ketidakpastian dan ketidakmungkinan kondisi manusia dan arus serta perubahan sejarah. Melalui ajaran-ajaran otoritatif tentang kepercayaan dan nilai, agama menyediakan kerangka acuan tentang pertikaian dan kekaburan pendapat serta sudut pandang manusia. Fungsi ini dapat menyumbang stabilitas, ketertiban, bahkan seringkali mendukung pemeliharaan status quo.
- c) agama dapat mensucikan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang telah dibentuk, mempertahankan dominasi tujuan kelompok di atas keinginan individu dan disiplin kelompok di atas dorongan hati individu. Dengan demikian agama memperkuat legitimasi pembagian fungsi, fasilitas dan ganjaran yang merupakan ciri khas suatu masyarakat. Dalam hal ini, agama mensucikan norma dan nilai, yang membantu pengendalian sosial, mengesahkan alokasi pola-pola masyarakat, sehingga membantu ketertiban dan stabilitas.

⁵⁹ Rhomas F. Ode a, op.cit., hal 25-26

d) agama juga melakukan fungsi yang bisa bertentangan dengan fungsi sebelumnya. Agama dapat pula memberikan standar nilai dalam arti di mana norma-norma yang telah terlembaga, dapat dikaji kembali secara kritis dan kebetulan masyarakat memang membutuhkannya. Hal ini mungkin sekali benar khusus dalam hubungannya dengan agama yang menitikberatkan transendensi Tuhan, dan konsekuensi superioritasnya pada kemerdekaan dari masyarakat mapan. Itu biasanya dinamakan fungsi risalat atau nubuat. Fungsi ini seringkali merupakan sumber protes sosial yang melawan norma dan kondisi masyarakat yang mapan.

e) agama melakukan fungsi-fungsi identitas yang penting. Melalui penerimaan nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan kepercayaan-kepercayaan tentang hakikat dan takdir manusia, individu mengembangkan aspek penting pemahaman diri dan batasan diri. Melalui peran serta manusia di dalam ritual agama dan doa, manusia melakukan unsur signifikan yang ada dalam identitasnya.

f) agama bersangkutan dengan pertumbuhan dan kedewasaan individu, dan perjalanan hidup melalui tingkat usia yang ditentukan oleh masyarakat. Dalam masing-masing peristiwa hidup dan masalah-masalah baru yang menantang individu. Mulai dari mempelajari suatu tingkat kepercayaan dasar dengan manusia lain, kemudian harus mengembangkan kemampuan berfungsi secara otonom serta berdikari. Kemudian masih harus belajar menahan pemuasan serta mendisiplinkan impuls dalam mencapai tujuan-tujuan yang dibenarkan secara sosial. Dalam hal ini, agama dimungkinkan mampu mensucikan norma dan tujuan serta mempertegas perkembangan identitas individu.⁶⁰

Fungsi-fungsi di atas memperlihatkan secara tegas mengenai hubungan interdependensi antara agama dan masyarakat. Sekaligus menunjukkan adanya pengaruh timbal-balik antara kedua faktor tersebut. Pertama, pengaruh agama terhadap masyarakat, seperti terlihat dalam pembentukan, pengembangan dan penentuan kelompok keagamaan spesifik yang baru. Kedua, pengaruh masyarakat terhadap agama lebih terpusat pada faktor-faktor sosial yang telah memberikan

⁶⁰ Ibid, hal 26-34

nuansa dan keragaman perasaan serta sikap keagamaan yang terdapat dalam suatu lingkungan atau kelompok sosial tertentu.⁶¹

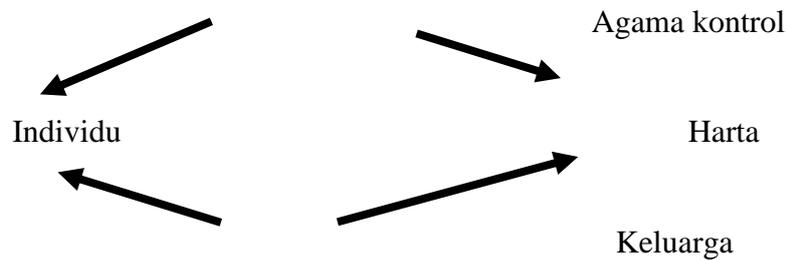
Dengan demikian, dimensi esoterik dari suatu agama pada dasarnya tidak dapat berdin sendiri, tetapi berkaitan dengan dimensi lain di luar dirinya. Selain dibentuk oleh substansi ajarannya, dimensi ini juga dipengaruhi oleh struktur sosial dimana suatu keyakinan dimanifestasikan oleh para pemeluknya. Sehingga dalam konteks tertentu, satu sisi, agama dapat beradaptasi dan pada sisi lain dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dari suatu proses perubahan yang terjadi di sekitar kehidupan para pemeluknya.

Dalam hal ini, Parsons menegaskan ketika keyakinan agama diposisikan sebagai salah satu contoh sistem simbolik sosial maka ia dapat menjadi nilai yang diterima secara umum. Ketika para anggota masyarakat menginternalisasikan nilai nilai simbolik sosial tersebut, maka akan terjadi proses sosialisasi; dan sosialisasi merupakan kekuatan integrasi dalam melaksanakan kontrol sosial yang mengikat semua anggota masyarakat.

Sebagai contoh, konsep yang menyatakan agama berperan langsung dalam kontrol sosial atas sub unit yang ada pada struktur masyarakat (misalnya individu dan keluarga) kaitannya dengan distribusi kekuasaan dan kekayaan yang terjadi pada masyarakat feodalisme dan kapitalisme kompetitif. Atau lebih tepatnya, pandangan yang telah mengandaikan bahwa kekayaan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui keluarga dan unit-unit keluarga yang merupakan sumber utama kekayaan. Dalam hal ini, kontrol agama atas seksualitas, khususnya seksualitas istri dan anak-anak merupakan sisi terpenting dalam pengontrolan hak-hak feodal atas kepemilikan tanah Sedangkan dalam masyarakat kapitalisme kompetitif, kontrol agama terhadap seksualitas memainkan peranan besar dalam distribusi kekayaan Pandangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.⁶²

⁶¹ Dadang Kahmad, *op.cit.*, hal 54

⁶² Lihat Bryan S Turner, *Agama dan Teori Sosial* (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hal. 21



Selanjutnya, dengan berpijak pada teori sistem tindakan Parsons dalam mencapai keseimbangan sosial, nilai fungsional semua sistem kehidupan manusia membutuhkan adanya pemenuhan relasi-relasi yang bersifat interdependensi. Fungsi adaptasi membutuhkan pemenuhan melalui lembaga ekonomi, fungsi perumusan tujuan membutuhkan pemenuhan melalui lembaga politik, fungsi integrasi membutuhkan pemenuhan melalui lembaga hukum, dan fungsi perolehan membutuhkan pemenuhan melalui lembaga keluarga, pendidikan serta agamna. Keempat sistem tindakan ini merupakan prasyarat bagi terciptanya keseimbangan sosial. Keempatnya berhubungan satu sama lain secara komplementer. Jika salah satu sistem tidak bekerja, sistem secara keseluruhan akan terganggu (disfungsi). Oleh karena itu, dibutuhkan reorganisasi dari keempat sistem tersebut sehingga keseimbangan sistem tercipta kembali. Keterkaitan empat sistem tersebut digambarkan oleh Parsons sebagai berikut:⁶³

Pada konteks lain, dapat dikatakan agama merupakan salah satu bentuk legitimasi sosial yang paling efektif. Agama merupakan semesta simbolik yang dapat memberi makna pada kehidupan manusia dan memberikan penjelasan yang paling komprehensif tentang seluruh realitas. Agama merupakan naungan sakral yang dapat melindungi manusia dari situasi kekacauan (chaos). Bagi para penganutnya, inti ajaran agama diyakini dapat mengantarkan pada kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Bahkan sebagai petunjuk yang dapat membedakan eksistensi manusia dengan cara hidup hewan dan makhluk lainnya. Sebagai sistem keyakinan, agama bisa menjadi bagian dan inti dari sistem nilai yang ada dalam

⁶³. Lihat: Margaret Poloma, *Contemporary Sociological Theory*, (Newyork Macmillan, 1979).

kebudayaan dari masyarakat, serta menjadi pendorong atau penggerak dan pengontrol bagi semua tindakan anggota masyarakat tertentu untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya.

Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung, etos yang menjadi pedoman dari eksistensi dan kegiatan berbagai pranata yang ada dalam masyarakat (keluarga, ekonomi, politik, dan pendidikan), dipengaruhi, digerakkan, dan diarahkan oleh berbagai sistem nilai yang sumbernya adalah agama yang dianutnya.⁶⁴

F. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk *homosocius*. Mereka memiliki naluri kemasyarakatan. Secara alamiah, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia senantiasa menginginkan hidup berkelompok. Bahkan lebih ditegaskan dalam kajian sosiologi, bahwa manusia secara individu tidak mungkin terpisah satu sama lain. Artinya kebutuhan untuk bermasyarakat merupakan hal yang azasi manusia dalam mengarungi kehidupannya. Kebebasan sebagai individu tidak mungkin dipikirkan tanpa adanya ikatan dan keterikatan dengan orang lain. Begitupun independensi sebagai individu tidak mungkin ada tanpa dependensi dari masyarakat.⁶⁵

Kajian tentang naluri kemasyarakatan di atas, secara sistematis dapat ditinjau berdasarkan kerangka sosiologis struktur-fungsional. Kerangka ini telah mampu memberikan konsepsi bahwa pergaulan hidup yang medianya adalah masyarakat merupakan inti daripada interaksi sosial sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan kehidupan masyarakatnya. Dari sisi dinamis masyarakat,⁶⁶ hal itu berbentuk proses sosial. Selanjutnya, proses sosial tersebut akan melahirkan struktur sosial sebagai sisi statis masyarakat, antara lain kelompok-kelompok

⁶⁴ Ibid, hal. 60-64.

⁶⁵ KJ. Veeger, *Realitas Sosisal: Refeleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 9.

⁶⁶ Dalam hal ini, Durkheim telah memandang bahwa masyarakat sebagai suatu sistem dinamis dan merupakan landasan berpijak kehidupan moral. Sehingga sistem sosial dianggap sebagai sistem ideal nilai yang mengaitkan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, masyarakat bukan saja merupakan matriks struktural, bentuk statis tindakan, melainkan juga melaksanakan suatu pengaruh dinamis normatif terhadap setiap tahap perkembangannya. Lihat. Don Martindale. *The Nature and Types of sociological Theory* (Cambridge The Reverside, 1990), hal. 86-90.

sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang. Adapun dari sisi mentalitas melahirkan wujud sistem nilai, pola-pola pikiran, sikap, pola-pola tingkah laku, dan sistem kaidah atau norma-norma.⁶⁷

Lebih ditegaskan oleh Parsons, sebagai suatu sistem sosial maka masyarakat merupakan suatu sistem tindakan (sistem perilaku manusia yang bermotivasi, bukan sistem pola-pola budaya). Oleh karena itu, jika unit sistem sosial adalah pelaku maka struktur sosial merupakan sebuah sistem hubungan-hubungan berpola para pelaku dalam kapasitasnya untuk memainkan peranan-peranan sosial. Menurut Parsons, proses kontinuitas tiap-tiap sistem sosial itu akan tergantung pada empat imperatif atau masalah yang harus ditanggulangi secara memadai supaya keseimbangan atau eksistensi sistem tersebut terjamin, yaitu: 1) adaptasi, 2) kemungkinan mencapai tujuan, 3) integrasi anggota-anggotanya, dan 4) kemampuan mempertahankan identitasnya terhadap kegoncangan dan ketegangan yang timbul dari dalam.⁶⁸

Sedangkan Weber, mendeskripsikan masyarakat berdasarkan konsep tindakan sosial. Baginya, ciri-ciri yang khas dari hubungan-hubungan sosial adalah hubungan-hubungan itu bermakna bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya, dan hubungan sosial tersebut memiliki tiga bentuk, yaitu konflik atau perjuangan, komunitas dan kerja sama.⁶⁹

Pernyataan-pernyataan di atas, menggambarkan bahwa konsepsi kehidupan sosial merupakan suatu sistem atau suatu jaringan dari bagian yang berbeda-beda yang menjelaskan bagian struktur dan analogi mengenai sebuah sistem yang menjelaskan bagian fungsionalnya.⁷⁰

Dalam hubungannya dengan kemiskinan, struktur fungsional telah melihat bahwa kemiskinan itu timbul sebagai akibat dari tidak berfungsinya (disfungsional) salah satu elemen sistem sosial (sub-sistem) yang ada dalam masyarakat.⁷¹ Oleh

⁶⁷ Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hal 45-46

⁶⁸ Tom Campbell, *Seven Theories of Human Society* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 222-230.

⁶⁹ KJ Veeger, *op.cit.*, hal. 171-176 "Soekanto, *Beberapa Teori*, *op cit*, hal 52-56

⁷⁰ Soekanto *Beberapa Teori Sosiologi tentang Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hal 150

⁷¹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi dan Klasik* (Jakarta: Gramedia, 1990), hal 150.

karena itu, konsep disfungsi ini sangat tepat untuk digunakan dalam menganalisis masalah kemiskinan sebagai masalah sosial dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu. dalam konteks inilah, struktur fungsional menawarkan persyaratan fungsional. Tipe persyaratan fungsional yang mendasar adalah untuk menjamin suatu tingkat kesesuaian minimal antara tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam sistem sosial. Persyaratan fungsional lainnya yang dapat dideskripsikan dalam suatu sistem sosial adalah adanya keseimbangan tertentu antara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kompetitif. Di sini harus ada prosedur untuk menjamin tingkat kerjasama minimal, guna menegakkan tingkat keharmonisan minimal antar peran yang berbeda. Artinya harus ada mekanisme untuk mengatasi masalah pembagian fasilitas, penghargaan, otoritas, dan kekuasaan, serta mengintegrasikan berbagai tipe tindakan ke dalam suatu system.⁷²

Dalam perspektif Islam, istilah masyarakat dapat dijelaskan dari konsep ummah, gāum, qabilah, syu'ub, tháí fah, dan jama'ah. Kata 'ummah' lebih dominan digunakan, seperti ditegaskan oleh Ali Syari'ati. Oleh karenanya, kata ummah memiliki keunggulan muatan makna, yaitu bermakna kemanusiaan yang dinamis, bukan entitas beku dan statis.⁷³ Kata ummah ini, dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 51 kali, dan hampir keseluruhannya mengindikasikan pada komunitas asosiatif yang bersifat sosial. Kata ummah dalam surat dan ayat-ayat tersebut, pada pengertian etimologis, berasal dari kata *âmma-yâ 'ummu-amman*, artinya "menuju", "ikutan", dan "gerakan".⁷⁴ atau menurut Ali Syari'ati, bermakna *gashada* (bermaksud) dan *azima* (berniat keras). Dari sisi ini, ummah tiada lain adalah "gerakan", "tujuan", dan "berketetapan hati yang sadar".⁷⁵ Bahkan lebih jauh, Ali Syari'ati menyebutkan bahwa kata ummah tersebut mengandung beberapa muatan, di antaranya: konsep kebersamaan dalam arah dan tujuan; konsep gerakan menuju arah dan tujuan tersebut, serta konsep keharusan adanya petunjuk kolektif. Dengan demikian, ummah adalah kumpulan manusia yang bersifat asosiatif, yang di

⁷² Ibid, hal 124-125.

⁷³ Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung Pustaka Hidayah, 1989), hal 50

⁷⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*. (Beirut: Dar Shadr, 1994, Juz 12), hal 22

⁷⁵ Ali syari'ati, *op.cit.*, hal 50

dalamnya memiliki tujuan yang sama, satu sama lain saling bahu membahu, bergerak menuju cita-cita bersama, berdasarkan petunjuk kolektif.⁷⁶

Masyarakat dalam sinomin ummah mengemban fungsi untuk menyelenggarakan keutamaan dengan menegakkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Penggunaan kata ummah dalam al-Qur'an tidak sekedar menggambarkan suatu entitas dengan komposisi dan batasan wilayah tertentu. Akan tetapi, ummah merupakan komunitas yang memiliki visi etis, profetik dan transformatif."⁷⁷ Visi etis dan profetik ummah dalam perspektif al-Qur'an adalah amar ma'ruf (menyeru kebaikan) dan nahi mungkur (mencegah kemungkaran). Visi etis dan profetik itu merupakan hasil dari visi transformatif unsur konstitutif nilai-nilai Islam, yakni berupa sistem nilai tauhid, yang secara bertahap melahirkan sentimen kolektif, yang kemudian membentuk komunitas Komunitas ini secara intern dan ekstern membentuk sistem kelembagaan dan sistem otoritasnya sendiri.⁷⁸ Pemahaman kata "ummah inilah yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep sistem masyarakat Islam.

Adapun secara terminologi, pengertian masyarakat Islam menurut Sidi Galzaba adalah kelompok manusia di mana hidup dalam lingkup kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya⁷⁹. Sedangkan menurut Al Misri, masyarakat Islam adalah masyarakat yang berbeda dengan masyarakat lainnya dari segi aturan, perundang-undangan al-qur'ân, dan individu-individu yang berada dalam satu akidah serta sama-sama menghadap suatu kiblat.⁸⁰ Dalam hal ini, al-Sharqani membatasi masyarakat Islam sebagai pola hubungan sosial pada ruuag lingkup keagamaan dan menjalin hubungan yang jelas antara kata hati individu dan masyarakat, dan antara balasan ruhaniah dan perjalanan

⁷⁶ Ibid, hal 52

⁷⁷ Abdullah Al-Ahsan, *Ummah or Nation? Identity Crisis in Contemporary Muslim Society* (United Kingdom Islamic Foundation, 1992), hal. 14-15

⁷⁸ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1994), hal.338-341

⁷⁹ Sidi Galzaba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal 102

⁸⁰ Amin Almisri, *al-Mujtama al-Islami* (Bandung Husaini, 1987), hal 9.

wujud, serta diikat dalam kesatuan budaya Islam yang menghimpun masyarakat dengan pijakan persaudaraan berdasarkan akidah.⁸¹

Sedangkan Al-Syaibani telah merumuskan dasar-dasar pandangan Islam tentang masyarakat yang mencakup prinsip-prinsip 1) masyarakat adalah sekumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan tanah air, kebudayaan, dan agama, 2) masyarakat Islam memiliki identitas dan karakteristik tersendiri, 3) dasar-dasar pembinaan masyarakat Islam adalah akidah, keimanan tentang wujud dan ke-Esean Allah, 4) ilmu sebagai alat pencapaian kemajuan masyarakat, 5) masyarakat selalu mengalami perubahan, 6) adanya peranan individu dalam masyarakat, 7) adanya peranan keluarga dalam masyarakat, dan 8) tujuan syari'at Islam adalah mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.⁸²

Muhammad Abu Zahrah,⁸³ mengaskan bahwa tujuan syari'ah Islam di atas mampu menjadi solusi dalam menangani masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, seperti halnya masalah kemiskinan dan kaum rentan. Pada halaqah tahun 1952, ia mengemukakan bahwa solusi syariah Islam itu bukan saja sangat relevan untuk sosio-kultural Arab, tetapi relevan pula untuk memecahkan problem sosio kultural pada negara-negara berkembang Masih menurut Abu Zahrah, bahwa syariat Islam mempunyai cita-cita sosial yang bisa direalisasikan dalam setiap masyarakat Cita-cita sosial tersebut bisa direalisasikan dalam komunitas permanen seperti keluarga masyarakat mikro dan masyarakat makro dalam suatu bangsa atau bahkan masyarakat manusia seluruhnya. Syariah Islam berfungsi untuk mensucikan jiwa dan mendidik semangat egaliter serta semangat sosial yang tidak mengenal permusuhan Begitupun syariat Islam akan melahirkan bentuk kerja sama sosial yang memberikan hak bagi orang miskin dalam harta orang kaya.⁸⁴

⁸¹ Effat Al-Sharqawi, *Filsafat Kebudayaan Islam* (Bandung: Pustaka, 1986), hal 252

⁸² Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta Bulan Bintang, 1979), hal. 163-258

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islam* (Jakarta Pustaka Firdaus, 1994), hal viii

⁸⁴ Thid, hal 15-16.

Substansi syari'ah Islam inilah yang dimaksud dalam sosiologi disebut dengan kaidah normatif sosial yang terdapat dalam jalinan sistem sosial. Yang menurut Mardjono,⁸⁵ bahwa kaidah-kaidah sosial tersebut bersifat rahmatan li al alamin Falsafah teologisnya jelas, yakni "aturan-aturannya dalam menata hubungan antara individu dan masyarakat bersifat seimbang"

Kaidah-kaidah masyarakat Islam itu akan mempengaruhi unsur-unsur sistem sosial lainnya dalam melakukan proses sosial khususnya yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, misalnya terhadap individu masyarakat. Kaidah Islam telah tegas menyebutkan bahwa harta benda merupakan alat (perantara) untuk menuju kebaikan dan guna mempermudah kemanpaatan seluruh manusia. Oleh karena itu, manusia diwajibkan berusaha dengan giat dalam mencari dan menghasilkan harta.⁸⁶ Seperti dikatakan Al-Buracy, bahwa beberapa ayat al-Qur'an telah mendorong kepada manusia untuk kerja keras dan mengatasi fatalisme serta kemandegan (Q.S. 9: 105; 23: 23; 18: 30-110).⁸⁷ Inilah yang dalam istilah sosiologi disebut dengan keharusan adanya partisipasi aktif dari kelompok masyarakat miskin dalam proses. pengelolaan pembangunan untuk keluar dari masalah-masalah sosialnya tersebut.⁸⁸

Kaidah-kaidah Islam bukan hanya ditujukan untuk memotivasi individu masyarakat yang tidak berkecukupan, tetapi juga berkenaan dengan kepemilikan harta kekayaan seseorang yang di dalamnya terdapat hak-hak bagi fakir miskin, yang wajib untuk diserahkan. Kemudian ditampung oleh pemerintah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, Khalifah Ali ra telah mengatakan, "*Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya di suatu*

⁸⁵ Hartono Mardjono, Menegaskan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1997), hal 31

⁸⁶ Musthafa Husni Assiba'i, Kehidupan Sosial menurut Islam, Tuntutan Hidup Bermasyarakat (Bandung Diponegoro, 1981), hal 155

⁸⁷ Muhammad A. Al-Buracy, Islam, Landasan Alternatif, Administrasi Pembangunan (Jakarta Rajawali Pers, 1986), hal. 181.

⁸⁸ Partisipasi masyarakat miskin merupakan suatu tuntutan penting untuk mencapai tujuan pembangunan sosial yang dapat diarahkan pada kualitas manusia. Melalui partisipasi inilah, masyarakat miskin dapat meningkatkan kemampuannya, serta mengembangkan kemandiriannya sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai. Baca Uma Lele, *The Design of Rural Development* (Washington DC: Jhon Hopkins University Pers, 1975), hal. 150-1511

negeri untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang miskin di negeri tersebut. Yang berwenang (pemerintah) berhak memaksa orang-orang kaya tersebut jika dana-dana yang diperoleh melalui zakat ternyata tidak mencukupi untuk menanggulangi kemiskinan tersebut.⁸⁹

Dalam pandangan struktur-fungsional, pemerintah merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki akses penguasaan atas sumber-sumber nasional. Kondisi demikian menyebabkan pengaruh birokrasi pemerintahan tidak bisa terlepas dari setiap aspek kehidupan masyarakat.⁹⁰ Adapun baitulmal, dalam perspektif sosiologis dapat dikatakan sebagai lembaga legal pemerintah dalam menyalurkan dana dan mendorong motivasi masyarakat untuk keluar dari kemiskinannya.⁹¹

Berbagai uraian di atas dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam menganalisis pemikiran Qardhawi tentang sistem masyarakat Islam hubungannya dengan masalah penanggulangan kemiskinan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan konsep-konsepnya memiliki perbedaan mendasar. Namun secara umum, gagasan awal Qardhawi dibangun pada persyaratan mutlak untuk keluar dari masalah kemiskinan adalah direalisasikannya sistem sosial Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab menurut Qardhawi,⁹² hanya dengan sistem Islam, elemen-elemen sosial dapat menjadi sarana untuk menghapus kemiskinan, menjamin kecukupan kaum fakir, menutupi kebutuhannya dan menjaga kehormatan mereka sebagai manusia di hadapan Tuhan dan sesamanya.

Menurut Qardhawi, penggunaan sistem sosial selain Islam di lingkungan masyarakat muslim tidak akan membawanya pada kesejahteraan fisik maupun bathin. Begitupun juga jika suatu negara berpenduduk mayoritas muslim melakukan proses adopsi sistem kapitalisme, sekulerisme dan komunisme, hal ini

⁸⁹ Ahmad Sanusi, op. cit., hal. 75.

⁹⁰ Sofian Effendi, *Debirokrasi dan Deregulasi: Upaya Meningkatkan Kemampuan Administrasi Untuk Melaksanakan Pembangunan* (Yogyakarta Mimeograph, 1987), hal. 4.

⁹¹ Penggunaan lembaga legal ini bertujuan untuk menghilangkan kendala-kendala atau kelemahan-kelemahan birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga tersebut, seperti apa yang dikatakan oleh Cohen dan Uphoff adalah "can act as intermediaries between rural residents and both government and private commercial firm. Baca *Rural Development Participation* (Ithaca Cornell University, 1984), hal 16

⁹² Qardhawi, *Kiat-Kiat Mengatasi Kemiskinan*, op.cit., hal 172

tidak akan membawa pada suatu langkah alternatif pemecahan untuk keluar dari kungkungan kemiskinan rakyatnya. Justru sebaliknya, masyarakat Islam akan semakin mengalami kemiskinan yang masif sebab selalu dihegemoni oleh kekuatan sistem-sistem sosial lain yang mengeksploitisir.

Dampak sampingan penggunaan atau pengadopsian sistem sosial lain bagi kehidupan lingkungan masyarakat muslim, menuntut keharusan adanya kembali pola tinjauan yang mengarah pada paradigma sistem sosial Islam atas sistem-sistem yang dikembangkan di negara-negara bermayoritas berpenduduk muslim, yang telah menyebabkan munculnya fenomena kemiskinan.

BAB II

AUTOBIOGRAFI YUSUF QARDHAWI

A. Perjalanan Hidup dan Karya-Karya Yusuf Qardhawi

1 Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf bin Abdullah al-Qardhawi (selanjutnya ditulis Qardhawi). semenjak duduk di tingkat keempat Ibtidaiyah selalu dijuluki 'Ya Allámah atau syaikh oleh para gurunya, beliau dilahirkan di sebuah kampung kecil yang bernama Shafth Turab. Salah satu perkampungan di Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah, dengan ibu kotanya Thantha Dari Kairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 kilo meter atau untuk menempuhnya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam.

Tepatnya, Qardhawi dilahirkan pada tanggal 09 September 1926 dan pasangan suami istri yang sangat sederhana tetapi taat beragama ia tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usianya baru mencapai dua tahun, ayah yang dicintainya telah dipanggil sang Kháliq Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandung, kakek dan pamannya. Akan tetapi pada saat ia duduk di tahun keempat Ibtida'iyah Al-Azhar, ibunya pun dipanggil yang Maha Kuasa. Beruntung, ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini hafal seluruh al Quran dengan bacaan yang sangat fasih, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal al-Qu'ran di bawah bimbingan seorang kutab yang bernama

Syaikh Hamid di madrasah zamiyyah Setelah ayah, Ibu dan kakeknya meninggal dunia, ia diasuh dan dibimbing oleh pamarinya Pendidikan formalnya dimulai di Madrasah Ibtidaiyyah Thantha dekat

dengan kampungnya, yang hanya menerima calon siswanya yang sudah hafal al Quran Di lembaga pendidikan inilah Qardhawi kecil mulai bergelut dengan kedalaman khazanah Islam di bawah bimbingan para gurunya, dan menyelesaikannya dalam waktu empat tahun. Kemudian setelah itu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Thantha juga selama lima tahun. Dalam rentang waktu

Ibtida'iyah sampai Tsanawiyah yang diselesaikannya di Thantha, ia mengalami berbagai peristiwa yang kelak sangat mempengaruhi jalan hidupnya.

Salah satu peristiwa istimewa yang dialaminya di tingkat Ibtida'iyah adalah pada saat pertama kali ia mendengarkan ceramah Ustdaz al-Bana. Ketika mendengarkan ceramahnya, intuisi Qardhawi kecil mulai dapat merasakan kehadiran seorang laki-laki 'alim yang telah menggadaikan seluruh kehidupannya hanya untuk kepentingan Islam dan umatnya. Saat itu, Qardhawi kecil yang pernah bercita-cita untuk menjadi Syaikh Al-Azhar, dapat menangkap seluruh isi ceramah yang disampaikan Syaikh al-Bana tanpa terlewat satu bagian pun. Ia pun mulai memiliki kesadaran dan pemahaman akan pentingnya dakwah yang dilakukan secara berjama'ah, maka untuk upaya inilah bersama Ikhwan al-Muslimin. mulai bergabung

Pada masa kecilnya, di dalam jiwa Qardhawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ulama alumni Al-Azhar di kampungnya) dan Ustadz Hasan al-Bana Bagi Qardhawi, Syaikh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya kepada dunia fikih, terutama madzhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan Syaikh al-Bana adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah Mengenai pengaruh al-Bana dalam dunia pemikiran dan spiritualnya, beliau pernah mengatakan: "Di antara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual kami adalah Syaikh al-Syahid al-Bana."⁹³

Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat Ibtidaiyyah dan Tsanawiyah Thantha, ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Akhirnya ia masuk ke Fakultas Ushuludin di Universitas al-Azhar. Ia berhasil memperoleh ijazah Perguruan Tinggi pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan S-2 jurusan bahasa Arab dengan konsentrasi pada pendidikan dan pengajaran, serta berhasil memperoleh ijazah S-2. Setelah itu, ia masuk ke Lembaga

⁹³ Qardhawi al-Shahrwah al-Islamiyyah bama al-Juhid wa al-Tatharruf, Bank al-Taqwa (tanpa kota) 1402 H.

Kajian dan Pengembangan Bahasa Arab Internasional yang menginduk pada Universitas Negara Arab. Di sini ia berhasil memperoleh gelar Diploma pada bahasa dan adab. Pada tahun yang sama, ia masuk pendidikan tinggi (S-3) qismud dirasah bidang al-Qur'an dan as-Sunnah di Fakultas Ushuludin, dan ia berhasil menyelesaikannya pada tahun 1960 M. Dari sana beliau mempersiapkan disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor yang membahas tentang zakat⁹⁴, yang seharusnya diselesaikan dua tahun. Namun karena situasi yang dialami gerakan.

Ikhwanul Muslimin di Mesir pada saat itu mengakibatkan beliau tidak berhasil menyelesaikan target tersebut. Sehingga baru berhasil menyelesaikannya pada tahun 1973 M⁹⁵.

Sebenarnya, sebelum situasi yang berdampak pada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, pada tahun 1956, Qardhawi telah bekerja di bagian pengawasan bidang Agama pada Kementrian Perwakafan di Mesir dengan aktifitas ceramah dan mengajar di masjid-masjid. Kemudian diangkat menjadi penilik lembaga al-A-immah Pada tahun 1959 dipindahkan ke bagian administrasi umum untuk Tsaqofah Islamiyyah di Universitas al-Azhar untuk mengawasi penerbitannya, dan bekerja di kantor seni pengelolaan dakwah dan bimbingan⁹⁶.

Selain alasan kondisi di Mesir, sebab keterlambatannya meraih gelar Doktor karena ia sempat meninggalkan Mesir. Yakni pergi menerima tugas ke negara Qatar pada tahun 1961. Di sana ia sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Dohal sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengalami dipenjara oleh penguasa Mesir. Pada saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, ketika itu umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. kemudian April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi

⁹⁴ lebih jelasnya berjudul "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

⁹⁵ ¹Sulaiman Bin Shalih al-Khurasyi, Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Timbangan (Bogor Pustaka Imam Syafei, 2003), hal 7-8

⁹⁶ Ibid.

Revolusi Juni di Mesir Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim penguasa pada saat itu.⁹⁷

Dalam rentang pernikahannya, Qardhawi dikaruniai tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing anaknya. Hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya

Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika dalam bidang Nuklir dari Inggris Putri keduanya memperoleh gelar Doktor dalam bidang Kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh pendidikan program S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan SI-nya di Universitas Texas Amerika Anak laki-laki yang pertama menempuh program S3 dalam bidang Teknik Elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, dapat terlihat bahwa pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern sangat bersifat akomodatif Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Dalam hal ini, Qardhawi dapat dikategorikan sebagai seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Baginya semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada

⁹⁷ Konsistensi isi kutbah-kutbahnya, pada proses selanjutnya menurut Sulaiman ternyata mengalami degradasi nilai terutama setelah beliau mencapai tingkar popularitasnya. Bahkan banyak fatwa fatwanya yang cenderung sejalan dengan hawa nafsu, misalnya, pembolehan nyanyian, drama pementasan panggung dan sikapnya yang menganggap enteng masalah kewanitaian, op.car, hal 9

orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam."⁹⁸

Menurut Qardhawi, peradaban bisa melesat maju jika peradaban tersebut bisa menyerap sisi-sisi positif dari peradaban yang lebih maju dengan tanpa meninggalkan akar-akar pembangunan peradaban yang dianjurkan Islam. Qardhawi menganggap, kemajuan peradaban manapun amat tergantung pada manusianya. Termasuk tentunya semangat untuk memajukan peradaban Islam dan mengusahakannya untuk memimpin peradaban dunia yang kehilangan roh kemanusiaan Peradaban Islam yang mundur, dalam pandangan Qardhawi, sebagaimana pernah juga diungkapkan Muhammad Abduh, adalah karena umat Islam menutup koridor-koridor kebesaran ajaran Islam dengan kebodohan umatnya sendiri. Islam menjadi ajaran yang dikavling-kavling dan diparsialkan, sehingga kehilangan nafas universalisme Islam yang agung dihinakan oleh anak-anaknya sendiri, yang tak percaya sepenuhnya kepada ajaran Islam itu sendiri.⁹⁹

Lintasan hidup di atas telah membentuk karakter pribadi muslim Qardhawi yang kuat komitmennya terhadap Islam. Akan tetapi sisi lain, ia dapat bersikap moderat terhadap kemajuan dan perubahan zaman.

2. Karya-Karya Yusuf Qardhawi

Qardhawi memiliki karya-karya yang jumlahnya lebih dari tujuh puluh buah. Jumlah tersebut sangat besar jika dilihat dari waktu luang yang dimiliki olehnya untuk menulis. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, niscaya akan mendapatkan bahwa pemikiran-pemikiran yang disampaikan dalam karya-karya tulisan tersebut banyak yang bersifat pengulangan saja. Bahkan sebagian kitab hanya sebatas pembahasan terhadap bab tersendiri dari kitab lain.¹⁰⁰ Berikut beberapa judul kitab yang telah ditulis oleh Qardhawi:

- 1) Al-Halaal wal Haraam fil Islam

⁹⁸ Lihat: <http://media.isnet.org/islam/qardhawi.html> Penggunaan referensi dari media internet ini adalah karena alasan sangat minimnya referensi buku yang mencatat biografi Qardhawi secara lengkap

⁹⁹ Lihat: <http://members.tripod.com/tesur/islam/qardhawi>.

¹⁰⁰ Sulaiman, op.cit, hal. 10.

- 2) Al-'Ibaadah fil Islam.
- 3) Al-limaan wal Hayaat
- 4) Al-Khashaa-ish al-Aammah lil Islaam.
- 5) Musykilatul Faqr wa Kaifa 'Aalajahal Islaam.
- 6) Fighuz Zakaat
- 7) Bai'ul Muraabahah lil Aamir bisy Syira'.
- 8) Fawaa-idul Bunuuk Hiya ar-Ribaa al-Muharram.
- 9) Al-Huluul al-Mastauridah wa Kaifa Janat 'alaa Ummatina?
- 10) Al-Hall al-Islaami Fariidhatan wa Dhuruuran.
- 11) Bayanaatul Hall al-Islaamiy wa Syubuhant al-Ilmaniyyiin wal
- 12) Mutagharibiin.
- 13) Ash-Shabr fil Qur-aanil Karim
- 13) An-Naas wal Haqq
- 14) Ghairul Muslimiin fil Mujtama'il Islaamiy
- 15) Darsun Nakbah ats-Tsaniyah
- 16) Tsaqaafatud Daa'iyah.
- 17) At-Tarbiyyah al-Islaamiyaah wa Madrasatu Hasan al-Bana
- 18) Risaalatul Azhar baina! Amsi wal Yaum wal Ghadd
- 19) Jiilun Nashr al-Mansyuud
- 20) Zhaahiratul Ghuluww fit Takfiir.
- 21) Ash-Shahwah al-Islaamiyyah binal Ikhtilaafil Masyruu' Wat Tafarruqil
Madzmuum
- 22) Ash-Shahwah al-Islaamiyyah binal Juhuud wat Tatharruf
- 23) Ash-Shahwah al-Islaamiyyah wa Humuumul Wathan al-'Arabi wal
Islaamy.
- 24) Min Ajli Shahwatin Raasyidatin, Tujaddidud Diin wa Tanhadhubid
Dun-ya
- 25) Ainal Khalal.
- 26) Auliyyatul Harakah al-Islaamiyyah fii Marhalatil Qaadimah
- 27) Al-Islaam wa 'Ilmaaniyah Wajhan li Wajhin
- 28) Ar-Rasuul wa 'Ilm.

- 29) Al-Waqt fi Hayaatil Muslim
- 30) Wajuudullah.
- 31) Haqiqatut Tauhiid
- 32) Nisaa-un Mu'minaatun.
- 33) Yuusuf ash-Shiddiq
- 34) Aalim wa Thaaghiyah.
- 35) Nafahaat wa Lafahaat.
- 36) Al-Muslimuun Qaadimuun
- 37) Al- Aql wal Ilm fil Qur'aanil Kariim.
- 38) Quthuufun Daaniyah minal Kitaab wa Sunnah
- 39) Al-Fiqhul Islaami binal Ashaalah wat Tajdiid
- 40) Awaamilus Sa'ah wal Muruunah fisy Syari'atil Islaamiyyah
- 41) Fataawa Mu'aashirah.
- 42) Al-Fatwa binal Indhibaath wat Tasayyub.
- 43) Madkhlal lid Diraasatisy Syarii ah al-Islaamiyyah
- 44) Al-Ijtihad fisy Syari'ah al-Islaamiyyah.
- 45) Al-Ijtihadul Mu'aashir binal indhibaath wal Infiraath.
- 46) Kaifa Nata'aamal ma'as Sunnah an-Nabawiyah?
- 47) Syari'atul Islaam Shaalihatun li Kulli Zamaanin wa Maakanin.
- 48) Madkhal li Diraasatis Sunnah an-Nabawiyah.
- 49) Taisiirul Fiqh: Fiqhush Shiyaam.
- 50) Al-Imam al-Ghazali baina Maadihihi wa Naaqidihi.
- 51) Qadhaayaa Mua'aasirah 'alaa Basaathil Baths.
- 52) Liga-aat wa Maharwarast Haula Quidhaayal Islam al-Mu'asshirah
- 53) Al-Muntaqaa minat Targhiib wat Tarhiib
- 54) Nahwa Wihdatin Fikriyyatin lil 'Aamiliina lil Islaam
- 55) Ats-Tsaqaafatul "Arabiyyah al-Islamiyyah binal Ashaalaahwal
- 56) Malaxmihul Mujtama'il Muslim alladzii Nunsyiduhu
- 57) Daurul Qayyim wal Akhlaaq fil Iqtishaadil Islaami.

Adapun karya-karya Qardhawi dalam beberapa tulisan ceramahnya
adalah

- 58) Limaadzaa al-Islam? Waajibusy Syabaab al-Muslim al-Yaum. Muslimatul Ghadd. Ash-Shaawatul Islaamiyyah bainal Aamal wal Mahaadzir Al-Islam Alladzii Nad'u Ilaihi "Awaamil Najahi Muassasatuz Zakaat fit Tathbiiqil Mu'aasir. Ath-Tarbiyyah Indal Imaam asy Saathibiy Qiimatul Insaan wa ghaayatu wujuudihi fil Islam.
- 59) Al-Islam Hadhaaratul Ghadd
- 60) Al-Ummatul Islaamiyyah Haqiqatun Laa Wahmun.
- 61) Fii Fiqhil Aulawiyyat
- 62) As-Sunnah an-Nabawiyyah Mashdaran lil Ma'rifah wal Hadhaarah.
- 63) Asy-Syaikh al-Ghazaaliy Kamaa 'Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarnin.
- 64) Duruusun fit Tafsir
- 65) Khithab asy-Syaikh al-Qardhawi.
- 66) Al-Hayaatur Rabbaaniyyah wa 'Ilm
- 67) An-Niyyah wa Ikhlaash
- 68) At-Tawakkal.
- 69) Taisiirul Fiqh fi dhau-il Qur'an was Sunnah: al-Muqaddimat wal Ushuul
- 70) Kaifa Nata'aamal ma'al Qur'aanil Azhiim?
- 71) Min Fiqhid Daulah fil Islaam.

3. Berdakwah Bersama Ikhwanul Muslimin.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,¹⁰¹ kecenderungan Qardhawi terlibat dalam kelompok Ikhwanul Muslimin diawali dengan kesan yang mendalam terhadap ceramah-ceramah Syaikh Hasan Al-Bana dari semenjak tahun pertama masuk Ibtidaiyah di Thantha.¹⁰² Semenjak saat itu, hati Qardhawi selalu bersama

¹⁰¹ Selain sebagai seorang penulis dan pemikir produktif, Qardhawi aktif pula dalam dunia dakwah. (harakah dan shahwah Islamiyah). Yang dimaksud dengan shahwah adalah sebuah upaya untuk membangkitkan umat dari keterlelahan, keterbelakangan, kejumudan dan melepaskan mereka dari konflik internal melalui berbagai wujud usaha dengan tujuan memperbaharui agama, sehingga dapat memperbaharui kehidupan dunia mereka ke arah keselamatan (Islam) Muhammad Imarah Al-Shahwah. Dalam al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Amah, (Kairo Wazarah al-Augaf, 2001), h. 850,

¹⁰² "Dalam hal ini, Qardhawi sangat terkagum-kagum atas kepribadian Syaikh Hasan al-Bana. Hal ini pula yang membuat Qardhawi sangat mencintainya la ibaratkan jika dalam dunia percintaan terdapat peribahasa yang mengatakan, bahwa "rasa cinta hanya akan lahir pada pandangan pertama", maka pada dunia dakwah, rasa kagum dan cinta kami terhadap Syaikh Hasan al-Bana sudah dirasakan semenjak kalimat pertama beliau ucapkan dalam ceramahnya. Qardhawi, Perjalanan hidupku (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2003), hal 245

Syaikh al-Bana. Bagi Qardhawi, cintaku adalah cinta seseorang murid terhadap guru, atau seperti seorang prajurit terhadap komandannya. Meskipun baru tiga tahun kemudian, Qardhawi dapat menjadi anggota (jundul) pada jama'ah Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan yang peduli terhadap shahwah Islamiyah. Tepatnya, ketika Qardhawi mulai masuk pendidikan formal tingkat Tsanawiyah,"¹⁰³

Kesan yang mendalam sehingga mempengaruhi Qardhawi terlibat langsung dalam aktifitas dakwah Ikhwanul Muslimin adalah pernyataan Syaikh Hasan al-Bana tentang keharusan ummat Islam untuk melakukan perlawanan pada setiap imperialis kejam, seperti kaum zionis. Kesan tersebut merupakan inti pembahasan al-Bana dalam mengerakkan setiap aktifitas kelompok Ikhwanul Muslimin, yakni:

- 1) pemahaman tentang problematika Islam bersama (Qadhiyyatuna).
- 2) taktik dan strategi berjuang (Wasilatuna).
- 3) quo vadis dakwah Ikhwanul Muslimin (Wada 'watuna).¹⁰⁴

Al-Bana menegaskan bahwa yang dimaksud dengan problematika Islam bersama adalah seputar tanah air kita, mulai dari yang paling kecil, besar hingga negeri paling besar. Beliau menjelaskan, negeri kecil adalah negen yang terdapat di lembah Nil. Yaitu Mesir di sebelah utara dan Sudan sebelah selatannya Artinya, Mesir adalah Sudan utara dan Sudan adalah Mesir Selatan.

¹⁰³ "Pada tataran teknis, cita-cita shahwah tersebut berusaha diwujudkan dalam sebuah aktivitas harakah Qardhawi menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi membutuhkan sebuah kerja massal (amal jamd 'i) yang tersusun dan terprogram secara rapi. Oleh karena hal inilah maka seirenjak duduk di tingkat Tsanawiyah, Qardhawi telah memulai tugas berdakwah dengan bergabung bersama Ikhwan al-Muslimin Semenjak awal, Qardhawi telah dipersiapkan agar menjadi salah seorang kader terbaik mereka Salah satunya adalah pada saat ia ditunjuk untuk menjadi da'i Ikhwan untuk luruh Mesir, dari Provinsi Alexandria (Iskandariyah) sampai Aswan dan Sinai, bahkan ia pernah ditugaskan berdakwah di beberapa negara Arab seperti Suria, Libanon dan Yordania, dengan dana yang didapatkannya dari Ustadz Hasan al-Hudhaibi, Mursyid 'am Ikhwan yang kedua, padahal saat itu ia masih berstatus sebagai seorang mahasiswa Qardhawi Al-Ikhwan AL-Muslimun Sab'una Aman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyah wa al-Jihad (Kairo Maktabah Wahbah, 1999), h. 31.

¹⁰⁴ Selain hal ini, pengaruh kelembagaan Ikhwanul Muslimin terhadap diri Qardhawi adalah terletak pada tujuan dakwahnya, yakni: a) mencoba menampilkan hukum-hukum Islam dalam bentuk sederhana tetapi komprehensif yang sesuai dengan kondisi zaman yang dihadapinya, 2) berusaha menampilkan Islam sebagai sebuah sistem dan aturan bermasyarakat yang sangat sempurna dan bukan hanya merupakan sebuah agama teoritis, terutama dalam menghadapi kapitalisme dan komunisme, 3) membela akidah Islamiyah dalam menghadapi filsafat materialistik; 4) membela eksistensi ruh manusia dalam menghadapi pemikiran yang menganggap manusia hanya sebagai binatang yang berkembang hasil evolusi Qardhawi, loc.cit., hal 297-298

Sedangkan yang dimaksud dengan tanah air besar adalah kaukus negara negara Arab (Al-Wathan Al-Arabi), yang menurut al-Bana, perbatasannya adalah dari Teluk Persia sampai Samudera Atlantik. Dari beliaulah, menurut Qardhaqi baru mengetahui batas-batas negara-negara Arab. Adapun negara yang dimaksud paling besar adalah negara-negara Islam (Al-Wathan Islami) yang terbentang dari Samudera Atlantik sampai Atlantik lagi, yaitu Samudera Pasifik sampai samudera Atlantik, atau dari Jakarta melewati Samudera Pasifik sampai Samudera Atlantik. Pada kesempatan inilah, Qarhawi juga mengetahui bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda dan harus segera membebaskannya dari belenggu penjajahnya. Disamping itu pula al-Bana membahas tentang bagaimana membebaskan Tunisia, Aljazair dan Maroko yang merupakan negara Arab paling Barat Beliau menjelaskan bahwa seluruh negara Islam harus saling membantu dan berduyun-duyun dalam rangka membebaskan saudara-saudara mereka dari jajahan negara lain.

Kemudian mengenai strategi (wasilatuna) dalam upaya mewujudkan tujuan dan meraih hak-hak tersebut, al-Bana mengungkapkan tahapan usaha yang harus dilakukan umat Islam Menurut al-Bana, dimulai dengan jalan negoisasi, yakni sebuah perundingan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak, dan bukan gaya perundingan seorang pengemis. Al-Bana menegaskan bahwa umat Islam wajib melakukan negoisasi tersebut, baik itu dengan berdialog yang disertai keinginan dan hati nurani umat dan bukan untuk mengemis, serta selamanya tidak pernah menyerah. Jika proses negoisasi tidak mungkin dilakukan, maka harus melakukan cara yang kedua yaitu boikot. Selanjutnya, jika cara kedua pun tidak berhasil maka umat Islam harus melakukan cara ketiga seperti yang diperintahkan agama, yaitu dengan berjihad. Perang melawan setiap imperialisme Barat dengan segala kemampuan yang dimiliki, menjadikan setiap laki-laki muslim sebagai balatentara dan mendidik dini kader muslim untuk mencapai tujuan tersebut serta menyebarkan ruh jihad ke dalam jiwa umat yang akan menggantikan sifat pengecut dan penakut yang selama ini meracuni kader-kader Islam

Pada kondisi seperti di atas, tidak syak lagi, perang merupakan sebuah kewajiban individu (*fardhu ain*) bagi seluruh rakyat yang beragama Islam sampai dapat mengusir para penjajah Barat dari negeri-negeri Islam. Ditegaskan bahwa seluruh rakyat harus rela mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, pernyataan al-Bana untuk memotivasi semangat juang para kader Ikhwanul Muslimin, termasuk telah mengilhami semangat juang Qardhawi adalah perihal kematian yang baik. Menurutnya, kematian yang baik adalah jika kepala ini berpisah dengan badan dalam perang membela agama Allah.¹⁰⁵

Selanjutnya mengenai manhaj dakwah Ikhwanul Muslimin (*Da'watuna*). Yang dalam proses perjalanannya telah dimodifikasi secara sempurna dan sistematis oleh Qardhawi. Hal ini akan dibahas secara terpisah dalam uraian pada sub tema karakteristik pemikiran Qardhawi.

Dari pijakan di atas, Qardhawi begitu intensif mengikuti kegiatan kegiatan gerakan Ikhwanul Muslimin. Bahkan, semenjak Qardhawi masuk pada jama'ah Ikhwanul Muslimin sudah memegang dua bidang yang sangat fundamental, yaitu bidang kesiswaan dan bidang penyebaran dakwah. Untuk misi dakwah, baru dapat membina masyarakat di Provinsi Gharbiyah. Bahkan pada proses selanjutnya, Qardhawi telah menjadi da'i Ikhwanul Muslimin yang selalu diutus ke luar negeri.

Dalam aktifitas di Ikhwanul Muslimin ini juga Qardhawi telah mengalami resiko perjuangan dengan dipenjara Tantha dan dibebaskan pada tanggal 13 Februari 1949. Kejadian penangkapannya adalah diawali ketika gerakan Ikhwanul Muslimin dipaksa dibubarkan pada tanggal 8 bulan Desember tahun 1948 oleh pemerintahan

Pada saat meninggalnya Syaikh al-Bana karena dihujani peluru oleh penembak gelap, kekaguman Qardhawi masih terlontar dengan menyebutkan bahwa kematiannya adalah kematian yang baik. Darah yang mengucur dari al Bana

¹⁰⁵ Ibid, hal. 247-249 Bahkan persoalan jihad ini merupakan doktrin pokok dalam menjalankan aktifitas dakwah yang harus berkaitan dengan proses transformasi dan internalisasi pemikiran Islam (*al-Fikrah al-Islamiyah*) dan pembebasan bumi-bumi Islam (*al-Ardhu al-Islamiyah*) yang masih dijajah.

akan selalu meniupkan ruh dan jiwa untuk membangkitkan kesadaran setiap kaum muslimin dari kondisi kehinaan dan kemunduran. Darah al-Bana telah menjadi air siraman kesuburan tanaman dakwah sehingga akan selalu tumbuh dan berkembang. Walaupun beliau hidup dengan usia 42 tahun, akan tetapi seperti dikatakan oleh Ibn Athailah dalam salah satu karyanya "Fushush Al-Hikam", betapa banyak orang yang umurnya pendek, tetapi semangatnya tetap hidup dan meluas. Saking terkagumnya pada sosok al-Bana, Qardhawi menyebutkan bahwa ia merupakan sosok yang dapat mengcover berbagai sifat. Beliau adalah seorang da'i, guru, pendidik, pembaharu, reformer, mujahid serta seorang politisi. Bahkan oleh Qardhawi, al-Bana telah diposisikan sebagai figur sentral dalam sejarah Mesir Modern Sampai-sampai menurut Qardhawi, peristiwa besar apapun yang terjadi di Mesir akan menghilang jika namanya berkibar.¹⁰⁶

Kekaguman seperti inilah yang membuat Qardhawi konsisten dengan gerakan Ikhwalul Musliminnya. Bagi Qardhawi, bergabung dirinya dengan Ikhwanul Muslimin telah memberikan mampaat bagi perkembangan pribadinya. Mampaat-mampaat tersebut, meliputi:

a. jama'ah Ikhwanul Muslimin telah berhasil memperluas cakrawala pemahaman terhadap Islam secara komprehensif, seperti yang telah diajarkan oleh Allah dalam kitab-Nya, didakwahkan oleh para Rasul Nya serta seperti yang dipahami oleh para sahabatnya, bahwa Islam adalah agama dan dunia (din wa dunya), dakwah da negara (diabwuh wa daulah), akidah dan syari'ah (aqidah wa syari'ah), ibadah dan kepemimpinan (ibadah wa qiyadah), al-Qur'an dan pedang (maf wa saut). Dengan jalan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin inilah. diyakini dapat memahami bahwa Islam adalah ajaran yang sangat komprehensif (syumud) dan tidak hanya mengatur aktivitas ritual, seperti yang dipahami sebelumnya atau seperti yang dipahami oleh sebagian orang saat ini.

b. dengan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, diri Qurdhawi dapat mengetahui seluruh kewajiban bersama untuk membela Islam. Seperti yang telah

¹⁰⁶ Ibid,hal. 343-345

dipahami bersama, bahwa membela Islam dengan perkataan, perbuatan, dakwah dan mengerahkan seluruh kemampuan hingga dapat terwujud sebuah kepemimpinan Islam, menerapkan ajaran Islam pada seluruh dimensi kehidupan, serta menghadapi berbagai aliran pemikiran yang memusuhi Islam dan membangun perdaban umat adalah pekerjaan dan tugas-tugas agama yang tidak akan dapat dikerjakan secara individual la hanya akan berhasil jika dilakuakn secara bersama-sama dalam sebuah gerakan yang memiliki tujuan dan pemahamn yang jelas, yang diikat oleh pemahaman yang mendalam, keimanan yang kokoh serta ikatan yang solid untuk mewujudkan tujuan besar umat Islam setelah dihancurkannya khilafah Islamiyah.

c. dengan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, diri Qardhawi dapat berubah dari sekedar "seorang penceramah agama" di kampung atau beberapa kampung yang saling berdekatan tetapi lebih dari itu Konteks berdakwah bukan hanya sekedar berupaya membina komitmen beragama per-individu dalam jiwa setiap muslim. Tetapi lebih dari itu berusaha mengelorakan "kesadaran berislam" secara menyeluruh. Sebuah kesadaran yang akan membangkitkan akal, menghidupkan hati dan membangkitkan bangsa-bangsa muslim. Oleh karena itu, dalam Ikhwanul Muslimin, seorang penasehat agama (al Waizh ad-Dini) hanya dapat melakukan upaya-upaya untuk melembutkan hati, mengingatkan manusia akan kematian dengan menggunakan berbagai hadist yang berisi kisah, kabar gembira dan ancaman, baik shahih ataupun tidak Sedangkan seorang juru dakwah Islam (ad-Da's al-Islam) tugasnya mencerdaskan pemikiran, membangkitkan rasa, memperkokoh tekad, meninggikan cita-cita. memobilitas kemampuan, menyatukan kekuatan, memperkuat ikatan dan mengiring umat Islam, selalu berusaha untuk mendidik dan membesarkan pemikiran umat, membangkitkan perasaan, meluruskan niat, meninggalkan cita-cita, membangun dan menyatukan kekuatan erta mengokohkan ikatan umat Islam secara maksimal dalam koridor Islam.

d. berkat bergabung bersama Ikhwanul Muslimin, dirinya mampu beralih dari memikirkan persoalan-persoalan kecil menjadi memikirkan persoalan-persoalan besar, atau dari memikirkan persoalan-persoalan pribadi menjadi pemeikiran mengenai cita-cita besar umat Semisal bercita-cita membebaskan

negeri Mesir, Sudan serta seluruh negara-negara Arab dan dunia Islam dari cengkraman penjajah asing. Dirinya pun menjadi memiliki kekuatan menolak setiap pemikiran, sistem, undang-undang yang berasal dari luar, dengan mengantikannya dengan pemikiran, sistem dan hukum Islam. Artinya harapan dan mewujudkan kembali khilafah Islamiyah di bawah naungan Al-Qur'an dan kepemimpinan Rasulullah sangat kuat tertanam dalam cita-cita setiap langkah dan gerakan.

e. manfaat lain dari dakwah jama'ah yang dilakukan bersama Ikwanul Muslimin adalah dapat menghindarkan diri dari sistem pendidikan yang membedakan antara pendidikan agama dan umum.

Pada proses selanjutnya, Selain menjadi aktivis Ikhwanul Muslimin di lapangan karena diawali ketertarikannya pada al-Bana, Qardhawi juga telah dikenal sebagai salah seorang pemikir yang ide-idenya banyak dijadikan sebagai referensi oleh para aktivis harakah, baik itu oleh Ikhwanul Muslimin sendiri maupun dari yang lain Menurutny, yang dimaksud dengan harakah adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara kolektif dan dimulai dari masyarakat paling bawah (bottom up) dan terorganisir secara rapih dalam upaya mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam.¹⁰⁷

Menurut Qardhawi, tujuan utama yang harus direalisasikan oleh sebuah harakah Islamiyah adalah bagaimana mewujudkan sebuah pembaharuan (tajdid). Melakukan tajdid adalah merupakan sebuah sunnatullah yang akan terus berulang Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim: *"Sesungguhnya pada setiap seratus tahun, Allah akan mengutus untuk umat ini, orang yang memperbaharui agamanya"*. Yang dimaksudkannya dengan pembaharuan (tajdid) adalah sebuah upaya untuk memperbaharui pemahaman keagamaan, keimanan, sikap iltizam kepada agama serta memperbaharui metode dakwah yang digunakan. Ia bukanlah sebuah usaha untuk membuat aturan baru dalam agama dengan merubah prinsip-prinsip baku (tsawabit) atau merusak tatanan

¹⁰⁷ Yusuf Qardhawi. Al-Ikhwān AL-Mushmān Sah uma 'Aman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyah wa al Jihād (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h, 31

ajaran yang qath'i. Adapun bidang-bidang yang harus diprioritaskan dalam mencapai tujuan tersebut antara lain adalah: pendidikan (tarhiyah), pekerjaan politik (xiyasa), ekonomi (iqtishadiyah), sosial (ytima'yah), medis massa (wasa'il al-Ilam) dan pekerjaan ilmiah.¹⁰⁸

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kontribusi Qardhawi dalam dunia dakwah tersebut, sangat kental dengan warna Hasan al-Bana. Dalam hal ini dapat dikatakan, jika Ustadz al-Bana adalah merupakan pendiri (mu'assis) dan disigner harakah Ikhwan, kemudian diteruskan oleh para mursyid am lainnya, maka kemunculan Qardhawi dalam harakah ini adalah sebagai penyambung lidah dan penerus cita-cita al-Bana. Kita mengetahui bersama bahwa perjuangan al-Bana dalam membesarkan harakah tersebut telah sampai pada tahap pembentukan sebuah harakah yang terorganisir. Setelah lama berkembang, maka kemunculan Qardhawi dalam gerakan ini adalah sebagai orang yang berusaha memagari harakah tersebut. Oleh sebab itu, karya-karya utama Qardhawi dalam bidang harakah dan shahwah Islamiyah, selalu diarahkan kepada upaya memperkokoh gerakan tersebut. Di antara karya-karyanya yang diarahkan kepada tujuan tersebut adalah al-Shahwah al-Islamiyyah bama al-fuhúd wa al-Tatharruf, al-Shahwah al Islámiyyah baina al-Ikhtilaf al- Masyrü' wa al-Tafarruq al-Madzmûm, al Shahwah al-Islamiyyah wa Humúm al-Wathan serta Aulawiyyat al-Harakah al Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah. Pada empat karya tersebut, Qardhawi berusaha keras membuat batasan-batasan etis yang harus dipegang dalam menjalankan tanggung jawab harakah, serta mengobati penyakit yang biasanya menghingapi para aktivis harakah

Menurut Qardhawi, hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang aktivis harakah Islamiyah adalah bagaimana mewujudkan sikap moderat (wasathiyah) dan menghindari sikap ekstrem (tatharruf), menghindari sikap yang terlalu mudah mengkafirkan seseorang (takfir) serta sudah saatnya agar harakah Islamiyah membuka diri untuk berdialog dengan arus yang selama ini berseberangan dengan mereka, baik kalangan sekuler, orientalis, mereka yang berbeda agama, bahkan dialog dengan mereka yang ateis, sehingga harakah Islamiyah tidak lagi

¹⁰⁸ Yusuf Qardhawi, Ummanuna bana Qarnai, (Kairo Dar al-Syuruq, 2000), h, 65

diasumsikan sebagai gerakan yang eksklusif (*inghilaq*). Satu hal yang tidak kalah penting bagi para aktivis harakah Islamiyah adalah agar mau merangkul semua kelompok yang sama-sama memiliki dedikasi untuk Islam, sehingga dalam menghadapi berbagai kekuatan dan pemikiran yang akan merusak jati diri Islam, mereka dapat bersatu padu dalam sebuah barisan yang kokoh dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki bersama.¹⁰⁹

B. Karakteristik Pemikiran Yusuf Qardhawi

Sebelum membahas karakteristik pemikiran Qardhawi ada baiknya melihat dulu kultur intelektual yang telah mempengaruhi perkembangan nalarnya, khususnya di Mesir sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang sangat kaya dengan khazanah keislamannya

Mesir adalah tempat kelahiran Qardhawi. Semenjak Islam masuk ke sana dan Amr bin 'Ash menjadi gubernur pertama di bawah Khalifah Umar bin al-Khattab, di negeri ini telah muncul para pemikir muslim dan pembaharu yang sangat brilian. Pada zaman Islam klasik, kita mengetahui bahwa salah seorang imam madzhab Islam terbesar, Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i, hampir separuh usianya beliau habiskan di Mesir. Pada tataran militer, negeri ini pernah dijadikan markas besar oleh mujahid besar, Shalahuddin al-Ayyubi yang membebaskan al-Quds dari tangan kaum Nashrani.

Pada abad ke-19, kita mendengar tokoh pembaharu seperti Jamaluddin al-Afghani (meskipun bukan kelahiran Mesir) (1838-1897 M), yang bersama sama dengan Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905 M) menerbitkan majalah *al-Urwah al-Wusqad* di Paris. Afghani adalah seorang pembaharu yang berusaha keras membela dunia Islam dan membebaskan mereka dari genggaman para penjajah dan terkenal dengan ide Pan Islamisme-nya (*al-Jami'ah al-Islamiyah*). Adapun Muhammad Abduh adalah seorang ulama yang berusaha keras melakukan pembaharuan dan mendialogkan ajaran Islam (terutama syari'ah) dengan realitas masyarakat yang dihadapinya. Begitu pula muridnya, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M), yang meneruskan tafsir *al-Mannar* karya Muhammad Abduh

¹⁰⁹ Ibid, hal. 185-192

dan menerbitkan majalah al-Mannar Kemudian disusul ulama-ulama Al-Azhar lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Tentu saja rentang waktu antara Imam Syafi'i dengan Jamaluddin al-Afghani tersebut, di Mesir telah banyak pemikir besar lainnya yang muncul.

Pada wacana pemikiran kaum intelektual muslim Mesir ini, sekitar awal abad ke-14 Hijriyah atau abad ke-19 Maschi, terjadi polemik besar antara kaum pembaharu dan kaum tradisional. Di satu sisi, kaum pembaharu berusaha keras agar dapat menghadapkan dan membawa Islam kepada persoalan-persoalan kontemporer yang tidak pernah muncul pada zaman klasik, sedangkan di sisi lain kaum tradisionalis sama sekali menolak ide pembaharuan tersebut dan mereka menangkapnya dengan penuh kecurigaan bahkan mereka menganggap bahwa ide pembaharuan hanyalah merupakan sebuah ide besar berbau Barat yang akan menghancurkan prinsip-prinsip ajaran Islam, padahal bagi para pembaharu, upaya tajdid ini adalah sebuah keniscayaan (*necessity*), karena tanpanya, Islam tidak akan dapat menyentuh persoalan-persoalan baru. Akan tetapi, pembaharuan yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pokok Islam yang tidak dapat berubah (*sawäbit*).

Tentu saja arah berlawanan ini menimbulkan polemik besar dan berkepanjangan Akan tetapi, akhirnya polemik tersebut mulai menjinak dengan munculnya beberapa pemikir baru Mesir pada awal abad ke-20 yang di antaranya adalah Syaikh Muhammad al-Ghazali dan Dr. Yusuf Qardhawi. Syaikh Muhammad al-Ghazali adalah ulama yang merepresentasikan kaum pembaharu, sedangkan Syaikh Qardhawi adalah representasi kaum tradisional. Dengan hadirnya dua orang ulama ini, kubu pembaharu dan tradisional mulai saling berdialog dan mendekati, sehingga kemunculan dua orang tokoh tersebut (meminjam istilah Thariq al-Busyra) seperti dua buah lautan yang bertemu pada sebuah muara (*multaqa al-Bahrain*), yaitu lautan para pembaharu dan lautan kaum tradisional, yang kemudian dua laut itu menjadi satu arus. Dengan demikian, dari kolaborasi 'cantik' antara dua pemikir ini, dunia Islam menemukan seorang pembaharu yang memiliki ruh tradisional dan pembela prinsip-prinsip Islam (*ushül*); dan seorang

tradisionalis yang memiliki jiwa pembaharu yang menggunakan tajdid sebagai jalan untuk mempertahankan eksistensi dan ushul Islam.¹¹⁰

Dua orang ulama ini adalah alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Mereka sering sekali mendialogkan pemikirannya secara terbuka. Salah satunya adalah ketika Syaikh Muhammad al-Ghazali menulis sebuah buku yang berisi rekonstruksi standar keshahihan hadits berdasarkan makna (matan) dan tidak hanya mendasarkannya kepada kredibilitas para perawi (sanad) seperti yang dilakukan oleh para ulama klasik. Buku tersebut berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Figh wa Ahl al-Hadis*. Kemudian Syaikh Qardhawi berusaha mengkritik metodologi Syaikh al-Ghazali ini dengan metodologi klasik yang sangat dikuasainya. Buku tersebut berjudul *Karfa na ta amal ma'a al-Sunnah al Nahawiyah* (Bagaimanakah seharusnya memperlakukan Sunnah Nabawiyah). Kedua buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kedua tokoh ini adalah dua orang ulama yang memiliki kedekatan secara personal dan pernah bersama-sama menjadi penghuni penjara Thür, bahkan Qardhawi menulis buku yang secara khusus menceritakan kedekatannya dengan Syaikh Muhammad al Ghazali yang berjudul: *al-Syaikh al-Ghazali Kama Araftuhu: Rihlah Nishf Qarn Saat ini*, setelah Syaikh Muhammad al-Ghazali meninggal dunia (bulan Maret tahun 1996), Syaikh Qardhawi terus berjuang dan berkarya untuk kebangkitan umat.¹¹¹

Selanjutnya, berpijak pada beberapa pengamat yang fokus pada perkembangan pemikiran modern dalam Islam, Qardhawi telah diposisikan sebagai pemikir Islam yang komitmen terhadap kebenaran cara berpikir moderat (*al-washanah al-Islamiyah*). Dalam buku-buku yang ditulisnya, selalu menyeru pada pemikiran moderat dan sangat anti pada pemikiran ekstrimisme. Beliau selalu mendengungkan kelebihan Islam dalam segala lininya. Menurutnya, Islam selalu menganjurkan untuk mengambil jalan tengah.

¹¹⁰ Thariq al-Busyra Sakhshiyah wa Qadhaya Masharah (Al-Hilal Kairo Al-Hilal, 2002), hal. 78-80

¹¹¹ "Lihat hapislamlib.com/TOKOH_qardhawi.html

Sebagai ulama yang apresiasinya terhadap al-Quran dan sunnah Nabi sangat tinggi, Qardhawi: telah berhasil dengan cerdas dan sangat jenius menangkap roh dan semangat ajaran al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Dia sangat fleksibel dalam memandang ajaran Islam, Kedalaman dan ketajamannya dalam menangkap ajaran Islam ini, sangat membantunya untuk selalu bersikap arif dan bijak. Namun pada saat yang sama, sangat kuat dalam mempertahankan pendapat pendapatnya yang dia gali dari al-Quran dan Hadits.

Qardhawi senantiasa dengan gencar mengedepankan Islam yang toleran serta kelebihan-kelebihannya yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain di luar agama Islam. Islam begitu sangat menghargai makna pluralisme agama sebagai sebuah realitas sosial yang tidak mungkin dihilangkan. Oleh karenanya, Qardhawi sangat anti terhadap gerakan-gerakan militan yang membunuh para turis di Mesir (beberapa tahun lalu), dengan tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Tindakan seperti itu, dia anggap sebagai perlakuan brutalisme yang hanya memperburuk citra dan gambaran Islam yang cinta damai dan sangat manusiawi dalam memperlakukan orang lain, telah dikotori oleh semangat barbarian yang menumpahkan darah. Namun di saat yang sama, Qardhawi juga mengingatkan bahwa tindakan seperti itu bukan muncul dari keinginan mereka. Tindakan tersebut muncul dari para ekstrimis akibat kemerdekaan mereka telah dirampas oleh para penguasa yang tidak memberikan bagi mereka ruang yang bisa mereka gunakan dengan leluasa menjalankan apa yang mereka yakini¹¹²

Dalam konteks modern, banyak pengamat menegaskan bahwa orang tidak bisa mengabaikan nama Qardhawi. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan dilambri dalil yang kuat, banyak dijadikan rujukan umat Islam, terutama menghadapi persoalan-persoalan kekinian. Banyak buku ulama Mesir ini yang beredar luas di Indonesia. Antara lain, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Islam Ekstrem, Menyatukan Pemikiran Pejuang Islam, Ulama versus Tiran, dan Agenda Permasalahan Umat.

¹¹² lihat <http://members.tripod.com/~tesur/islam/qardhawi>.

Dalam pandangan Qardhawi, umat Islam sudah lama mengidap krisis identitas diri yang akut akibat perang pemikiran (ghazwul fikr) Barat yang tidak menginginkan Islam bangkit kembali. Umat Islam sudah tidak percaya lagi kepada agamanya sendiri, justru lebih percaya kepada peradaban Barat. Hingga kini pun, umat Islam masih di bawah cengkeraman peradaban Barat. Qardhawi adalah salah satu intelektual yang tak jemu-jemunya mengembalikan identitas umat itu. Caranya, terus menerus melakukan penyebaran pemikiran Islam yang benar dan tidak menyimpang. Dia tidak hanya terlibat dalam penyebaran pemikiran lewat karangan-karangannya yang sangat beragam, serta seminar seminar di tingkat internasional. Lebih penting dari itu adalah, pendiriannya yang sangat kokoh terhadap apa yang dia yakini sebagai kebenaran dan prinsip Islam, walaupun ada tekanan dari manapun. Qardhawi sama sekali tidak terpengaruh dan amat selektif terhadap berbagai propaganda pemikiran Barat maupun Timur, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri. Beliau bukanlah pengikut buta dari mazhab atau gerakan Islam modern tertentu. Bahkan dia tidak segan-segan berbeda pendapat dengan senior-seniornya dalam pergerakan Islam seperti Sayyid Quthb, tokoh garda depan pergerakan Islam modern Ikhwanul Muslimin. Kritik kritik Qardhawi, terutama diarahkan pada pemikiran Sayyid Quthb dalam bukunya yang sangat spektakular *Ma'alim Fii al-Thariq* (Rambu-Rambu di Jalan), yang mengandung ajaran sangat "hitam-putih". Sebuah buku yang menggiring pengarangnya ke tiang gantungan.

Menurut Qardhawi, perbedaan pendapat merupakan hal yang tak mungkin dihindari dan tak mungkin dapat dihentikan dengan tulisan-tulisan ilmiah atau seminar-seminar. Juga tak bisa dihentikan dengan diterbitkannya kitab-kitab. Sepanjang sebab-sebab perbedaan itu ada, maka perbedaan itu tidak akan pernah sirna. Bahkan dia beranggapan, religiusitas yang sangat dalam pada dada kaum Muslimin, sering menimbulkan ketegangan-ketegangan perbedaan yang sangat tidak toleran. Dimana masing-masing pihak dengan penuh semangat mempertahankan pendapat masing-masing dan menganggapnya paling benar. Mereka menyangka, pendapat mereka adalah agama itu sendiri yang mungkin seseorang dengan mengikuti atau tidak mengikutinya bisa mendapat pahala atau

dapat siksa. Mereka telah dengan sekuat tenaga, menjadikan pendapat-pendapatnya sebagai sesuatu yang sangat sakral dan sangat anti terhadap perbedaan. Sebuah sikap yang sebetulnya sangat tercela, karena akan terjadi pengendapan absolutisme pemikiran dan pendapat yang sangat menghambat nilai-nilai kemungkinan untuk berbeda yang dijamin Islam.

Menurutnya perbedaan pendapat akan selalu ada sepanjang nash-nash, yang dari sana diambil kesimpulan sebuah hukum, terbuka bagi sebuah penafsiran yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Sepanjang pemahaman setiap orang juga tidak berada dalam satu tataran dalam pengambilan kesimpulan, maka perbedaan ini akan terus berjalan. Perbedaan seorang alim yang mengambil rukhsah (keringanan hukum) dengan yang mengambil 'azimah (sesuai dengan perintah awal syara'), atau yang mengambil hukum dengan sangat hati-hati (al ahwath) dengan yang mengambilnya dengan cara lebih mudah (al-aysar) tidak mungkin dipertemukan sampai hari kiamat. Pasalnya, nash-nash al-Quran selalu membuka ruang yang segar bagi penafsiran yang berbeda. Sebuah rahmat yang sering kali tidak mampu dinikmati umat Islam dengan cerdas dan cermat. Para sahabat juga berbeda pendapat antar mereka. Namun itu semua tidak menjadikan mereka saling cakar-cakaran, bahkan mereka dengan damai hidup dalam alam perbedaan itu. Mereka shalat di belakang yang lain tanpa risih dan tanpa caci maki. Qardhawi sangat menyayangkan mereka yang tidak bisa membedakan antara perbedaan pendapat yang terpuji dan tercela secara syara'.

Pandangan-pandangan Qardhawi yang tajam dalam hal perbedaan yang terpuji dan tercela ini, sangat lugas dan luas dituangkan dalam bukunya *As Shahwah al-Islamiyah baina al-ikhtilaf al-masyru' wa al-tafarruq al-madzmum* (Kebangkitan Islam Antara Perbedaan yang Terpuji dan yang Tercela). Atau dalam sebuah bukunya yang lain *Awaamil sa'ah wa al-muruunah fii al-syariah al-Islamiyah* (Elemen-Elemen Fleksibilitas dalam Syariah Islam).¹¹³

¹¹³ Ibid.

Qardhawi telah mengemukakan pandangannya secara terbuka bahwa gerakan dakwah Islam pada masa ini dan masa akan datang hendaklah memahami serta melakukan implikasi "Fiqh al-Aulawiyat" dalam Gerakan Dakwah. Menurut Qardhawi, hilangnya dimensi Fiqh al Aulawiyat di kalangan para dai telah mengakibatkan pelbagai kehilapan dan kekeliruan dalam mempraktekkan gerakan dakwah. Qardhawi telah mampu menyetengahkan orientasi model gerakan dakwah Islam dalam dua buah bukunya, yakni al-Aulawiyat al-Harakat al Islamiyah fi al-Marhalati al-Qadimah (Keutamaan dalam Gerakan Islam Pada Tahun Mendatang) dan Fiqh al-Aulawiyat Dirasatun fi Dhawi al-Quran wa Assunnah an Nabawiyyah (Fiqh Al-Aulawiyat satu kajian dari perspektif Islam Quran dan Sunnah).

Menurut Qardhawi, fiqh al Aulawiyat itu dapat meletakkan suatu pertempatan dengan adil. Segala jenis hukum hakam, amal dan nilai-nilai dalam Islam secara komprehensif. Muslim yang terikat oleh fiqh al Aulawiyat, segala pemikirannya harus didasarkan kepada prinsip mengutamakan suatu perkara ke atas suatu perkara yang lain. Artinya, suatu yang kurang penting tidak wajib dipentingkan Apa yang wajar didahulukan hendaklah diketengahkan, suatu yang wajar dikemudiankan hendaklah dikemudiankan, perkara yang kecil tidak wajar dibesar-besarkan, sementara perkara yang penting tidak wajar dipermudah. Dengan kata lain, perkataan tiap-tiap suatu hendaklah diletakkan pada tempatnya secara berimbangan. Landasannya, menurut Qardhawi, adalah firman Allah S.w.t "Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Surah Ar-Rahman, Ayat 7-9).

Bagi Qardhawi, perkara asas dalam hal di atas ialah semua aspek hukum, amal, nilai dan taklif harus dipahami idak berada dalam suatu susunan yang sama. Justeru itu Al Quran mengemukakan argumentasi yang amat kuat seperti yang terdapat dalam surah at-Taubah, ayat 19-20, Allah Swt berfirman: "Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan menguruskan Masjid Al Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-

orang yang beriman dan berhijrah di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orangnya yang mendapat kemenangan".

Sementara Rasulullah S.a.w bersabda: "Iman itu mempunyai 70 cabang yang tertinggi ialah kalimah La Ilaha Illallah dan yang paling rendah ialah mencabut duri di atas jalan" Para sahabat telah mengemukakan persoalan kepada Rasulullah Saw tentang jenis amal yang paling penting. Kemudian Rasulullah menjawab dengan kata-kata seperti: Kehilangan dimensi aulawiyat. Dalam kehidupan umat adalah salah satu faktor yang mengakibatkan kedhaifan umat Islam pada masa kini ialah kehilangan pertimbangan golongan yang berpendidikan dan golongan awam terhadap Fiqh al Aulawiyar. Bintang masyarakat pada masa modern ini bukan ilmuwan atau penulis, mereka kalangan muda telah menjadikan artis-artis sebagai idola Apabila seorang ilmuwan meninggal dunia, media tidak memberikan liputan penting apapun. Fenomena tersebut jelas membuktikan tidak ada prioritas dalam masyarakat sekarang, mana yang dikatakan prinsip dan tidak berprinsip atau yang lebih penting dari yang kurang penting.

Dalam hal ini Qardhawi menegaskan bahwa masyarakat sekarang harus juga memahami Fiqh al Muaznah. maksudnya Fiqh al Muaznah ialah kepunyaan seorang individu yang berkelayakan untuk membuat pertimbangan memilih di antara masalih dan manafi' atau al-akhirah al-masru'ah. Fiqh al Muaznah juga bermaksud untuk memilih mana yang dikatakan mafasid dengan mudhar Begitupun Fiqh al Muaznah dapat memberi ruang untuk membuat pertimbangan yang paling tepat dalam memilih di antara perkara yang masalih dan mafasid. Dalam kategori yang pertama, prinsip-prinsip dharurriyyat, hajiati dan tahsinat adalah penting dikaitkan dengan fiqh al Aulawiyat. Bahkan dalam konteks dharuriyyat agama (al-Din) dijadikan sebagai prinsip terpenting dari prinsip lainnya, seperti; an-nafs, an-nasl, al-akal, al-amal dan al-maslahah.

Dalam gerakan dakwah masa kini, Qardhawi mengingatkan para dai agar memahami dengan jelas dan tepat apa yang dikatakan al Aulawiyat fi majal al Islah. Di antara isu-isu yang mesti dipertimbangkan dengan adil dan cermat ialah keutamaan gerakan intelektualisme, keperluan (kewajipan) mewujudkan aliran

alwasitah, melaksanakan hudud dan mengaulawiatkan pendidikan penerangan tentang Islam.

Selanjutnya, sebagai seorang faqih, Qardhawi senantiasa melakukan proses ijtihad. Di dalam ijtihad fikihnya, Qardhawi telah berhasil membuat sebuah formulasi baru dalam memperlakukan fikih, terutama ketika ia berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Di antara formula yang dibangunnya adalah mengenai perlunya dibangun sebuah fikih baru (fiqh jadid) yang akan dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan baru umat. Walaupun demikian, yang dimaksudnya dengan fiqh tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum-hukum ju'ci yang diambil dari dalil-dalil terperinci (tafshili) seperti persoalan-persoalan thaharah, shalat, zakat dan lain sebagainya, bukan pula hanya merupakan sebuah sistem ilmu dalam islam. Lebih dari itu, seraya mengutip al-Ghazali, yang dimaksudnya dengan kata 'fikih' adalah merupakan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, yaitu al-Fiqh (fikih) sebagai al-Fahm (pemahaman).¹¹⁴ Adapun fikih baru yang berusaha dibangunnya antara lain adalah karakter fikih yang pemikirannya berpija pada:

a. keseimbangan (fiqh al-Muwazanah). Yang dimaksudnya dengan fikih keseimbangan (muwazanah) adalah sebuah metode yang dilakukan dalam mengambil keputusan hukum, pada saat terjadinya pertentangan dilematis antara maslahat dan mafsadat atau antara kebaikan dan keburukan. Oleh karena menurutnya, di zaman sekarang ini sudah sangat sulit mencari sesuatu yang halal seratus persen atau yang haram seratus persen. Menurutnya, dengan menggunakan sistem fikih seperti ini, kaum muslimin dapat memahami: Pada kondisi seperti apakah sebuah kemudaratan kecil boleh dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar, atau kerusakan temporer yang boleh dilakukan untuk mempertahankan kemaslahatan yang kekal, bahkan kerusakan yang besar pun dapat dipertahankan jika dengan menghilangkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.¹¹⁵

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah al Mu'assasah, (Beirut Mu'assasah Risalah, 1997), h. 26.

¹¹⁵ Yusuf Qardhawi Al-Siyasah al-Syar'iyah fi dha'i mushuh al-Syari'ah wa maqashidiha, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), h. 228.

b. fikih realitas (Figh Waqi'i). Yang dimaksudkannya dengan fikih waqi'i adalah buah metode yang digunakan untuk memahami realitas dan persoalan-persoalan yang muncul di hadapan kita, sehingga kita dapat menerapkan hukum sesuai dengan tuntutan zaman.¹¹⁶

c. fikih prioritas (Fiqh al-Aulawiyat). Yang dimaksudnya dengan fikih prioritas adalah sebuah metode untuk menyusun sebuah sistem dalam menilai sebuah pekerjaan, mana yang seharusnya didahulukan atau diakhirkan. Salah satunya adalah bagaimana mendahulukan ushul dari furu, mendahulukan ikatan Islam dari ikatan yang lainnya, ilmu pengetahuan sebelum beramal, kualitas dari kuantitas, agama dari jiwa serta mendahulukan tarbiyah sebelum berjihad.

d. fiqh al-Maqashid al-Syari'ah, yaitu sebuah fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Pada teknisnya, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash syar'i yang juz'i dalam konteks maqashid al-Syari'ah dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat¹¹⁷la mengutip Ibn Qayyim yang mengatakan, bahwa prinsip utama yang menjadi dasar ditetapkannya syari'ah adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, maka seluruh kandungan syari'ah selalu berisi keadilan, kasih sayang Tuhan dan hikmah-Nya yang mendalam. Dengan demikian, segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kelaliman, kekejian, kerusakan ketidakbergunaan, maka pasti ia bukanlah syari'ah.¹¹⁸

e. fikih perubahan (Fiqh al-Tagyir). Ia adalah sebuah metode untuk melakukan perubahan terhadap tatanan masyarakat yang tidak Islami dan mendorong masyarakat untuk melakuakn perubahan tersebut.

Selain itu, kontribusi pemikiran lain yang diberikan Qardhawi dalam bidang fikih adalah bagaimana mencairkan kejumudan umat Islam dalam menghadapi zaman. Menurutnya, salah satu penyebab kejumudan tersebut adalah berhentinya kreativitas umat dalam berjihad yang merupakan dapur utama kemajuan mereka

¹¹⁶ Ibid, h. 30.

¹¹⁷ Ibid, h. 231.

¹¹⁸ Ibid, h. 232.

Dari masa ke masa, persoalan umat selalu berkembang, terutama setelah terjadinya inovasi-inovasi baru dalam bidang sains dan teknologi, sementara seperti kaum muslimin sangat faham, jumlah ayat al-Quran dan hadits nabi, sampai kiamat mustahil akan bertambah. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut kecuali melalui jalan ijtihad yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama ajaran Islam.¹¹⁹

Menurutnya, melakukan ijtihad adalah merupakan sebuah kewajiban agama kolektif (*fardlu kifayah*), artinya pada setiap zaman harus ada seseorang yang mampu dan mau melakukannya, bahkan bagi mereka yang sudah mencapai kemampuan untuk melakukannya, ijtihad adalah merupakan sebuah kewajiban individual (*fardhu am*).²⁸ Meskipun demikian, menurut Qardhawi, dalam melakukan ijtihad kontemporer, terdapat beberapa kode etik ijtihad yang harus menjadi acuan utama para mujtahid, baik yang berhubungan dengan para mujtahid (sebagai subjek) maupun yang berhubungan dengan tema persoalan (objek). Kode etik yang berkenaan dengan para mujtahid antara lain:

a) Dalam melakukan ijtihad, hendaknya seseorang telah memiliki perangkat-perangkat utama yang diperlukan dalam berijtihad. Perangkat-perangkat tersebut antara lain: harus memahami bahasa Arab, memiliki pengetahuan yang memadai mengenai al-Quran dan sunnah, ushul fikih serta memiliki keahlian dalam beristidlal. Syarat lain yang tidak kalah penting adalah agar seorang mujtahid benar benar memahami kondisi zamannya, sehingga ia dapat menetapkan sebuah hukum yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Dengan demikian, maka seorang mujtahid tidak akan menjadi masyarakat elit. yang berada di menara gading, dan keputusan hukum yang diambilnya jauh dari realitas umat, dengan istilah lain mujtahid *fi wâdin* dan realitas umat *fi wâdin ákhar*. Artinya, dalam menentukan hukum, ia tidak akan memandang sebuah kasus hanya sebagai kasus yang berdiri sendiri tanpa melihat latar belakang dan faktor-faktor penyebabnya Ia mencontohkan hal ini dengan ijtihad Ibn Taimiyah. Pada saat Ibn Taimiyah bersama beberapa orang muridnya melewati barak tentara Tatar, beliau mendapatkan mereka sedang pesta

¹¹⁹ Yusuf Qardhawi. *Min ajli Shahwah Rasyidah*. (Kairo: Dar al-Syurq, 2001), h 49
Ibid, h 44.

mabuk. Tentu saja para murid Ibn Taimiyah tidak dapat menerima kenyataan ini. Akan tetapi kepada para muridnya Ibn Taimiyah berkata: "Biarkan saja mereka tenggelam dalam mabuk dan khamar. Allah telah mengharamkannya karena ia dapat menghalangi seseorang dari dzikir dan shalat, tetapi saat ini kita lihat khamar telah menghalangi mereka dari melakukan pembunuhan dan peperangan".¹²⁰

b) dalam melakukan ijtihad, hendaklah seorang mujtahid selalu independen dan tidak berada di bawah tekanan pihak manapun.

c) hendaknya ijtihad yang dilakukan hanya pada wilayah-wilayah yang dzanni, baik dzanni dilalah maupun dzanni al-Tsubit. Dengan demikian kita tidak diperkenankan untuk berijtihad pada persoalan-persoalan yang qathi, karena persoalan yang didasarkan pada dalil gath'i, bukan merupakan wilayah ijtihad.

d) ijtihad dapat dilakukan baik dalam tema-tema yang benar-benar baru (ijtihad insya'i) maupun dalam memilih pendapat yang argumennya paling kuat, paling sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah dan paling maslahat bagi umat.¹²¹

Selanjutnya, dalam karyanya yang berjudul "Malaamihu al Mujtama' al Muslim alladzi Nasyuduh", Qardhawi telah menegaskan akan pentingnya masyarakat Islam untuk berperan dalam masya'ir Islamiyah. Dalam hal ini, Qardhawi menyebutkan bahwa tugas masyarakat Islam meliputi:

1. memperkuat masya'ir itu dan meluruskannya serta menyebarkannya dengan segala sarana penerangan dan pendidikan, seperti masjid, sekolah, buku, surat kabar, radio, televisi' dan teater serta seluruh sarana yang dapat merealisasikan tujuan Islam.

2. mewujudkan perasaan yang Islami dalam realita yang bisa dirasakan masyarakat dan dalam kondisi-kondisi yang strategis.

3. hendaknya masyarakat Islam tidak memberi kesempatan kepada segala sikap yang bertentangan dengan Islam dengan memunculkan dan mempengaruhi dalam masyarakat Islam, bahkan akarnya harus dicabut sehingga tidak akan muncul, dan mengusirnya jika muncul sehingga akan mati dalam

¹²⁰ Ibid, h. 46.

¹²¹ Yusuf Qardhawi. Syari'ah al-Islam. (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, tt), h.110.

sarangnya. Dalam hal ini, kaum muslimin dapat melihat Rasulullah S.aw membebaskan dirinya dari ashabiyah (kesombongan) yang menghilangkan ukhuwah Islamiyah dan Nabi memerangnya dengan terus terang dan tegas karena khawatir terhadap masyarakat Islam yang baru kalau dirusak oleh qabilah jahiliyah yang berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama. Rasulullah bersabda: *"Barangsiapa yang berperang di bawah bendera kesombongan di mana ia mengajak untuk berbangga, dan mendukung karena kesombongan, lalu ia terbunuh maka matinya mati jahiliyah."* Ketika ada seorang Yahudi jahat berhasil membangkitkan semangat kesombongan jahiliyah antara Aus dan Khazraj pada suatu hari maka Rasulullah memadamkan api fitnah dengan cahaya iman dan mengembalikan mereka pada persaudaraan Islam.

4. hendaknya masyarakat Islam menutup jendela yang berhembus darinya angin permusuhan dan perpecahan, dan berusaha memberantas berbagai faktor yang merusak nilai-nilai persaudaraan Islam dan merobohkan perasaan yang Islami (solidaritas Islam). Sebab rahasia Islam mengharamkan ghibah (menggunjing), mengadu domba, menghina terhadap orang lain dan memasukkan itu semua sebagai kerusakan moral yang merobek tali dan membunuh ruh mahabbah di antara manusia. Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu dan yang paling dekat dariku di akhirat adalah yang paling baik akhlaqnya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di akhirat adalah orang yang paling burak akhlaqnya, mereka itulah orang-orang yang tsar-tsaruun, mutafaiqihuun, dan orang-orang yang mutasyaddiquun." Dari sinilah Islam mengingkari perbedaan yang tajam antara individu dan kelompok-kelompok, di mana terdapat kemiskinan yang menonjol di sisi kekayaan yang luas, kemewahan yang berlebihan di sisi ketiadaan yang menyedihkan, karena tidak tergambar dalam kehidupan bersaudara antara si kaya yang tenggelam dalam kenikmatan dan si miskin yang selalu merintih karena kelaparan dan kehausan.¹²²

¹²² lihat: <http://members.tripod.com/-tesur/islam/qardhawi>

Dalam mewujudkan masya'ir Islamiyah, Qardhawi telah merumuskan secara sistematis pada karakter pemikirannya tentang harakah dan shahwah Islamiyah, khususnya mengenai manhaj dakwah Islam. karya-karya utama Qardhawi dalam bidang harakah dan shahwah Islamiyah, selalu diarahkan kepada upaya memperkokoh gerakan masya'ir Islamiyah tersebut. Di antara karya karyanya yang diarahkan kepada tujuan tersebut adalah al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhid wa al-Tatharruf, al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al Masyru' wa al-Tafarruq al-Madzmum, al-Shahwah al-Islâmiyyah wa Humim al Wathan serta Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah. Pada empat karya tersebut, Qardhawi berusaha keras membuat batasan-batasan etis yang harus dipegang dalam menjalankan tanggung jawab harakah, serta mengobati penyakit yang biasanya menghingapi para aktivis harakah. Secara umum pemikiran Qardhawi dalam manhaj dakwah Islamiyah¹²³ tersebut adalah:

Pertama, gerakan dakwah Islam harus berpijak pada kajian mendalam tentang tiga hal, yakni: Murabhi (pendidik), Manhaj (metode), dan Bi'ah (lingkungan). Sebab menurut Qardhawi, dalam konteks pembentukan masyarakat Islam peranan dan pengaruh ketiga hal tadi sangat kuat. (1) Murabbi memegang peranan teramat penting dalam proses Islamisasi masyarakat. Seorang Murabbi berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah akan senantiasa memegang pembinaan spiritual (Takwimul Ruhiyah) sebagai kunci dari semua aktivitas. Seorang Murabbi yang memiliki khittah (garis perjuangan) yang jelas tidak akan terpengaruh oleh godaan-godaan dari luar. Ia merumuskan konsep tarbiyah secara sistematis dan metodologis. Dimulai dari niat yang ikhlas dan bermental mujahid, seorang murabbi akan senantiasa sabar dalam bergerak dan berjuang; (2) manhaj, keberhasilan dakwah yang amat tergantung dari penataan sistem yang jelas dan terprogram rapi (manhajji). Bermula dari mengenal Allah dan seluruh sifat sifatnya (Ma'rifatullah). Tingkat ini merupakan garis pemisah antara mereka yang masih jahiliah dalam arti luas dengan mereka yang sudah mau dan mampu. memahami

¹²³ lihat: Ibnu Hilmi Ariel (ed), Da'wah Manhaji (Jakarta Tanzhim Pres, 1993), hal. 13-46.

kunci atau prinsip Islam dalam suatu tahapan dakwah (Marhalah Dakwah) yang sistematis, manhaj pembinaan tidak sekedar mengerti (kognitif ma'rifah) akan prinsip-prinsip Islam, melainkan juga terus berkelanjutan pada pembentukan fikrah (pola pikir) Islam. Fikrah Islam ini merupakan kunci pembuka bagi terlaksananya suatu gerakan (Harakah) Islam. Dari sisi ini patut dipertanyakan mengapa banyak ormas Islam yang nota-bene merupakan gerakan Islam tapi belum tampak pengaruhnya justru ke dalam organisasinya sendiri (intern)? Agaknya jawaban sederhana adalah karena para pelaku dakwah di sana masih belum memiliki fikrah Islami. Mungkin dalam soal ritual cukup aktif, tapi dari segi lain (masalah sosial kemasyarakatan, misalnya), fikrah Islam itu belum tampak. Pola pikirnya masih sekuler kapitalistik, sekuler humanistik atau sekuler eksistensialistik untuk tidak menyebut komunistik; (3) bi'ah, yang di dalam proses dakwah memegang peran penting juga. Artinya lingkungan keberadaan hidup umat Islam memang sampai hari ini belumlah mendukung terciptanya suatu masyarakat yang egaliter, adil dan bermoral. Apalagi dengan arus kebudayaan impor yang makin bebas. Semua nilai dan institusi baru yang munkar tumpang tindih dengan nilai-nilai positif. Akibatnya batas menjadi tidak jelas atau samar-samar. Karena itu proses dakwah yang fakih (dakwah Manhaji) tentu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, termasuk segi-segi lainnya dalam keseluruhan proses dakwah.

Kedua, seorang aktifis dakwah harus memandang bahwa Islam adalah Dien Risalah dan Dakwah.¹²⁴ Dari konteks totalitas dan universitas Islam, maka seluruh proses aktivitas penyebaran Islam dapat disebut sebagai proses dakwah. Karena itu pada hakekatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa (syu'ur), berfikir (fikrah), bersikap (mau'rif) dan bertindak (suluk) manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu (Manhaj).

¹²⁴ lihat: QS. 34:28, 16:125

Ketiga, tujuan akhir dari setiap proses dakwah merupakan tujuan dari Dienul Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil a'alamin. Yakni tujuan vertikal berupa suatu kehidupan yang diridhai Allah¹²⁵ dan tujuan horisontal, berupa (a) kebahagiaan di dunia dan akhirat dan (b) rahmat bagi sesama manusia dan alam semesta¹²⁶. Sedangkan dari segi satuan lingkungannya, maka dakwah Islam harus dapat membentuk: Syakhshiyah Islamiyah, terwujudnya pribadi yang diridhai Allah, yaitu pribadi muslim yang paripurna yang taqwa kepada Allah SWT.¹²⁷ Usrah Islamiyah, terwujudnya rumahtangga yang siridhai Allah, yaitu rumahtangga yang sakinah (tentram) penuh mawaddah dan rahmah anugerah Ilahi",¹²⁸ Ijtima'iyah Islamiyah, terwujudnya qaryah (lingkungan kampung, kampus, kantor dsb) yang diridhai Allah, yaitu qaryah yang kondusif dan layak menerima berkah Allah dari pelbagai arah, disebabkan warganya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,¹²⁹ Daulah Islamiyah, terwujudnya negara yang diridhai Allah, yaitu baldah thayyibah yang diliputi maghfirah Allah SWT,¹³⁰ dan, Alam Islamiyah, terwujudnya dunia yang diridhai Allah, yaitu dunia yang hasanah dan berkesinambungan dengan akhirat yang hasanah pula.¹³¹

Keempat, seorang da'i harus mengetahui pola-pola dakwah, diantaranya: 1) Tabligh¹³² (Informasi). Pola ini merupakan dakwah bersifat terbuka massal dan umum. Tujuannya adalah mengenalkan al-Islám secara pintas, menarik dan populer. Contoh kegiatannya, seperti: ceramah umum, diskusi panel, tabligh tkbar, pameran seni budaya Islam, dll. Pola ini merupakan tahapan masa mengubah tidak tahu (Juhala) Islam menjadi tahu (Ma'rifat) Islam, 2) Ta'lim (Pengajaran dan Pendidikan).¹³³ Pola ini merupakan proses dakwah yang bersifat selektif, tetap dan terbatas. Tujuannya adalah menambah ilmu-ilmu tentang Al-Islam dan dapat disebut sebagai masa pembentukkan dari sikap tahu Islam (Fikrah Islamiyah)

¹²⁵ lihat: QS 2.207-365, 6:162-168, 19.6.

¹²⁶ lihat QS 28 77, 7:156 dan QS. 21: 207.

¹²⁷ lihat QS. 2-22-28, 207

¹²⁸ lihat: QS. 20:21.

¹²⁹ lihat QS. 7.96.

¹³⁰ lihat QS. 34:15.

¹³¹ lihat QS. 34:15. lihat QS. 88.77, 7:156.

¹³² lihat: QS.5: 67

¹³³ lihat: QS 2:151

Contohnya seperti, kegiatan majlis-majlis ta'lim, mentoring, kuliah Al-Islam dsb, 3) Takwin¹³⁴ (Kaderisasi). Pola ini merupakan bentuk dakwah yang bersifat khusus, selektif dan doktriner. Tujuannya adalah mencetak sejumlah kader mujahid dakwah dalam tiap pribadi muslim. Masa ini adalah mengarahkan pola pikir Islami menjadi sebuah aktivitas atau gerakan (Harakah)¹³⁵ yang Islami dan berorientasi pada pengkaderan muslim. Contohnya seperti, kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), Studi Aqidah Islam, Training Manajemen Remaja Mesjid, dll; 4) Tanzhim (Konsolidasi) atau (Harakah Natijah). Pola ini merupakan bentuk dakwah yang bersifat konsolidasi, administratif, ideologis dan organisasional. Masa ini adalah menjadikan gerakan Islam menjadi mempribadi dalam hati muslim, yang meliputi: menyatukan shaff, konsolidasi aktivitas/program, mendekatkan kesatuan. Contoh kegiatannya, seperti: Usrah, Pembinaan Pasca Training, Job Training. Pada tahap inilah kader muslim diberikan wawasan pergerakan (Nazhariyatul Harakiyah), dan; 5) Tanfidz (Operasionalisasi) atau (Natijah Ghayah).¹³⁶ Pola ini merupakan bentuk dakwah yang bersifat konkrit, amaliyah nyata dan mandiri. Masa ini adalah menentukan hati nurani muslim mencapai cita-cita al-Islâm terbentuknya masyarakat adil makmur penuh ridha Allah SWT. Pada tahap inilah seorang kader manusia akan mampu mengembangbiakkan lahan dakwah seluas-luasnya dengan berbagai program yang nyata, bil hal, bil lisan dan bil kitabah.

Kelima, seorang da'i harus memahami karakteristik dakwah Islamiyah. Karakteristik ini sebagai pijakan global dalam menjalankan berbagai aktifitas dakwah sebagai proses melakukan perubahan lingkungan individu manusia dan lingkungan sosial-kemasyarakatan, diantaranya meliputi:

a) Rabbaniyah (Berketuhanan)

Maksudnya, bahwa dakwah Islam harus berangkat nilai-nilai Ilahiyah murni tanpa diiringi maksud-maksud tertentu dari sang da'i. Jangankan Juru Dakwah, Nabi saja yang mendapat wahyu dari Allah SWT tidak diperkenankan memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam menjalankan tugasnya.¹³⁷

¹³⁴ lihat: OS 3:104, 2:9, 112

¹³⁵ lihat QS 3:103, 61:4

¹³⁶ lihat: QS. 9: 105.

¹³⁷ lihat: QS. 3:37

b) Islamiyah Qabla Jam'iyah (kehidupan Islam sebelum masuk Jama'ah)

Maksudnya, seorang muslim harus memacu dirinya dengan amal-amal Islami semaksimal mungkin sebelum memasuki kehidupan berjama'ah. Sebab kehidupan berjama'ah akan fungsional apabila didalamnya terdiri dari mereka yang memiliki komitmen moral dan operasional dengan Islam secara baik dan benar. Ini menjadi karakteristik dakwah yang akan mengendalikan peradaban Islam. Hal ini disitir dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

"Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka sujud dan ruku'mencari karunia Allah dan keridhaannya tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikian sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat sifat mereka dalam Injil, itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu besarlah dia dan tegak lurus diatas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengalkan hati orang arang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu'min). Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal shalih diantara mereka ampunan dan pahala yang besar."¹³⁸

c) Syamilah Ghairu Juz 'iyah (menyeluruh tidak parsial)

Dakwah Islam harus menyentuh seluruh sektor kehidupan, karena pada hakekatnya seluruh yang ada di langit di bumi tunduk pada hukum-hukum Allah (Sunnatullah). Dakwah yang menyeluruh bisa terwujud apabila didukung oleh orang-orang yang memasuki Islam secara menyeluruh pula. Ada sebagian kelompok yang itu sangat mengabaikan aspek aqliyah, jasadiyah serta usaha usaha ke arah pembentukan masyarakat Islam. Sebagian kelompok mengutamakan segi aqliyah dengan mengabaikan aspek-aspek lainnya. Selain itu masih ada lagi kelompok yang sangat antusias untuk mendirikan Khilafah Islamiyah tetapi menafikan aspek-aspek lainnya. Ketiga jenis kelompok di atas tadi menggambarkan

¹³⁸ lihat: Q.S.48:29

metoda dakwah yang syamil (menyeluruh) tetapi sebaliknya mencerminkan sifat juz 'iyyah (parsial).

d) Mu'ashirah Ghairu Taqlidiyah (Seiring dengan perkembangan zaman/kontemporer tidak statis

Dakwah Islam harus mengiringi setiap proses Islamisasi di setiap disiplin ilmu. Di sini, ia berbeda dari sementara cendekiawan muslim kontemporer yang cenderung sekaligus bangga melakukan Islamisasi dengan metoda asing atau katakanlah dari warisan ilmu Sikap selanjutnya yang muncul ialah penyakit pengagungan setiap yang "lama". Sifat yang lama ini menambah keagungan suatu amal sehingga menghalangi dari kritikan dan analisa Tumpukan berbagai ilmu dan praktek kehidupan sepanjang abad yang lalu telah menjadi turats (peninggalan budaya) besar yang dalam pandangan manusia bercampur dengan dasar-dasar pokok agama dan ketentuan-ketentuan syari'at dan selanjutnya tidak bisa dikritik, diteliti dan dianalisa apalagi ditolak, ditentang ataupun dicela.

Islam merupakan agama yang tidak mungkin dilepaskan dari masalah masalah kontemporer. Di bidang kehidupan manapun Islam senantiasa mengambil peranannya. Karena Islam bukan semata-mata agama dengan seperangkat ibadah ritual. Tetapi kebanyakan orang berburuk sangka kepada Islam. Mereka menganggap bahwasanya Islam tidak memiliki konsep ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi dan sebagainya. Tetapi setelah konsep yang mereka pakai hancur lebur mereka mulai mencari alternatif-alternatif lain. Atau secara kurang ajar menanyakan kepada islam tentang usaha perbaikannya. Padahal jika mereka memakai konsep Islam, Insya Allah mereka tidak hancur lebur seperti sekarang ini.

Peradaban Barat baru berpengaruh lebih kurang 200 tahun yang lalu. Banyak bukti menunjukkan bahwa Barat sudah mulai menurun dari puncak kejayaannya. Tokoh-tokoh pemikir dan filosof Barat sendiri sepakat mengatakan bahwa permulaan dari akhir Barat sudah datang Yang menjadi masalah: Sewaktu Barat sedang menuju kehancuran, umat Islam juga ikut hancur. Barangkali hal ini berlangsung sangat cepat sekali. Sungguh pun demikian sumber satu-satunya untuk peradaban pengganti hanya Islam.

Maka setiap kaum muslimin diminta kontribusinya di dalam memainkan peranannya dalam membangun peradaban Islam. Proyek raksasa semacam ini tidak mungkin mencapai sasaran jika dilaksanakan secara individual (infiradhi), tetapi ia harus berjalan di atas kerja kolektif (amal Jama'i), jika pemikir-pemikir muslim berkumpul merekalah yang akan mengemudikan kendaraan, karena pemikiran mereka berpengaruh kepada seluruh publikasi, surat kabar dan majalah kelompok yang mereka ikuti. Banyak kelompok Islam masa kini yang tidak mempelajari sumber-sumber asli. Dengan demikian tanggungjawab pemikir Islam lebih besar lagi. Mereka menjadi sumber ilmu dan fatwa, dan mereka pembawa pendapat dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu tanggungjawab pertama yang terletak di pundak para pemikir Islam adalah meninggalkan "toga", yakni ketergantungan pemuda dari diri mereka dan menghubungkannya langsung kepada sumber asli, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, fiqh dan sejarah. Namun bukan berarti para pemikir saja yang dimintai kontribusinya di dalam pembangunan peradaban Islam. Semua lapisan wajib menyumbangkan yang terbaik dari dalam dirinya untuk kemajuan Islam.

e) Mahaliyah Wa 'Alamiyah (Lokal dan Internasional)

Dakwah Islam (Gerakan Islam) harus bersifat Internasional karena musuh Islam juga bersifat Internasional. Ada kelompok Islam yang pesimis, bahkan tidak percaya pada Pergerakan Islam yang berskala Internasional. Ketidakpercayaan mereka disebabkan oleh ruang lingkup wawasan berfikir, kapasitas intelektual dan sistem gerakan yang terbatas pada skala nasional. Hal ini disebabkan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.

Ada lagi sebagian pendapat yang menafikan atau menolak adanya Internasionalisasi gerakan Islam ini dengan alasan setiap negara mempunyai problematika yang spesifik. Maka hanya gerakan Islam yang ada di negara itu saja yang sanggup menyelesaikan persoalannya. Selintas pendapat ini tampak benar, tetapi bila dikaji agak dalam maka ada beberapa hal yang harus dijelaskan.

Memang setiap gerakan Islam di masing-masing negara mempunyai persoalan yang berbeda dengan negara lain dalam kerangka nasionalnya. Hal ini karena setiap negara memiliki ciri khasnya dalam sistem kehidupan bernegara.

Namun, bukan berarti gerakan Islam di negara tersebut harus berkebutuhan dengan persoalan negerinya. Ia juga wajib memikirkan nasib saudaranya yang ada di negara lain, sebab menurut hadits Rasulullah SAW setiap mukmin yang satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh, apabila salah satu anggotanya sakit maka anggota yang lainnya akan merasakannya.

Untuk itulah Gerakan Islam Internasional berfungsi sebagai pengarah (Syathurah) bagi Gerakan Islam Internasional terdapat garis perjuangan (Khittah), sasaran (Ahdaf), metode (Manhaj), tujuan (Ghayah) dan hal-hal yang berhubungan dengan sistem penegakkan syari'at Allah yang dijadikan pedoman bagi Gerakan Islam di setiap negara. Walau demikian, Gerakan Islam Internasional dapat mentolerir ciri masing-masing dari gerakan Islam Nasional, seperti masalah suku, ras, ekonomi, budaya dan sebagainya.

f) Ilmiah (Keilmuan)

Ilmiah yang dimaksud di sini mencakup sistematika, obyektifitas dan metodologi dakwah. Dengan kata lain dakwah Islam harus sistematis setidaknya dalam penyampaian dan dalam isi. Sehingga obyek dakwah menerima dengan puas hati secara obyektif (apa adanya). Yang haq dikatakan haq, yang bathil dikatakan bathil Yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram Diterangkan secara gamblang sesuai dengan tingkat pemahaman madu dakwah yang metodologis merupakan salah satu ciri dakwah yang ilmiah. Dengan sifat keilmiahannya sebaliknya tidak doktriner maka akan menanamkan suatu kesadaran Islam (tau'iyah Islamiyah), bukan dendam, kecemburuan ataupun emosi.

g) Basyirah Islamiyah

Basyirah Islamiyah sekurang-kurangnya mengandung tiga pengertian Pertama, memiliki bukti-bukti yang lengkap yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti ditegaskan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut: *"Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. maka barangsiapa melihat (kebenaran itu) maka (Manfaatnya) bagi dirinya sendiri, dan barang siapa*

buta (tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara(mu)".

Basyirah Islamiyah juga harus mencakup beberapa hal, diantaranya

1) Materi Dakwah (Maudhu' Dakwah). Maka bagi seorang da'i dituntut harus mengetahui tentang hukum-hukum syari'at (fiqhul ahkam), yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat hala, haram, makruh mubah, syubhat dan lam lain. Sebab hal ini merupakan pokok-pokok yang sering ditanyakan oleh mad'u. Da'i harus berani mengatakan yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, Pernyataannya tidak boleh hasil pesanan dari pihak-pihak tertentu. selain itu dia juga harus mengerti tentang minhaj (hal ini termasuk dalam kategori fiqhud dakwah). Di sinilah perbedaan antara hukum syari'at dengan minhaj. Jika dalam hukum syari'at (fiqhul ahkam) membicarakan boleh tidaknya sesuatu dilakukan, tetapi dalam fiqhud dakwah menyangkut bisa tidaknya sesuatu dilakukan. Contohnya adalah masalah potong tangan. Jika tidak ada pertimbangan fiqhud dakwah berpatokan dengan fiqhul ahkam berapa banyak mereka yang harus menjalani hukuman ini. Di sinilah peranan minhaj (fiqhud dakwah) dalam melihat satu persoalan. Karena saat ini banyak da'i yang menguasai persoalan-persoalan hukum, tetapi buta dalam memahami fiqhud dakwah.

2) Kondisi obyektif mad'u. Kondisi mad'u yang harus diperhatikan sang da'l sebelum ia berdakwah, diantaranya usia, tingkat pendidikan, profesi, dari kalangan ahli kitab atau bukan dan seterusnya. Pengetahuan Da'i tentang hal hal ini akan melahirkan kebijaksanaannya dalam berdakwah. Dia tidak akan main hantam kromo. Sebaliknya dia akan mengukur setiap ucapannya sesuai dengan tingkat usia, profesi dan tingkat pendidikannya Ini mutlak dan perlu diperhatikan mengingat banyak da'i yang kurang mempertimbangkan segi ini, akibatnya timbul istilah muballigh tubruk lari Dan Rasulullah SAW sendiri memerintahkan kepada kita agar menyampaikan (berdakwah) sesuai dengan bahasa kaumnya Artinya. "Kebijaksanaan seorang da'i sebenarnya sedikit banyak ditentukan dengan penggunaan bahasa yang tidak berlebih-lebihan, disamping tentunya juga penguasaannya tentang hukum-hukum syari'at (3) Cara praktis berdakwah

(Kaifiyatud dakwah). Di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah SWT memberitahukan kepada kita bahwa ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara amal jama' Hadits Nabi yang mengatakan bahwa kalau engkau melihat kemungkaran hendaknya diubah dengan tanganmu, kalau tidak mampu dengan mulutmu, jika masih tidak mampu ubahlah dengan Natimu dan itulah kelemahan-kelemahan iman Bukankah untuk mengubah itu semua dibutuhkan amal jama'i, sebab kemungkaran itu juga terjadi karena konspirasi dari semua kemungkaran Dan dalam amal jama'i harus ada pemimpin yang dipimpin Yang memimpin jangan bersikap otoriter dan yang dipimpin harus ikhlas Mekanisme inilah yang telah dicontohkan Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya Betapa bahagianya sahabat-sahabat beliau sewaktu hidup bersama Nabi, sampai bekas air wudhu'nya diperchutkan oleh para sahabatnya

h) Mang'ah Islamiyah (Kekebalan Islam)

Proses imunisasi merupakan karakteristik selanjutnya, dengan memberikan vaksinasi Jika vaksinasi ini diberikan maka akan melahirkan kekebalan (mun). Kekebalan di sini meliputi beberapa aspek Yang pertama imun dari segi teoritis (Nazhari) Kekebalan teoritis akan menghindarkan kita dari serangan Ghazwul fikri. Karena saat ini cukup dirasakan hebat serangan gharwul fikri dari segala penjuru, serta korbannya terdiri dari segala lapisan, baik dari kalangan awam maupun dari kalangan cendekiawan Jika korbannya dari kalangan awam dampaknya tidak begitu luas, tetapi kalau cendekiawan yang jadi korban dampaknya tidak hanya buat dirinya tetapi meluas ke lapisan masyarakat lainnya. Karena kaum intelektual memiliki pengaruh yang luas Immunitas teoritis juga akan mampu menolak virus yang akan menggerogoti aqidah Islam seorang Muslim. Kekebalan yang kedua dari segi mental (Ma'naw) Kekebalan mental dapat mempertahankan izzah Islamiyah, tidak bisa direndahkan.

Izzah (harga diri) berbeda dengan takabur. Jika takabur mempertahankan kebathilan maka izzah mempertahankan kebenaran. Saat berada di Madinah, Rasulullah SAW sering bertanya kepada sahabatnya, "Siapa yang sudi membela aku maka beberapa hari kemudian seorang sahabat membawa kepala dua orang

Yahudi, ini terjadi karena orang Yahudi menghina Rasul. Kejadian ini membuktikan bahwa para shahabat sangat menjaga nama baik Rasulullah SAW. Mereka tidak rela nama Rasul dihina Kemudian yang ketiga kekebalan aktivitas (Amaliyah). Kekebalan amal ini akan menghindarkan dari obyek bulan-bulanan musuh dan mudah diselewengkan.

Kemudian ketiga, immunitas ini harus didukung dengan orinsip-prinsip dasar Islam (Ma'rifarul Mabda). Pengenalan prinsip-prinsip dasar Islam akan memperkuat kekebalan dari segi teoritis, mentalitas dan aktivitas Pengenalan prinsip ini harus didukung dengan pengenalan fikrah (Ma'rifatul Fikrah), Pengenalan fikrah akan membantu banyak dalam operasionalisasi. Contohnya pada kasus harta rampasan perang Kenapa Allah menyebutkan bahwa harta rampasan perang itu pertama-tama milik Allah dan Rasul-Nya, karena persoalan harta rampasan perang akan berlanjut pada keperluan kaum muslimin pada masa yang akan datang, untuk itulah sejak dini disebut milik Allah dan Rasul-Nya agar management untuk masa berikutnya sesuai dengan juklak (petunjuk pelaksanaan) Allah dan Rasul-Nya. Pemahaman seperti ini berkaitan erat dengan pengenalan fikrah. Contoh lainnya betapa pentingnya pengenalan fikrah ini, ketika Rasulullah berkata shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat, seharusnya tidak hanya berlaku untuk shalat saja. Karena Rasulullah SAW sebagai uswah di semua sektor kehidupan, maka dalam berdakwah juga harus berlaku berdakwahlah kalian sebagaimana kalian lihat aku dakwah, dan juga dalam berharakah berlaku berharakahlah kalian sebagaimana kalian lihat aku berharakah Selain itu, pengenalan minhaj kita akan mengetahui cara-cara menanggulangi serangan dari luar.

Ketiga ma'rifah ini insyaallah akan melahirkan penguasaan teoritis (al Isti'ah al-Nazhari) Agar terjadi immunitas mentalitas maka harus didukung oleh kemaun yang kuat (al-Iradah al-Qawiyah) Kemaun yang kuat merupakan senjata yang ampuh untuk menangkis virus-virus yang akan menyerang mental Di samping itu juga perlu didukung dengan tekad yang konsisten (al-Wafaa al Tsaabat) Sedangkan untuk bidang amali harus ada gerakan yang berkesinambungan (al-Harakah al-

Mustamurah) Gerakan yang kontinyu merupakan konsekuensi logis dari gerakan perusak/pemurtadan (Harakah Al Irtidad) yang juga kontinyu.

i) *Inqilabiyah Ghairu Tarqi'iyah* (Perubahan fundamental bukan tambal sulam)

Perubahan fundamental menyangkut segi-segi penampilan, keyakinan, pemikiran, perasaan mental dan sebagainya. Perubahan fundamental hanya bisa dilakukan oleh gerakan Islam yang menyeluruh pula (syamil). Perubahan seperti ini akan melahirkan pribadi yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan kata lain akan melahirkan pribadi yang memiliki furqan (pembeda), dan kalau furqan ini julas maka muncullals pribadi yang taqwa (Muttaqin)¹³⁹.

j) Murhaliyal (Bertahap)

Karena jalan Dakwah (Thorighud Dakwah) yang akan dilalui begitu berat dan panjang serta sasaran yang ingin dicapai begitu besar dan hibur. Maka akuvitas dakwah yang dijalankan harus melalm langkah-langkah secara bertahap (Marhaliyah). Dengan langkah-langkah bertahap sembari memenuhi hak setiap tahapan, setiap usaha dakwah akan bisa meraih apa yang dicita-citakan Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna pernah menjelaskan tentang Karakteristik Dakwah sebagai berikut: "Garis perjuangannya berfase fase bertahap) memakan waktu lama tidak tergesa-gesa memperoleh hasil dan setiap persoalan telah ada ketentuan (dari-Nya)".

Jika sistem atau metodologi dakwah ini dapat kita terapkan dengan baik, Insy Allah masa depan Islam akan lebih baik daripada hari ini dan akan segera terwujud peradaban modern yang akan dikendalikan Islam seperti yang banyak diramalkan oleh sarjana muslim dan para orientalis yang jujur dalam mengemukakan pendapatnya.

¹³⁹ Lihat Q5 829

Inilah pemikiran Qardhawi yang terpenting yakni telah berusaha memodernisasi model fiqh dan kepentingan masyarakat Islam melalui konsep manhaj dakwahnya. Beliau berpendapat bahwa masyarakat Islam perlu mempunyai perspektif yang baru dalam memahami fiqh. Fiqh yang tidak terlalu kaku dengan takrif yang tradisional semata-mata. Artinya konsep fiqh yang rasional dan lebih komprehensif untuk kepentingan Gerakan Dakwah pada zaman modern ini bukan model fiqh yang mengandung unsur-unsur permasalahan pokok yang telah mengakibatkan kemundurannya kembali ummat Islam Seperti munculnya wujud kelompok "mutaturryf" dalam pemahaman keagamaan dan juga golongan yang "jumud" dari segi pemikiran. Karya Qardhawi yang berjudul "As shahwah al Islamiyat baina al Juhud wat-Tatarruf" (Kebangkitan Islam di Tengah-Tengah Golongan yang Menentang dan Ekstrim) jelas membuktikan hakikat pemikirannya.¹⁴⁰

Berpijak dari alur pemikirannya yang telah disebutkan di atas, maka Qardhawi dapat dikatakan sebagai cendekiawan moderat Sebagaimana kaimnya sendiri, bahwa ia merupakan orang yang menempuh jalan tengah (moderat) dalam segala hal. Qardhawi mengklaim telah menempuh jalan ini sejak awal proses pendidikannya ia menyebutkan Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada saya sejak awal kehidupan pemikiran dan dakwah saya untuk membangun jalan tengah yang didasarkan pada teori keseimbangan yang komprehensif, dan jauh dari sikap ifrath (pengagungan yang berlebihan) dan tafrith (sikap meremehkan yang berlebihan).¹⁴¹

Dalam sebuah kitabnya "al fatwa baina Indhibaath wat Tasayyub", Qardhawi mengemukakan: "Di antara kelebihan jalan tengah (moderat) yang saya tempuh adalah konsisten berpegang pada sikap tengah, sikap adil antara tafrith dan Ifrath, antara orang-orang yang hendak melepaskan diri dari kebebasan hukum yang tetap dengan alasan mengikuti perkembangan orang-orang yang hendak

¹⁴⁰ lihat: <http://www.islam.gov.my/e-rujukan/aula.html>.

¹⁴¹ Sulaiman, op cit, hal 19. thid, hal 20

berpegang teguh dengan semua pendapat yang baru, antara orang-orang yang hendak bernaung di bawah fatwa, ucapan dan keputusan para pendahulu mereka, sebagai upaya mengkultuskan segala yang ada pada masalah lalu Bahkan dalam kitab "Malaamthul Muytama' al-Muslim", ia juga berkata: "Dan kita berkewajiban untuk membangun pemahaman aliran moderat Sedangkan dalam kitab "Ash Sharwah al-Islamiyyah wa Humanmul Wathan al-Arabi wal Islam lebih mempertegas bahwa kajian ini memancarkan sebagian cahaya pada bingkai umum bagi kebangkitan Islam kontemporer, yang tercermin pada aliran-ahirannya yang paling kuat dan paling luas. Itulah yang saya sebut dengan "Aliran Moderat."¹⁴²

C. Pro-Kontra Seputar Pemikiran Moderat Qardhawi

Adalah merupakan salah satu sunnah Allah bahwa kehidupan manusia tidak akan ada yang mencapai kesempurnaan. Tidak ada seseorang yang ide idenya akan selalu mulus diterima tanpa reserve oleh berbagai kelompok. Begitu mula dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Qardhawi, karena selain para pengagum yang selalu terperangah dengan ide-ide briliannya, ada juga kelompok lain yang harus berfikir dua kali untuk menerima ide-idenya, bahkan ada pula yang mencurigai seluruh usahanya Pada dasarnya kritikan yang disampaikan oleh siapa dan kepada siapa pun, akan sangat konstruktif jika dilakukan dengan cara cara yang cerdas dan beradab, sehingga generasi yang akan datang, dapat belajar banyak dari mereka. Akan tetapi, semua itu akan menjadi preseden buruk bagi masa depan umat, jika dilakukan secara emosional dan penuh kecurigaan.

Pada konteks inilah, banyak pihak-pihak yang berseberangan dengan Qardhawi. Di antara para ulama yang mengkritik Qardhawi dengan ilmu dan menghargai seluruh usahanya adalah Syaikh Nashiruddin al-Albani (peneliti hadits terbesar abad 20), Syaikh Abdullah bin Beh dan Syaikh Rasyid al-Ghanusi Untuk mengkritik Qardhawi, Syaikh al-Albani, menulis sebuah buku yang berjudul Ghayal al-Maram fi Takhrij Hadits al-Halal wa al-Haram. Pada buku ini beliau

¹⁴² Ibid, hal.20

berusaha meneliti (fakhrij) kesahihan hadis-hadis yang digunakan Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*.

Selain itu, menurut Isham Talimah, kelompok yang keras mengkritik pemikiran Qardhawi adalah mereka yang menamakan diri sebagai kaum Salafi. Ia telah menemukan ada oknum mereka yang menulis sebuah buku yang berjudul *al-Qardhawi fi al-Mizan*. Buku ini beredar luas di Saudi Arabia. Isham Talimah mengatakan, bahwa ia pernah bertanya mengenai persoalan ini kepada salah seorang pejabat Konsul Saudi Arabia di Qathar. Ternyata ia menjawab bahwa buku tersebut ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal, karena ulama-ulama Saudi sangat respek terhadap Qardhawi. Buku ini telah dijawab dengan ilmiah dan penuh tanggung jawab oleh salah seorang mantan hakim Syari'ah Qathar, Syaikh Walid Hadi.¹⁴³

Secara garis besar mereka yang kontra terhadap pemikiran Qardhawi menegaskan beberapa hal, di antaranya:

- 1) alur pemikiran Qardhawi dengan aliran moderatnya cenderung suka mengampangkan dalam masalah *figh*, meskipun didasari dengan *nash-nash*
- 2) Qardhawi telah membangun pemikiran "Islam Universal". Maksudnya tidak, tidak menganut salah satu paham Islam tertentu, meski kepada *manhaj*

Salafush Shalih atau madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah sekalipun

- 3) metode pemikiran Qardhawi lebih cenderung menggunakan akal dalam memahami *nash-nash* syari'at, sehingga tidak jarang menolak sebagian darinya dan menta wilkan sebagian lainnya di bawah panji "rasionalitas". Dalam kitabnya "*Fataawa Mu'aashirah*", Qardhawi mengungkapkan bahwa senap muslim harus emnjadikan dirinya sebagai tawanan bagi dalil dan hujjah. Hukum apapun

¹⁴³ lihat: <http://www.islam.gov.my/e-rujukan/aula.html>

yang baginya mempunyai dalil kuat, serta akal nya pun bisa menerimanya serta hatinya merasa tenang padanya, maka hendaknya dia mengamalkannya.¹⁴⁴

Demikianlah alasan-alasan yang kontra terhadap pemikiran-pemikiran Qardhawi. Dalam hal ini, khususnya mengenai penguraian akal secara berlebihan dalam fiqh, merupakan persolan yang banyak dikritik oleh para cendekiawan muslim yang kuat terhadap aliran salafi. Akan tetapi, dibalik sikap kontra terhadap pemikiran Qardhawi khususnya pada aspek pengintrepretasian fiqhnya. Secara umum, pemikiran Qardhawi lebih banyak yang pro-nya, khususnya oleh para cendekiawan muda Islam. Hal ini dikarenakan, Qardhawi dalam setiap membangun konsep-konsep pemikirannya mampu menggunakan pendekatan metodologi yang diakui secara ilmiah dan rasional.

¹⁴⁴ Sulaiman, op cit, hal 23-25.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Secara dekat, penggunaan metodologi dalam penelitian ini termasuk hal yang penting.¹⁴⁵ Oleh karena itu, untuk sampai pada penelitian yang ilmiah perlukan perangkat pengetahuan mengenai langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian bahan kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan jalan penyelesaiannya.

Sepakat dengan Moh. Nasir,¹⁴⁶ perangkat pengetahuan yang terdapat pada metodologi penelitian bukan hanya tuntutan memperbaiki teori yang ada. Akan tetapi jika hasil dari penelitian itu membuktikan adanya penemuan-penemuan yang tidak sesuai lagi dengan teori yang ada berdasarkan proses pengujian ilmiah¹⁴⁷. maka hal ini memberi peluang untuk mengadakan reformulasi teori atau mengembangkan teori yang ada

Dalam pengertian lain, dapat pula disebut sebagai ilmu tentang suatu cara untuk mencari kebenaran melalui definisi masalah dan pemberian solusi terhadap masalah tersebut, dengan tujuan memperoleh suatu kesimpulan ilmiah. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini akan diarahkan pada hal yang berhubungan dengan teori ilmu-ilmu sosial, yang menyangkut aspek hubungan kausalitas satu sistem sosial tertentu dengan masalah sosial berupa kemiskinan, khususnya yang jadi pada masyarakat muslim. Kemudian mencari solusi masalah sosial tersebut dengan

¹⁴⁵ Metodologi merupakan ilmu yang mempelajari metode-metode ilmiah, yang secara khas terdiri dan kumpulan metode yang dipilih dalam melakukan pendalaman objek studi tertentu. Dan sesuai signifikasinya, metode ilmiah ini sangat dalam secap proses ilmiah, karena sistem yang mampu mewujudkan ilmu pengetahuan bukan hanya semata-mata mempunyai kelengkapan struktur yang agak media fungsional proses deteksi dan proses induksi secara silih berganti, melainkan juga dilengkapi dengan metode ilmiah. Lihat Koertaningrat. *Metode-Metode Peneliti Masyarakat* (Jakarta PT Gramedia, 1989), hal 8

¹⁴⁶ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta Ghala Indonesia, 1000), hal 26

¹⁴⁷ Akumo Saharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta, Rineka Cipta 10021 al 12 dan lihat juga Hillway, *Intrudiction To Reseach* (Boston Houghton Mifflin, 1956) hal 3

mengajukan pandangan Qardhawi tentang syarat diparktekkannya sistem Islam dalam masyarakat muslim.

Sedangkan secara spesipik, studi penelitian ini memiliki titik tekan untuk melakukan pengujian terhadap paradigma Islam tentang hubungan kausalitas sistem sosial berdasarkan agama Islam dengan masalah kemiskinan yang telah dikembangkan oleh seorang cendikiawan muslim Yang dari sisi basic research nya, penelitian ini tidak lebih hanya merupakan upaya pengembangan paradigma tentang konsepsi sosiologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Landasan dilakukannya penelitian ini terdiri dari dua pola pikir pertama, pola pikir ini muncul ketika melihat adanya fenomena kemiskinan di kalangan masyarakat Islam yang disebabkan oleh beberapa faktor, dan, kedua, pola pikir ini muncul karena adanya kelangkaan pemikir sosiologi yang mendapat pengakuan secara teoritik keilmiahan Oleh karena itu, penelitian ini selain akan mengkaji dan mengembangkan kerangka konsepsional teori sosiologi Islam juga berkeinginan menguji salah seorang cendikiawan muslim agar dapat diakui tingkat validitas pandangannya berdasarkan pendekatan teori-teon sosiologi struktur-fungsional.

A. Menentukan Jenis Penelitian

Penelitian ini tidak termasuk kepada jenis penelitian eksperimental dan empirikal¹⁴⁸, karena basis masalahnya tidak langsung bersifat kasuistik lapangan (field use). Akan tetapi bersifat abstraks masalah yang dieksplanasikan dalam gambaran kasuistik teoritik (theoretical case) Sifat masalah dalam penelitian ini dapat dikategorikan kepada "ex post facro", yaitu sifat penelitian yang menganalisis masalah sesudah terjadinya sesuatu "sebab" Jenis penelitian model seperti ini merupakan bagian dari penelitian ilmu-ilmu sosial yang berangkat dari suatu

¹⁴⁸ Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian disertai kontrol Pemelitian jenis ini sering digunakan untuk bidang bidang ilmu eksakta, tetapi belakangan banyak digunakan untuk penelitian ilmu-ilmu sosial

keadaan yang sudah terjadi dengan cara menggunakan kepustakaan dan sejumlah catatan yang ada (literatur).¹⁴⁹

Jenis penelitian "ex post facto", menurut peneliti, tingkat probabilitas penyimpangannya sangat minim karena data-data dapat dikontrol menjadi variabel independen dan tidak mungkin terjadi manipulasi data karena sesuatu yang akan diteliti sudah terjadi. Dalam hal ini, sesuatu yang telah terjadi adalah pernyataan Qardhawi tentang terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat Islam sebagai akibat melalaikan sistem sosial yang berdasarkan nilai ajaran dan kultur Islam.

Dalam penelitian ini, pengambilan jenis penelitian ex post facto digunakan sebagai jenis penelitian yang lebih diarahkan pada pengolahan data (sumber). Data yang dimaksud adalah literatur, buku-buku atau lainnya hasil pemikiran Qardhawi yang telah menjadi sumber informasi dan kajian untuk melakukan pembahasan penelitian ini berlangsung Informasi yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan akar masalah kemiskinan, dampak dan sebab akar masalah, dan sistem masyarakat Islam dalam interpretasi Qardhawi. Kemudian untuk kepentingan analisa penelitiannya ini adalah informasi tentang pandangan-pandangan dari mazhab sosiologi struktur fungsional. Oleh karena itu sebagai sumber informasi dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lepustakaan (library reseach).

B. Menentukan Jenis dan Sumber Data

Berkenaan dengan jenis penelitian yang telah disebutkan di atas, maka untuk kepentingan pembahasan masalah dalam penelitian ini diperlukan sejumlah data kualitatif dan teknik pengumpulan data Data-data tersebut menjadi penting karena dapat memberikan nilai keilmiah dalam proses penelitian selanjutnya, yang pada gilirannya dapat menjadi landasan untuk menganalisa secara logis

¹⁴⁹ Hal ini dapat dilukiskan bahwa banyak rakyat Indonesia yang miskin disebabkan oleh banyaknya pelaku birokrasi yang korup dan kebijakan pembangunan yang memihak ke kalangan masyarakat atas saja dalam kurun masa orde baru

melalui pendekatan sosiologi struktur-fungsional Sedangkan teknik pengumpulan data diperlukan untuk menunjukkan hubungan logis antara data yang satu dengan lainnya.

Jenis data yang akan dikumpulkan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy Moleong bahwa kategori jenis data kualitatif dapat berbentuk kata tindakan, data tertulis, photo dan statistik.¹⁵⁰ Dari keempat jenis tersebut, yang dijadikan pilihan peneliti dalam menentukan jenis data penelitian ini adalah jenis data tertulis yang telah tertuang dalam karya-karya Qardhawi, khususnya berkenaan dengan wacana sistem masyarakat Islam dan penanggulangan masalah kemiskinan dan karya-karya pemikir sosiologi struktur fungsional yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai alat analisisnya.

Penelitian ini berbentuk studi tekstual atas interpretasi Qardhawi tentang miskin yang terjadi di kalangan masyarakat Islam dan upaya penanggulangannya, maka sumber penelitian ini kategorinya menjadi dua bagian sumber data primer dan sumber data sekunder Sumber data primer ditekankan pada karya-karya Qardhawi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diantaranya *Musykilah al-Faqr wakafa Aalajahu al-Islam*, *Malaamih Al Mujtama AL Malim Alladzi Nasyuduhu*, *Ummatuna baina Qarnai*, *Aulawiyat al-Harakah al liyah fi al-Marhalah al-Qadimah*, *Mon Fiqhid Daudah Fil Islam*, *Al-Sunnah: Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah*, *Darul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Lilin*, *As-Shyasah Asy-Syari'ah dan Madkhal Lima'iffuul Islam Muqawwimatuhu*, *Khashaishuhu* , *Adhafulu*, *Mashadirul*.

Adapun sumber sekunder yang meliputi karya-karya lain Qardhawi adalah *al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhid wa al-Tatharruf*, *al-Shalwah al klomiyyah Min al-maraaqihati ilal ar-rusydi*, *Al-Khaahooish Al-Ammah li Al Islam Ath-Thariq Ilallah: At-Tawakal Syari'atu al-Islamiyah*, *Khuluduha wa Sholahiha li*

¹⁵⁰ Lesy J Moleang, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung Rosdakarya, 1996), hal 112

Tathbiqi li kulli Zamaninn wa Makanin, Al-Iman wal Hayat Haula Ruknul Ikhlas, Ainal Khalal.

Sumber sekunder yang lainnya berbentuk uraian, komentar, penjelasan dan dusan-ulasan terhadap pemikiran Qardhawi dan karya karya tokoh sosiologi struktur fungsional

C. Menentukan Metode Penelitian

Untuk melakukan proses penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka sangat memerlukan penerapan pendekatan-pendekatan dan unsur-unsur metodis. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami masalah kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam dan upaya penanggulangannya dengan memakai pendekatan analisis secara kritis pada teks teks¹⁵¹ Kemudian mengkomparasikannya dengan realitas sosial dan dinamika historis.¹⁵² Kajian komparasi ini, bukan hanya merumuskan ide-ide Islam dan pijakan dasar bagi seluruh lapangan kehidupan yang telah membentuk suatu sistem sosial" dan "pola prilaku.¹⁵³ yang berkaitan dengan masalah menyikapi kemiskinan" sebagai matras murni dari doktrin Islam, melainkan juga memahami ajaran agama melalui internalisasi, yaitu penghayatan ajaran dan penjelmaan keutuhan ajaran tersebut dalam kehidupan pribadi serta corak hubungan social.

Penelitian tentang sosok Qardhawi hubungannya dengan interpretasinya terhadap sistem sosial dalam masyarakat Islam menerapkan pendekatan sejarah (historical approach), "¹⁵⁴yang berupa penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap

¹⁵¹ Dalam istilah lain disebut dengan analisa deskriptif, yakni suatu prosedur penyelidikan dalam menganalisa rumusan fenomena masalah yang dikaji secara holistik. Dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi mengenai objek rumusan masalah yang dikaji secara rinci, mendalam, utuh, dan menyeluruh menurut term objek itu sendiri. Dalam pernyataan lain, analisa deskripsi ini telah telah menjadi tradisi tertentu yang sering digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara Edamental bergantung pada pengamatan objek lihat Michael Quinn Paton, *Qualitatif Evaluation Method*, (London: Sage Publication, 1989), hal 21, Lexy J Moelong, pp. cit, hal 3

¹⁵² lihat Taufik Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hal 9-12

¹⁵³ Ibid, hal 10

¹⁵⁴ Keunggulan penelitian sejarah antara lain ia mampu menyelidiki secara kritis mengenai pemikiran yang berkembang di zaman lampau dengan mengutamakan sumber primer. Baca M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 141-143.

kehidupan seseorang dan idenya, serta pembentukan watak tokoh tersebut. Dengan kata lain, keberadaan seseorang pemikir di manapun tidak akan dapat melepaskan diri dan bentukan sejarah yang melingkarinya,"¹⁵⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), yang menelaah karya-karya Qardhawi sebagai sumber primer dan buku-buku yang berisi komentar-komentar serta penjelasan-penjelasan terhadap pemikiran Qardhawi sebagai sumber sekundernya. Sedangkan untuk analisis masalah dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis dan metode sejarah kritis

Metode analisis isi¹⁵⁶ digunakan untuk menganalisis pemikiran Qardhawi dengan melakukan langkah-langkah dalam pengelompokan data melalui identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi teks. Adapun metode sejarah kritis digunakan untuk mengevaluasi data-data sekunder yang dapat membedakan opini, interpretasi dan pikiran-pikiran yang sifatnya subjektif-spekulatif, sehingga diketahui tingkat keabsahan biografi, geografis, kronologis, dan aspek fungsionalnya secara ilmiah.¹⁵⁷

D. Definisi Konsepsional

Penelitian literatur sarat dengan masalah konsepsional. Oleh karena itu, variabel-variabel istilah dalam penelitian ini perlu diksplanatori dan dijabarkan secara eksplisit. Sepakat dengan Derrida, setiap variabel-variabel istilah mempunyai tujuan tersendiri atau penuh dengan maksud yang dilatarbelakangi oleh unsur-unsur kehidupan. Pada sisi ini, untuk menemukan makna yang

¹⁵⁵ lihat: Anton Bakker, *Metode-Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). 141-143

¹⁵⁶ analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat diulang dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Baca Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Knahtauf* (Yogyakarta Rake Sarasin, 1998), hal 49-51

¹⁵⁷ hat Noegroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta Yayasan Idayu 1978), hal 112

2. Sistem Masyarakat

Sistem secara bahasa merupakan susunan atau kesatuan dan bagian-bagian yang saling bergantung¹⁵⁸ "Kemudian definisi masyarakat adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu¹⁵⁹. Masyarakat ini dalam pengertian terminologi adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia¹⁶⁰. Jadi sistem masyarakat adalah susunan atau kesatuan dari unit-unit sosial yang terdapat dalam masyarakat tertentu.

Selanjutnya, mazhab struktur fungsional telah dipandang masyarakat sebagai sebuah sistem, yang saling berhubungan, saling ketergantungan, selalu berkembang memiliki keseimbangan orientasi secara holistik, dan mewakili sistem sistem kebutuhan atau fungsi-fungsi pokok yang harus ada dan berjalan dalam sebuah komunitas manusia. Dalam hal ini, sistem sosial merupakan representasi dan fungsi atau beberapa sistem kebutuhan pokok manusia berkelompok.¹⁶¹

Mazhab ini telah beranggapan bahwa masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai berdasarkan sistem yang telah ditetapkan dan dikehendaki untuk mempertahankan eksistensinya. Sistem itu terdiri dari perancangan aksi, kaidah kaidah, gagasan-gagasan, dan teknik-teknik untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sosial, dan realitas lingkungan Masyarakat sebagai sebuah kelompok manusia tidak saja berubah secara konstan, akan tetapi juga bergantung pada penambahan fungsi, pengaruh-pengaruh positif sebagai faktor pengikat atau pemersatu.¹⁶²

¹⁵⁸ "Mas'ud, Op Cit, hal 364

¹⁵⁹ Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakarta Pustaka Amani, 11.) hal 244

¹⁶⁰ Mac Iver dan Charles H. Page dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suan Pengantar, (Jakarta) Rajawali Pers, 1990), hal 26

¹⁶¹ "Lihat Graham C Kinlich, Sociological Theory Its Develovment and Major Paradigms, dalam Topik Utama Structure Fungsionalism. (Florida Florida State University, t.t.)

¹⁶² Soerjono Sockanto, Pengantar Sosiologi Kelompok (Bandung: Remaja Karya, 1986), hal. 79

Mazhab ini pun telah berpendapat bahwa anggota-anggota masyarakat akan mendapatkan kepuasan apabila kelompoknya berproses menuju tujuannya. Dan beberapa kelompok menjadi penjamin ketahanan kelompok suatu masyarakat sehingga dapat berfungsi untuk memenuhi anggota-anggota lainnya. Fungsi para anggota kelompok masyarakat yang menjadi penjamin itu adalah, antara lain: mengamati apa yang terjadi, menentukan efek gejala-gejala terhadap proses pencapaian tujuan dan usaha ketahanan, melakukan aksi, sesuai dengan hasil pengamatan tersebut diatas. Melakukan aksi, mungkin berarti mengarahkan kembali proses pencapaian tujuan yang menyimpang atau menyeleweng, memperkuat proses yang menuju pencapaian tujuan secara benar, menanggulangi setiap aksi yang menghalangi proses pencapaian tujuan dan; menunjang setiap proses yang memperlancar pencapaian tujuan.

Anggota-anggota kelompok masyarakat harus mempunyai fungsi yang mampu memelihara keseimbangan yang ada dengan menyerasikan kebutuhan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan. Pencapaian tujuan dan ketahanan akan berhasil apabila anggota-anggota kelompok masyarakat tersebut mempunyai kemampuan yang tinggi.¹⁶³

Selanjutnya untuk memperjelas pembahasan tentang konsep sistem masyarakat, maka akan lebih baik jika melakukan deskripsi secara ringkas mengenai dua tipe pemikiran yang terdapat dalam mazhab struktur fungsional, yakni tipe naturalistik dan tipe sistemik.

Tipe naturalistik, secara global dapat diwakili oleh Talcot Parson dengan menggunakan analogi organik. Parson memandang bahwa sistem masyarakat merupakan sesuatu yang memiliki karakter universal, yang memungkinkan dapat membangun teori yang dapat diterapkan pada semua lapisan masyarakat, perkembangan dan pembangunannya. Dalam hal ini, Parson telah berasumsi mengenai sistem masyarakat sebagai berikut: a) sistem sosial merupakan ciri khas

¹⁶³ Ibid, h. 80-811

masyarakat yang memiliki realitas independen masa depan dan merupakan perwujudan individu sebagai sebuah sistem interaksi; b) subsistem masyarakat merepresentasikan beberapa fungsi pokok dasar atau masalah-masalah sistem dasar. Fungsi ini menegaskan konsep integrasi (dasar sistem sosial dalam norma yang mengikat individu untuk bermasyarakat, melalui pendekatan norma-norma kesatuan), susunan pemeliharaan (nilai sistem budaya dan sistem umum), tujuan akhir (sistem kepribadian) dan, sistem adaptasi (perilaku organik-peran dasar); c) sistem dasar ini, pada gilirannya menegaskan empat subsistem, yakni komunitas sosial (norma integrasi), susunan pemeliharaan (nilai integrasi), politik (penerapan hasil secara maksimal) dan, ekonomi (penerapan penyesuaian). Secara umum, fokus utama sistem sosial adalah norma-norma integrasi yang merupakan basis sistem masyarakat yang berada pada level kebutuhan relatif pribadi dalam lingkungannya; d) fondasi masyarakat adalah kecenderungan ke arah keseimbangan atau bertahan hidup. Kecenderungan ini adalah saling berhubungannya empat subsistem aksi yang ada pada mereka yang saling mempengaruhi, menginternalisasi fenomena sosial dan kultural ke dalam personal, dan menginstitutionalisasi komponen normatif sebagai struktur konstitusi sosial. Sistem sosial ini telah memandang masyarakat sebagai puncak ketinggian integrasi dan keseimbangan orientasi, dan; e) sistem sosial ini tidak dipandang sebagai hal yang statis, hal tersebut dipengaruhi oleh kapasitasnya yang selalu berkembang secara adaptif dalam sebuah gaya yang akan mengakibatkan adanya fluktuasi tujuan akhir dalam masyarakat sebagai kepanjangan dari relasi peningkatan kesatuan internal. Proses utama dalam perubahan yang berkembang menegaskan suatu perbedaan (kemajuan divisi atau spesialisasi struktur fungsional), latihan adaptasi (kebebasan unit-unit sosial dari keterbatasan sumber penghasilan), cantumnya struktur baru dalam sistem normatif dan nilai nilai umum (mengembangkan sistem nilai untuk meningkatkan level umum mempertahankan aturan integrasi dengan evolusi).¹⁶⁴

¹⁶⁴ lihat Graham C. Kinlich, *Sociological Theory Its Development and Major Paradis dalam Topik Utama Structure Fungsionalism*, (Florida Florida State University, tt)

Oleh karena itu, menurut Parson, masyarakat tidak lain adalah suatu sistem sosial yang harus memenuhi empat syarat atau azas untuk setiap sistem itu berfungsi, yaitu: penyesuaian masyarakat dengan lingkungan, anggota masyarakat harus sepakat akan ketentuan untuk memilih, mengetahui dan memahami tujuan kolektif dengan menyusun struktur tertentu, penentuan anggota masyarakat agar dapat memainkan peranan dan mematuhi nilai-nilai, serta menyelesaikan konflik dalam berinteraksi dan terjadinya interaksi dari keadaan yang ada dalam masyarakat, individu dan institusi yang dikontrol oleh unsur atau bagian tertentu agar sistem sosial terpelihara.¹⁶⁵

Begitupun Parson telah menguraikan empat struktur institusional dalam setiap sistem masyarakat, yaitu: (a) struktur kekerabatan. Struktur ini berhubungan dengan pengaturan ungkapan perasaan seksual, pemeliharaan, dan pendidikan; (b) struktur prestasi instrumental dan stratifikasi Struktur ini menyalurkan semangat dorong individu dalam memenuhi tugasnya untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Suatu strategi pokok untuk menjamin motivasi adalah memberikan penghargaan kepada orang sesuai dengan kontribusinya. Oleh karena itu, Parson menghubungkan antara sistem stratifikasi dengan prestasi yang bersifat instrumental. Dalam masyarakat modern, struktur okupasi menyalurkan kegiatan berprestasi instrumental seperti penyebaran uang, prestise dan kekuasaan; (c) teritorial, kekuatan dan integrasi dalam sistem kekuasaan. Semua masyarakat harus memiliki bentuk organisasi teritorial yang berfungsi untuk mengontrol konflik internal dan untuk berhubungan dengan masyarakat lainnya, dan, (d) agama dan nilai integrasi. Secara tradisional, agama memberikan kerangka arti simbolis yang bersifat umum. Karena itu, suatu sistem nilai akan dipengaruhi makna akhir atau mutlak Dengan kata lain, pandangan dunia yang mendasar dalam masyarakat berkaitan dengan struktur agama

¹⁶⁵ Jadistira K Garna, *Himu-Ilmu Sosial*, (Bandung Program Pascasarjana UNPAD, 1996), hal 57

Selanjutnya, hampir keseluruhan pemikiran Parson tentang sistem masyarakat dapat dirumuskan dalam empat subsistem fungsional yang disebut dengan model A-G-1-L (Adaptation-Goal Attainment-Integration-Latent Pattern Maintenance). Adaptation menunjukkan kepada keharusan suatu sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Pertama, harus ada suatu penyesuaian dari sistem sosial terhadap tuntutan kenyataan yang tidak dapat diubah yang berasal dari lingkungan. Kedua, harus ada proses transformasi aktif dari situasi tersebut. Goal Attainment merupakan persyaratan fungsional yang muncul dalam sebuah tindakan yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Titik perhatian utamanya bukan pada tujuan pribadi individu, tetapi pada tujuan bersama para anggota suatu sistem sosial. Jadi, persyaratan fungsional untuk mencapai tujuan, meliputi pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penentuan prioritas. Integration merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi diantara anggota suatu sistem sosial. Agar sistem sosial itu berfungsi secara efektif sebagai suatu kesatuan, maka harus ada suatu tingkat solidaritas di antara individu dalam sistem sosial tersebut. Latent Pattern Maintenance merupakan konsep latensi yang menunjukkan berhentinya interaksi. Para anggota dalam sistem sosial apa saja dapat saja mengalami kelelahan dan kejenuhan serta tunduk pada sistem sosial lainnya tempat mereka terlibat. Karena itu semua sistem sosial harus bersiaga jika sewaktu-waktu sistem sosial kacau dan para anggota tidak lagi bertindak atau berinteraksi sebagai anggota sistem sosial tersebut.¹⁶⁶

Kemudian, tipe sistemik telah diwakili oleh Amytai Etzioni dan Edward Tiryakian. Dalam menguraikan sistem masyarakat, Etzioni telah berpandangan bahwa ia terdiri dari unit-unit sosial yang merupakan pengembangan dari makrososiologi. Dalam proses regulasinya, unit-unit sosial dapat memaksimalkan tujuan sosial dengan melakukan kontrol dan pembangunan sosial. Sistem masyarakat tersebut, misalnya terdiri dari unit (peranan-peranan), sub unit (misalnya famili), dan supraunit (misalnya lingkungan) Hubungan dalam sistem

¹⁶⁶ Judistira K Garna, Teori Sosial, (Bandung Program Pascasarjana UNPAD, 2001), hal. 398-401

masyarakat dilandasi oleh tiga varian: situasi (hubungan antar unit), sistem (saling ketergantungan antar unit), dan komunitas (integrasi unit-unit).

Hal yang paling pokok dalam sistem masyarakat adalah sebuah pemerintahan yang menggambarkan lapisan atas sibernatorial masyarakat, yang merupakan sistem bimbingan masyarakat terpusat. Dua faktor utama dalam proses bimbingan masyarakat terpusat adalah: 1) kontrol, sebagai sistem kapasitas sibernatorial (masukan pengetahuan dan struktur pembuatan keputusan) dan kekuasaan (aset dan mobilitas), 2) bentuk kapasitas konsensus (bentuk struktur sebagai konsensus internal masyarakat). Penggunaan dua bentuk kontrol dan konsensus, dalam pandangan Etzioni dapat memproduksi sebuah tipologi masyarakat aktif. Begitupun bentuk: kontrol dan konsensus akan mengakses model masyarakat yang bercirikan, sebagai berikut: (1) komparatif aktif (tinggi dalam kontrol dan konsensus), (2) penyimpangan masyarakat (rendah pada kontrol tetapi tinggi dalam konsensus), (3) terlalu mengatur masyarakat (tinggi pada kontrol tetapi rendah pada konsensus), dan, (4) masyarakat pasif (kedua-duanya rendah).

Sistem dasar normatif berupa bimbingan masyarakat memiliki relasi dengan tujuan prestasi sosial. Sehabis dengan sistem dasar normatif tersebut, akan ada penekanan pada pemerintahan dan kontrol sebagai pusat, yang memungkinkan berjalannya orientasi elit masyarakat. Sehingga setiap unit dapat terkontrol dalam posisi relasinya yang proposional bersama situasi, sistem dan komunitas yang berjalan sesuai dengan perencanaan sosial.

Sedangkan menurut Tiryakian, sistem masyarakat merupakan implementasi dari fenomena kesadaran normatif antar subjek yang merupakan bingkai aksi sosial dalam setiap ruang sosial. Oleh karena itu, sistem sosial tidak lain merupakan aktualisasi atau manifestasi dari kemungkinan-kemungkinan setiap eksistensi kemanusiaan. Sistem sosial tersebut bersifat dinamis dan kemunculannya lebih baik daripada hal yang bersifat statis. Adapun lahirnya institusisasi atau formalisasi menunjukkan adanya proses yang memunculkan permukaan fenomena sosial dari lingkungan sekitarnya, mendatangkan visi yang jelas dan diorganisir ke dalam

sistem sosial. Selanjutnya, wilayah-wilayah ini memiliki kemungkinan bercabang ke dalam daerah sakral dan sekuler, yang dapat menertibkan keseimbangan antitetikal (basis ketertiban sosial). Munculnya ketertiban sosial merupakan refleksi dari regulasi irrasional dan regulasi yang sakral sebagai proses terbentuknya strukturisasi sosial.¹⁶⁷

Demikianlah, konsep sistem masyarakat dalam pandangan struktur fungsional. Baik tipe naturalistik maupun sistemik telah memandang bahwa sistem masyarakat tidak lain merupakan sistem sosial yang berada dalam keseimbangan, yang memolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri Lembaga-lembaga sosial yang kompleks secara keseluruhan¹⁶⁸ merupakan sistem sosial yang setiap bagiannya saling bergantung satu sama lain, sehingga perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lain yang pada akhirnya mempengaruhi kondist sistem secara keseluruhan Bahkan melalui pendekatan teon konsensus, struktur fungsional telah menyajikan mekanisme kontrol antara anggota masyarakat dan pemerintahan sebagai lapisan atas masyarakat dengan cara memaksimalkan nilai partisipasi lembaga-lembaga serta realisasi norma yang ada dalam sistem sosial, sebagai implementasi ketertiban sosial yang bersifat regulatif

Dalam penelitian ini, sistem masyarakat yang dimaksud adalah sistem masyarakat Islam. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya adalah mengenai sebuah sistem, yang saling berhubungan, saling ketergantungan, selalu berkembang, memiliki keseimbangan orientasi secara holistik, dan mewakili sistem-sistem kebutuhan atau fungsi-fungsi pokok yang harus ada dan berjalan berdasarkan pijakan Islam. Sistem sosial Islam ini merupakan representasi yang bersifat fungsional. khususnya sebagai solusi menanggulangi kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam.

¹⁶⁷ lihat Graham C Kinlich, *Sociological Theory Its Develoment and Major Paradigm*.dalam Topik Utama Structure Fungsionalism (Florida Florida State University, 11)

¹⁶⁸ Thomas F Odea, *Sosilogi Agama*, (Jakarta Rajawali Pers, 1996), hal 3

3. Kemiskinan

Merumuskan suatu definisi tentang kemiskinan, nampaknya bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena selain kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, juga disebabkan masing-masing pembuat definisi sangat dipengaruhi oleh latar belakang kerangka pemikiran dan fokus perhatiannya yang berbeda dalam melihat masalah kemiskinan ini.

Akan tetapi dari disparitas pengertian kemiskinan yang telah dirumuskan, secara garis besar yang disebut miskin itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau pokok bagi suatu tingkat kehidupan yang layak menurut ukuran umum yang berlaku di masyarakat setempat. Sebenarnya, jika ditinjau dari sisi bahasa pun, pengertian kemiskinan selalu disandingkan dalam arti ekonomi. Yaitu keadaan "serba kekurangan" dalam hal material.¹⁶⁹ Bahkan lebih ditegaskan oleh pendapat yang lain, bahwa yang disebut miskin adalah tidak berharta benda, serba kurang, dan papa¹⁷⁰ Pengertian secara etimologi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa hakikat kemiskinan adalah kondisi yang dialami seseorang atau masyarakat tertentu yang serba kekurangan dalam memiliki harta benda.

Adapun beberapa definisi kemiskinan secara terminologi, diantaranya menurut Nabil Subhi Ath-Thawil adalah tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan itu dianggap pokok karena menyediakan batas kecukupan minimum untuk hidup manusia secara layak dengan tingkat kemuliaan yang telah dilimpahkan Allah atas dirinya.¹⁷¹

¹⁶⁹ w JS, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta Balai Pustaka, Cet IX, 1986), hal 652

¹⁷⁰ "Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakarta Pustaka Amani, 11.), hal 255..

¹⁷¹ Nabil Subhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan, Terjemahan Muhammad Bagir, (Bandung cet 1, 1985), hal. 36

Definisi lainnya yang senada diberikan oleh Frans Magnis Suseno, S.J. yaitu keadaan orang yang tidak menguasai sarana-sarana fisik secukupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, untuk mencapai tingkat minimum kehidupan yang masih dapat dinilai manusiawi.¹⁷²

Definisi-definisi diatas telah menitikberatkan pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar atau pokok yang minimal dapat hidup secara layak dan manusiawi. Akan tetapi yang masih samar dari rumusan definisi tersebut adalah mengenai tingkat ukuran atau standar kebutuhan dasar dan tingkat kehidupan yang layak, yang itu merupakan hakikat dari kemiskinan yang sebenarnya.

Dalam hal ini, Parsudi Suparlan telah mencoba membuat ukuran batas standar minimal tingkat kehidupan. Menurutnya, secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷³

Selanjutnya, ada yang unik jika kita melihat dari perspektif literatur hukum Islam, yakni adanya perbedaan pemaknaan istilah "miskin dengan "fakir"¹⁷⁴. Perbedaan ini dijelaskan oleh Ali Yafic, bahwa yang disebut miskin ialah mereka yang memiliki harta benda atau mata pencaharian, akan tetapi hanya menutupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokok. Sedangkan yang disebut fakir ialah mereka yang tidak memiliki sesuatu harta benda atau tidak mempunyai mata pencaharian tetap, atau mempunyai harta benda tetapi hanya menutupi kurang dari seperdua kebutuhan pokok.¹⁷⁵

Dalam hal ini, Ali Yafie telah mengumpamakan standar dari tingkat kepemilikan harta pada konteks miskin dan fakir tersebut, yakni jika diasumsikan

¹⁷² Frans Magnis Suseno, SJ, Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-segi Ens. Dalam JB. Banawiratman, SJ (ed), Kemiskinan dan Pembebasan, (Yogyakarta: Kanisius, cet L, 1987). hal 37

¹⁷³ Parsudi Suparlan, (ed), Kemiskinan di Perkotaan (Jakarta, Sinar Harapan, cet. 1, 1984), hai. 12

¹⁷⁴ Sebagai contoh dapat dilihat dalam QS At-Taubah ayat 103, yang menerangkan tentang para mustahig (yang menerima) zakat

¹⁷⁵ Ali Yafie, Islam dan Problema Kemiskinan (Jakarta P3M, No 2/VOL III, 1986), hal. 6.

bahwa indeks ditetapkan angka 10 maka yang memiliki atau memperoleh penghasilan angka 5 sampai dengan 9 dapat digolongkan miskin. Akan tetapi jika hanya memiliki atau hanya berpenghasilan angka 4 ke bawah maka dapat digolongkan sebagai fakir.¹⁷⁶ Lebih ditegaskan perbedaannya oleh Sahri Muhammad, bahwa orang fakir yaitu yang tidak memiliki alat produksi dengan pendapatan per-harinya sangat rendah dan sengsara, tidak punya harta untuk memenuhi penghidupannya, termasuk penganggur yang tidak memiliki modal kecuali tenaganya yang berarti memerlukan lapangan kerja.¹⁷⁷

Dalam ilmu-ilmu sosial, persoalan standar atau tolak ukur dalam menentukan batas kemiskinan biasanya dapat dikategorisasi atau diklasifikasi dalam beberapa sudut pandang. Ada yang mengukur berdasarkan in com per-capita atau pendapatan rata-rata perkepala Contohnya PBB menetapkan bahwa suatu masyarakat yang pendapatannya rata-rata per-orang setahun kurang dari US\$ 300 digolongkan sebagai masyarakat yang miskin

Tolak ukur lainnya yang biasa digunakan adalah melalui gizi. Semisal jika jumlah protein dan kalori seseorang atau masyarakat kurang dari jumlah tertentu maka dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin. Ada juga yang secara ekstrim mengukurnya dengan rata-rata kematian (death rate) Asumsinya jika suatu masyarakat dikatakan miskin, jika angka rata-rata kematiannya cukup tinggi. Hal ini bertolak dari anggapan bahwa jika banyak orang yang meninggal, kemungkinan mereka kurang makan.¹⁷⁸

Demikianlah beberapa contoh tolak ukur yang biasa dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial dalam menentukan batas kemiskinan. Namun jika direlasikan dengan kompleksitas permasalahan kemiskinan serta patokan kebutuhan dasar bagi suatu kehidupan, tampaknya tolak ukur tersebut masih jauh dari cukup untuk

¹⁷⁶ Ibid

¹⁷⁷ Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang Yayasan Pusat Studi Aveicenna, 1982), hal. 27.

¹⁷⁸ ihat Selo Sumardjan, *Kemiskinan Sirkutural dan Pembangunan dalam Alfian* (ed). Komsk Strakurat (Jakarta Yayasan Ilmu-Ilmu Sossal, 1980), hal 6-7

menggambarkan realitas permasalahan kemiskinan. Artinya, standarisasi yang biasa digunakan secara umum ini akan mendapat kesulitan dalam memberikan pengertian dan membatasi hakikat kemiskinan. Oleh karena pada tiap lingkungan tertentu dan pada tiap kurun waktu tertentu, masalah kepentingan dan kebutuhan manusia dan masyarakat berbeda-beda. Seseorang yang ada pada suatu masyarakat digolongkan miskin, akan tetapi mungkin pada masyarakat lainnya digolongkan tidak miskin.

Selanjutnya, dari beberapa literatur sosial yang telah fokus membicarakan masalah kemiskinan, jika dianalisis akan didapatkan beberapa kategori atau klasifikasi bentuk-bentuk kemiskinan. Hal ini didasarkan atas jenis tingkat ukuran kemiskinan atau karena sebabnya. Diantaranya adalah jenis kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang memiliki arti bagi seseorang atau kelompok pada tingkat kehidupannya tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup layak. Kemiskinan absolut ini biasanya dibedakan dari kemiskinan subjektif dan kemiskinan relatif.

Bentuk kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang didasarkan pada keadaan lingkungan sekelilingnya. Artinya orang yang berkecukupan di daerah yang miskin dapat dianggap kaya, sebaliknya orang yang berkecukupan di daerah orang-orang yang kaya dapat merasa miskin. Sedangkan kemiskinan subjektif ialah seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara subjektif. Oleh karena tingkat kebutuhan penduduk dapat bervariasi berdasarkan pendidikan, lingkungan, adat istiadat dan sebagainya, maka tingkat kemiskinan subjektif pun dapat berbeda-beda.¹⁷⁹

Sedangkan dari segi sebab kemiskinan, dapat dibedakan antara bentuk "kemiskinan struktural" dengan bentuk "kemiskinan temporer atau aksidental". Atau dalam pandangan lain, dapat dibedakan antara bentuk kemiskinan alamiah dan bentuk kemiskinan buatan (saneal and artificial poverty). Kemiskinan temporal

¹⁷⁹ S Sunarto, Ndani Mursite *Meningkarkan Pedas Sekce Peraman dess laks CSIS*, No 7/VIII/Juli, 1979), hal 586

adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh adanya cacat jasmani atau jiwa, atau juga akibat malapetaka yang menimpa seseorang.¹⁸⁰ Cacat jasmani atau mental secara nil dapat membuat seseorang tidak bisa bekerja, sehingga dia tidak produktif dan menjadi miskin. Demikian juga bencana alam dalam bentuk gunung meletus, atau serangan hama dan kemarau panjang yang menimpa kaum petani dapat menyebabkan kemiskinan. Akan tetapi bentuk kemiskinan semacam ini biasanya bersifat individual atau hanya menimpa pada sekelompok orang saja, dan terjadinya bersifat temporer. Oleh karenanya, akibat yang ditimbulkannya serta cara penanggulangannya relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan jenis kemiskinan struktural yang biasanya bersifat massal dan telah berkembang sedemikian kompleks.

Adapun bentuk kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang bertolak dari sebab keadaan struktur sosial yang eksploitatif dalam pola hubungan atau interaksi pada institusi-institusi ekonomi, politik, agama, keluarga, budaya dan sebagainya. Oleh karena itu, kemiskinan yang timbul dalam suatu masyarakat, bukan semata mata sebagai akibat dari faktor-faktor yang ada pada dirinya sendiri, misal kurangnya pendidikan atau kurangnya kalori, melainkan sebagai akibat dari adanya eksploitasi.¹⁸¹

Lebih lanjut, seperti juga apa yang disebutkan oleh Magnis Suseno bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural itu adalah Kemiskinan bukanlah akibat kehendak jelek orang miskin sendiri, (misalnya: ia malas, suka main judi) atau orang kaya (misalnya ia pribadi rakus), melainkan akibat strukturisasi proses-proses ekonomi, politik, (bahwa hanya sekelompok kecil menguasai sarana-sarana produksi dan pengambilan keputusan mengenai kehidupan masyarakat), sosial (misalnya hak-hak tradisional golongan atas), budaya (misalnya perbedaan akses terhadap pendidikan) dan ideologis, bahwa masyarakat dibelenggu faham-faham

¹⁸⁰ Lihat Hidayat Nataatmadja, *Masalah Kemiskinan Tinjau dari Ajaran Islam*, dalam Amrullah Ahmad et al (ed) *Islamisasi Ekonomi*, (Yogyakarta PLP2M, 1985), hal 109

¹⁸¹ Lihat M. Dawam Raharje, *Esel-esel Ekonomi Polink*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal 196

yang menutup-nutupi ketidakadilan, kemiskinan dan memperlihatkan sebagai akibat faktor-faktor objektif belaka".¹⁸²

Dalam skala makro, masalah kemiskinan struktural ini dapat dilihat dari saling keterkaitan dan ketergantungan setiap pembangunan suatu masyarakat tertentu dengan realitas perkembangan masyarakat lainnya. Semuanya secara struktural saling berkaitan. Menurut Fachry Ali,¹⁸³ berbagai sudut dunia yang dahulu terpisah dan terpencar-pencar, kini telah dintegrasikan menjadi suatu kawasan-kawasan dunia salah satu faktor pengintegrasian dunia ini adalah lewat perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dunia ini telah menimbulkan suatu jenis hubungan dunia dalam bentuk hirarkis yang tersusun sedemikian rupa. Ada negara yang dominan sebagai pusat dan negara pengikut di pinggiran.

Lebih ekstrim, menurut Dawam Raharjo,¹⁸⁴ perkembangan tersebut telah menimbulkan perubahan persepsi mengenai gejala kesalinghubungan antara berbagai persoalan yang tadinya dilihat secara terpisah, antara kemiskinan dan kepincangan sosial dengan sistem kekerasan (violence), dominasi dan eksploitasi, antara polusi dan pencemaran lingkungan hidup dengan sistem ekonomi yang ekspansionis, antara pola hubungan ketergantungan pusat pinggiran (centre-periphery) dengan sistem teknologi yang mengandung kode ekonomi dan nilai kognitif, antara sistem politik yang represif di Dunia ketiga dengan orde ekonomi internasional yang dikuasai segelintir negara barat. Semua gejala tersebut mempunyai kaitan satu sama lain dalam hubungan struktural Masalah keterbelakangan di suatu daerah yang paling terpencil telah atau segera akan mempunyai kaitan dengan sistem kapitalisme internasional yang melakukan ekspansi dan penetrasi.

¹⁸² "Frans Magnis Suseno, S1, Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-Segi Enis dalam J.B Banawiratama, SJ. (ed), opeit, hal. 38

¹⁸³ Fachry Ali. Islam Keprihatinan Universal dan Politik di Indonesia, (Jakarta: Antar Kota, 1984), hal, 7-9

¹⁸⁴ Dawam Rahrjo, Pembangunan dan Kekersan Struktural: Agenda Riset Perdamaian, (Jakarta LP3ES dalam Prisma No 3 Maret/X, 1981), bal 4-5.

Secara empiris, pengalaman historis di negara-negara berkembang selalu menunjukkan bahwa bentuk kapitalisme industrial yang masuk telah mensyaratkan keperluan adanya kekuasaan negara yang dan bercorak birokrasi authoritarian. Negara-negara berkembang tersebut selalu menjadi ajang dominasi negara besar. Tata hubungan internasional menjadi structural dominan (dominasi struktur) yang di negara-negara berkembang melahirkan apa yang disebut structural violence (kekerasan struktural). Suatu bentuk kekerasan yang bukan sekedar saling bunuh karena masalah pribadi atau suku, tetapi adalah kekerasan yang timbul dari pertumbuhan kapital yang tidak merata dan berkembang tidak terbatas. Kekerasan ini mengambil bentuk dalam wujud eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, dan marginalisasi masyarakat, sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang nasib mereka.

Wujud kekerasan di atas melahirkan kemiskinan massal, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial dan alienasi atau peniadaan individualita karena adanya proses penyeragaman negara. Bentuk kekerasan ini juga berakibat pada alam dan lingkungan, seperti dalam bentuk pencemaran lingkungan dan pengrusakan sumber-sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui

Sebagai contoh sederhana dari ketidakadilan sosial ekonomi yang menyebabkan kemiskinan massal adalah kasus yang terjadi di Ethiopia. Ketika jutaan orang Islam berebutan mencari sesuap makanan dari bantuan yang sampai, Mengestu yang marxis menghabiskan dua milyar dollar untuk membeli senjata. Selanjutnya ketika dunia meramalkan kelaparan di Ethiopia, Mengestu menyelenggarakan peringatan sepuluh tahun kekuasaannya dengan segala kemewahan dan kemegahan.

Lebih dari empat puluh juta dollar dihabiskan untuk membangun stadion, monumen, patung dan podium. Untuk menjamu tamu, sebuah kapal dikirim dari Inggris dengan mengangkut 500.000 botol wiski scotch, dengan biaya lebih dari tiga ratus dollar dibuang percuma. Inilah sebuah contoh ketidakadilan struktur

sosial, Mangestu yang marxis telah memandang kelaparan di daerah muslim sebagai hukuman dari penguasa yang sah atas sikap pemberontakannya.¹⁸⁵

Contoh lainnya dalam skala makro adalah menggejalanya ketimpangan hubungan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Semisal terjadinya keterbelakangan negara-negara Amerika Latin. Melalui analisa pendekatan tesis ketergantungan dan keterbelakangan (*dependency and underdevelopment theses*), Paul Baran mengatakan bahwa faktor utama penyebab keterbelakangan Negara Amerika Latin yang kaya dengan bahan-bahan mentah salah karena proses eksploitasi oleh pihak asing akibat hubungan ekonomi yang tidak adil. Tesis ini menolak tesis yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi negara-negara miskin akan terjadi akibat hubungan ekonomi negara maju yang akan menimbulkan difusi modal, teknologi, nilai-nilai institusi dan faktor-faktor dinamik lainnya. Tetapi sebaliknya, masuknya modal asing dari negara maju ke negara miskin hanya bertujuan untuk menyedot keuntungan dari negara miskin dengan diiringi pula oleh masuknya sistem kapitalisme yang menggeser kebiasaan sosial yang ada pada masyarakat di negara miskin. Masuknya modal asing dalam proses pembangunan ekonomi di negara berkembang dipermudah dengan adanya jaringan kerjasama antara pemodal asing, pengusaha domestik, dan elite penguasa sebagai *comprador* yang bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan asing¹⁸⁶. Inilah yang dalam bahasa lain disebut dengan kemiskinan struktural, yang mana fungsi-fungsi struktur sosial dalam suatu masyarakat atau negara telah mengalami disfungsi sosialnya sehingga mengakibatkan kondisi miskin yang masive.

Selanjutnya, mengenai penyebab terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini banyak pendapat mengenai sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Pendapat pertama, bahwa suatu masyarakat atau bangsa terkadang dipandang mengalami kemiskinan karena keadaan alamnya yang kurang subur, seperti tanahnya yang berbatu-batu

¹⁸⁵ Jalaluddin Rahmat, dalam kata Pengantar Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, Terjemahan Muhammad Bagis (Bandung: Mizan, 1985), hal 7

¹⁸⁶ Lihat Sirtua Arif dan Adi Sasono, *Indonesia. Ketergantungan dan Keterbelakangan* (Jakarta 1981)

kering, tidak cukup luas, tidak mengandung mineral atau kekayaan alam lainnya. Dengan demikian negara tersebut dipandang tidak mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Pandangan semacam ini mendapat kritikan dengan mengajukan contoh beberapa negara yang sempit (kecil) atau keadaan alamnya yang tidak subur, tetapi mampu menjadi negara maju. Di antaranya adalah Jepang, Belanda, Singapura atau 48 Taiwan.¹⁸⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah karena "sikap mental atau budaya" seseorang atau masyarakat yang tidak memiliki sikap mental yang positif untuk membangun, seperti tidak memiliki sikap wiraswasta, apatis, pasrah, tidak percaya diri dan sebagainya.

Pendapat ini senada dengan David C. McClelland yang mengatakan bahwa penyebab suatu bangsa tidak maju adalah karena tidak memiliki "n Ach" (singkatan dari need for achievement) yaitu kebutuhan untuk meraih hasil atau prestasi. N Ach ini semacam virus mental yang apabila terjadi pada diri seseorang, cenderung akan menyebabkan orang itu bertingkah laku secara giat.

Menurut McClelland salah satu penyebab tidak adanya Ach ini dapat ditemukan pada cerita anak-anak atau cerita rakyat yang kebanyakan bersifat fatalistik. Virus n Ach ini bisa ditularkan untuk mengubah sikap mental masyarakat yang kurang atau tidak memilikinya.¹⁸⁸

Selanjutnya, pendapat yang mengatakan bahwa penyebab terjadinya kemiskinan adalah masalah ledakan penduduk. Salah satu tokoh dari pendapat ini adalah Malthus yang sejak tahun 1978 telah sampai pada kesimpulan bahwa kesentosaan manusia senantiasa diganggu oleh kenyataan pertambahan manusia yang lebih cepat daripada pertambahan bahan makanan. Manusia berkembang biak

¹⁸⁷ John Kenneth Galbraith, *Hakikat Kemiskinan Massa*, terjemahan Tom Anwar, (Jakarta PT. Sinar Harapan, 1983), hal. 12

¹⁸⁸ David C McClelland, *Dorongan Hati Menuju Modernisasi*, dalam Myron Weiner (ed), *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan* (Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1980), hal 2-13

menurut "deret ukur" sedangkan bahan makanan berkembang menurut "deret hitung".¹⁸⁹

Dalam hal ini, Malthus (1926) melalui *Frist Essay on Population*, telah berpendapat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penyediaan pangan, yang selanjutnya berakibat pada tersingkirnya sejumlah manusia ke wilayah kemiskinan dan kelaparan. Gagasan ini, kemudian menjadi acuan dasar bagi sejumlah ahli untuk mengkaji secara mendalam ide "seleksi alam" dan "survival of the fittest" yang dikemukakan oleh Darwin.

Beberapa sebab lain yang dianggap penyebab timbulnya kemiskinan adalah pendidikan, kekurangan gizi, pola asuh dalam keluarga, atau karena kesalahan dalam sistem ekonomi yang dikembangkan suatu negara dalam proses pembangunan atau modernisasi beserta sistem politik dan ideologinya. Bahkan pada sisi lain, agama sering dipandang sebagai turut andil beserta sistem budaya yang terkadang menjurus pada sikap fatalis dan menerima kemiskinan sebagai suatu takdir dan mendapat sempit terbormat untuk mendekatkan dan pada Tuhan bagi kesempurnaan dirinya.

Kesalingterkaitan berbagai sebab kemiskinan dalam hampir semua aspek kehidupan oleh Gunnar Myrdal dikatan sebagai "vicious circle", suatu lingkaran tak ng pangkal. Sulit dibedakan antara faktor penyebab dan akibat dari kemiskinan.

Contoh dari lingkaran tak berujung pangkal itu dikemukakan oleh Myrdal dalam mengutip profesor Ragnar Nurske yang mengatakan bahwa karena seseorang kurang makan, maka kesehatan menjadh lemah karena tubuhnya lemah maka Lemampuan kerjanya pun rendah, hal mana mengakibatkan miskin, dan keadian ini selanjutnya mengakibatkan kurang makan Demikian pula selanjutnya.

¹⁸⁹ Lihat Paul R. Ehrlich, *Ledakan Penduduk Terjemahan Inyo Fernandez dan Paul Soge*, PT Gramedia, Jakarta, 1981 Masalah yang timbul dari ledakan penduduk tidak terbatas pada keprihatinan tentang kemiskinan, tetapi juga pada masalah pemukiman, kerusakan lingkungan, kesehatan, migrasi dan sebagainya

Lebih lanjut, Myrdal mengatakan bahwa masalah tersebut adalah proses sirkuler dan kumulatif yang terus menerus menurun ke tingkat yang lebih rendah, dimana suatu faktor negatif memainkan dua peranan sekaligus menjadi penyebab dan akibat dari faktor-faktor negatif lainnya.¹⁹⁰

Pada perspektif lain, Jalaludin Rahmat dengan berpijak pada beberapa pendapat telah menyimpulkan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial dan ekonomi, karena adanya sekelompok kecil elit masyarakat yang hidup mewah di atas penderitaan banyak orang, baik elit dalam negeri ataupun

pada peranan negara-negara maju yang telah menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang dan mengeruk keuntungan lewat kolaborasi dengan elit local.¹⁹¹

Selanjutnya, sebab kemiskinan akibat gelombang pengungsi yang terkena bencana kelaparan serta wabah penyakit akibat peperangan. Hal ini dipicu oleh perkembangan lomba senjata dalam sistem perang (war-system) beserta sistem persenjataannya (armament-system) yang telah menyedot biaya yang sangat besar di tengah masalah kemiskinan dalam berbagai belahan dunia. Dalam situasi seperti ini timbul kesan bahwa umat manusia telah tidak lagi menguasai dirinya dan telah dikuasai oleh suatu sistem dan teknologi dalam bentuk sistem perang yang diciptakannya sendiri. Pembangunan persenjataan tersebut, merupakan salah satu cara terpenting untuk mempertahankan status quo dan memelihara kepentingan kepentingan kelompok-kelompok elit yang melakukan dominasi dan eksploitasi."¹⁹² Oleh karena itulah maka gejala militerisasi dunia berkoeksistensi dengan terjadinya kepincangan pendapatan yang terwujud secara global. Kepincangan ini, lebih jauhnya berdampak pada sebab kemiskinan secara struktural.

¹⁹⁰ Gunnar Myrdal, *Bang Bang Kaya dan Miskin* terjemahan Paul Sihotang (Jakarta. PT Gramedia, cet 11, 1980), hal 35-37.

¹⁹¹ Jalaludin Rahmat, *op cit*, hal. 12-13

¹⁹² Dawam Raharjo, *op.cit.*, bal. 4.

Dari beberapa pendapat dan analisa mengenai bentuk dan sebab-sebab terjadinya kemiskinan tampak jelas sangat tergantung pada kerangka teori yang berbeda-beda. Kerangka teori kemiskinan ini menurut A. Suryawisata¹⁹³ secara garis besar terbagi pada model teori konsensus dan model teori konflik.

Model teori konsensus terbagi pada ideologi konservatif dan liberal yang telah melatarbelakanginya. Dalam pandangan ideologi konservatif, masalah kemiskinan adalah sebagai kesalahan pada orang miskin sendiri. Mereka karena bodoh, malas, tidak punya motivasi berprestasi yang tinggi, tidak punya keterampilan dan sebagainya. Oleh karena itu, kaum konservatif percaya bahwa masalah kemiskinan akan terselesaikan dengan sendirinya. Sedangkan menurut pandangan ideologi liberal, masalah kemiskinan harus dipecahkan lewat struktur politik, ekonomi yang ada dengan menciptakan kesempatan yang sama untuk berusaha bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Bagi kaum liberal, orang miskin pasti dapat mengatasi kemiskinan mereka asal mendapat kesempatan berusaha yang memadai.

Baik pandangan konservatif maupun liberal cenderung mempertahankan struktur sosial yang sudah ada beserta perbedaan tingkat sosial, sistem ekonomi kapitalis dan politik. Perbedaannya dalam melihat masalah kemiskinan, kaum konservatif cenderung menyalahkan orang miskin yang dinilai tidak cukup berusaha menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada yang disediakan oleh masyarakat, sedangkan kaum liberalis memandang bahwa kesempatan yang ada belum cukup memadai sehingga orang miskin tidak bisa hidup sebagaimana diharapkan. Maka bagi kaum liberal usaha yang harus dilakukan ialah bagaimana memungkinkan orang miskin hidup dalam struktur sosial yang sudah ada, sedangkan kaum konservatif lebih cenderung membiarkannya.

Selanjutnya, dalam pandangan teori konflik menjelaskan bahwa penyebab kemiskinan adalah struktur sosial yang ada. Sebab struktur sosial adalah dominasi

¹⁹³ A Suryawisata, "Analisa Sosial", dalam J.B Banawiratma, S.J., op. cit., hal. 15-33.

sekelompok kecil dan kepatuhan serta ketundukan sebagian warga masyarakat atas dominasi kelompok kecil tersebut. Bahkan masalah kultur dan mentalitas orang miskin yang dinilai sebagai penyebab kemiskinan oleh kaum konservatif dalam pandangan teori konsensus, menurut teori konflik sebagai akibat dari struktur sosial itu sendiri yang sengaja ditanamkan dan dipertahankan. Oleh karena itu, dalam pandangan teori ini, untuk mengatasi kemiskinan harus melalui perombakan struktur sosial yang ada ke arah yang lebih demokratis dan partisipatif.

Teori lain adalah ide tentang seleksi alam dan "survival of the fittest" yang dikemukakan oleh Darwin. Berkaitan dengan hal ini, Spencer (1961) telah mengelaborasi pemikiran Darwin dalam konteks kemasyarakatan, khususnya dalam upaya memahami fenomena kemiskinan. Menurutnya, perbedaan-perbedaan biologis antara anggota masyarakat manusia diyakini sebagai faktor penting dalam memahami terjadinya kemiskinan dan kemakmuran. Mereka yang miskin diyakini secara sederhana sebagai produk dari ketidaktegaran biologis. Sebaliknya mereka yang unggul secara biologis, dengan sendirinya akan menikmati tingkat kehidupan yang layak.

Gagasan memahami kemiskinan melalui kajian superioritas dan inferioritas biologis ini mendapat kritik dari banyak ahli. Cooley, melalui karyanya *Poverty* (1909) memberikan dimensi lain dari fenomena kemiskinan. Ia tetap mengambil ide dasar pemahaman Malthus-Darwin-Spencer tentang teori *unfitness*. Tetapi ia menolak kriteria biologis sebagai ide dasar penjelasannya. Menurutnya kemiskinan memang disebabkan oleh *unfitness*, tetapi bukan dalam pengertian biologis, melainkan dalam pengertian sosial. Pemahaman Cooley ini kemudian membuka dimensi baru dalam memahami masalah kemiskinan: Kemiskinan harus ditelusuri jejaknya pada struktur sosial yang tersedia dalam masyarakat.

Pemikiran Cooley ini hampir bersamaan diajukan oleh Simmel (1908). Dalam memahami kemiskinan, Simmel mengaitkannya dengan teori hak dan kewajiban. Menurutnya kaum miskin memiliki hak untuk dibantu, sementara kewajiban membantu ada dalam masyarakat dan merupakan tuntutan masyarakat

bagi dirinya sendiri. Logika dasar yang digunakan Simmel untuk mendukung argumentasinya adalah bahwa setiap makhluk manusia miskin memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum masing-masing dan hak untuk dibantu, terlepas dari kesediaan atau ketidaksediaan mereka untuk menerimanya. Dengan alasan tersebut, bagi Simmel, kewajiban untuk membantu kaum miskin bukannya dalam kerangka memenuhi hak kaum miskin untuk dibantu, tetapi justru untuk memenuhi *self of obligation* yang dituntut masyarakat dari diri sendiri. Dengan demikian hak kaum miskin untuk dibantu bukannya merupakan determinan yang melahirkan kewajiban bagi masyarakat. Keduanya muncul berdampingan secara bersamaan dalam masyarakat, tetapi terlepas satu sama lain.

Argumentasi Simmel ini telah meletakkan dasar awal ke arah pemahaman lain tentang kemiskinan. Logika Maltus-Darwin-Spencer yang menuding kaum miskin sebagai penyebab kemiskinannya sendiri, dengan demikian ditolak. Penolakan thesis ini semakin diperkuat oleh perkembangan terakhir di bidang sosial, ekonomi dan politik. Tingkat produktifitas dunia, terutama karena adanya revolusi teknologi dan sistem ekonomi, telah mencapai tingkat yang sama sekali berada di luar imajinasi Malthus yang cenderung meremehkan kapasitas manusia. Akan tetapi menurut Chenery (1976), fakta juga telah membuktikan bahwa pada saat bersamaan, kemiskinan terutama kemiskinan relatif terus bertahan, bahkan cenderung meningkat. Hal ini nampak terutama dari semakin meluasnya jurang ketimpangan antar kelas, bangsa, daerah dalam hal distribusi produksi dunia. Sebagai contoh adalah meningkatnya produktifitas pertanian sebagai akibat dari revolusi hijau, dalam kenyataannya tidak diikuti oleh menurunnya kemiskinan di banyak negara dunia berkembang. Bahkan terdapat petunjuk, revolusi hijau justru menyudutkan posisi para petani kecil dan lebih menguntungkan petani kaya.

Menurut Whyte (1965), Sejumlah fakta tersebut pada akhirnya membawa para pakar untuk mengkaji kembali masalah kemiskinan. Bagi sejumlah ahli, kemiskinan tidak sekedar kekurangan makan, tetapi bisa saja hadir ditengah-tengah masyarakat yang sudah secara teratur dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi inilah yang kemudian menggiring para ahli untuk menempatkan

kemiskinan sebagai fenomena relative deprivation atau membedakan secara tegas antara kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut (relative and absolute poverty). Dalam pandangan Whyte, kemiskinan lahir ketika seseorang membandingkan dirinya dengan menggunakan standar yang dimiliki anggota kelompok lain yang hidup di sekelilingnya. Dengan demikian, kaum miskin tidak hanya terbatas pada mereka yang secara riil miskin, tetapi juga termasuk mereka-mereka yang oleh orang lain dikategorikan miskin.

Fakta inilah yang kemudian melahirkan pendekatan sosial dalam memahami masalah kemiskinan. Perdebatan tentang masalah kemiskinan ini dilanjutkan oleh Lewis (1966) melalui konsep budaya kemiskinan. Yaitu suatu sub-kultur yang menurutnya hidup dalam masyarakat kapitalis barat. Sub-kultur ini memiliki struktur dan rasionalitas sendiri yang berbeda dengan sub-kultur lainnya. Budaya ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan sekali budaya kemiskinan ini terbentuk, cenderung mengental untuk kemudian mengeras, yang menyebabkan pendukungnya sulit untuk melepaskan diri dari belitannya. Budaya kemiskinan ini menurut kajian Lewis tidak secara otomatis terdapat pada setiap masyarakat miskin. Artinya, tidak setiap orang atau masyarakat miskin memiliki budaya kemiskinan ini terdapat ciri-ciri khusus yang menandai masyarakat miskin dengan budaya kemiskinan, yaitu: a) masyarakat yang hidup dalam lingkungan budaya kemiskinan terpisah dan tidak bersinggungan dengan institusi-institusi utama yang ada dalam masyarakat, b) kemiskinan, segregasi, deskriminasi, ketakutan, kecurigaan, apatisme dan berkembangnya alternatif prosedur dan institusi lain dalam masyarakat kawasan kumuh adalah sebab-sebab di balik keterpisahan dan ketidakbersinggungan di atas, c) mereka yang hidup dalam budaya kemiskinan menghasilkan dan menerima imbalan yang sedikit, yang disebabkan oleh pangangguran yang kronis, kelangkaan cadangan pangan dan sebagainya; d) golongan berbudaya kemiskinan ini pada umumnya sadar akan nilai-nilai seperti yang dimiliki kelompok atau kelas menengah, misalnya nilai perkawinan sah tetapi sangat sedikit dari mereka yang mengikuti sistem nilai tersebut, e) umumnya golongan yang hidup dalam lingkungan budaya kemiskinan

memusuhi lembaga-lembaga penting yang dipandang sebagai kelas dominan. Oleh karenanya dolongan ini secara sosial politik memendam potensi untuk protes dan berontak, f) di luar lingkungan keluarga inti (besar), golongan ini tidak memiliki organisasi yang berarti; g) individu yang tumbuh dalam lingkungan budaya kemiskinan mewarisi perasaan fatalistik yang kuat, dan; h) kelompok ini cenderung untuk melihat ke dalam dan pengetahuan mereka terbatas pada lingkup ketetangaan dan cara hidup sendiri.

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka profil kemiskinan tersebut meliputi Pertama, kemiskinan bukanlah masalah kesejahteraan belaka, tetapi juga masalah kerentanan (vulnerability). Kedua, masalah kemiskinan adalah masalah powerlessness (ketidakberdayaan), yaitu perasaan impotensi emosional dan sosial dalam menghadapi elit masyarakat dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut kehidupan dirinya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, ketidakberdayaan mengakibatkan penyakit dan kematian, kekumuhan dan kekotoran Ketiga, kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja sehingga tidak memiliki peran aktif dalam bentuk partisipasi dalam setiap pembangunan Hal ini disebabkan posisi tawar mereka dalam struktur hubungan sosial sangat lemah. Keempat, kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau sebagian besar dan penghasilan untuk konsumsi pangan dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas. Sehingga gizi amat rendah yang kemudian berakibat pada produktivitas yang rendah juga. Kelima, kemiskinan ditandai oleh tingginya dependency ratio, karena besarnya keluarga, dan beberapa diantaranya masih balita. Keenam, kemiskinan juga dapat terwujud dalam bentuk rendahnya akses pada pasar, karena aksesibilitas yang rendah dan kondisi alam yang miskin Terakhir ketujuh, kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.¹⁹⁴

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kemiskinan adalah keserta-kurangan p kepaan serta kelemahan ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain di kalangan

¹⁹⁴ lihat Tjorowinoto, op cit, hal. 112-115

masyarakat Islam akibat ketidak-mampuan mereka dalam memanfaatkan potensi mental maupun fisik yang telah diatur dalam sistem masyarakat Islam.

4. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Berpijak dari uraian sebelumnya, bahwa kemiskinan merupakan fenomena sosial yang multidimensional. Artinya kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan struktural, psikologis, kultural, ekologis dan sebagainya. Pemahaman terhadap fenomena kemiskinan dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan dan kekurangan sumberdaya (faktor ekonomi), tetapi juga harus dikaitkan dengan faktor faktor lainnya.

Dengan beragamnya faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut, maka untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan model strategi penanggulangan yang sesuai dengan kemiskinan tersebut. Dalam hal ini, Guimaraes telah menawarkan beberapa strategi sebagai berikut:

Pertama, strategi de-lingking. Asumsi dasar strategi ini adalah bahwa salah satu sumber utama kemiskinan adalah bersifat struktural, yaitu adanya hubungan depedensi antara kaum miskin dan elit masyarakat, rentenir, dan birokrat. Hubungan depedensi ini telah mengakibatkan lestarnya kemiskinan, maka satu-satunya jalan adalah dengan "mematahkan" (de-lingking). Melalui strategi ini diharapkan potensi kaum miskin untuk tumbuh dengan kekuatan sendiri (kemandirian) dan senantiasa berkembang.

Kedua, strategi desentralisasi. Yaitu dengan menempatkan pusat pengambilan keputusan pada unit yang paling dekat dengan kelompok sasaran (kaum miskin). Melalui pendekatan ini akan terwujud keputusan-keputusan yang dapat merefleksikan aspirasi dan kepentingan objektif kaum miskin.

Ketiga, strategi integrasi spasial. Strategi ini menghendaki keterpaduan antara program pembangunan di tingkat daerah dengan desa atau kota sebagai subsistemnya. Strategi ini selanjutnya akan memungkinkan terjadinya hubungan

koza-desa dalam perencanaan pengentasan kemiskinan, yaitu dengan memperhatikan struktur dan peranan inekanisme pasar

Keempat, strategi pembangunan kultural. Kemiskinan pada hakikatnya juga berakar pada kultur masyarakat. Oleh karenanya dalam pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan aspek kultural.¹⁹⁵

Adapun dalam pendekatan sosiologi pembangunan, secara konseptual bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang harus menyangkut reorganisasi dan reorientasi system ekonomi dan sistem sosial secara keseluruhan. Di samping peningkatan pendapatan dan pengeluaran, setiap upaya pengentasan kemiskinan juga harus menyangkut perubahan radikal struktur kelembagaan, struktur sosial, struktur administrasi, serta perubahan sikap, adat kebiasaan dan kepercayaan.¹⁹⁶

Dimensi-dimensi strategi menanggulangi kemiskinan, menurut Esman harus mencakup keseluruhan makna yang terkait dengan konteks pembangunan, yaitu: a) pertumbuhan ekonomi, bentuk ini sangat diperlukan sebagai dasar material bagi kehidupan yang lebih baik, b) keadilan, yaitu lahimnya distribusi yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan ekonomi; c) kemampuan, yaitu meningkatnya keterampilan kelembagaan dan insentif yang memungkinkan masyarakat untuk mengatasi yang muncul di sekitarnya; d) keotentikan, perbedaan kualitas yang diperoleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ditunjukkan dalam praktek lembaga-lembaga pembangunan, e) pemberdayaan, yaitu pengembangan kesempatan individu dan kelompok untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kegiatan pembangunan, baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Tjokrowinoto, op cit, hal 116-118

¹⁹⁶ Lihat Michael Todaro, *Economic Development in the Third World*, (New York: Logman, 1977). hal 11.

¹⁹⁷ Milton J. Esman, *Management Dimensions of Development*, (West Hartford Connecticut Kumarian press, 1991), hal 6.

Berpijak pada model diatas, maka artikulasi setiap strategi pembangunan dapat merupakan proses perbaikan menuju bentuk yang lebih baik. Namun demikian, meskipun usaha menuju situasi yang lebih baik telah dilakukan, tidak berarti usaha tersebut mampu mewujudkan semua yang direncanakan dan dicita-citakan.

Sebagai contoh, model strategi pembangunan yang dipakai di negara-negara berkembang dengan memakai pola mekanisme "efek tetesan ke bawah. Dalam strategi ini, pendapatan dan kesejahteraan warga masyarakat dilihat sebagai proses yang akan terjadi dengan sendirinya sebagai fungsi dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pendapatan dan kesejahteraan warga masyarakat di sini akan terjadi melalui mekanisme "efek tetesan ke bawah. Akan tetapi berdasarkan pengalaman di banyak negara berkembang, mekanisme tetesan ke bawah yang diharapkan oleh teori-teori pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Sebaliknya, yang terjadi seringkali justru efek penyedotan ke atas."¹⁹⁸

Masih menurut ul Haq, kegagalan strategi pembangunan yang tertumpu pada pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, pada akhirnya mendorong munculnya strategi baru yaitu strategi yang berwawasan pada pemerataan. Strategi ini mencoba mengatasi masalah kemiskinan secara langsung dan tidak hanya melalui mekanisme tetesan ke bawah, tetapi dengan menyalurkan pelayanan dan kebutuhan pokok masyarakat miskin secara merata. Dalam strategi tersebut muncul dua model pembangunan yaitu model "Redistribution with GrowthTM dan model "Basic Needs".

Model redistribusi dengan pertumbuhan adalah melalui strategi campur tangan dengan sengaja untuk membagi kembali sumber-sumber daya kepada golongan masyarakat miskin. Pada konteks ini, golongan miskin dipenuhi modal yang lebih besar untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan bagi kebutuhan mereka. Hal ini berarti harus melakukan reorientasi dari strategi pertumbuhan

¹⁹⁸ Mahbub ul Haq, *Tirai Kemiskinan: Tantangan-Tantangan untuk Dunia Ketiga* (Jakarta) Yayasan Obor, 1983), hal 26.

ekonomi yang terpusat, kepada investasi yang berhubungan langsung dengan orang miskin. Penguasaan penduduk miskin atas kekayaan tersebut akan menambah produktivitas golongan miskin. Sehingga akan berdampak pada penambahan pendapatan mereka. Menurut Chenery, dalam jangka pendek model ini dapat merugikan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dalam jangka panjang pertambahan produktivitas dari pendapatan golongan penduduk miskin akan meningkatkan pendapatan semua anggota masyarakat.¹⁹⁹

Redistribusi dengan tema pertumbuhan, yang titik beratnya adalah menjadikan kaum miskin lebih produktif, selanjutnya melahirkan aliran "kebutuhan dasar". Model kebutuhan dasar beranggapan bahwa kemiskinan hanya dapat dihilangkan apabila kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi. Oleh karena itu, model kebutuhan dasar menegaskan perlunya setiap manusia memperoleh "absolute necessity", yaitu pemenuhan kebutuhan dasar yang memungkinkan setiap manusia mampu mengaktualisasikan dirinya. Perhatian utama dari model kebutuhan dasar adalah mencari kriteria yang benar untuk menilai hasil-hasil pembangunan. Yaitu seberapa jauh kebutuhan dasar warga masyarakat telah terpenuhi. Apabila terdapat masalah dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini, maka masalah tersebut harus segera dipecahkan, kalau perlu melalui pelaksanaan program-program bantuan. Dalam konteks ini maka Indeks Mutu Hidup atau Physical Quality of Life Index (PQLI) merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan yang diusulkan untuk menggantikan Gross National Product (GNP) sebagai ukuran keberhasilan pembangunan pada strategi pertumbuhan ekonomi. Meskipun kedua strategi yang telah diuraikan di atas tidak menghilangkan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun dalam orientasinya sangat memperhatikan dan mementingkan masalah kemiskinan dan pemerataan melalui kebijaksanaan redistribusi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin."²⁰⁰

¹⁹⁹ lihat Chenery et al., *Redistribution With Growth*. (Great Britanian Oxford University Press 1974), hal 79

²⁰⁰ Ibid.

Kendati kedua model di atas berhasil mempengaruhi kebijaksanaan pembangunan di negara-negara dunia ketiga, namun pada realisasinya hanya mampu memecahkan masalah kemiskinan dan pemerataan secara parsial. Pelaksanaan pembangunan di sini tetap bertumpu dan didominasi oleh usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui proses produksi. Sedang usaha pemerataan pembangunan dilakukan dengan melaksanakan berbagai bentuk program bantuan kepada masyarakat miskin. Akibatnya masyarakat miskin menjadi semakin tergantung kepada berbagai jenis pelayanan dan program pembangunan pemerintahan.²⁰¹ Dengan demikian strategi pembangunan kebutuhan dasar ini cenderung memanasifestasikan charity strategy dari pada penumbuhan kemampuan masyarakat untuk mandiri.

Kelemahan strategi pertumbuhan ekonomi dan penerapan pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan ini, pada akhirnya memunculkan alternatif baru, yang dipandang lebih mampu menjawab tantangan pembangunan pada masa sekarang. Strategi baru ini diperkenalkan oleh Adelman (1973), yakni depauperization (peniadaan kemiskinan). Depauperization merupakan kombinasi yang seimbang dari keadilan dan pertumbuhan Akan tetapi karena tekanannya yang eksplisit pada aspek dinamis dan non-material dari kesejahteraan perorangan, maka depauperization lebih berdekatan pada keadilan Hal ini berarti tujuan utama dari pembangunan bukan saja untuk membantu golongan miskin untuk mencapai suatu tingkat hidup yang layak, tetapi juga menciptakan kondisi-kondisi yang akan dapat memberikan kemungkinan kepada kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mewujudkan diri sendiri.

Pemikiran Adelman yang terkandung dalam konsep depanperication in menyatakan bahwa kejahatan terbesar-yang dipraktekkan secara luas-bagi umat manusia adalah menciptakan dan memaksakan kondisi-kondisi melalui rimangat

²⁰¹ David C. Korten dan Rudi Klauss (ed), *People Centered Development* (Connecticut Kumarian Press, 1984), hal 186

rintangan institusional dan dinamika struktural yang mengakibatkan terbuangnya 90 persen potensi umat manusia untuk suatu kehidupan yang memuaskan, kreatif, dan memungkinkan perkembangan seseorang Melalui straterp depusperiation ini diharapkan potensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan peningkatan kemampuan manusia itu sendiri. Strategi ini sejalan dengan pemikiran Frederickson (1984) tentang administrasi negara yang tidak sekedar bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas, tetapi juga harus mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Strategi pengentasan kemsikiman yang dikemukakan oleh Adelman ini telah diterjemahkan oleh Korten sebagai strategi pembangunan yang berpusat pada manusia. Pendekatan ini berusaha untuk melakukan transformasi pembangunan berdasarkan nilai-nilai pada rakyat. Pendekatan pembangunan yang berfokus pada rakyat ini mengambil landasan yang berpijak bukan pada birokrasi dan program program atau proyek-proyek pembangunan yang dirancang dan dikelola secara terpusat, tetapi masyarakat atau komunitas itu sendiri, seperti kebutuhan kebutuhannya, kemampuan-kemampuannya, dan penguasaan atas sumberdaya dan nasib mereka sendiri. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pemberiaan kekuatan (pemberdayaan), yaitu kemampuan untuk mengelola sumberdaya sumberdaya produktif di dalam rangka kepentingan masyarakat Dan oleh mayoritas penduduk negara-negara dunia ketiga terdiri atas penduduk miskin, adalah logis apabila aplikasinya mempersyaratkan partisipasi yang dalam dari mayoritas penduduk miskin di dalam proses pembangunan.²⁰²

Strategi ini nampaknya menawarkan potensi untuk memperbaiki proses pelaksanaan pembangunan dengan memberi kekuasaan kepada individu, kelompok penerima manfaat lokal, masyarakat dan struktur pembangunan lokal lain, agar berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi dan lebih

²⁰² Ibid

menjamin tumbuhnya kemandirian masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan.

Ciri-ciri pokok pendekatan pembangunan yang terpusat pada manusia menurut korten adalah: a) keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang didalamya rakyat memiliki identitas dan peranan yang dilakukan sebagai partisipan yang dihargai, b) fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerah mereka sendiri, c) pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi, d) dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses social learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar, e) budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi, yang menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, yang berinteraksi satu sama lain guna memberikan umpan balik pelaksanaan yang lebih cepat dan kaya kepada semua tingkat organisasi yang membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horizontal dapat terwujud, dan f) proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan lembaga lokal, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal.²⁰³

Dari berbagai pemikiran strategi pembangunan yang telah diuraikan, strategi pembangunan yang berorientasi pada manusia merupakan strategi pembangunan yang paling tepat bagi usaha pengentasan kemiskinan Strategi ini

²⁰³ Tjokrowinoto, op.cit, hal. 44

cenderung memandang manusia bukan sekedar obyek pembangunan, tetapi memiliki utama dari setiap usaha pembangunan.

Dalam penelitian ini, strateginya ditujukan kepada masyarakat Islam untuk keluar dari jerat kemiskinannya dengan merealisasikan sistem masyarakat Islam. Yakni dengan mengoptimalkan empat bagian dalam sistem masyarakat Islam secara komprehensif, yakni pemberdayaan kaidah sosial Islam yang harus menjadi pijakan normatif dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, pelaku pembuat kebijakan pembangunan (pemerintah) dalam merencanakan dan menjalankan aturan bermasyarakat Islam dan, pemberdayaan potensi serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya secara penuh untuk ikut serta dalam pembangunan yang telah direncanakan

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan analisa dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan teori dasar, yang oleh Bodan dan Biken disebut dengan istilah paradigma. Paradigma ini diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep atau preposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian Fokus atau orientasi teoritisnya adalah cara memandang dunia.²⁰⁴

Penelitian tesis ini akan menggunakan pendekatan analisa ilmiah yang berkaitan dan memiliki konsentrasi dengan objek rumusan masalah-masalah penelitian. Oleh karena penelitian ini akan memfokuskan pada masalah hubungan kausalitas sebuah sistem masyarakat yang berpijak pada satu agama (baca: Islám) dengan masalah kemiskinan (upaya penanggulangannya), maka peneliti telah mengambil pendekatan struktur fungsional dalam menganalisanya nanti.

Secara historis, pendekatan struktur fungsional telah lama menjadi kerangka yang begitu penting untuk melakukan penelitian sosiologi atau ilmu kemasyarakatan.²⁰⁵ Mazhab ini muncul sebagai reaksi yang sistematis dalam

²⁰⁴ Moeloeng, Op.Cit, hal 8.

²⁰⁵ SP Varma, Teori Polik Modern (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal 68

menetapkan orientasi intelektual untuk memenuhi kebutuhan mengenai kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan agama pada masyarakat kontemporer. Hal tersebut telah digambarkan sebagai antisipasi khusus bagi persoalan-persoalan yang terjadi setelah perang, post-defresi, sosial kontemporer, ekonomi dan teknologi. Orientasi filosofis para elit intelektualnya merupakan representasi yang aplikatif dalam dunia pemikiran bangsa Eropa abad-19, khususnya ketika memperhatikan hukum-hukum alam, penetapan progressivitas perubahan sosial, kelompok pembaharu sosial, dan analogi organik masyarakat dalam konteks sistem nilai pragmatis serta non-idealistik.²⁰⁶

Secara garis besar, konsep umum pendekatan analisa struktur fungsional berprinsip pada tiga pertanyaan mendasar, yakni: (a) fungsi dasar apa yang harus dipenuhi dalam setiap sistem, (b) oleh struktur yang bagaimana dan (c) di bawah keadaan apa. Secara khas suatu fungsi didefinisikan sebagai hasil yang dituju dari suatu pola tindakan, yang diarahkan bagi kepentingan sistem. Oleh karenanya, suatu fungsi akan selalu berurusan dengan akibat-akibat dari suatu pola tindakan yang ditunjukkan bagi suatu sistem.²⁰⁷

Berkaitan dengan hal di atas, penting untuk membedakan antara fungsi dengan disfungsi. Menurut Robert K. Merton, fungsi adalah akibat yang nampak, yang ditunjukkan bagi kepentingan adaptasi dan penyetelan (adjustments) dari suatu sistem tertentu, dan disfungsi adalah akibat-akibat yang nampak, yang mengurangi daya adaptasi dan penyetelan. Hal itu bukan berarti bahwa akibat-akibat yang bersifat fungsional dan disfungsional selalu dihasilkan oleh pola-pola tindakan yang berbeda, atau pola-pola yang selalu bekerja dalam tingkat sistem yang sama. Bisa saja terjadi, pola-pola tindakan yang fungsional bagi seluruh sistem sosial, disfungsional bagi individu atau kelompok, demikian pula sebaliknya. Merton membuat perbedaan yang sangat bermanfaat, antara fungsi nyata (manifest) dengan fungsi yang bersifat (latent). Fungsi yang nyata bersangkutan paut dengan pola-pola

²⁰⁶ lihat Graham C Kinlich, *Sociological Theory and Development and Major Paradigms*, dalam *Topik Utama Structure Fungsionalism*, (Florida: Florida State University, tt)

²⁰⁷ MSP Varma, *op.cit.*, h 68

tindakan yang konsekuensinya benar-benar diharapkan dan dikenal. Sedangkan fungsi laten berurusan dengan pola-pola tindakan yang konsekuensinya tidak diharapkan dan tidak dikenal.²⁰⁸

Selain konsep tentang fungsi, konsep lain dalam struktur fungsional adalah "struktur". Sementara fungsi berurusan dengan akibat-akibat atau konsekuensi konsekuensi yang melibatkan tujuan-tujuan serta proses-proses dari suatu pola tindakan, struktur menunjukkan kepada susunan-susunan dalam sistem yang melakukan fungsi-fungsi. Suatu pemikiran bahwa fungsi tertentu dapat dipenuhi oleh banyak struktur yang berbeda-beda.²⁰⁹ Dua konsep inilah yang secara umum ada dalam struktur fungsional. Satu sisi menggambarkan tentang konsep yang berhubungan dengan fungsi, lainnya mengaitkan pada hubungan dengan struktur suatu sistem tertentu. Oleh karena itu, menurut Eisenstadt,²¹⁰ konsep umum struktur fungsionalis mengetengahkan dua sebab utama perubahan dalam sistem sosial, pertama, kecenderungan tak seimbang yang ada pada setiap hubungan yang terjadi antara suatu sistem sosial dengan lingkungannya, kedua, ketegangan yang hidup di antara unsur normatif dan struktur dari setiap sistem sosial. Bahkan lebih jauhnya, menekankan pada sumber-sumber baru yang sangat memungkinkan untuk menciptakan tingkatan baru diferensiasi struktural. Hal ini merupakan suatu sumber penting bagi perubahan dan perkembangan orientasi nilai baru yang dapat menciptakan sistem kontrol utama dengan mana perubahan dapat melembaga.

Secara umum, teori-teori mazhab struktur fungsional telah berpandangan bahwa munculnya suatu fakta sosial dan tindakan sosial akan bergantung pada hubungan-hubungan antar sub-sistem dalam sistem sosial. Yakni, adanya saling ketergantungan dan interaksi antar sub-sistem. Satu tipe persyaratan fungsional yang mendasar adalah untuk menjamin suatu tingkat kesesuaian minimal antara tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam struktur sosial. Persyaratan fungsional lainnya telah ditunjukkan oleh mazhab sosiologi ini dalam suatu sistem sosial,

²⁰⁸ Ibid, h. 69

²⁰⁹ Ibid, hat 70

²¹⁰ SN Eisenstadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal 33

yakni adanya keseimbangan tertentu antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bersaing Di sini harus ada prosedur untuk menjamin tegaknya tingkat keharmonisan minimal antarperan yang berbeda. Artinya, harus jelas adanya mekanisme untuk mengatasi masalah pembagian fasilitas, penghargaan, otoritas dan kekuasaan, serta mengintegrasikan berbagai tipe tindakan ke dalam suatu sistem Oleh karena itu untuk mewujudkan persyaratan-persyaratan fungsional tersebut menurut mazhab ini adalah harus dikembangkan mekanisme kontrol sosial dalam suatu sistem social.²¹¹

Berkaitan dengan penelitian ini, menurut pandangan peneliti, pendekatan struktur fungsional dapat menjadi alat analisis yang andal dalam memetakan interpretasi Qardhawi tentang kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam dan upaya penanggulangannya Pemetaan tersebut meliputi (1) mengidentifikasi persyaratan-persyaratan fungsional yang pokok dalam sistem masyarakat yang sedang diteliti; (2) mengkategorisasi sebab dan bentuk fakta sosial akibat adanya disfungsional sistem masyarakat, dan; (3) menganalisis struktur-struktur tertentu (elemen-elemen strategis dalam sebuah masyarakat) dengan mana persyaratan persyaratan fungsional ini dapat dipenuhi.

Secara empiris, pendekatan analisa struktur fungsional terbukti sangat bermanfaat dalam penelitian tentang pola pemeliharaan serta pengaturan suatu system. Artinya, bagaimana syarat-syarat dasar dari pemeliharaan suatu sistem dapat dipenuhi melalui penggunaan mekanisme struktural dan kelembagaan tertentu. Bagaimana suatu keseimbangan yang layak antara konsekuensi-konsekuensi fungsional dan disfungsional dari berbagai pola tindakan yang dapat dipertahankan serta keadaan-keadaan yang akan mengakibatkan kemacetan dalam suatu sistem."²¹²

²¹¹ Jhonson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, (Jakarta Gramedia, 1990), hal 124-125

²¹² SP Varma, Teori Politik Modern (Jakarta PT Raja Grafindo Persails, 1995), hal 70-71

Oleh karena itu dalam meneliti masalah kemiskinan dan upaya penanggulangannya di kalangan masyarakat Islam, pendekatan struktur fungsional dapat diandalkan guna membedah akar dan bentuk-bentuk kemiskinan sebagai masalah sosial kemudian melihat elemen sistem masyarakat Islam yang diarahkan untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

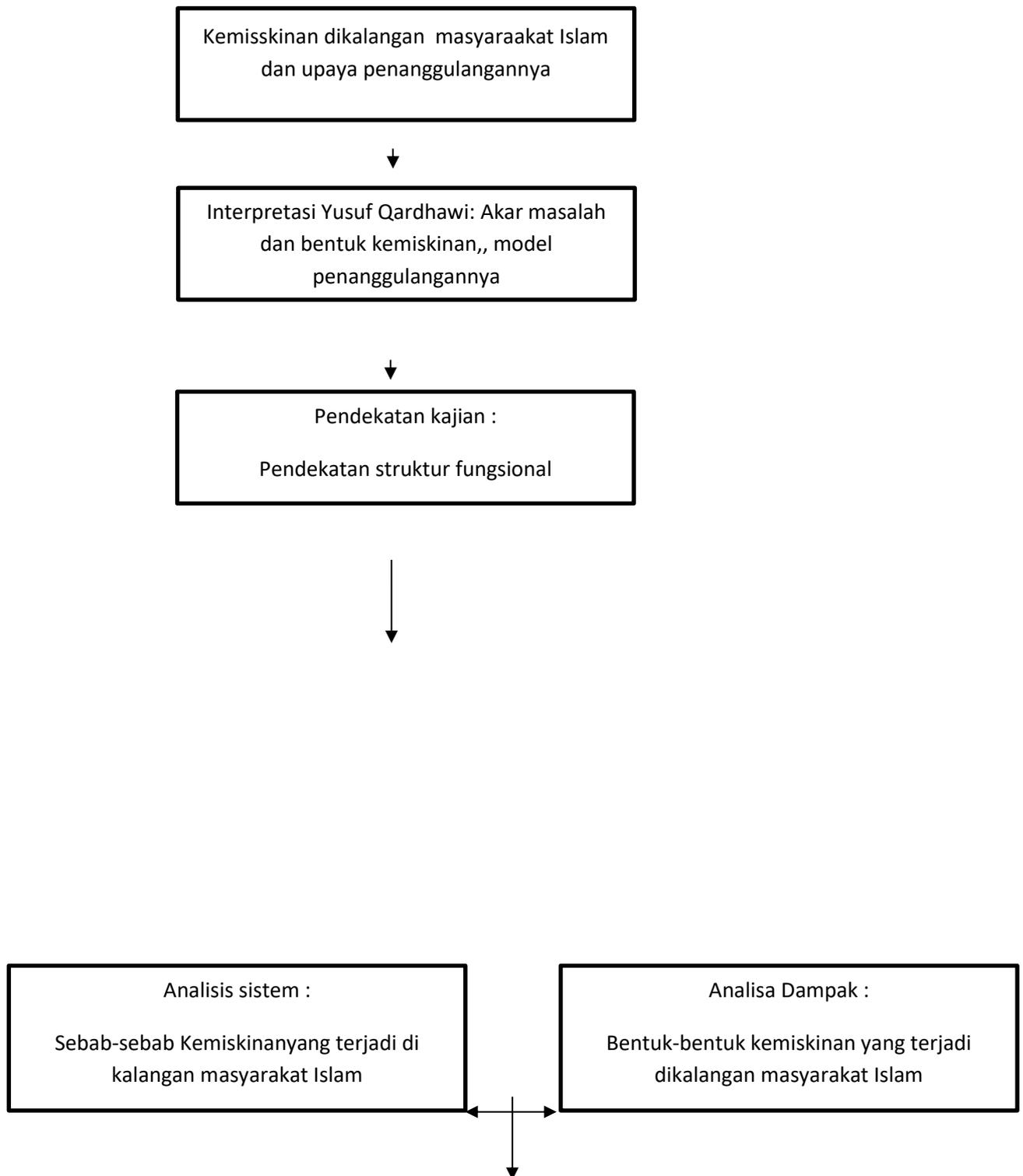
F. Disain Penelitian

Abstraks peta pemikiran penelitian merupakan proses menuju tujuan dan orientasi penelitian yang akan dilakukan dengan sistematis, jelas, terpola, akurstif serta orientatif, dan hal ini digambarkan dalam disain global penelitian Nasution²¹³ menyatakan bahwa desain penelitian merupakan sesuatu yang penting dalam perencanaan penelitian. Oleh karena di dalamnya memuat bagaimana cara yang akan dilakukan, dan cara menganalisa data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian dan memberikan acuan bagi penelitian. Begitupun menurut Atmadilaga,²¹⁴ mengartikan desain penelitian digambarkan secara global Artinya sekedar gambaran global tentang sifat pendekatan penelitian yang lazimnya disebut dengan disiplin ilmu yang bersangkutan, dan menyangkut pemilihan metode yang akan dilakukan dalam penelitian.

²¹³ S Nasution, *Metode Research* (Jakarta Jemars, 1982), hal 32

²¹⁴ Didi Atmadilaga *Menghayati Ilmu dari Segi Filsafat Ilmu. Metodologi dan Sonilisasi lim* Bandung Paska Sarjana UNPAD, 1989), hal 46

Dalam penelitian ini, desain yang akan digambarkan adalah secara global.
Yakni sebagai berikut:



BAB IV

INTERPRETASI YUSUF QARDHAWI TENTANG KEMISKINAN DI KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Pilar-Pilar Utama Masyarakat Islam

Islam menaruh perhatian terhadap masyarakat (mujtama) seperti perhatiannya terhadap individu (fard). Dalam kitab "Malamih Al-Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduhu,"²¹⁸ Qardhawi telah berpandangan bahwa masyarakat dan individu adalah satu sama lain saling mempengaruhi dan memiliki ketergantungan secara dominan. Masyarakat itu tidak lain kelompok individu individu yang mana mereka terikat dengan ikatan tertentu. Kebaikan individu adalah suatu keharusan bagi kebaikan suatu masyarakat. Oleh karena itu, individu adalah bagaikan batu bata dalam suatu bangunan, jika tidak ada kebaikan pada bangunan maka batu batanya rapuh.²¹⁹

Bahkan lebih ditegaskan oleh Qardhawi bahwa tidak ada kebaikan bagi individu kecuali berada dalam suatu masyarakat yang membantunya untuk tumbuh "sehat", proses sosialisasi yang benar dan berperilaku lurus. Masyarakat merupakan tanah dimana benih individu tumbuh, berkembang dan mekar membesar dalam iklimnya, memanfaatkan langit, udara dan sinar mataharinya Oleh karenanya, Nabi Muhammad tidak melakukan hijrah ke Madinah melainkan suatu upaya menuju satu masyarakat masa depan (masyarakat harapan) dimana akibah Islam, syiar dan syariatnya dapat terwujud. Menurut Qardhawi, Islam tidak memandang manusia secara terpisah, akan tetapi melihatnya sebagai satu anggota dalam suatu masyarakat. Och karena itu, perintah dan tugas syari'at sebagai sistem sosial universal ditujukan padanya dalam konteks kolektif (khitab jamai). Hal itu

²¹⁸ Qardhawi, Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nasyudulm, terjemahan (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), hal vii.

²¹⁹ Sebuah hadist menyebutkan bahwa "Orang Mu'min terhadap orang Mu'min, tak obahnya bagaikan suatu bangunan yang bagian-bagiannya saling kuat-menguatkan (Hadist Riwayat Muslim)

dikarenakan kewajiban-kewajiban syari'at Islam berdampak pada proses tolong-menolong dan saling gotong royong dalam memikul serta mengembannya, baik dalam tugas ibadah (ta'abudi) maupun tanggungjawab moral dalam setiap interaksi sosial.²²⁰

Dalam konteks sosiologi struktur-fungsional, individu merupakan salah satu sub-sistem dalam masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh Kinsley Davis (1959), bahwa hubungan manusia secara individu dengan masyarakatnya sebagai hal yang bersifat fungsional. Dia beranggapan bahwa suatu masyarakat akan bergantung pada cara-cara peranan atau perilaku individu yang akan mengakibatkan timbulnya suatu gejala sosial. Dia juga menjelaskan tentang makna sosial bagi individu. Menurut Davis, setiap individu muslim harus terkait dengan keharusan moral untuk memandang dan memperlakukan masyarakat sebagai sebuah jasad yang tunggal" (al-jasad al-wahid).²²¹ Oleh karena itu, ditegaskan oleh Parson, bahwa masyarakat harus dipahami sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang berkaitan satu sama lain, masing-masing bagian tidak dapat dipahami secara terisolasi dari sistem keseluruhan. Perubahan dalam bagian-bagian tertentu samapai tingkat tertentu dapat mengakibatkan perubahan-perubahan pada bagian-bagian lain dari sistem serta menuntut adanya reorganisasi sistem secara keseluruhan. Dalam menganalisis bagaimana suatu sistem sosial dapat menjalankan

²²⁰ *ibid*, hal 2. Dalam tafsiran mazhab struktur fungsional bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem, yang saling berhubungan, saling ketergantungan, selalu berkembang memiliki keseimbangan orientasi secara holistik, dan mewakili sistem-sistem kebutuhan atau fungsi-fungsi pokok yang harus ada dan berjalan dalam sebuah komunitas manusia. Dalam hal ini, struktur serta sistem sosial merupakan representasi dari fungsi atau beberapa sistem kebutuhan pokok manusia berkelompok lihat Graham C. Kinlich, *Sociological Theory Its Development and Major Paradigms*, dalam *Topik Utama Structure Fungsionalism*. (Florida. Florida State University, tt.) Bahkan Mazhab ini telah beranggapan bahwa masyarakat memiliki tujuan yang bendak dicapai berdasarkan sistem yang telah ditetapkan dan dikehendaki untuk mempertahankan eksistensinya. Sistem itu terdiri dari perancangan aksi, kaidah-kaidah, gagasan gagasan, dan teknik-teknik untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sosial, dan realitas lingkungan Masyarakat sebagai sebuah kelompok manusia tidak saja berubah secara konstan, akan tetapi juga bergantung pada pertambahan fungsi, pengaruh-pengaruh positif sebagai faktor pengikat atau pemersatu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Kelompok*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hal 79

²²¹ Hadist Nabi menyebutkan bahwa: "Perumpaan orang-orang Mu'min itu dalam cinta-mencintai, kasih-mengasihinya dan santun-,menyantuninya, tidak ubahnya seperti satu tubuh, yang apabila menderita satu anggota dari tubuh itu, maka ikut pula keseluruhan tubuh. (Hadist Riwayat Muslim)

fungsi pemeliharaan dan menciptakan keseimbangan, Parson selalu menggunakan nilai yang dianut dan diterima secara umum oleh suatu masyarakat tertentu.²²²

Nilai yang dianut dan diterima secara umum dalam suatu masyarakat tersebut pada konteks masyarakat Islam, menurut pandangan Qardhawi adalah agama (Ad-Din). Di dalamnya mengandung sistem menyeluruh berupa syari'at Islam (sistem Islam). Menurut Qardhawi dalam kitab, "Syari'atu al-Islamiyah khuluduhu wa Sholahuha li tathhbiqi li kuli Zamaninn wa makanin", sistem Islam ini mampu berfungsi dalam memelihara dan menciptakan keseimbangan suatu masyarakat. Secara historis, sistem nilai sosial Islam tersebut telah mampu membuktikan untuk memenuhi hajat masyarakat yang dikuasanya la dengan keunggulannya mampu memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ketika dipraktekkan pada masa Rasulullah, baik waktu di Madinah maupun masa paska futeh Mekkah, syari'at Islam mampu mengayomi ummatnya dengan janji putusan hukum berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini menurut Qardhawi, sebab sistem ini memenuhi syarat-syarat keadilan, keamanan, ketentraman dari kepuasan bathin. Selama tiga belas abad, sistem Islam telah mampu membuktikani sebagai kontrol sosial dalam semua aktifitas kehidupan individu maupun masyarakat.²²³

Masih dalam kitabnya tersebut, Qardhawi menyebutkan bahwa sebelum Islam hadir, bangsa Arab adalah bangsa yang paling rendah dan sengsara dalam hidupnya (sistem dan nilai sosial yang di anut secara umum tidak mencerminkan fungsi pemeliharaan dan keseimbangan pada masyarakat Arab). Kebobrokan nampak, kemiskinan mencuat, bangsa ini terbelenggu dalam kekejaman sistem sosial yang diperankan oleh bangsa Parsi dan Romawi Akan tetapi setelah kehadiran Islam dengan sya'riatnya, terjadi proses reorganisasi sistem secara keseluruhan. Fungsi-fungsi struktur sosial yang tidak adil, menganiaya, merendahkan martabat manusia berganti pada fungsi-fungsi sosial yang adil, melindungi dan menghormati martabat kemanusiaan.²²⁴

²²² Kahmad, *op.cit*, hal 55-56

²²³ Lihat: Qardhawi, *Syari'atu al-Islamiyah, khuluduhu wa Sholahuha li tathhbiqi li kuli Zamanion wa makarun*, terjemahan (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993), hal. 16-17.

²²⁴ *Ibid*, hal 60-62.

Dalam analisa struktur fungsional, Islam sebagai sistem sosial pada masa Rasulullah telah menjadi sumber nilai penting atas terjadinya perubahan dan perkembangan orientasi nilai baru yang dapat menciptakan sistem kontrol utama bagi bangsa Arab jahiliyah."²²⁵ Secara teoritis, sebab utama terjadi perubahan sistem sosial bangsa Arab itu adalah Pertama, adanya kecenderungan tak seimbang yang terdapat pada setiap hubungan yang terjadi pada sistem sosial dengan lingkungan bangsa Arab pada saat itu, yakni adanya intervensi dan dominasi yang kuat dari sistem sosial bangsa Parsi dan Romawi dan mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan-hubungan antar sub-sistem pada bangsa Arab, dan; Kedua, adanya ketegangan kuat (diferensiasi atau deviasi sosial) yang hidup di antara unsur normatif dan struktur dalam sistem sosial bangsa Arab.²²⁶

Dalam kitabnya "Min Fighid Daulah Fil-Islam". Qardhawi menegaskan bahwa tabiat sistem Islam diatas merupakan manhaj sosial yang dapat menuntun, menyetir dan mengarahkan dan menetapkan hukum, mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bersosial. Dengan kata lain, sistem Islam mampu membangun suatu pemikiran dan perilaku, yang seluruh bangunannya didirikan pada prinsip-

²²⁵ Menurut Abul A'la Maududi, secara ekstrim Islam dibawah kenabian Muhammad telah memberikan orientasi hidup bangsa Arab pada saat itu, berupa fungsi perbaikan kondisi masyarakat dengan mengikis habis penyakit-penyakit jahiliyah yang meracuninya, baik secara praktis melalui rencana dan aksi secara responsif, melalui penciptaan revolusi pandangan dan alam pikiran bangsa Arab, memberi arali pandangan keselamatan, metode berpikir lurus, cara yang mesti ditempuh dan tujuan yang harus dicapai bangsa Arab yang sesuai dengan watak keselamatan, mengorganisir secara sistematis kekuatan-kekuatan individu atau komunitas untuk menyebarluaskan sistem pendidikan dan pengajaran keselamatan dalam kerangka membina masyarakat Arab ke arah masyarakat berperadaban, dan terakhir adalah menegakkan sistem masyarakat Islam. Lihat Abul A'la Maududi, Langkah-Langkah Pembaharuan Islam, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984.

²²⁶ Konsep umum struktur fungsionalis menyetengahkan dua sebab utama perubahan dalam sistem sosial; pertama, kecenderungan tak seimbang yang ada pada setiap hubungan yang terjadi antara suatu sistem sosial dengan lingkungannya, kedua, ketegangan yang hidup di antara unsur normatif dan struktur dari setiap sistem sosial. Bahkan lebih jauhnya, menekankan pada sumber suber baru yang sangat memungkinkan untuk menciptakan tingkatan baru diferensiasi struktural. Hal ini merupakan suatu sumber penting bagi perubahan dan perkembangan orientasi nilai baru yang dapat menciptakan sistem kontrol utama dengan mana perubahan dapat melembaga S.N. Eisenstadt, Revolusi dan Transformasi Masyarakat, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 33,

prinsip yang dikehendaki oleh setiap anggota masyarakat, baik pendidikan, hukum, undang-undang, ekonomi dan berbagai masalah lainnya.²²⁷

Sejarah telah membuktikan bahwa Islam dengan risalah sya'riatnya pada masa Arab jahiliyah telah mampu memutar-balik roda pemikiran mereka untuk mendekonstruksi dasar-dasar kehidupan jahiliyah, baik itu tahapan kehidupan metafisika hingga fisika. Misi Islam dibawah kenabian Muhammad tersebut, telah menjulangkan revolusi-revolusi"²²⁸ religio-politik, sosial-ekonomi, ruhani, moral dan intelektual, yang sifat dan akibatnya sangat dalam pada sejarah kemanusiaan saat ini. Tercatat bahwa perpisahan dengan keangkuhan, kejahatan moral, kekejaman sosial, kesenangan hawa nafsu, seks bebas, perbudakan, perampasan hak, dan penyakit-penyakit sosial yang dewasa ini kembali mencekam dunia peradaban kontemporer, telah berputar tumbang oleh proses aplikatif misi Islam dan mendaur ulang alam insani beserta pemikirannya kearah derajat kemanusiaan yang bermartabat dan beralih pada wilayah masyarakat Islam (penuh keselamatan)²²⁹

Dalam konteks itulah, Qardhawi telah menginterpretasikan bahwa masyarakat Islam adalah sebuah masyarakat unik yang berbeda dari semua masyarakat lainnya dengan komposisi unsur pembentukannya dan karakteristik spesifiknya. Ia adalah suatu masyarakat rahbani (berpegang pada nilai-nilai Ilahi). manusiawi dan seimbang (tawajun). Masyarakat Islam dengan sistem di dalamnya, dapat memantapkan kehidupan agama dan menampilkan jati diri sosial manusia sebagai makhluk berketuhanan secara total (kaffah) Suatu kehidupan sosial yang diarahkan oleh akidah, disucikan oleh ibadah-ibadah, dipimpin oleh manhaj dan fikrah yang menyelamatkan, digerakkan oleh cita-cita mulia, dikendalikan oleh

²²⁷ Qardhawi, *Min Fighid Daulah Fil-Islam*, terjemahan (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 1998), hal 28-29

²²⁸ "Dalam konteks teori modern, status revolusioner adalah peran seseorang atau komunitas yang memiliki tujuan melakukan perubahan yang total dan radikal terhadap struktur-struktur sosial, ide-ide, perilaku-perilaku dan pola-pola pikir yang dekaden serta anomalie (reorganisasi sistem secara menyeluruh) Lihat Ziaul Haque, *Wahyu dan Revolusi*, kiS, Yogyakarta, 2000, hal 5. dan 17

²²⁹ lihat Qardhawi, *Syari'atu al-Islamiyah* op.cit., hal 39-57 dan dalam Syed Habibul Haq Nadvi, *Dinamika Islam*, (Bandung Pustaka Risalah, 1984), bal 222-224

akhlak (moralitas), dihiasi oleh adab (etika), dan diatur oleh undang-undang yang berkeadilan yang dilaksanakan dalam bentuk kepemimpinan sosial (khalifah).²³⁰

Interpretasi Qardhawi di atas menggambarkan pemikiran struktur fungsional tentang konsep adaptation, goal attainment dan Integration dalam sistem masyarakat. Adaptation menunjukkan kepada keharusan suatu sistem sosial (masyarakat yang berpijak pada sistem Islam) untuk menghadapi lingkungannya (sistem-sistem masyarakat lainnya). Pertama, harus ada suatu penyesuaian dari sistem sosial Islam terhadap tuntutan kenyataan yang tidak dapat diubah yang berasal dari lingkungan. Pada konteks ini, adanya keharusan memberlakukan fungsi fleksibilitas syari'at Islam untuk beradaptasi dalam menghadapi perkembangan dunia. Kedua, harus ada proses transformasi aktif dari situasi tersebut. Pada konteks ini, harus direalisasikan fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Goal-Attainment merupakan persyaratan fungsional yang muncul dalam sebuah tindakan yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Titik perhatian utamanya bukan pada tujuan pribadi individu, tetapi pada tujuan bersama para anggota suatu sistem sosial. Jadi, persyaratan fungsional untuk mencapai tujuan, meliputi pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penentuan prioritas. Pada konteks inilah harus di berlakunya fungsi maqashidus Tasri'iyah integration merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi diantara anggota dalam sistem sosial Islam. Pada konteks inilah, sistem sosial Islam dapat membimbing mereka mengenai perilaku solidaritas atau kesetiakawanan²³¹

Fungsi fleksibilitas syari'ah maknanya dapat menyesuaikan dengan realita perkembangan dunia. Kehadiran syari'at Islam diperuntukkan buat kemaslahatan masyarakat, agar dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Itu bukan berarti bahwa manusia sama sekali tidak punya harkat dihadapan syari'at Islam. Akan tetapi, agar terjadi adaptasi dengan realitas lingkungannya maka ijtihad merupakan

²³⁰ Qardhawi, Malamih al-Mujtama..op.cit, hal. 3 dan lihat As-Siyasah Asy-Syar'iyah. terjemahan, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999)

²³¹ lihat: Qardhawi, Syari'atu al-Islamiyah dan sebagai bahan perbandingan baca Judistira K Garna, Teori Sosial, (Bandung Program Pascasarjana UNPAD, 2001), h. 398-401.

faktor terpenting dalam menghasilkan hukum-hukum yang sangat bersifat akomodatif. Faktor ijtihad inilah yang dapat melahirkan proses adaptasi yang terkontrol dengan realita sosial sehingga sistem Islam dapat terinternalisasi dengan baik pada masyarakat.²³²

Adapun fungsi amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang dijadikan Allah sebagai salah satu dari dua unsur fundamental tentang keutamaan dan kebaikan umat. Tidak ada jalan keselamatan bagi orang Muslim dari kerugian dunia dan akhirat kecuali dengan cara nasihat-menasihati kepada kebenaran dengan penuh kesabaran. Dalam konteks lain, ini disebut dengan pelaksanaan amar ma'ruf. Yang substansinya sebagai usaha menjaga terjadinya keseimbangan, kebenaran dan kebaikan dalam masyarakat Muslim. Kemudian, setiap kemungkaran bisa saja terjadi di tengah masyarakat Muslim. Kemungkaran ini tidak terjadi kecuali karena kelalaian mereka sendiri atau karena adanya kelemahan dan perpecahan di dalam. Jika ini terjadi maka akan menyebabkan adanya disfungsi struktural dalam masyarakat Muslim. Muncullah yang disebut dengan kemungkaran, baik itu berupa ketidak-adilan, penindasan, penipuan, perzinahan dan lain-lain pada kehidupan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pelaksanaan nahi munkar merupakan faktor penting untuk mengontrol terjadinya keseimbangan pada masyarakat Muslim secara konstan.²³³

Selanjutnya, apabila fungsi amar ma'ruf nahi munkar berjalan dengan baik maka tujuan prioritas dari syari'at Islam akan terwujud dalam kehidupan masyarakat Muslim. Tujuan prioritas tersebut adalah pemeliharaan keseimbangan pada kehidupan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima hal ini merupakan tujuan prioritas yang dapat menjadikan kehidupan masyarakat Muslim senantiasa dalam kondisi kemaslahatan di dunia dan di akhirat.²³⁴

²³² Qardhawi, Syari'atu al-Islamiyah... op.cit., hal. 19-21

²³³ lihat: Qardhawi, Min Fiqhid Daulah Fil Islam, terjemahan (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), hal 166-179. Dalam pernyataan lain, Qardhawi mengaskan bahwa merajelanya disvaritas sosial, semisal suburnya kemaksiatan, menyebarnya perbuatan dosa, rusaknya situasi umat merupakan tanda mendekatnya waktu kehancuran umat (instabilitas sosial) Al-Sunnah. Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadiarah, terjemahan (Surabaya: Danakarya, 1997), Hai 263. "

²³⁴ lihat: Qardhawi, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, op.cit., hal 277-280.

Akan tetapi tujuan prioritas di atas tidak akan terealisasi secara maksimal apabila tidak berjalannya persyaratan yang berhubungan dengan interelasi di antara anggota dengan sistem sosial Islam. Dalam konteks ini diperlukan perilaku solidaritas atau kesetiakawanan yang tidak didominasi oleh perasaan kedengkian (kecemburuan sosial) antara kelas-kelas sosial, perasaan "diskriminasi etnis, perasaan "fanatisme patriot nasionalis, dan perasaan 'fanatisme kesukuan. Seperti yang terjadi pada masyarakat Madinah sebagai contoh kehidupan sosial yang berperadaban.

Masyarakat Islam berbeda dari masyarakat lainnya dengan apa yang mendominasinya dari rasa persaudaraan yang solid, cinta yang mendalam antar sesama warganya, meskipun saling berjauhan negerinya, berpencar tanah airnya, berbeda-beda ras dan warna kulit mereka, tetap saling berpautan posisi dan kelas antar mereka. Bukti sejarah menggambarkan bahwa masjid Nai di Madinah dahulu telah menghimpun di bawah atapnya berbagai ras, warna kulit dan kelas sosial. Mereka tidak merasakan selain perasaan persaudaraan yang universal, tidak merasakan suatu perbedaan dan diskriminasi apapun di kalangan mereka.²³⁵

Diantara mereka ada orang Persia seperti Salman, ada orang Romasi seperti Ahuhaib, ada orang Habasyi seperti Bilal, ada orang kaya seperti Ustman bin Affan dan Abudurahman Auf dan ada orang miskin seperti Abu Dzarr dan Ammar, ada di antara mereka orang Badui (Arab pedalaman) dan orang Arab perkotaan (yang berperadaban), orang terpelajar dan orang awam, ada orang kulit putih dan orang kulit hitam pria serta wanita, orang lemah dan orang kuat, hamba sahaya dan orang merdeka, mereka semua adalah bersaudara di bawah naungan Islam dan bendera al-Qur'an.

Qardhawi menegaskan bahwa hubungan persaudaraan antara sesama Muslim adalah seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yakni: "Seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain, ia tidak mendzaliminya, tidak menyerahkannya kepada musuh, tidak melecehkannya dan tidak menghinakannya.

²³⁵ Qardhawi, *Malamih al-Mujtama* op.cit., hal 73-74.

Cukuplah seseorang dianggap berbuat jahat dengan menghina saudara Muslimnya". Bahkan Nabi telah menggambarkan masyarakat Islam dan cita rasa saling cinta, saling simpati dan saling kasih sayang yang mendominasinya dengan mengatakannya, "Kamu melihat orang-orang Mukmin dalam saling cinta dan kasih sayang di antara mereka bagaikan satu tubuh, jika suatu anggota darinya mengeluh kesakitan maka seluruh anggota tubuh yang lainnya menyahutnya dengan demam dan begadang malam".²³⁶

Inilah gambaran masyarakat Islam yang mana setiap individu terlibat berpartisipasi dalam proses menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi sesamanya. Tidak apatis terhadap penderitaan saudaranya, yang kuat tidak menindas yang lemah dan yang kaya tidak mengeksploitasi yang miskin. Akan tetapi, semua anggota masyarakat Islam senantiasa memiliki sikap simpati dan empati terhadap setiap masalah-masalah sosial yang terjadi pada saudaranya. Baik itu dalam peranannya sebagai penguasa, warga masyarakat bahkan mitra penguasa dan masyarakat. Ditegaskan oleh Qardhawi dalam kitab "Malamih Al Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu", untuk merealisasikan model persaudaraan yang bersifat integratif tersebut maka sub-sub sistem yang merupakan landasan fungsional pembentukan masyarakat Islam harus selalu menjadi doktrin filosofis dalam menuju 'khoiru ummah'. Di antaranya, adanya kekuatan doktrin akidah, ibadah dan dakwah, akhlak, nilai-nilai humanisme, politik dan hukum yang jelas, ekonomi dan harta kekayaan yang adil, dan budaya yang lurus (hanif).

Dari uraian-uraian di atas, pemahaman tentang sistem masyarakat Islam adalah satu entitas yang sama dalam cita-cita. Di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang menyatukan antara (sabat (prinsip yang konstan) dengan tathawwur (dinamika), berpijak pada azas-azas ideologi konseptual yang sama dalam mensinkronkan antara idealita dan realita. Artinya masyarakat Islam itu satu referensi (rujukan, sumber hukum) sebagai dasar petunjuk dalam menjalankan proses sosialnya. Tidak mengenal diskriminasi atau strata sosial yang berpijak pada

²³⁶ ibid, hal. 75-76.

fanatisme golongan, ras, warna tanah air, bahasa, klas sosial, mazhab atau lainnya yang dapat merongrong integrasi sosial.

1. Sistem Akidah dalam Masyarakat Islam

Landasan dasar pertama yang merupakan pijakan masyarakat Islam dan yang sekaligus harus diembannya adalah akidah. Dalam hal ini, agar terjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat Islam maka akidah tersebut harus senantiasa dirawat, dimantapkan dan dipancarkan cahayanya pada seluruh cakrawala sosial. Ditegaskan oleh Qardhawi, bahwa substansi dari akidah dapat memancarkan karakter membangun (konstruktif) dan tidak menghancurkan (destruktif), mengalang dan tidak menceraiberaikan setiap proses social.²³⁷

Akidah Islam yang simbolnya tampak pada kalimat agung dan telah dikenal di kalangan umat Islam dengan kalimat tauhid, kalimat Ikhlas, dan kalimat taqwa yaitu: "Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah" (Tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah), jika ditafsirkan secara praksis maka akan berdampak pada penyingkapan setiap rahasia kehidupan individual maupun

Interpretasinya, "Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah" dapat melahirkan gerak deklarasi sebuah revolusi terhadap para rezim yang lalim di muka bumi dan para thogut jahiliyah. Sebuah revolusi terhadap segala berhala dan tuhan-tuhan yang dinobatkan selain Allah. Sebuah revolusi untuk menumbangkan setiap penindasan dan ketidakadilan sosial.²³⁸

"Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah" akan berdampak pada kebangkitan sebuah konsepsi baru yang bukan produk rekayasa penguasa maupun filosof, ia merupakan konsep Allah yang mana wajah tidak pantas tertunduk kecuali kepadanya, hati tidak pantas patuh kecuali hukumnya dan tidak boleh takluk kecuali kepada kekuasaannya. Manifestasi sosialnya adalah ketundukan masyarakat pada hukum yang menyelamatkan dan model kepemimpinan sosial seperti Rasulullah.

²³⁷ Ibid.hal 5

²³⁸ Qardhawi, Madkhal Li Ma'rifatil Islam Muqawwumaruhu, terjemahan (Jakarta: Al-Kautsar, 1997), hal. 55-56

"Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah" akan membangkitkan gerak proklamasi lahirnya sebuah masyarakat baru, yang berbeda dari masyarakat jahiliyah, yaitu sebuah masyarakat unik yang tampil beda dengan akidahnya, tampil beda dengan sistemnya yang tidak terdapat padanya rasialisme, regionalisme dan kastaisme, karena ia hanya berafiliasi kepada Allah saja dan tidak mengenal loyalitas kecuali hanya kepada-Nya.

Pada masa Rasulullah, para pembesar dan tokoh jahiliyah telah mengetahui apa yang terkandung dalam seruan "Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah", yakni berkonsekuensi pada penyerahan singasana kekuasaan mereka, penghapusan rezim dan kesewenang-wenangan mereka serta menolong kaum lemah yang tertindas untuk mengalahkan mereka. Oleh karena itu, sangat logis jika mereka tidak pernah lelah untuk berhenti memerangi dakwah "Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah", dengan tujuan untuk menghambat dan menghalangi setiap jalan Allah terhadap orang-orang yang beriman serta mereka selalu menghendaki dakwah itu berbelok haluan.

Simbol akidah "Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah" inilah yang telah melahirkan model masyarakat Ideal.²³⁹ Yang pada zaman dahulu, simbol akidah ini telah diposisikan sebagai sumber persepsi dan pemikiran, dasar ikatan dan perkumpulan, landasan hukum dan undang-undang, motivator gerak dan spirit protes sosial, bahkan merupakan sumber keutamaan dan moralitas kehidupan

Dalam kitabnya, "Madkhal Li Ma'rifatil Islam Muqawwumatuhi, Khashaishuhu, Ahdafuhu, Mashadiruhu", Qardhawi menerangkan bahwa akidah Islam ini dapat berfungsi bagi kehidupan manusia pada kecenderungan untuk berinteraksi mesra dengan alam nyata yang sangat besar dan berhubungan erat dengan Rabb Pemilik seluruh alam nyata, ia tidak lagi hidup tenggelam dalam perasaan kesepiannya, merasa asing dari lingkungan sekitarnya atau takut pada alam sekitarnya. Dengan akidah pulalah, manusia dapat mengontrol kehidupan dirinya di dunia sebab ia sangat menyakini tentang suatu proses transisi (pindahan) dari satu fase ke fase lain. Dari fase kehidupan alam dunia menuju

²³⁹Dalam pernyataan lain, Qardhawi menyebutnya masyarakat shaleh atau umat yang shaleh
167

fase kehidupan alam Barzah, setelah menuju kebangkitan yang lain (akhirat).²⁴⁰ Dimana setiap jiwa akan diganjar setimpal dengan amal perbuatannya. Dengan yakinan ini, manusia akan bersikap tawadhu, adil, bijaksana, hati-hati dan lurus dalam menjalankan aktifitas kehidupan sosialnya di dunia. Tidak sombong, mengeksploitasi, menganiaya dan berbuat dholim terhadap sesamanya.

Bahkan lebih jaunya, peran akidah akan memberikan sebuah kekuatan di saat lemah, sebuah harapan di saat putus asa, sebuah kemauan dan kerinduan di saat ketakutan, memberi ketabahan di saat kesempitan, penderitaan dan peperangan. Keimanan atas akidah kepada Allah, keadilan dan rahmat-Nya, tentang pahala dan balasan di sisi Allah di negeri keabadian (akhirat) memberinya manusia kesehatan jiwa dan kekuatan rohani. Maka kebahagiaan akan menerangi hidupnya, optimisme akan memenuhi jiwanya, akan menjadi luas menurut pandangan ruang lingkup kehidupan, ia akan melihat kehidupan dengan kaca mata bening, akan menjadi ringan baginya segala sesuatu yang dihadapi dan digelutinya dan kehidupan yang fana' (tidak kekal).

Dalam konteks modern, banyak orang yang hidup tanpa akidah yang kokoh mengalami stres kejiwaan, ketegangan syaraf dan kekalutan pikiran. Ini adalah suatu realita aksiomatik yang diakui oleh para psikolog dan dokter ahli terapi kejiwaan (psikiater) di zaman modern.²⁴¹ Dengan meminjam pernyataan Karl Bang dalam bukunya " Al-Insan Al-'Ashri Yabhatsu 'An-Nafsihi", Qardhawi menegaskan bahwa sesungguhnya penyebab setiap penyakit kejiwaan dan sosial di hampir segala penjuru dunia adalah kurangnya keimanan dan goyahnya akidah manusia, sementara manusia itu tidak akan mendapatkan kesembuhan kecuali setelah mengembalikan keimanan dan menguatkan kembali akidahnya.²⁴²

²⁴⁰ Qardhawi, loc.cit., hal 26-27.

²⁴¹ Dalam pendekatan struktur fungsional, jika akidah agama mengalami disfungsi maka akan mengakibatkan pada tercaibainya kemapanan keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, untuk memulihkan kondisi deviasi (tingkah laku yang tidak mematuhi norma-norma sosial dari suatu kelompok sosial) tersebut maka akidah agama harus difungsikan kembali dalam tatanan kehidupan sosial, sebab ia akan menjaga keseimbangan dan pemeliharaan.

²⁴² Ibid, hal 27-28. Kondisi krisis seperti ini dapat disimulasikan pada situasi masa akhir dinasti Mughal yang telah kehilangan seni mengenai hidup. Kondisi masyarakatnya sangat kaku, dogmatis, disharmonis, jiwanya terjepit, hidupnya hampa, basi, diulang-ulang, mekanis dan dekaden. Bahkan konvensasinya diwujudkan dalam perilaku-perilaku penyalahgunaan unsur seks, mabuk, judi dan

Berpijak pada pernyataan Allamah As-Sayyid Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar. Qardwahi telah menafsirkan akidah dalam agama Islam berfungsi sebagai petunjuk bagi beberapa kelompok manusia seperti bangsa, kabilah dan umat yang mana dengan kemajuan mereka itu akan terwujud nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial, baik bangsa yang nomadik (badui) atau bangsa yang berperadaban (civilized). Dan mengikuti akidah para rasul merupakan dasar setiap peradaban, karena kemajuan moral adalah memotivasi kemajuan materiil. Seorang tokoh sosiolog kontemporer, Herbert Spencer telah mengakui bahwa etika bangsa dan nilai luhurnya yang merupakan tonggak peradabannya, semuanya adalah berlandaskan pada akidah agama.²⁴³

Ditegaskan oleh Qardwahi dalam kitabnya "Al-Iman wal Hayat", dengan diawali perasaan iman kepada aspek-aspek dalam akidah agama, baik itu kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, nabi-nabi-Nya, hari Akhirat, qadha dan qadar Nya, kemudian berlanjut pada perubahan mental manusia dan mengkristal menjadi semangat untuk melakukan revolusi sosial, politik dan ekonomi. Sungguh berat bagi manusia melakukan pembaharuan mental untuk memiliki semangat melakukan revolusi secara positif karena dalam dirinya bertemu dan bercampur aduk berbagai keadaan serta sifat yang beraneka ragam. Akan tetapi, iman kepada akidah agama adalah satu-satunya perangkat yang benar-benar mampu menyampaikan ke arah sana. Dengan iman kepada akidah agama menjadikan mental manusia siap menerima pokok-pokok pikiran yang baik, mesti di dalam kebaikan itu tersimpan taklif dan kewajiban, pengorbanan dan kesulitan. Iman seperti inilah satu-satunya unsur yang dapat mengadakan perubahan dalam jiwa

kemalasan. Begitupun seperti halnya pada masa penguasa Umayyah yang opportunistik, mereka telah terjebak pada fahara materialisme praktis dan mengakibatkan sejatuhannya diri dalam bentuk kemerosotan moral. Hal ini tidak bedanya dengan pandangan hidup Barat yang materialistik, yakni kosong, serba melalaikan, mabuk, masa bodoh dan tak tahu diri (1963), hal 161; M. Luce-Claude Maitre, Pengantar Kepemikiran Iqbal (Bandung: Mizan, 1995), hal. 67, M.M. Syarif, labai tentang Tuhan dan Keindahan, (Bandung, Mizan 1985), hal 81-85.

²⁴³ Qardhavi, op.cit., hal, 35.

manusia dan menjadikannya dalam bentuk yang baru, sehingga berubah tujuan hidup dan jalan yang ditempuhnya, berubah tingkah laku, pandangan hidup, perasaan dan pertimbangannya.²⁴⁴

Sesungguhnya semua pengalaman sejarah dan realita empiris telah menyatakan tentang berakarnya keimanan dalam kehidupan dan urgensinya bagi manusia, yaitu iman merupakan suatu keharusan bagi individu agar tenteram, bahagia dan mulia, dan suatu keharusan bagi masyarakat agar mantap, solid dan maju. Dinamika sejarah membuktikan berulang-ulang bahwa kekuatan akidah agama tidak dapat ditandingi oleh kekuatan fanatisme (ashabiyah), kekuatan nasionalisme, kekuatan tradisi, kekuatan etika moral, kekuatan hukum dan undang-undang, karena kekuatan masing-masing hubungannya sangat terbatas. dengan lingkungan sosialnya. Sedangkan kekuatan akidah agama mampu mereferensi hubungan semua eksistensi kehidupan.

Inilah hakikat kekuatan akidah agama, yang melahirkan sebuah revolusi kemanusiaan (humanisme) yang besar dan universal. Sebuah revolusi untuk membebaskan manusia dari penghambaan dan ketandukan kepada selain Penciptanya. Sebuah revolusi di dunia pemikiran, hati dan perasaan, dan merupakan sebuah revolusi di dunia kenyataan (realita) dan pelaksanaan (aplikasi) Simbol akidah dalam Islam "Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah mengantarkan eksistensi manusia sama di hadapan Tuhaninya. Jadi umat manusia adalah sama, tidak boleh sebagian orang memperbudak terhadap sebagian yang lain, atau sebagian menindas terhadap sebagian yang lain. Jika sebagian orang berlaku lalim, menindas dan merusak, maka merupakan suatu kewajiban atas orang-orang yang lain untuk menghalangi dan menahannya, dan bila tidak demikian maka mereka semua dianggap bersekongkol dalam dosa dan berhak mendapatkan hukuman yang adil dari Allah.²⁴⁵

Interpretasi Qardhawi di atas, dalam perspektif struktur fungsional, bahwa akidah telah diposisikan sebagai salah satu unsur dalam agama islam yang dapat mensucikan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang telah dibentuk,

²⁴⁴ Qardhawi, *Al-Inum wol Heyat*, terjemahan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hal 309-313

²⁴⁵ *Ibid*, hal 45-47

merapertahankan dominasi tujuan kelompok di atas keinginan individu dan disiplin kelompok di atas dorongan hati individu. Pada posisi tersebut, akidah secara fungsional dapat memperkuat legitimasi pembagian fungsi, fasilitas dan ganjaran yang merupakan ciri khas suatu masyarakat. Akidah Islam secara fungsional dapat mensucikan norma dan nilai, serta membantu pengendalian sosial, mengesahkan alokasi pola-pola masyarakat, sehingga membantu ketertiban dan stabilitas dalam realita kehidupan masyarakat.²⁴⁶

2. Sistem Ibadah dan Dakwah dalam Masyarakat Islam.

Ibadah dan dakwah merupakan manifestasi dari keyakinan akidah agama. Dalam kitabnya "Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu" Qardhawi mengatakan bahwa ibadah dan dakwah merupakan pilar inti kedua bagi masyarakat Islam la merupakan syiar ritual yang bersifat praktis-fungsional dalam hubungannya dengan fungsi identitas dan fungsi kontrol sosial.

Semisal shalat sebagai syiar ritual Islam, menginterpretasikan fungsi identitas sosial antara masyarakat Muslim dengan Kufur."²⁴⁷ Inilah, yang telah menegaskan identitas masyarakat Islam sebagai masyarakat rabbani (terikat dengan nilai-nilai ilahi) dalam tujuan dan orientasi. Yaitu suatu masyarakat yang bertalian erat dengan Allah dan terikat dengan talinya yang kokoh. Secara fungsional, shalat menjadikan seorang Muslim komitmen selalu berada dalam perjanjian dengan Allah. Setiap kali manusia tenggelam dalam hiruk pikuk kehidupannya yang kadang melibatkan noda-noda sosial, maka shalat akan mengingatkannya pada harapan untuk melakukan penyucian hidup dengan membersihkan diri dan hati manusia.

Dengan shalat ini pula, manusia diajarkan hidup bersosial secara tertib (berjama'ah) yang mencerminkan nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah), persamaan (misawamah), gotong royong (takaful) dan kebebasan. Oleh karena itu, shalat merupakan sistem kehidupan serta konsep tarbiyah yang lengkap mencakup badan,

²⁴⁶ Thomas F. Oden, *Sociologi Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal. 26-34

²⁴⁷ Dari Jabir, Rasulullah Saw, menyebutkan bahwa, "Perjanjian yang membedakan antara Muslim dengan kaum kufar adalah shalai, maka barangsiapa yang meninggalkannya sungguh ia telah kafir (HR. Ahmad, Nasa'I, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim dari Buraidah, dan Tirmidzi berkata, "hadist hasan shahih)

akal dan hati. Badan bersuci dan bergerak, aka! belajar dan mencerdaskan diri, serta hati melakukan pembersihan dan bersuci.

Berpijak pada pernyataan Imam Asy-Syahid Hasan Al-Bana, Qardhawi menegaskan bahwa fungsi shalat tidak hanya berhenti pada batas individual saja, melainkan berdampak pada makna-makna sosial yang baik, seperti nilai kedisiplinan, keteraturan, kecintaan antar sesama, persaudaraan dan persamaan di hadapan Allah. Dimana diyakini bahwa masyarakat ideal adalah berada dalam naungan pilar-pilar seperti itu.²⁴⁸

Dalam perpektif sosiologi struktur fungsional, syiar ritual sebagai sub sistem dari agama Islam telah menawarkan suatu hubungan transedental melalui pemujaan dan upacara ibadat. Hal ini telah memberikan dasar emosional bagi rasa aman baru dan identitas yang lebih kuat di tengah ketidakpastian dan ketidakmungkinan kondisi manusia dan arus serta perubahan sejarah. Melalui ajaran-ajaran otoritatif tentang kepercayaan dan nilai, agama menyediakan kerangka acuan tentang pertikaian dan kekaburan pendapat serta sudut pandang manusia. Fungsi ini dapat menyumban stabilitas dan ketertiban, bahkan seringkali mendukung pemeliharaan kemapanan sosial.²⁴⁹

Dalam shalat terdapat prinsip-prinsip sosial modern, yaitu bahwa shalat dalam Islam telah mengambil nilai-nilai positif daripadanya dan mencampakkan nilai-nilai negatif dan minusnya. Contohnya, shalat telah mengambil dari persaudaraan dengan mengumpulkan manusia berada pada tingkat yang sama. Ia telah mengambil dari diktatorisme nilai kedisiplinan dan ketegasan dengan mengharuskan jama'ah mengikuti imam di setiap gerak dan diam. Begitupun ia telah mengambil dari demokratisme nilai nasihat (kebebasan mengoreksi dan mengontrol), yakni musyawarah dan keharusan mengembalikan imam kepada kebenaran jika melakukan kesalahan bagaimanapun kondisinya.

Kemudian contoh kedua dalam pelaksanaan zakat. Dalam sejarah, zakat tidak hanya sekedar suatu kebajikan yang terserah kepada keimanan individu dan hati nuraninya, melainkan ia adalah suatu ibadah yang dijaga oleh keimanan

²⁴⁸ Qardhawi, Malamih Al-Mujtana op cit., bal. 41-45.

²⁴⁹ Thomas F O'dca, op.cit, ha! 30-34

individu, kontrol sosial dan kekuasaan negara. Secara interpretatif, fungsi zakat ini merupakan sistem kontrol kepemilikan harta yang harus dijalankan oleh pihak yang berwenang (birokrasi pemerintahan) dan sistem distribusi kekayaan yang berkarakter keadilan.

Pada masa lalu, pelaksanaan zakat merupakan konsensus bersama dalam komunitas sosial Islam. Bagi yang tidak melakukannya maka ia dianggap telah menyimpang dari norma-norma sosial. Oleh karena itu, zakat merupakan kewenangan pemerintahan dalam melakukan pemungutannya dan pendistribusiannya agar terjadi secara proposional.

^ Dalam perspektif mazhab struktur fungsional, zakat dapat diposisikan sebagai disparitas normatif yang dapat membimbing masyarakat memiliki relasi dengan tujuan prestasi sosial. Sebab dengan zakat ini akan terjadi penekanan pada pemerintahan untuk menjadi media kontrol, yang memungkinkan berjalannya sirkulasi dan distribusi kekayaan secara berkeadilan. Artinya, setiap unit kekayaan akan terkontrol dalam posisi relasinya yang proposional bersama situasi, sistem dan komunitas yang berjalan sesuai dengan perencanaan sosial

Zakat dalam konteks kesejahteraan sosial merupakan implementasi dari fenomena kesadaran normatif antar subjek masyarakat. Pada akhirnya menjadi bingkai aksi sosial dalam memecahkan masalah kesenjangan dan kemiskinan sosial. Zakat yang pada tataran praksisnya harus ditangani oleh prosedur birokrasi, yakni Al 'Amiliina 'Alaiha (para amil zakat), tidak lain merupakan proses institusisasi atau formalisasi dari lingkungan sekitarnya. Proses formalisasi tersebut akan mendatangkan visi yang jelas dan diorganisir ke dalam struktur sosial dengan menguatkan pada basis sakral, yang dapat menertibkan keseimbangan antitetikal (basis ketertiban sosial). Oleh karena itu, wajar jika Tiryakian menyebutkan bahwa munculnya ketertiban sosial merupakan refleksi dari regulasi irrasional dan regulasi yang sakral sebagai proses terbentuknya strukturisasi sosial (dalam hal ini pengelolaan zakat).²⁵⁰

²⁵⁰ Lihat Graham C Kinlich, *Sociological Theory Its Development and Major Paradigmas dalam Topik Utania Structure Fungsionalism*. (Florida Florida State University, L.L.).

Selanjutnya mengenai fungsi dakwah dalam masyarakat Islam adalah untuk melakukan kontrol, pemeliharaan dan ketertiban sosial. Dalam hal ini, Qardhawi menyebutkan bahwa dakwah merupakan manifestasi pengejawantahan yang paling utama daripada iman yang dimiliki seseorang. Dakwah itu tidak lain menunjukkan jalan yang hak kepada segenap insan, atau menanamkan rasa cinta kepada kebaikan dan benci kebathilan serta kejahatan, dan membawanya keluar dari kebodohan dan kekalutan. Sehingga, dengan dakwah dapat terbentuk manusia dan masyarakat yang taqwa, dinamis dan berperadaban.²⁵¹

Dalam konteks kenegaraan, aplikasi dakwah dalam masyarakat Islam adalah termasuk melakukan upaya pemeliharaan atas kehormatan rakyat, mengontrol proses distribusi dan alokasi program pembangunan, mekanisme penerimaan pekerja pemerintahan, mekanisme pelaksanaan hukum dan pengadilan, menertibkan para provokator sosial, yang akan mengakibatkan hilangnya hak-hak keadilan serta kesejahteraan rakyat. Pada konteks ini, keterlibaian partisipasi setiap Muslim tanpa memandang stratifikasi sosialnya merupakan keharusan dalam bersikap aktif untuk menumpas bentuk-bentuk kemungkaran, apapun bentuknya, baik politis, ekonomis, sosial dan peradaban.²⁵²

Sangat logis jika berpijak pada pernyataan di atas, dakwah yang substansinya adalah amar ma'ruf nahi munkar diposisikan sebagai kewajiban yang fundamental dalam Islam. Karena ternyata pelaksanaan dakwah ini dalam al Qur'an telah menjadi salah satu kriteria utama bagi pembangunan "khoiru ummat"²⁵³ Menurut Qardhawi, inilah kewajiban Islam yang merupakan pagar syiar-syiar yang terdahulu dan berfungsi sebagai penjaganya. Kewajiban ini merupakan kelebihan yang hanya dimiliki oleh masyarakat Islam. Oleh karena itu, masyarakat Islam adalah umat dakwah dan risalah yang mana anibisinya serta obsesinya hanya menyebarkan kebaikan dan memantapkannya, memberantas kemungkaran dan

²⁵¹ Qardhawi, Kritik dan Saran Untuk Para Da'i, terjemahan (Jakarta 1.LF.S.O, 1985), hal. 2-4,

²⁵² Qardhawi, Min Fighid Deuloh Fil Islam, op.cit, bal 125-131

²⁵³ lihat: QS. Al-Imran: 110

melarangnya. Dalam surat al-Imran ayat 110, Qardhawi telah menafsirkan bahwa kandungan ayat tersebut adalah berkonsekuensi supaya masyarakat Islam membangun suatu kelompok spesialis yang mampu dan yang dipersiapkan secara tepat untuk mengemban kewajiban dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Objek perintah ilahi ini adalah mewujudkan kelompok spesialis tersebut, baik diakomodir dari masyarakat umum Islam maupun pemerintahan secara khusus.

Dalam pernyataan lain, Qardhawi menegaskan jika dakwah ini tidak difungsikan (disfungsional) maka akan simalah daya kontrol, pemeliharaan kebaikan dan ketertiban sosial dalam masyarakat Islam. Pada saat itu bergeseriah tatanan nilai sosial dan ranculah tolak ukurnya. Maka sesuatu yang baik dipandang menyimpang dan sebaliknya yang menyimpang dianggap baik. Seperti pada konteks kehidupan saat ini, komitmen terhadap kehidupan agama dianggap kuno, istiqomah dianggap sesuatu sikap kekolotan, kesopanan dianggap sesuatu kebekuan, kejahatan dianggap sebagai suatu seni, kesesatan dianggap suatu kebebasan, dekadensi moral dianggap suatu kemajuan. Singkat kata, pada saat itu kebaikan menjadi suatu kemungkaran dan kemungkaran menjadi suatu kebaikan.²⁵⁴

Dalam hal itulah, dakwah dapat berfungsi untuk membangun opini umum untuk mengontrol terjaganya keseimbangan nilai-nilai umat, moralitas dan kebaikannya serta berdampak dalam meluruskan penyimpangan dari masalah kehidupan umat. Kontrol moral dan etika yang lurus akan berlanjut pada dampak ketertiban dan pemeliharaan sosial yang berazaskan keadilan dan keselamatan.

3. Sistem Akhlak dalam Masyarakat Islam

Akhlak adalah satu bagian yang optimal dari eksistensi masyarakat Islam. Ia adalah masyarakat yang penuh keadilan, kebaikan santun dan kasih sayang, kejujuran dan amant, kesabaran dan kesetiaan, sifat malu dan menjaga kesucian diri, kemulyaan dan rendah diri, kedermawanan dan keberanian, kesatria dan keutamaan, dedikasi dan pengorbana, patriotisme dan pertolongan, kebersihan dan berhias, ekonomi dan hemat, toleransi dan kelembutan, nasihat dan gotong-royong, menjaga kehormatan diri, keluarga dan agama, menguasai hawa nafsu, marah demi

²⁵⁴ Qardhawi, Mialamih Al-Mujtamen op.cit, ha! 51-54

kebenaran, cinta kebaikan, itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), berbuat kebajikan terhadap terhadap semua makhluk khususnya berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, memulyakan tetangga, menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan dipenuhi segala perangai kebaikan, sifat-sifat mulya dan budi pekerti luhur.²⁵⁵

Akhlak yang pertama adalah ikhlas kepada Allah, bertaubat kepada-Nya, pada-Nya, takut kepada-Nya, mengharapkan rahmat-Nya, tawakkal mengangungkan syi'ar-syi'ar-Nya, mencari keridhaan-Nya, dan berhati-hati dari hal-hal yang membuat-Nya murka. Akhlak pertama ini akan berkonsekuensi pada sikap untuk mengharamkan setiap perbuatan nista dan perilaku bejat serta menyimpang. Pada konteks ini, setiap anggota masyarakat Islam harus berpandangan bahwa akhlak termasuk faktor internal essensial penopang bangunan struktur sosial, bukan termasuk faktor eksternal non-essensial yang bersifat insidentil atau bukannya termasuk masalah hamisyiah (marginal/sampingan) dalam sistem kehidupannya.

Al-Qur'an menegaskan bahwa akhlak termasuk di antara karakteristik dasar orang-orang beriman dan bertakwa Barangsiapa yang berpaling dari akhlak maka sesungguhnya ia telah menjauh dari karakteristik orang-orang beriman dan telah menjerumuskan dirinya kepada murka Allah serta rahmat-Nya. Dari sisi ini, maka akhlak berfungsi menjaga kestabilan identitas sosial anggota-anggota dalam masyarakat Islam.

Disvaritas dari akhlak ini banyak termaktub dalam al-Qur'an dan senantiasa berhubungan dengan dimensi vertikal ketuhanan serta horizontal kemanusiaan. Dalam hal ini, Qardhawi telah mengambil contoh-contoh akhlak dalam kandungan al-Qur'an sebagai berikut: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-

²⁵⁵ ibid, hal. 85

minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan bertakwa²⁵⁶ Ayat ini menurut Qardhawi telah mengabungkan antara akidah dengan akhlak. Secara sosiologis, akhlak harus mencerminkan kombinasi harmonis antara hakikat dan realita sosial. Sehingga akhlak bukan hanya berfungsi sebagai pembebasan pribadi dari keterkungkungan hawa nafsu, tetapi juga harus berfungsi menjadi katalis pembebasan manusia dari struktur sosial yang terbelenggu oleh hawa nafsu.

Kombinasi antara akhlak vertikal rabbaniyah' seperti iman kepada Allah dan kepada hari pembalasan dengan akhlak 'horizontal insaniyah' seperti kesetiaan, kesabaran, silaturahmi, infak, zakat, menolak kejahatan dengan kebaikan, mencerminkan pola perilaku yang konstruktif dalam proses menjalankan kehidupan sosial manusia, khususnya pada masyarakat Islam. Oleh karena itu, fungsi lain dari akhlak adalah mengarahkan dan membimbing suatu masyarakat untuk mencapai martabat sosial yang tinggi. Bahkan lebih jauhnya berfungsi melindungi anggota-anggota masyarakat Islam dalam segala tindakan penyelewengan atau kebathilan yang akan merusak citra dirinya sebagai Muslim. Sebaliknya jika mengalami disfungsi akhlak, maka suatu masyarakat akan mengalami kehancuran moral secara sosial (deviasi individual dan struktural). Artinya deviasi tersebut akan mengarah secara sistemik dan selanjutnya dapat merobohkan sendi-sendi normatif sosial yang telah disepakati.²⁵⁷

4. Sistem Humanisme dalam Masyarakat Islam

Qardhawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-Qiyam al insaniyah' (nilai-nilai humanisme) adalah nilai-nilai perikemanusiaan yang tegak di atas prinsip-prinsip penghormatan terhadap kemuliaan, kebebasan, harkat dan hak-hak asasi manusia. Berdiri tegak di atas prinsip perlindungan dan pemeliharaan terhadap darah, kehormatan hak milik, kesehatan akal pikiran dan keturunan

²⁵⁶ QS Al-Baqarah: 177.

²⁵⁷ Qardhawi, Malamik Al-Mujtama...op cit, hal 85-93

manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat Dalam hal ini, hanya memfokuskan pada beberapa nilai kemanusiaan, yaitu ilmu, amal, kebebasan, dan keadilan dan persaudaraan.

Nilai-nilai humanisme dalam konteks ilmu, berfungsi untuk menegaskan bahwa setiap Muslim dan Muslimah berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan agar mereka memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan para ulama telah menyepakati, hukumnya adalah fardhu ain dan ada yang mengatakan fardhu kifayah. Menurut Qardhawi, hukum fardhu ain adalah hak pengajaran ilmu merupakan keharusan agar dapat memahami agamanya, baik akidah, ibadah, maupun akhlak dan juga profesi duniawi, sehingga dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya secara ikut andil dalam mencukupi kebutuhan umatnya. Adapaun yang fardhu kifayah adalah hak pengajaran ilmu yang mendukung tegaknya agama dan dunia bagi umat Islam dan umat manusia pada umumnya.²⁵⁸

Landasan kewajiban tersebut adalah perintah-perintah Allah yang terkandung dalam al-Qur'an²⁵⁹ Secara interpretatif, al-Qur'an merupakan kitab yang membangun budaya rasionalitas dan menolak segala bentuk mitos. Melakukan pemberontakan secara revolusioner terhadap budaya taqlid buta dari nenek moyang dan para tokoh atau pembesar yang banyak mengakibatkan terjadinya penindasan dan penyimpangan di kalangan masyarakat. Dia juga menolak hegemoni praduga tak berdasar dan mengikuti hawa nafsu dalam konteks akidah maupun norma-norma sosial. Secara fungsional, maka itu akan melahirkan budaya atau peradaban maju dan mulia dalam masyarakat Islam seperti yang dicontohkan nabi Muhammad Saw di Madinah.

Selanjutnya, nilai-nilai humanisme dalam konteks amal berfungsi memberikan kebebasan untuk melakukan perbuatan atau mencurahkan segala upaya yang positif dengan penuh kesadaran untuk merealisasikan tujuan-tujuan Allah. Tujuan-tujuan tersebut menurut Qardhawi dengan meminjam pandangan imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya "Adz-Dzari'ah ilaa Makaarimisyyariah" meliputi: ibadah, khilafah dan imarah (memakmurkan bumi). Dalam

²⁵⁸ibid, hal. 105-109.

²⁵⁹ Seperti dalam QS. Az-Zumar: 9, Al-Imran: 18, Al Fathir: 27-28, dan lain-lain

konteks inilah, fungsi nilai-nilai humanisme akan berdampak pada idiom aktif "fastabiqul khairat" (berlomba-lomba dalam kebaikan) tanpa ada yang mengebiri maupun menghalanginya. Karenanya perilaku bekerja dapat menjadi sebuah kewajiban bagi setiap anggota masyarakat Islam. Begitupun menyediakan sarana bekerja dapat menjadi keharusan bagi pemerintahan sebagai upaya memenuhi hak kehidupan ekonomi setiap anggota masyarakat Islam. Kewajiban ini akan berkonsekuensi pada fungsi menjadikan masyarakat Islam sebagai masyarakat yang paling produktif dan paling kaya di antara masyarakat dunia lainnya.

Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh Islam adalah "kebebasan", yang dengannya dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, intimidasi, tirani kediktatoran dan penjajahan. Kebebasan ini meliputi: kebebasan beragama, berfikir, berpolitik, sipil dan segala bentuk kebebasan hakiki.

Yang dimaksud kebebasan beragama adalah kebebasan berkeyakinan dan melakukan ibadah. Menurut Qardhawi, Islam sama sekali tidak dapat menerima perlakuan seseorang yang memaksa orang lain untuk meninggalkan agama yang dianut dan dipeluknya, atau dipaksa untuk memeluk suatu agama yang tidak ia sukai.²⁶⁰ Siapa saja orang-orang di luar Islam yang berada dalam tanggung jawab Muslimin (sebagai penguasa maupun komunitas yang mayoritas) maka dia telah mendapatkan hak warganegara (sipil) dan memiliki kewajiban seperti kaum Muslimin secara umum, dengan beberapa pengecualian karena perbedaan ketentuan agama masing-masing. Maka tidak wajib baginya segala sesuatu yang diwajibkan kepada kaum Muslimin, dan tidak diharamkan padanya segala sesuatu yang diharamkan bagi umat Islam.

Kemudian nilai-nilai humanisme dalam konteks keadilan adalah berfungsi memberikan semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok, atau berbentuk sesuatu apapun, bernilai apapun, tanpa melebihi atau mengurangnya sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan atau mendzolimi hak orang lain. Secara tegas, menurut

²⁶⁰ lihat: QS. Yunus: 99 dan al-Baqarah 256

Qardhawi, Islam memerintahkan kepada umatnya agar berlaku adil kepada semua manusia, yaitu keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dicintai dan keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dibenci. Sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebathilan, dan perasaan benci itu tidak mencegah untuk berbaut adil dan memberikan hak kepada yang berhak."²⁶¹

Di antara bentuk keadilan yang paling menonjol yang ditegaskan Islam, dalam istilah sekarang disebut "keadilan sosial" yang berarti keadilan dalam membagi kekayaan bangsa dan negara, membuka berbagai kesempatan yang memadai untuk anak-anak bangsa, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payah mereka. Semua itu berjalan tanpa adanya praktek korupsi oleh orang-orang kuat dan berpengaruh. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antar individu maupun golongan, satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir (miskin) di sisi lainnya.²⁶²

Apabila keadilan mengalami disfungsi maka layaknya seperti masyarakat jahiliyah (masyarakat tercela) yang dimurkai Allah karena mereka telah menelantarkan kaum lemah dan kaum kaya hanya mementingkan serta menyibukkan diri dengan memakan harta waris dan mencintai harta mereka. Berbeda dengan Islam, keadilan wajib difungsikan dalam dataran sosial. Lapisan lemah dalam masyarakat harus diperhatikan. Karena itu, Islam menentukan hukum dan sarana untuk menjamin tersedianya lapangan kerja yang sesuai bagi pengangguran, tertunainya upah yang adil untuk setiap pekerja, terjangkau makanan yang cukup untuk setiap orang yang kelaparan, tersedianya pengobatan yang cukup untuk setiap orang yang sakit, dan lain-lain.

Untuk menjamin terlaksananya fungsi keadilan dalam masyarakat Islam maka diperlukan nilai-nilai humanisme dalam konteks ukhuwah. Hal yang pokok dalam merealisasikan persaudaraan adalah adanya rasa cinta (mahabbah). Fungsi mahabbah ini adalah untuk memelihara integrasi sosial dari perasaan iri, dengki,

²⁶¹ lihat QS An-Nisa S8, 135 dan Al-Maidah: 8

²⁶² "Qardhawi, op.cit, hal 128-131

benci dan sebab-sebab terjadinya permusuhan serta pertentangan. Dalam istilah hadist, hal-hal tersebut disebut dengan "Da'ul Uman" (penyakit-penyakit umat) atau "Al-Haliqah" (pencukur/pemangkas). Maksudnya adalah hal yang dapat memangkas agama disebabkan bahayanya bagi kesatuan jama'ah (komunitas) dan integrasinya secara moral maupun materiil"²⁶³ Implikasi dari mahabbah yang paling tinggi derajatnya adalah mendahulukan kepentingan saudaranya atas dirinya dalam segala sesuatu yang ia cintai. Seperti halnya persaudaraan yang dicontohkan oleh kaum anshor dan muhajirin di Madinah sebagai profil sikap ideal masyarakat Islam.²⁶⁴

Dalam konteks inilah, Islam mengharamkan dekadensi moral dan kejahatan sosial yang dapat memutuskan ikatan mahabbah dan mawaddah di antara manusia. Tidak dipecah belah oleh perbedaan unsur, warna bahasa, ras dan bangsa. Tidak didikotomi oleh status sosial, baik itu pemerintahan dan rakyat jelata.

Secara fungsional, persaudaraan akan berimplikasi pada persatuan (integrasi) yang dilambai oleh saling tolong menolong (ta'awun), saling mendukung (tanaasur) dan saling berkasih sayang (taraahum).²⁶⁵ Tiga implikasi tersebut dalam konteks sosiologis dapat disebut dengan solidaritas sosial (takaful). Akan tetapi jika terjadi disfungsi dari sistem persaudaraan tersebut maka akan mengakibatkan disintegrasi sosial.

5. Sistem Politik dan Hukum dalam Masyarakat Islam.

Dalam kitabnya "Min Fiqhid Daudah fil Islam", Qardhawi menegaskan bahwa Islam yang benar seperti yang disyariatkan Allah tidak akan menjadi sempurna jika ia tidak berwawasan politik. Bahkan jika ada yang melepaskan Islam dari urusan politik, berarti telah menjadikannya agama lain, bisa agama Budha, agama Nasrani atau lainnya."²⁶⁶

²⁶³ Dalam hal ini Qardabawi menyebulan ladist Rasulullah yang diriwayatkan Al Bazzar sebagai berikut Telah merata kepadanu penyaki ummat terdalalu. Itulah hasad dan kebencian, sementara kebencian itu adalah pemangkas agama

²⁶⁴ lihat QS Al-Hasyr. 9

²⁶⁵ Qudhawi, op.cit, hai 142-143

²⁶⁶ Qardhawi, Min Fiqhid Daulahop.cir, hal 123 "ibid, lal. 137

Politik sebagai sub sistem dari masyarakat Islam, tidak bisa dipisahkan darinya. Oleh karena dengan fungsi politiklah, setiap urusan kemasyarakatan akan teradministrasi dan terstrukturisasi dengan baik. Hubungan Islam dengan politik harus dipandang bersifat integratif (menyatu) dan bersifat simbio-mutualistik (saling menyempurnakan/membutuhkan). Dalam hal ini, Qardhawi dengan meminjam pernyataan Ibnul Qayyim pada kitabnya "Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fis Siyasa Asy-Syar'iyah", menegaskan bahwa politik adalah suatu kinerja, yang dengannya manusia bisa menjadi lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh dari kerusakan, selagi tidak bertentangan dengan syari'at. Di lihat dari sisi inilah maka politik merupakan suatu ilmu yang memiliki urgensi dan kedudukan tersendiri. Yang secara praktis, politik merupakan suatu profesi yang memiliki kehormatan dan mamfaat tersendiri karena ia berkaitan dengan usaha menangani urusan manusia dengan cara sebaik-baiknya²⁶⁷

Karena fungsi politik memiliki relasi dengan usaha menangani urusan manusia dengan cara sebaik-baiknya maka ia merupakan mekanisme untuk mengatur serta mengontrol proses interaksi dan komunikasi sosial, agar kehidupan manusia dalam masyarakat berjalan dengan efektif dan dapat mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan cita-citanya. Baik itu mengenai, urusan kepemimpinan dan kekuasaan umat, penetapan undang-undang yang mengatur semua aspek kehidupan sosial, maupun urusan kenegaraan dan kewarganegaraan.

Qardhawi menegaskan dalam kitabnya "As-Syisayah Asy-Syar'iyah" bahwa politik yang harus dibangun oleh Muslim adalah politik yang berdasarkan syariat. Politik menurut perspektif syariat ini ialah menjadikan syariat sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar padanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya. Dengan begitu, politik dalam masyarakat Islam adalah politik yang berpijak pada syariat yang berfungsi menangani urusan-urusan sosial yang harus mendatangkan kemaslahatan.²⁶⁸

²⁶⁷ Ibid,hal.137

²⁶⁸ Qardhawi, As-Syisayah Asy-Syaryoh, op.cit, hal 34-35.

Bahkan lebih jauhnya, Qardhawi dengan berpatokan pada pendapat-pendapat para ulama, bahwa politik substansinya memiliki dua makna, yakni:

a) Makna umum, yaitu menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syariat Islam. Karena itu mereka mengenal istilah khilafah, yang berarti perwakilan dari Rasulullah Saw untuk menjaga terpeliharanya keseimbangan aplikasi agama dan pengaturan dunia.

b) Makna khusus, yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya, untuk menangkal kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus.²⁶⁹

Baik politik dalam makna umum maupun khusus, pada proses selanjutnya telah menunjukkan bahwa risalah Islam menurut Qardhawi mengharuskan adanya daulah atau wilayah bagi Islam, agar dapat mengembangkan akidah, syiar, ajaran, pemahaman, akhlak, keutamaan, tradisi dan syariat-syariatnya di sana. Pada sisi inilah, aplikasi politik dapat mengantarkan masyarakat Islam ke arah daulah yang bertanggung jawab pada setiap zamannya. Daulah yang mampu membangun suatu pemikiran, yang seluruh bangunannya didirikan pada prinsip-prinsip yang dikehendaki, baik pendidikan, pengajaran, hukum, undang-undang, ekonomi dan berbagai masalah dalam negeri maupun hubungan luar negerinya.²⁷⁰

Penekanan fungsi hukum ilahi (tasyri 'Rabbani) dalam politik, agar ia tidak mengalami distorsi fungsi ketika dalam proses aplikasinya pada kehidupan masyarakat Islam. Hukum ini merupakan salah satu kekuasaan utama bagi jalannya masyarakat secara benar dan baik dalam mengatur hubungan sesama mereka. Hukum memberikan sanksi kepada orang yang menyimpang dari kaidah kaidahnya, baik hukum tersebut berasal dari langit (wahyu) atau buatan manusia. Karena hati nurani dan motivasi saja tidak cukup untuk makhluk secara umum dalam memelihara keselamatan berkelompok (jama'ah), menjaga eksistensinya baik yang bersifat materi atau moral dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

²⁶⁹ Ibid, hal. 38

²⁷⁰ Qardhawi, *Min Fiqhiel Daulahop*.cit, hal 29-30.

kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus,

Baik politik dalam makna umum maupun khusus, pada proses selanjutnya telah menunjukkan bahwa risalah Islam menurut Qardhawi mengharuskan adanya daulah atau wilayah bagi Islam, agar dapat mengembangkan akidah, syiar, ajaran, pemahaman, akhlak, keutamaan, tradisi dan syariat-syariatnya di sana. Pada sisi inilah, aplikasi politik dapat mengantarkan masyarakat Islam ke arah daulah yang bertanggung jawab pada setiap zamannya. Daulah yang mampu membangun suatu pemikiran, yang seluruh bangunannya didirikan pada prinsip-prinsip yang dikehendaki, baik pendidikan, pengajaran, hukum, undang-undang, ekonomi dan berbagai masalah dalam negeri maupun hubungan luar negerinya. "

Penekanan fungsi hukum ilahi (tasyri 'Rabbani) dalam politik, agar ia tidak mengalami distorsi fungsi ketika dalam proses aplikasinya pada kehidupan masyarakat Islam. Hukum ini merupakan salah satu kekuasaan utama bagi jalannya masyarakat secara benar dan baik dalam mengatur hubungan sesama mereka. Hukum memberikan sanksi kepada orang yang menyimpang dari kaidah kaidahnya, baik hukum tersebut berasal dari langit (wahyu) atau buatan manusia. Karena hati nurani dan motivasi saja tidak cukup untuk makhluk secara umum dalam memelihara keselamatan berkelompok (jama'ah), menjaga eksistensinya baik yang bersifat materi atau moral dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Tasyri' (hukum ilahi) tidak terbatas pada hudud (hukum pidana) sebagaimana difahami oleh kebanyakan orang atau dilakukan oleh sebagian orang. Hukum ilahi menurut Islam berfungsi untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya dan manusia dengan sesamanya; dalam keluarga dan masyarakatnya; antara pemerintah dengan rakyatnya, antara orang-orang kaya dengan kaum fakir, antara pemilik modal dan tuan tanah dengan orang-orang sewaanannya dan lain sebagainya, baik dalam keadaan damai ataupun perang ia merupakan peraturan sipil dan administrasinya, ia juga merupakan undang-undang selain juga merupakan

hukum agama, Dia adalah hukum yang menjangkau seluruh aspek dan segi kehidupan masyarakat.²⁷¹

Berpijak pada perspektif struktur fungsional, fungsi politik dan hukum di atas mendeskripsikan empat struktur institusional dalam setiap sistem masyarakat. Politik dan hukum akan menjangkau struktur kekerabatan, yakni struktur ini berhubungan dengan pengaturan ungkapan perasaan seksual, pemeliharaan, dan pendidikan; struktur prestasi instrumental dan stratifikasi, yakni struktur yang akan menyalurkan semangat dorong individu dalam memenuhi tugasnya untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Suatu strategi pokok untuk menjamin motivasi dalam memberikan penghargaan kepada orang sesuai dengan kontribusinya. Dalam masyarakat modern, dikenal dengan struktur okupasi yang menyalurkan kegiatan berprestasi instrumental seperti penyebaran uang, prestise dan kekuasaan; struktur teritorial, yakni kekuatan dan integrasi dalam sistem kekuasaan. Bentuk organisasi teritorial ini berfungsi untuk mengontrol konflik internal dan untuk berhubungan dengan masyarakat lainnya, dan; struktur agama dan nilai integrasi, yakni yang memberikan kerangka arti simbolis yang bersifat umum. Dengan kata lain, pandangan dunia yang mendasar dalam elakukan aktifitas kehidupan bermasyarakatnya.²⁷²

Adapun fungsi politik dan hukum, jika dianalisis dari sisi struktur fungsional tipe sistemik versi Etzioni, akan menginterpretasikan sebuah sistem bimbingan masyarakat terpusat. Di dalamnya terdapat mekanisme kontrol sebagai sistem kapasitas sibernatorial (masukan pengetahuan dan struktur pembuatan keputusan) dan kekuasaan (aset dan mobilitas) dan bentuk kapasitas konsensus (bentuk struktur sebagai konsensus internal masyarakat). Dua bentuk mekanisme kontrol dan konsensus dalam fungsi politik dan hukum ini pada akhirnya akan memproduksi sebuah tipologi masyarakat aktif. Model masyarakat aktif tersebut,

²⁷¹ Qardahwi, Malamin Al-Mujtama op.cit, hal 152-155.

²⁷² Lihat Judistira K. Garna, Teori Sosial, (Bandung Program Pascasarjana UNPAD, 2001), h. 398-401

dapat tergambar pada masyarakat Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah.²⁷³

6. Sistem Ekonomi dalam Masyarakat Islam

Sistem ekonomi dalam masyarakat Islam memiliki ruang lingkup dan implementasinya dalam persoalan materi, baik dalam bidang produksi, sirkulasi, distribusi, maupun konsumsi,²⁷⁴ Sistem ekonomi ini telah memposisikan berbagai aspek dalam pembentukannya pada masyarakat Islam, di antaranya:

- a. Harta dinilai sebagai suatu kebaikan dan kenikmatan jika berada di tangan orang-orang shalih.
- b. Harta adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah dipinjami dengan harta itu.
- c. Dakwah untuk menumbuhkan etos kerja yang baik adalah merupakan ibadah dan jihad dalam upaya pemabngunan kesejahteraan ummat.
- d. Cara-cara kerja yang kotor diharamkan bagi setiap anggota masyarakat Islam.
- d. Adanya pengakuan hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya.
- f. Dilarang bagi seseorang untuk menguasai benda-benda yang sangat diperlukan oleh masyarakat.
- e. Dilarangnya pemilikan harta yang membahayakan orang lain.
- h. Pengembangan harta tidak boleh membahayakan akhlak dan mengorbankan kepentingan umum.
- f. Mewujudkan kemandirian (eksistensi) ummat.
- g. Adil dalam berinfaq.
- h. Wajinya takaful (saling menanggung) di antara anggota masyarakat.
- i. Memperdekat jarak perbedaan antara strata (tingkat) sosial di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks di atas, harta kekayaan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan membantu untuk melaksanakan kewajiban, seperti shadaqah (zakat), infaq dan jihad serta persiapan utama untuk memakmurkan bumi.

²⁷³ Mitat Graham C. Kinlich, *S/osiological Theory Its Develovment and Major Paradigm dalam Topik Utama Structure Fungsionalism*, (Florida Floride State University, t.t)

²⁷⁴ Qardhawi, Michal li Ma'rifatl Islam.... op.cir, hal 116.

Oleh karena itu, harta kekayaan harus dipandang sebagai milik Allah dan bagi manusia hanyalah sebagai amanah saja. Pada sisi inilah, wajib bagi manusia (yang mengemban amanat harta) terikat dengan instruksi dan melaksanakan keputusannya serta tunduk terhadap arahan-arahan Allah dalam memelihara dan mengembangkannya, dalam menginfakkan dan mendistribusikannya sebagai implementasi untuk membangun kesejahteraan sosial.

Kemudian sistem ekonomi Islam, dalam kaitannya dengan fardhu kifayah, berfungsi mengarahkan kaum Muslimin untuk mempersiapkan jumlah yang terlatih dan mencukupi untuk setiap profesi yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga kaum Muslimin bisa mandiri mencukupi kebutuhannya. Mendorong terjadinya etos kerja yang tinggi bagi kaum Muslimin sehingga dapat melahirkan kemandirian ekonomi ummat. Menutup praktek ekonomi riba, risywah (suap), ihtikar (menimbun di saat orang membutuhkan), penipuan, berdagang barang-barang yang diharamkan dan menetapkan konsekuensi prinsip istikhlaf (pengamanan kepemilikan pribadi). Demikianlah sistem ekonomi Islam berfungsi memberikan nilai kebaikan dan keadilan pada praktek ekonomi dan kepemilikan harta kekayaan.²⁷⁵

Berdasarkan uraian-uraian di atas, karakteristik masyarakat Islam telah dibangun di atas sistem-sistem yang jelas. Ia merupakan sinonim dari kata umat yang dibangun oleh wahyu, diasuh dan dipelihara oleh ajaran dan hukum hukumnya. Ia merupakan sebuah umat yang sumbernya (masdhar) adalah rabbani dan demikian pula orientasinya (wijhah) adalah rabbani. Begitu pula ia merupakan meletakkannya di tangan bukan di hati. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan adalah masalah bahkan musibah yang harus dilenyapkan. Menurut Qardhawi, kemiskinan dalam pandangan Islam akan berdampak pada keseimbangan, pemeliharaan dan kestabilan jiwa maupun sosial kehidupan kaum muslimin. Dampak-dampak tersebut meliputi:

²⁷⁵ What Qardhawi, *Malamih Al-Mujtma*, op.cit., hal. 181-202

Pertama, kemiskinan dapat berdampak pada akidah. Artinya kemiskinan biasa menjadi ancaman yang sangat serius terhadap akidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada yang berlaku aniaya. Terlebih lagi jika kaum dhuafa ini bekerja dengan susah payah sementara golongan kaya hanya bersenang-senang. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan dapat menebarkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan ilahi mengenai pembagian rezeki. Akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial, bisa timbul penyimpangan akidah. Dalam hal ini Rasulullah telah mengingatkan bahwa "Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran".

Kedua, kemiskinan dapat berdampak pada akhlak dan moral. Artinya kemelaratan dan kesengsaraan seseorang-khususnya apabila ia hidup di lingkungan golongan kaya yang tamak---dapat mendorongnya melakukan pelanggaran moral. Sebuah ungkapan menyebutkan, susara perut dapat tiengalahkan suara nurani. Lilitan kesengsaraan pun bisa mengakibatkan seseorang meragukan nilai-nilai akhlak dan agama.

Ketiga, kemiskinan dapat berdampak pada keluarga. Artinya kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan maupun keharmonisannya. Dari sisi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para kader Islam (pemuda) untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak biasa memenuhi berbagai syarat seperti mahar, nafkah dan kemandirian ekonomi. Begitupun sering menyaksikan tekanan kemiskinan dapat mengalahkan nilai-nilai moral dalam keberlangsungan perkawinan. Ia dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya. Bahkan kemiskinan bisa merengangkan hubungan harmonis antar anggota keluarga. Kadang-kadang bisa memutuskan tali kasih sayang di antara mereka. Al-Qur'an mencatat fakta sejarah yang mengerikan, yaitu sebagian orang tua mengorbankan buah hatinya akibat lilitan kemiskinan atau takut terhadap kemiskinan."²⁷⁶

²⁷⁶ Lihat QS Al-An'am: 151 dan al-Isra: 31.

Keempat, kemiskinan dapat berdampak pada kestabilan masyarakat. Artinya kemiskinan bisa berbahaya bagi keamanan dan kestabilan masyarakat. Apabila kemiskinan itu disebabkan tidak adanya pemerataan, serakahnya segolongan orang, dan berfoya-fojanya sekelompok kecil masyarakat di atas penderitaan orang banyak maka ia akan menimbulkan keresahan dan keguncangan sosial, ia dapat memutuskan tali persaudaraan antara anggota masyarakat. Bahkan lebih jauhnya, kemiskinan dapat mengancam kedaulatan, kebebasan, dan kemerdekaan suatu bangsa akibat lemahnya jiwa pembelaan.

Oleh karena itu menurut Qardhawi, Islam sangat menolak pandangan yang mengultuskan kemiskinan. Begitupun menentang terhadap pandangan fatalis atau jabariyah. Pandangan seperti ini merupakan tembok penghalang upaya membenahi kondisi masyarakat yang rusak, meluruskan nilai-nilai yang menyimpang, menegakan keadilan, dan mewujudkan kesetiakawanan sosial. Islam justru mewajibkan untuk meluruskan pemikiran kaum fatalis yang telah dianut sebagian orang sejak dahulu. Langkah ini diperlukan agar Islam dapat menyempurnakan misinya untuk membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan dan kemelaratan, menjamin hak pribadi dalam kehidupan bebas dan mulia, serta menegakkan solidaritas sosial.

Selanjutnya, Islam menolak pandangan ketergantungan pada kemurahan individu dan sedekah. Islam menghargai usaha ini, namun menentang prinsip mengharapkan kemurahan dan kerelaan golongan kaya. Sebab menurut Qardhawi, membiarkan kaum fakir dan dhuafa di bawah belas kasihan kelompok kaya yang dermawan, sama halnya dengan mengabaikan kaum lemah tersebut. Sebab prinsip ini tidak akan mampu menyelesaikan kemiskinan secara tuntas. Pada satu sisi, ia tidak menetapkan jumlah harta yang harus dibayarkan kaum kaya kepada kaum miskin, sedangkan pada sisi lain ia tidak memiliki kredibilitas untuk menjamin kelangsungannya.

Kemudian Islam sangat menolak pandangan kapitalisme. Tidak ada dalam ajaran Islam yang menyebutkan tentang anggapan bahwa orang kaya adalah pemilik hakiki harta kekayaan. Islam menolak anggapan bahwa seseorang adalah tuan bagi semua harta kekayaannya, tanpa adanya hak orang lain sedikit pun. Dalam

Islam, setiap harta yang dimiliki seseorang yang kaya terdapat hak bagi orang lain yang fakir. Dalam hal ini, Islam mengizinkan negara campur tangan menegakkan hukum dengan mengambil bagian tertentu dari harta orang-orang kaya dan membagikannya kepada kaum papa.

Terakhir, Islam sangat menolak terhadap pandangan sosialis-marxisme. Artinya Islam mengakui adanya kepemilikan individu yang dapat memuaskan fitrah kemanusiaannya. Akan tetapi, Islam memberikan patokan mengenai batasan kepemilikan individu tersebut. Tidak seperti halnya, kaum sosialis marxisme yang sama sekali tidak mengakui adanya sistem kepemilikan individu sehingga jalan untuk menghapuskan kemiskinan harus dengan cara menghancurkan golongan kaya dan menyita semua kekayaannya.²⁷⁷

Dari uraian-uraian di atas, interpretasi Qardhawi tentang pandangan Islam atas masalah kemiskinan tersebut adalah ia merupakan salah satu masalah kemanusiaan yang di dalamnya nilai-nilai agama Islam memiliki misi untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia dari cengkeraman kemiskinan tersebut.

Dalam hal ini, suatu hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai kemampuan agama Islam untuk menemukan wawasannya yang menantang dan menarik serta mempunyai relevansi untuk memecahkan persoalan hidup yang nyata Islam dengan kitab suci al-qur'annya, diakui oleh Qardhawi, telah menekankan perlunya manusia untuk beranial, agar dapat mampu berbuat secara konkret berdasarkan azas kemampaatan dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh karena itu, kemiskinan dalam Islam pada hakikatnya bukanlah takdir Tuhan, akan tetapi kemiskinan terjadi karena kekuasaan dan kekayaan hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Dalam kaitan inilah, agama Islam dengan segala perangkat kelembagaannya dapat melakukan fungsi kontrol terhadap peranan kehidupan ekonomi yang melewati batas-batas keberadaannya.²⁷⁸

²⁷⁷ at Qardhawi, *Musykilal Al-Faqr*. op.cit, hat. 22-49

²⁷⁸ lihat: Musa Asy aric, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi) hal 22-24

3. Sebab dan Bentuk kemiskinan di Kalangan Masyarakat Islam Secara interpretatif, Qardhawi telah menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat Islam diakibatkan berkembangnya al-Khalal²⁷⁹ (kelemahan umat dari tujuan Islam). Bahkan dengan semakin merebaknya 'al-khalal tersebut, ummat Islam mengalami krisis kesadaran dari kehilangan identitasnya. Qardhawi menegaskan bahwa ummat Islam pada zaman zaman terakhir ini telah tercerabut kekuatannya dihegemoni oleh bias-bias faham kehidupan materialisme, kapitalisme, fatalisme."²⁸⁰

Kekuatan hegemoni di atas merupakan musibah pertama bagi kemunduran peradaban ummat Islam. Faham sosialisme-materialisme telah menyebabkan semakin hilangnya nilai-nilai kesatuan ummat yang didasarkan pada prinsip tauhid. Persaudaraan universal (ukhuwah Islamiyah) semakin terkikis oleh kedengkian, rasa iri dan dendam sosial. Hal ini mengakibatkan setiap upaya melahirkan kesejahteraan ummat berdasarkan visi kemandirian ekonomi terhambat oleh kediktatoran penguasa Ploretariat Hak pribadi memiliki harta kekayaan hilang dirampas oleh peraturan yang otoriter. Sehingga setiap orang mengalami rasa rendah diri, kehilangan motivasi untuk mandiri dan kehilangan kepribadiannya.²⁸¹ Ujungnya berkonsekuensi pada kemiskinan ummat secara massif akibat hilang motivasi (selain adanya pengaruh faham fatalisme)"²⁸² dan pengungsian karena

²⁷⁹ al-Khalal ini menurut Qardhawi adalah kelemahan-kelemahan umat Islam yang disebabkan mereka melepaskan diri dari sistem kemasyarakatannya seperti sistem akidah, ibadah, akhlak, politik dan hukum bahkan sistem ekonomi yang bernjak pada karakteristik Islam. Lihat dalam kitabnya "Syari'atu al-Islamiyah khuludumu wa Sholchiha li tatbiqi li kuli Zaman wa makanin", terjemahan (Surabaya: Pustaica Progressif, 1993)

²⁸⁰ Menurut Qardhawi, kaum muslimin rela menaber benih di sawah sambil mengilani ekor-kor sapi. Walaupun tanahnya subur dan permis dengan kekayaan alam, tetapi mereka tidak dapat menikmati buah dari apa yang ditanamnya, tidak dapat eminum susu segar dari sapinya, dan tidak dapat menghasilkan kekayaan dari kegiatan impor dengan negara-negara lainnya. Lahat dalam kitabnya Ainal Khalaf", teijemahan (Jakarta: Penebar Salar, 2001), hal. 17-18

²⁸¹ Lihat Qardhawi, Musykilah Al-Fagr, op.cit, hal 43-49

²⁸² Faham fatalis ini, menurut Qardhawi merupakan tembok penghalang dalam upaya membenari masyarakat yang rusak dan telah memberikan kontribusi yang negatif, khususnya kaum muslimin telah kehilangan etos kerjanya untuk berupaya memakmurkan bumi demi mencapai kesejahteraan diri serta sosialnya.

peperangan yang berkepanjangan, semisal di Palestina, Afganistan, Bosnia, Uganda dan lain-lain.

Pengaruh paham kapitalisme mengakibatkan lahirnya egoisme pribadi, bebas menumpuk kekayaan, mengembangkan dan membelanjakannya. Dalam komunitas berpenduduk mayoritas beragama Islam, paham kapitalisme ini merupakan malapetaka besar bagi kehidupan ekonomi mereka. Oleh karena, orientasi kepentingan individualisme mengejala di kalangan umat Islam tanpa diiringi memperhatikan kepentingan orang lain. Akhirnya banyak umat yang tertindas, yakni kelompok yang terbuang dan miskin karena tidak memiliki akses dalam setiap pembangunan di era globalisasi saat ini. Seiring dengan itu, nilai-nilai egaliter (musawamah), keadilan (adl), gotong royong (ta'awun) dan perasaan senasib sepenanggungan (takafulun ijtima'i) musnah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam. Substansi musnahnya nilai-nilai kebaikan hidup tersebut, berawal dari pemikiran tentang pemisahan (sekuler) pijakan agama dari semua aspek kehidupan sosial. Dan konsekuensinya agama mengalami disfungsi karena dimarginalisasi oleh sebagian kelompok elit politik, sosial dan ekonomi. Fungsi agama sebagai penegas keadilan sosial, kontrol bagi elit masyarakat, dan motivasi untuk mencapai kesejahteraan dunia serta akhirat betul-betul telah terpinggirkan oleh paham ini.²⁸³

Lebih jauhnya, Qardhawi dalam kitabnya 'ainal Khalal" menegaskan bahwa akibat pengaruh hegemoni paham-paham di atas adalah lahirnya fenomena kemiskinan secara menyeluruh, baik itu karena adanya disfungsi motivasi dan kemampuan, disfungsi akal dan pemahaman, disfungsi ilmu dan amal, disfungsi perekonomian dan kekuatan kaum muslimin, dan disfungsi spritual."²⁸⁴

Jika di analisis pernyataan Qardhawi di atas maka sebab-sebab kemiskinan di kalangan masyarakat Islam bukanlah diakibatkan oleh minimnya sumber daya alam ataupun kuantitas jumlah penduduk. Akan tetapi diakibatkan oleh tidak berfungsinya sistem kehidupan sosial yang berpijak pada Islam. Kemiskinan

²⁸³ Qardhawi, Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami, terjemahan (Jakarta Gema Insani Press, 1997), hal. 69-71

²⁸⁴ Qardhawi, ainal Khalal, op.cit., hal, 18-39.

tersebut diakibatkan oleh tidak adanya pemerataan pembangunan, serakahnya segolongan orang dan berfoya-foya sekelompok kecil masyarakat di atas penderitaan orang banyak.²⁸⁵

Negara-negara Islam tengah menderita keterbelakangan ekonomi secara luar biasa, yaitu mubazirnya atau kurang dimampatkannya sumber daya insani dan fisik. Akibatnya kemiskinan, keterbelakangan dan stagnasi terjadi di mana mana. Meskipun negara-negara itu termasuk kaya sumber daya. Dalam hal ini, sumber apapun yang hendak dijadikan inspirasi ekonomi, baik kapitalisme atau sosialisme, tidak akan berarti apa-apa bagi pembangunan nilai-nilai Islam dan strategi pembangunan berdasarkan Islam.²⁸⁶

Interpretasi Qardhawi atas sebab-sebab kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam menggambarkan keterkaitan erat dengan hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dari sisi sosiologi berarti adanya disfungsi sistem yang kondusif bagi meningkatkan kesejahteraan ummat akibat terlanjur mengadopsi sistem lain yang justru sifatnya merusak. Dalam hal inilah lahir sebab-sebab lainnya, semisal "sikap mental atau budaya seseorang atau masyarakat Islam yang tidak memiliki sikap mental yang positif untuk membangun; seperti tidak memiliki sikap wiraswasta, apatis, pasrah, tidak percaya diri dan sebagainya.

Penafsiran Qardhawi ini senada dengan pendapat David C. McClelland yang mengatakan bahwa penyebab suatu bangsa tidak maju adalah karena tidak memiliki "n Ach" (singkatan dari need for achievement) yaitu kebutuhan untuk meraih hasil atau prestasi. N Ach ini semacam virus mental yang apabila terjadi pada diri seseorang, cenderung akan menyebabkan orang itu bertingkah laku secara giat.

Secara empiris, salah satu penyebab tidak adanya n Ach ini dapat ditemukan pada cerita anak-anak atau cerita rakyat di negara dunia ketiga (mayoritas berpenduduk beragama Islam) yang kebanyakan bersifat fatalistik.

²⁸⁵ hat Qardhawi, *Musykiluh al-Fagr.*, op.cit., hal. 29;

²⁸⁶ Kursid Ahmad dalam "Enika Ekonomi Politik", Aimur Rofiq (ed), (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hal 3

Virus n Ach ini telah menularkan penyakit kronis pada masyarakat Islam sehingga tidak mau mengubah sikap mental untuk maju."²⁸⁷

Kemudian pendapat lain yang senada dengan Qardhawi adalah. pandangan yang telah menganggap sebab timbulnya kemiskinan adalah pendidikan, kekurangan gizi, pola asuh dalam keluarga, atau karena kesalahan dalam sistem ekonomi yang dikembangkan suatu negara dalam proses pembangunan atau modernisasi beserta sistem politik dan ideologinya. Dalam konteks masyarakat Islam, kesalahan mengambil sistem ekonomi tersebut adalah Kapitalisme dan Sosialisme.²⁸⁸

Selanjutnya, hal yang senada dengan interpretasi Qardhawi adalah pandangan Jalaludin Rahmat yang telah menyimpulkan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial dan ekonomi, karena adanya sekelompok kecil elit masyarakat yang hidup mewah di atas penderitaan banyak orang. Baik elit dalam negeri ataupun pada perenan negara-negara maju yang telah menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang dan mengeruk keuntungan lewat kolaborasi dengan elit lokal.²⁸⁹

Begitupun sama halnya dengan pernyataan Dawam Raharjo, mengatakan bahwa sebab kemiskinan adalah akibat gelombang pengungsi yang terkenan bencana kelaparan serta wabah penyakit akibat peperangan. Hal itu semua merupakan rekayasa yang menjalankan sistem sosial sebagai salah satu cara terpenting untuk mempertahankan status quo dan memelihara kepentingan kepentingan kelompok-kelompok elit yang melakukan dominasi dan eksploitasi²⁹⁰

²⁸⁷ David C. McClelland, *Dorongan Hati Memija Modernisasi*, dalam Myron Weiner (ed), *Modernisasi, Dinamika, Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980), hal. 2-13

²⁸⁸ Lihat Gunnar Myrdal, *Rangsa-Bangsa Kava dan Miskin* terjemahan Paul Sihotang, (Jakarta) PT Gramedia, cet 11, 1980)

²⁸⁹ Jalaluddin Rahmat, dalam kata Pengantar Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, terjemahan Muhammad Bagis, (Bandung: Mizan, 1985), hal 7.

²⁹⁰ Dawam Rahrjo, *Pembangunan dan Kekersan Struktural: Agenda Riset Perdamaian*, (Jakarta IP3ES dalam Prisma No. 3 Maret/X, 1981), bal. 4-5

Berpijak dari sebab-sebab kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam yang telah diuraikan oleh Qardhawi. Semisal hilangnya motivasi bekerja, dominasi sistem sosial lain, ketimpangan sosial karena struktur yang tidak memihak pada rakyat, dan lain-lain. Maka secara interpretatif, kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam terbagi pada beberapa bentuk, di antaranya.

Pertama, bentuk kemiskinan individual atau yang menimpa segelintir orang di dalam masyarakat Islam. Bentuk ini berbeda dengan bentuk kemiskinan massal (mass poverty).²⁹¹ Bentuk kemiskinan individual di kalangan masyarakat Islam lebih bersifat miskin secara temporal, yakni diakibatkan oleh adanya kelemahan jiwa atau mental sehingga dia tidak produktif dalam bekerja atau tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam pandangan Qardhawi, faham fatalisme dan materialisme merupakan penyebab utamanya. Semisal, pemahaman kemiskinan adalah takdir Tuhan yang tidak bisa dirubah dan manusia harus merelakan dirinya dalam kondisi miskin. Begitu juga tentang pemahaman bahwa individu tidak mempunyai hak kepemilikan harta secara pribadi sehingga orang merasa rendah dan tidak mempunyai kepribadian. Dalam perspektif ini, Qardhawi menyebutnya sebagai bentuk kemiskinan spritual. Yang mana, segelintir orang di kalangan masyarakat Islam tidak memiliki motivasi melakukan perubahan diri maupun merubah perjalanan sejarah hidupnya.²⁹²

Kedua, bentuk kemiskinan struktural. Bentuk kemiskinan struktural ini bertolak dari sebab keadaan struktur sosial yang eksploitatif dalam pola hubungan atau interaksi kaum muslimin dengan institusi-institusi ekonomi, politik, agama, keluarga, budaya dan sebagainya di luar akidah Islam. Oleh karena itu, kemiskinan yang timbul dalam suatu masyarakat, bukan semata-mata sebagai akibat dari faktor-faktor yang ada pada dirinya sendiri tetapi juga berkaitan dengan ideologi pembangunan yang dipakai dan struktur sosial yang menjalankannya di kalangan

²⁹¹ Toeti Heraty Noerhadi telah menggunakan istilah "kemiskinan per-kasus" untuk membedakan dengan jenis "kemiskinan massal" Lihat dalam, Sirtua Arief, Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal, LSP, Jakarta, cet II, 1987.

²⁹² Qardhawi, ainal Khalal, op.cit., hal. 33-35 Beliau memuktikan bahwa spritualitas Islam membimbing manusia untuk senantiasa melakukan perubahan diri dan masyarakatnya, seperti apa yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-rad'u ayat 11.

masyarakat Islam.²⁹³ Dalam hal ini, menurut Qardhawi, penyebab utamanya adalah selain paham materialisme juga paham pembangunan kapitalis.²⁹⁴

Dalam skala makro, masalah kemiskinan struktural ini dapat dilihat dari saling keterkaitan dan ketergantungan setiap pembangunan suatu masyarakat tertentu dengan realitas perkembangan masyarakat lainnya. Pada proses selanjutnya melahirkan model hubungan negara yang dominan sebagai pusat dan apa yang negara pengikut di pinggiran. Sisi ini di akui oleh banyak kalangan, bahwa masyarakat Islam selalu menjadi negara pengikut yang dimarginalisasi atau bahkan memarginalisasi dirinya.

Lebih ekstrim, justru perubahan paham yang terjadi di kalangan masyarakat Islam telah menimbulkan perubahan persepsi mengenai gejala kesalinghubungan antara berbagai persoalan yang tadinya dilihat secara terpisah: antara kemiskinan dan kepingcangan dengan sistem kekerasan (violence); dominasi dan eksploitasi; antara polusi dan pencemaran lingkungan hidup dengan sistem ekonomi yang ekspansionis; antara pola hubungan ketergantungan pusat pinggiran (centre-periphery) dengan sistem teknologi yang mengandung kode ekonomi dan nilai kognitif, antara sistem politik yang represif di Dunia ketiga dengan orde ekonomi internasional yang dikuasai segelintir negara Barat kapitalis. Semua gejala tersebut mempunyai kaitan satu sama lain dalam hubungan struktural. Masalah keterbelakangan dan kemiskinan di suatu daerah masyarakat Islam mempunyai kaitan dengan sistem kapitalisme internasional yang melakukan ekspansi dan penetrasi.

²⁹³ Lihat: M. M. Dawam Raharjo, *Esai-esai Ekonomi Politik*, (Jakarta: LPJES, 1983), hal 196.

²⁹⁴ Sepakat dengan analisis Magnis Suseno, kemiskinan ini bukanlah akibat kehendak jelek orang miskin sendiri, (misalnya: malas, suka main judi) atau orang kaya (misalnya, ia pribadi rakus), melainkan akibat strukturisasi proses-proses ekonomi, politik, (bahwa hanya sekelompok kecil menguasai sarana-sarana produksi dan pengambilan keputusan mengenai kehidupan masyarakat). sosial (misalnya hak-hak tradisional golongan atas), budaya (misalnya perbedaan akses terhadap pendidikan) dan ideologis, bahwa masyarakat dibelenggu paham-paham yang menutup-nutupi ketidakadilan, kemiskinan dan memperlihatkannya sebagai akibat faktor-faktor objektif belaka. Baca "Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-Segi Etis", dalam J.B. Banawiratama, Si. (ed), *Kemiskinan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, cet. 1, 1987), hal. 37.

Secara empiris, pengalaman historis di negara-negara berpenduduk mayoritas beragama Islam selalu menunjukkan bahwa bentuk kapitalisme industrial yang masuk telah mensyaratkan keperluan adanya kekuasaan negara yang bercorak birokrasi authoritarian. Negara-negara tersebut selalu menjadi ajang dominasi negara besar, semisal Arab Saudi, Mesir, Afganisia, Kuwait bahkan Indonesia. Tata hubungan internasional menjadi structural dominan (dominasi struktur) yang di sebagian negara-negara berpenduduk mayoritas beragama Islam disebut dengan structural violence (kekerasan struktural). Suatu bentuk kekerasan yang bukan sekedar saling bunuh karena masalah pribadi atau suku, tetapi adalah kekerasan yang timbul dari pertumbuhan kapital yang tidak merata dan berkembang tidak terbatas. Kekerasan ini mengambil bentuk dalam wujud eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, dan marginalisasi masyarakat, sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang nasib mereka.

Pada uraian Qardhawi tentang tidak berfungsinya (disfungsi) nilai-nilai Islam, seperti ukhuwah, taxamuh, takaful, dan adl dan mengakibatkan kemiskinan massal di kalangan masyarakat Islam merupakan wujud dari bentuk kemiskinan struktural. Dalam teori sosial pun, wujud kekerasan yang melahirkan kemiskinan massal, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, alienasi atau peniadaan individualita karena adanya proses penyeragaman negara merupakan bentuk kemiskinan struktural yang bersifat massal

Dalam hal ini sepakat dengan Jalaluddin Rahmat, bahwa contoh sederhana dari ketidakadilan sosial ekonomi yang menyebabkan kemiskinan massal adalah kasus yang terjadi di Ethiopia. Ketika jutaan orang Islam berebutan mencari sesuap nasi dari bantuan yang sampai Mangestu yang marxis menghabiskan dua milyar dollar untuk membeli senjata. Selanjutnya ketika dunia merainakan kelaparan di Ethiopia, Mangestu menyelenggarakan peringatan sepuluh tahun kekuasaannya dengan segala kemewahan dan keraegahan. Lebih dari empat puluh juta dollar dihabiskan untuk membangun stadion, monumen, patung dan podium. Untuk menjamu tamu, sebuah kapal dikirim dari Inggris dengan mengangkut 500.000 botol wiski scotch, dengan biaya lebih dari tiga ratus dollar dibuang

percuma. Inilah sebuah contoh ketidakadilan struktur sosial, Mangestu yang marxis telah memandang kelaparan di daerah Muslim sebagai hukuman dari penguasa yang sah atas sikap pemberontakannya.²⁹⁵

C. Upaya Penanggulangan Kemiskinan yang terjadi di kalangan Masyarakat Islam

1. Keharusan Merealisasikan Sistem Sebagai Prasyarat Mutlak dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kalangan Masyarakat Islam

Menurut Qardhawi dalam kitabnya *Musykilah Al-Fagr wakaifa 'Aulajaha al-Islam'*, diperlukan syarat tertentu agar sejumlah sarana untuk menghapuskan kemiskinan, menjamin kecukupan kaum fakir, menutupi kebutuhan pokoknya, dan menjaga kehormatannya sebagai manusia dapat berjalan dengan baik. Ia hanya mungkin berhasil jika dipraktikkan dalam masyarakat Islam yang berpegang teguh pada sistem Islam, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik.

Sementara itu, jika Islam diminta menjelaskan masalah kemiskinan dalam masyarakat yang menganut konsep non-Islam, atau masyarakat yang memberlakukan sistem asing, tidak mungkin efektif. Artinya menurut Qardhawi, Islam dengan sifatnya yang komprehensif tidak mungkin diberlakukan secara parsial---sebagian yang lain ditinggalkan-dan hanya bersifat karitatif atau komplementer saja. Banyak bukti empiris, di negara-negara berkembang yang telah mempraktekkan pengelolaan zakat, sementara sistem yang lainnya memakai sistem non-Islam menunjukkan ketidakefektifannya bahkan dapat dikatakan kegagalannya karena tidak dapat dijadikan sebagai solusi memecahkan masalah keumatan.

Qardhawi menegaskan bahwa sistem Islam tentang kehidupan dan masyarakat bersifat integral dan saling melengkapi. Ia tidak boleh dipilah-pilah dengan cara agambil sebagian daripadanya dan membuang sebagian yang lain. Allah SWT memerintahkan kita untuk menghormati segala persyaratan yang telah

²⁹⁵ Jalaluddin Rahniat, dalam kata Pengantar Nabil Subli Ath-Theil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Masline* Terjemahan Mahammad Bags (Bandung Mizan, 1985), hal. 7

87 ditetapkan.²⁹⁶ Begitupun seorang muslim jangan bertindak seperti orang Yahudi yang ingin jadi pemeluk Islam tetapi mereka tetap pada adat kebiasaan lama mereka atau seperti Ahlul Kitab yang ingin mengubah sebagian ketentuan agama Allah.

Pelaksanaan sebagian sistem Islam dengan meninggalkan sebagian lainnya bertentangan dengan prinsip Islam yang menolak pemilah-milahan. Bila dilakukan juga, maka ia tidak akan bisa secara tuntas mengobati berbagai penyakit masyarakat. Menurut Qarhawi, di dalam masyarakat yang tidak memakai sistem Islam atau sebagian saja menggunakannya, di sana tidak cukup ada jaminan yang sehat dalam pembagian harta dan penghasilan, hak pekerjaan, dan lain-lain. Akan tetapi menurut Qardhawi, bila suatu masyarakat dan negara diatur dengan sistem Islam, maka persoalannya menjadi lain. Hal ini disebabkan karena:

a) Negara yang memakai sistem Islam akan menyiapkan pekerjaan dan latihan keterampilan yang dibutuhkan semua angkatan kerja sehingga ia dapat memperoleh hasil secara proposional dan profesionalitasnya.

b) Negara yang memakai sistem Islam akan berusaha menempatkan setiap pekerja pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan pengalamannya agar ia dapat berkiprah secara maksimal dan menghasilkan yang terbaik.

c) Negara yang memakai sistem Islam akan menyediakan berbagai sarana dan perangkat yang menunjang peningkatan produksi.

d) Negara yang memakai sistem Islam akan menggaji orang tersebut sebanding dengan usaha dan kebutuhannya walaupun jumlah gajinya menjadi tinggi. Dengan demikian, gaji itu akan bersisa sehingga dapat diwariskan kepada anak cucunya.

e) Bila gaji atau penghasilan seseorang tidak mencukupi diri dan keluarganya, ia berhak memperoleh bantuan dari kas negara untuk memenuhi kebutuhannya.

f) Bila seseorang ditimpa musibah sehingga ia terpaksa berutang, ia berhak mendapatkan bagian dari dana zakat dan juga dari perbendaharaan negara lainnya

²⁹⁶ lihat QS Al-Baqarais 208 dan al-Maidah: -19

g) Hal ini berdasarkan prinsip bahwa gaya hidup Islami terbebas dari minuman keras, wanita, hura-hura, berbagai model yang tidak berguna, dan berbagai tindakan batil lainnya. Yang semua itu menjadi beban bagi masyarakat karena biayanya kadang-kadang lebih besar daripada biaya hidup secara wajar dan sehat.²⁹⁷

Dalam hal ini, Qardhawi telah mengandaikan penerapan suatu sistem Islam oleh masyarakat yang asing terhadap Islam. Apakah yang terjadi jika masyarakat itu menerapkan salah satu sistem Islam, misalnya zakat? Secara empiris menurutnya, kebijaksanaan ini akan melahirkan hal-hal sebagai berikut:

1) Zakat akan terkumpul sedikit sekali sehingga tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan atau berbagai masalah sosial yang ditimbulkannya. Terbatasnya penghasilan zakat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: Pertama, lemahnya dorongan dan pengetahuan agama di kalangan masyarakat Islam akibat invasi pemikiran asing. Kebanyakan orang pun enggan membayar zakat kepada pemerintah karena sudah terbebani berbagai pajak. Mereka tidak menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang terbukti telah mengabaikan hukum Allah. Mereka memperkirakan bahwa zakat yang dipungut tidak akan didistribusikan menurut ketentuan syari'at, seperti halnya pendistribusian hasil pajak telah diselewengkan, dan; Kedua, karena mayoritas masyarakat Islam tidak mempunyai kekayaan dan penghasilan yang cukup sebagai sumber dana zakat. Sebab, gaya hidup kaum muslimin sekarang hampir secara total meniru gaya hidup orang-orang kafir. Diungkapkan dalam sebuah hadits Nabi bahwa seandainya orang-orang kafir itu masuk ke lubang biawak, kaum muslimin pun akan mengikuti mereka. Gaya hidup tercela ini bersifat boros, mengutamakan kemewahan serta menggemari kegiatan hura-hura. Pemenuhan berbagai kesenangan yang diambil dari luar itu pun akhirnya menyedot kekayaan dan sumber daya umat Islam. Padahal, semua aktivitas itu tidak ada manfaatnya

²⁹⁷ Qardhawi, *Musykilch Al-Fuqr...* op.cit, hal. 174.

2) Sebagian hasil zakat itu akan digunakan untuk membiayai pegawai, tata laksana perkantoran, dan perlengkapan penanganan zakat. Akibat kelemahan administrasi dan kecenderungan hidup bermegah-megah, dana zakat itu pun habis sebelum sampai kepada mereka yang berhak.

3) Ketika zakat didistribusikan, sering timbul kekacauan dan penyimpangan. Banyak orang yang berhak tidak mendapatkan bagian, sementara orang yang tidak berhak justru mendapatkannya. Hal itu disebabkan oleh lemahnya iman dan minimnya hasil pendidikan agama, baik di kalangan pengurus zakat maupun kalangan masyarakat.

4) Akhirnya, zakat tidak mampu berperan optimal kecuali terhadap sebagian kecil kaum miskin yang mendapatkan bantuan sangat sederhana. Setelah itu, timbullah keguncangan hati, keluhan, dan ceriaan terhadap zakat karena ketidakefektipannya. Hal ini mengakibatkan tersebarinya benih-benih keraguan terhadap sistem Islam secara keseluruhan.²⁹⁸

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa mencampur-adukkan system asing dengan sistem Islam tidak akan dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Dalam perpektif struktur fungsional, masyarakat sebagai kesatuan sistem tertentu akan mengalami disfungsi (menyimpang) jika salah satu dari unit sistemnya tidak difungsikan atau menggunakan unit sistem lain yang tidak sesuai dengan kaidah normatif dalam masyarakat tersebut. Pada konteks inilah, analisa struktur fungsional telah menegaskan bahwa setiap tujuan masyarakat tertentu harus didasarkan dan disesuaikan dengan keseluruhan sistem yang telah ditetapkan dan dikehendaki untuk mempertahankan eksistensinya. Sistem itu terdiri dari perancangan aksi, kaidah-kaidah, gagasan-gagasan, dan teknik-teknik untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sosial, dan realitas lingkungan. Sebab dengan keseluruhan sistem tersebut, masyarakat akan mengalami pertambahan fungsi dan pengaruh-pengaruh positif sebagai faktor pengikat atau pemersatu.²⁹⁹

²⁹⁸ Ibid, hal. 175-176.

²⁹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Kelompok (Bandung Remaja Karya, 1986), h. 79

Begitu pun seperti sistem Islam, ia akan memberikan dampak pada penambahan fungsi kepada anggota-anggota komunitasnya dan pengaruh pengaruh positif yang dapat menjadi faktor pengikat dan pemersatu dalam menanggulangi setiap problematika yang dihadapi ummat apabila digunakan secara komprehensif dan integral.

Pada letak inilah menurut Qardhawi dalam kitabnya "Musykilah Al Faqr wakaifa Aalajaha al-Islam, bahwa sistem Islam dengan segala sisinya harus dipersepsi oleh kaum Muslimin sebagai kesatuan yang utuh. Satu bagian tidak terpisahkan dengan bagian lainnya. Dalam sektor ekonomi, misalnya, system Islam mendorong dan merangsang individu untuk lebih giat bekerja dan mencipta. Oleh karena itu Islam melindungi hak milik perseorangan dengan memberlakukan beberapa persyaratan untuk mencegah kezaliman dan keserakahan. Di samping itu, Islam menetapkan hak dan kewarisan sehingga seseorang dapat mewariskan kekayaannya kepada anak cucunya. Islam juga membukakan jalan bagi setiap pribadi untuk berprestasi dan berkompetisi secara jujur. Dengan demikian, harta di tangan orang yang shaleh menjadi sarana yang baik untuk memakmurkan bumi.

Ketika Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki harta benda, bekerja, dan berkarya, ia tidak melupakan kepentingan masyarakat. Ia menjaga keseimbangan segi individu dan masyarakat dengan hak dan kewajiban masing-masing

Dalam sistem Islam, pada dasarnya harta milik Allah. Orang kaya dan kaum berada hanya wakil Allah untuk mengurusnya. Jadi, mereka tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Ia terikat oleh aturan, pengarahan dan perintah Sang Pernilik Asli. Semua harta benda di jagat raya ini adalah milik rabbul-'ibad yang mengasihi semua umat, baik kaya maupun papa Sistem ciptaan Allah ini dibuat untuk melindungi, mengembangkan, serta mengatur peredaran dan distribusi harta benda. Cara memakai dan menggunakannya selalu didasarkan pada kepentingan masyarakat, baik kalangan miskin maupun kaya.

Sistem Islam melarang sikap menyia-nyiakan dan membuang-buang harta. Ia menjadikan para pemboros dan penyia-nyiia harta sebagai sahabat setan yang terkutuk. Islam juga mengajarkan kita untuk tidak memberikan harta kepada orang

bodoh yang suka berlaku boros dan mubazir. Begitu pun Sehubungan dengan pengembangan harta dan investasi, Islam melarang monopoli riba yang merupakan pilar utama berdirinya sistem kapitalisme. Melalui Al-Qur'an, Allah dan Rasul-Nya memaklumkan perang terhadap para pemungut riba jika mereka tidak bertobat. Mereka hanya diperbolehkan mengambil pokok hartanya, tanpa menzalimi ataupun dizalimi.

Tidak diragukan lagi, monopoli dan riba adalah sarana golongan kuat untuk menyedot darah mereka yang lemah. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin makin sengsara. Tegasnya, sistem Islam melarang keras usaha menumpuk uang dan menjadikannya tidak produktif Ia mengancam para penumpuk uang dengan azab yang sangat pedih. Ia pun mewajibkan zakat bagi uang itu bila sampai satu nisab, baik ia dikembangkan ataupun tidak. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan para pemilik uang untuk menginvestasikannya pada berbagai proyek yang berguna agar setiap tahun tidak berkurang karena zakat. Islam juga menganjurkan kepada para pengelola harta anak yatim agar mengembangkan dan menginvestasikan harta itu dengan baik. Dengan demikian, harta itu tidak berkurang karena dinafkahkan dan disedekahkan.

Sistem Islam mengharuskan berlaku adil dan menjaga kejujuran dalam segala urusan. Oleh sebab itu, Islam menggariskan berbagai ketentuan dengan rinci untuk mengatur hubungan antara atasan dan bawahan, pekerja dan majikan, penjual dan pembeli, serta produsen dan konsumen. Tujuannya, setiap pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan tidak saling menzalimi pihak lain.³⁰⁰

Oleh karena itu, bila karakter sistem Islam diterapkan secara sempurna dan tidak parsial, banyak hal positif yang akan terwujud. Ia akan meningkatkan kekayaan masyarakat, mengurangi pengangguran, sekaligus mengurangi jumlah kaum miskin. Apabila kekayaan suatu bangsa meningkat pesat, kaum miskinnya berangsur-angsur terentaskan, dan kaum kayanya menempuh jalan yang lurus, sangat gampang menghapuskan kemiskinan.

³⁰⁰ Qardhawi, loc.cit., hal. 177-179

Bukti historis prestasi sistem Islam dalam mengentaskan kemiskinan terwakili oleh contoh Rasulullah sewaktu di Madinah. Dalam hal ini, Rasulullah telah meramalkan bahwa dengan mempraktekkan sistem Islam secara komprehensif akan terwujud ketenangan dan kemakmuran suatu masyarakat Beliau mengetahui betul hasil yang akan dicapai bila sistem Islam diberlakukan dengan baik dan sempurna. Kemakmuran yang langgeng, keamanan, dan kesejahteraan yang merata di segenap lapisan masyarakat adalah beberapa diantaranya. Tentu saja, hal ini terwujud bila sistem Islam diberlakukan secara menyeluruh.

Dalam hal di atas, Imam Bukhari mengisahkan dalam kitab sahihnya dari 'Adi Bin Hatim ath-Tha'i, saat itu ia berada di sisi Rasulullah. Tiba-tiba seseorang datang kepada Rasulullah mengadukan kemelaratannya, banyaknya perampok beraksi di jalan-jalan. Ketika itu, Adi mendatangi Rasulullah untuk berikrar menjadi pemeluk Islam. Nabi khawatir jangan-jangan, Adi terpengaruh oleh keluhan kedua orang itu sehingga ia mengurungkan niatnya untuk memeluk Islam. Kemudian Rasulullah menyampaikan beberapa berita gembira kepadanya seperti yang terungkap dalam kisah ini sebagai daya tarik buat 'Adi. Rasulullah bertanya, "Adi pernahkan kamu pergi ke al-Hirah?" "Adi menjawab, "Belum, saya belum pernah ke sana". Rasulullah menambahkan, jika umurmu panjang, kamu pasti akan melihat seorang perempuan pergi seorang diri dari al-Hirah sampai ke Ka'bah, lalu ia bertawaf. Ia tidak takut kepada siapapun selain Allah. Adi bertanya, "Bagaimana mungkin? Bukankah para perampok menyebar di seluruh pelosok negeri?" Rasulullah melanjutkan, "Bila umurmu panjang, kamu akan menyaksikan dikuasainya kekayaan kerajaan Kisra". "Adi bertanya, "Kisra putra Hormuz, raja Persia?" Rasulullah Saw menjawab, "Benar!" Kisra putra Hormuz. Bila umurmu panjang, kamu akan melihat seorang laki-laki menuju tempat umum sambil menggenggam emas dan perak mencari orang yang berhak menerimanya. Namun, dia tidak menemukan seorang pun yang berhak..."

Kemudian Adi masuk Islam dan menjalankan segala ajarannya dengan baik. Ia menyaksikan sendiri berita yang disampaikan Nabi Saw kepadanya. Ia berkata, "Saya melihat seorang perempuan berjalan seorang diri dari al-Hirah sampai Ka'bah

lalu ia berthawaf di sana. Ia tidak takut kepada siapapun selain Allah. Dan saya termasuk orang yang menguasai harta karun Kisra, putra Hormuz".

Jika anda berumur panjang, tentu anda akan melihat apa yang diberitakan Rasulullah, seseorang akan berjalan menggenggam emas dan perak untuk menyerahkannya kepada orang yang berhak tetapi ia tidak menjumpai seorang pun. Nabi Saw telah menjamin bahwa pada suatu saat umat Islam akan mengalami kesejahteraan jika mereka menjalankan sistem Islam dengan baik. Sernua orang akan berkecukupan dan kemiskinan pun akan lenyap.

Sabda Rasulullah kepada Adi, "Bila umurmu panjang, kamu akan melihat seorang lelaki menuju ke tempat umum sambil menggenggam emas dan perak... menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi dalam waktu dekat dan bisa disaksikan oleh para sahabat yang berumur panjang. Kemakmuran masyarakat seperti yang diramalkan Rasulullah ini memang tercapai pada zaman Khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang adil.

Menurut Qardhawi, banyak hadits Rasulullah yang memberitakan bahwa kemakmuran akan merata di kalangan umat, sampai tidak ada orang yang berhak menerima sedekah. Semua teks hadits ini berasal dari Rasulullah yang terpelihara dari dosa dan terbebas dari hawa nafsu. Dengan berbagai cara Rasulullah mendorong umat Islam untuk memberantas kemiskinan. Dalam hal ini, Qardhawi telah menguatkannya dengan beberapa teks yang menunjukkan bahwa kemiskinan pernah lenyap dalam lingkungan masyarakat Islam.

Diriwayatkan dari Al-Bakhrabi dari Haritsah Bin Wahab al-Khuzari, beliau berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian! Sesungguhnya akan datang kepada kalian suatu zaman ketika seorang lelaki berkeliling membawa sedekahnya, namun ia tidak menjumpai orang yang berhak menerimanya. Lalu seseorang berkata bahwa kalau ia datang kemarin, ia akan menerimanya'

Dirawikan dari Abi Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah berkata, "Kiamat belum akan datang sampai kalian memiliki harta benda yang berlimpah Seseorang bersusah payah mencari orang yang akan menerima sedekahnya. La

menawarkan sedekah itu kepada orang lain, tetapi orang itu menjawab, 'Saya tidak membutuhkannya

Dikisahkan dari Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi Saw beliau bersabda, "Akan datang kepada umat suatu zaman ketika seseorang berkeliling membawa sedekah berupa emas namun ia tidak menemukan seorang pun yang berhak menerimanya".

Tidak lama lagi, umat Islam pun menyaksikan kemakmuran yang merata dan tidak seorangpun di antara mereka berhak menerima sedekah. Syaratnya, sistem Islam dilaksanakan dengan baik di bawah kebijaksanaan penguasa yang adil seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra Yahya bin Sa'id berkata, "Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Arika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya".

Pada saat itu, kemakmuran dan kesejahteraan tidak hanya terwujud di Afrika seperti dikisahkan Yahya bin Sa'id. Seluruh wilayah Islam juga mengalami hal yang sama.

Dirawikan oleh Abu Ubaid bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abdil Hamid bin Abdurrahman, Gubemur Irak, ngar ia membayarkan semua gaji dan hak rutin orang di daerah itu. Dalam surat balasannya, "Umar memerintahkan, "Carilah orang yang dililit untuk melumasi utangnya. Abdul Hamid kembali menyurati Umar, "Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di baitul mal masih banyak dana". Umar memerintahkan lagi, "Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu ia ingin kawin, kawinkanlah dan bayarkanlah maharnya". Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar, "Saya sudah mengawinkan semua yang ingin kawin tetapi di baitul mal masih terdapat banyak dana". Akhirnya, Umar bin Abdul Aziz memberikan pengarahan, "Carilah orang yang biasa membayar upeti atau pajak hasil bumi. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar ia mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih".

Begitulah kemakmuran dan kesejahteraan di bawah sistem Islam yang adil. Semua yang berhak mendapatkan haknya dari perbendaharaan negara tanpa perlu mengemis, mengeluh dan memohon. Semua orang yang dililit utang mempunyai hak untuk melunasinya dengan uang negara. Semua orang lajang tidak mampu juga mendapatkan bantuan pemerintah untuk kawin dan membina rumah tangga. Ketika kebutuhan pokok dan darurat telah terpenuhi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengalihkan perhatiannya kepada peningkatan produksi pertanian Ia membantu petani kecil, dan pemilik lahan pertanian agar mampu mengolah lahan dengan baik. Bantuan itu diwujudkan dengan memberikan pinjaman dari kas negara. Peristiwa ini terjadi ratusan tahun sebelum dunia mengenal apa yang dinamakan Bank Kredit Pertanian. Khalifah Umar menjelaskan bahwa meningkatnya hasil produksi pertanian tidak hanya menguntungkan mereka tetapi juga negara. Negara boleh mengambil haknya bagi kemudahan yang diberikannya.

Sebelum zaman Umar bin Abdul Aziz, sebagian wilayah yang kesejahteraan, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kesejahteraan merata ke segenap penjuru. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya seorang miskin pun oleh Mu'adz bin Jabal di Yaman. Mu'adz adalah staff Rasulullah Saw untuk memungut zakat di Yaman. Setelah wafatnya Nabi Saw, Khalifah Abu Bakar dan Umar terus menugaskannya di sana. Kesejahteraan masyarakat tercapai tidak lama setelah diterapkannya sistem Islam di daerah tersebut. Karena tidak menjumpai orang yang berhak menerimanya, Mu'adz mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar bin Khattab di Madinah. Namun, Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Mu'adz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu Umar kembali menolaknya dan berkata, "Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga". Mu'adz berkata, "Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apapun kepadamu". Pada tahun kedua, Mu'adz inengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Mu'adz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan Umar. Mu'adz berkata, "Saya

tidak menjumpai seorangpun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut".³⁰¹

Kisah di atas merupakan bukti bahwa hanya dalam hitungan beberapa tahun saja, sistem Islam yang adil telah memperoleh hasil yang fantastis. Semua rakyat berkecukupan, kesejahteraan dan kemakmuran merata ke seluruh negeri. Dalam hal ini, kemiskinan bukanlah suatu hal yang pasti atau keharusan dalam masyarakat Islam. Kemiskinan adalah hal tidak tetap yang menghadang masyarakat Islam seperti ia juga menghadang masyarakat yang lain. Oleh karena itu, kemiskinan di kalangan masyarakat Islam dapat diatasi dengan tindakan nyata lewat berbagai ketentuan dan peraturan yang tegas, yang bersumber dari sistem Islam yang komprehensif dan integral.

Dengan menggunakan sistem Islam secara komprehensif tersebut, menurut Qardhawi dalam kitabnya "Daurul qiyam wal akhlaq fil iqtishadil Islami", memungkinkan lahirnya bangunan kaidah normatif sosial, ekonomi maupun politik yang berpihak pada masyarakat Islam yang miskin.³⁰² Seperti pada kaidah normatif sosial dimungkinkan lahir praktek-praktek hubungan interaksi kemanusiaan yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan satu sama lain. Ditegakkan atas dasar tauhid, ukhuwah Islamiyah, musawamah, ta'awun, takaful, mahabbah, dan jihad amaliyah.³⁰³

Kemudian pada kaidah normatif ekonomi, sistem Islam dapat mengarahkan pada lahirnya sistem perilaku ekonomi yang bersumber pada akhlak dan semangat yang beretika. Semisal pada bidang produksi diperlukan disiplin kerja dan pemakmuran sumber daya alam yang benar. Dengan disiplin kerja maka akan tumbuh etos kerja yang tinggi dan terhindar dari perilaku malas yang merupakan salah satu sebab terjadinya kemiskinan³⁰⁴ Dalam hal ini, sistem Islam telah

³⁰¹ Ibid, hal 182-187.

³⁰² lihat: Qardhawi, Daurul qiyam... op.cit, hal 97-115

³⁰³ het Qardhawi Malanth Al-Mujiama...op cit, hal. 105-149.

³⁰⁴ Berdasarkan teori konsensus bahwa masalah kemiskinan adalah sebagai kesalahan pada orang miskin sendiri. Mereka karena bodoh, malas, tidak punya motivasi berprestasi yang tinggi, tidak punya keterampilan dan sebagainya. Pada konteks lain, masalah kemiskinan ini harus dipecahkan lewat struktur politik, ekonomi yang ada dengan menciptakan kesempatan yang sama untuk berusaha bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Lihat: Suryawasita, "Analisa Sexual", dalam J.B. Banawiratma, S.J., op. Cit, h. 15-33.

mengajarkan bahwa etos kerja harus diposisikan sebagai mekanisme hidup yang bersifat bathin, yang selalu mengerakkan usaha kerja keras dan pantang menyerah. Hal tersebut harus dibarengi dengan penguasaan ilmu beserta kearifannya agar tidak mengalami deviasi ke arah yang berlawanan dengan prinsip-prinsip akhlak Islam, seperti tawakal, sabar, jujur, tidak serakah, adil, dan lain-lain.³⁰⁵

Begitu pula dengan pemakmuran sumber daya alam yang benar, maka dapat lahir proses produksi yang tidak bersifat eksploitatif, merusak sistem ekologi, dan hanya dilakukan oleh segelintir orang yang memiliki kapital saja.³⁰⁶ Dalam hal ini, sistem Islam telah mengancam setiap proses produksi yang tidak mengindahkan azas mampaatnya, status hukum halalhnya, hak perlindungan sumber daya alam yang diproduksinya, dan lain-lain.³⁰⁷

Selanjut pada kaidah normatif politik, sistem Islam dapat mengarahkan pada bentuk pemerintahan yang bertanggungjawab dalam melindungi orang-orang lemah dan mengayomi hak dan kebebasan mereka. Menciptakan hukum pengayoman dan perlindungan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakatnya.³⁰⁸ Sehingga setiap kebijakan pembangunannya akan berdampak pada usaha keselamatan umat³⁰⁹ seperti peningkatan sumber daya insani, perluasan

³⁰⁵ Qardhawi, Daurul qiyam, op.cit., hal 102-103.

³⁰⁶ Ibid, hal 26 Dalam pandangan teori konflik menjelaskan bahwa penyebab kemiskinan adalah struktur sosial yang ada. Berkuasanya dominasi sekelompok kecil yang memiliki kapital atas sumber daya alam yang seharusnya bisa dinikmati juga oleh masyarakat luas Bahkan masalah kultur dan mentalitas orang miskin yang dinilai sebagai penyebab kemiskinan dalam pandangan teori konsensus, menurut teori konflik sebagai akibat dari struktur sosial itu sendiri yang sengaja ditanamkan dan dipertahankan secara tidak adil dan memihak pada rakyat miskin.

³⁰⁷ Qardhawi, loc.cit., hal. 117-123

³⁰⁸ Qardhawi, Min Fighid Daulah Fil Islam, op.cit, hal. 58-74.

³⁰⁹ lihat Ignas Kleden, Dialog Antar Agama: Kemungkinan dan Batas-Batasnya, dalam Prisma, (Jakarta: LP3ES, No.5/Vil/Juni, 1978), h. 7-8. Dalam struktur fungsional, keselamatan manusia merupakan tujuan dari agama. Oleh karena itu, agama sangat mendorong dan membenarkan pada usaha-usaha yang dijalankan untuk mempertahankan, mencapai dan mengembangkan keselamatan. Di antara upaya ke arah: keselamatan tersebut adalah juga berarti membebaskan manusia dari berbagai masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan keterbelakangan, ketertindasan dan lain sebagainya Adanya tujuan ke arah pemecahan masalah kemanusiaan itu merupakan kekuatan serta kontribusi agama seperti tercantum dalam nilai-nilai ajaran yang dikandungnya bahkan sebagai amanat yang bersifat mutlak dari Sang Pencipta untuk diwujudkan dalam kehidupan. Qardhawi, loc.cit., hal. 165-178

produksi yang bermampaat, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, pembangunan yang berimbang antara materiil dan spritual, penggunaan teknologi baru yang menyelamatkan, dan menghilangkan ketergantungan pada bangsa lain yang tidak memakai sistem Islam.

Bahkan pada konteks kaidah normatif politik ini, sistem Islam dapat membimbing suatu pemerintahan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan sosialnya. Dengan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, pemerintahan dapat mengontrol kelebihan harta pada seseorang dengan menerapkan kewajiban zakat. Kemudian dijadikan sebagai konsensus yang mengikat untuk mengayomi dan mengantisipasi setiap masalah-masalah ummat, seperti masalah kemiskinan. Contoh kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, pada proses selanjutnya akan melahirkan masyarakat yang aktif dan mandiri.³¹⁰

Dalam perspektif analisa struktur fungsional yang diwakili oleh Amytai Etzioni dan Edward Tiryakian, bahwa setiap fungsi sistem sosial tertentu akan melahirkan proses regulasi yang maksimal, seperti unit lapis sosial teratas (pemerintah) dapat memaksimalkan tujuan sosial dengan melakukan kontrol dan pembangunan sosial yang terarah dengan menciptakan sistem bimbingan masyarakat terpusat. Struktur dasar normatif berupa bimbingan masyarakat ini memiliki relasi dengan tujuan prestasi sosial. Sebab dengan struktur dasar normatif tersebut, akan ada penekanan pada pemerintahan dan kontrol sebagai pusat, yang memungkinkan lahirnya keseimbangan dan kestabilan social.³¹¹

Begitu pun dengan sistem Islam yang telah diinterpretasikan oleh Qardhawi, bahwa ia akan melahirkan kaidah-kaidah normatif yang dapat menciptakan keselamatan, keseimbangan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, dalam interpretasi Qardhawi, pemberdayaan sistem Islam telah menjadi prasyarat utama dalam menanggulangi setiap masalah-masalah sosial, seperti halnya masalah kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam dewasa ini.³¹²

³¹⁰ Qardhawi, loc. cit hal.165-178

³¹¹ lihat: Graham C. Kinlich, *S/ostological Theory Its Develovment and Major Paradigms*, dalam *Topik Utama Structure Fungsionalism*, (Florida. Florida State University, t.t.).

³¹² Dalam analisa sosiologi pembangunan versi struktur fungsional, realisasi sistem Islam sebagai prasyarat utama dalam menanggulangi kemiskinan merupakan pendekaian konseptual yang

2. Keharusan Peran Pemerintahan dalam Mengantisipasi Terjadinya Kemiskinan di Kalangan Masyarakat Islam

Menurut Qardhawi dalam kitabnya "Daurul qiyam wal akhlag fil iqtishadil Islami", bahwa salah satu pemerintahan adalah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi praktek sehari-hari. Seperti, peran pemerintah membuat satu badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi, mengadili orang yang melanggar, dan menegur orang yang lalai.

Oleh karena itu, jika peran pemerintahan diberdayakan, maka ia dapat berfungsi dalam menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan mencegah mereka dari segala perbuatan haram, khususnya dosa-dosa besar.

Menurut Qardhawi, Allah telah mensifati orang-orang beriman yang diteguhkan kedudukannya di muka bumi dengan firman-Nya: "(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar..." Yang dimaksud dengan "diteguhkan" (tamkin) di muka bumi ini dalam interpretasi Qardhawi adalah bagi orang-orang yang beriman dengan kekuasaan di tangan mereka. Pengaruh dari "diteguhkan" tampak pada ditegakkannya hak Allah yang paling menonjol seperti shalat, terpeliharanya hak manusia terutama bagi fakir miskin yaitu hak mereka dalam bagian dari zakat, tersebarnya kebaikan dan kebenaran dan ditentangnya kebathilan dan kerusakan. Inilah yang disebut fungsi dan peran pemerintah dalam amar maruf nahi mungkar

berpijak pada strategi penanggulangan kemiskinan sebagai sesuatu yang harus dipandang sebagai proses multidimensional, baik menyangkut reorganisasi sistem politik, reorientasi sistem ekonomi dan sistem sosial secara keseluruhan. Dalam konteks ini yang diperlukan adalah adanya perubahan radikal struktur kelembagaan, struktur sosial, struktur administrasi, serta perubahan sikap, adat kebiasaan dan kepercayaan dari kaidan normatif sosial yang telah mengakibatkan

Ditegaskan oleh Qardhawi bahwa peran pemerintah di lapangan ekonomi adalah memantapkan, mengokohkan dan menjaga norma dan kewajiban pada semua bidang tanpa kecuali produksi, konsumsi, distribusi, dan transaksi. terjadinya kemiskinan kepada kaidah oormatif yang dimungkinkan dapat menyelamatkan masyarakat dari derisa kemiskinnannya. Sehingga semua bidang tersebut dapat berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan anggota masyarakatnya.

Dalam interpretasi Qardhawi, Islam sangat memberikan ruang peran yang luas bagi pemerintah dalam pengumpulan serta pembagian zakat. Ini jelas di dalam al-Qur'an dan Hadits. Zakat adalah kewajiban keuangan diperoleh dari orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada kaum fakir miskin. Yang melaksanakan ini semua adalah pemerintah atau penguasa negeri melalui petugas petugas yang lebih populer disebut al-amilima alatha (amil zakat). Orang-orang inilah yang mengurus zakat, mulai dari pendataan, pemungutan, penyimpanan dan pembagiannya. Nabi telah mengutus amil zakat ke seluruh negeri dan kabilah di semenanjung Arab. Mereka ditugaskan mengambil zakat terutama hewan-bagi yang memiliki batas nisab.

Untuk berhasilnya pengumpulan diperlukan tiga pengawasan. Pertama, keimanan seorang muslim dan kesadaran keagamaannya, yang mendorongnya untuk melaksanakan kewajibannya, karena mendambakan ridha Allah, mengharap pahala-Nya, dan takut akan siksa-Nya. Dalam konteks ini, pemerintahan berperan melakukan bimbingan dan pembinaan sosial sebagai wujud meningkatkan kesadaran serta keimanan para warganya.

Kedua, hati nurani masyarakat yang terwujud dalam opini masyarakat yang disalurkan oleh amar maruf nahi mungkar dan berbesar dalam kebenaran dan kesabaran. Dalam konteks ini, pemerintahan berperan untuk membuat kebijakan yang melibatkan semua partisipasi warganya agar terjadi kontrol sosial ekonomi yang seimbang.

Pengawasan ketiga dilakukan oleh pemerintah yang berwenang mengambil zakat. Terhadap mereka yang menolak mengeluarkan zakat, maka pemerintah diperbolehkan menggunakan tindakan paksaan, menyita harta benda dan

pemerintah dapat memerangi kaum yang menolak membayar zakat Dalam konteks ini, pemerintahan berperan untuk menegakkan supremasi hukum yang tegas kepada subjek-subjek yang menolak mengeluarkan zakat. Hal ini sebagai upaya mengontrol jalannya ketertiban social.

Sejarah telah menggambarkan mengenai peran khalifah pertama dalam menegakkan supremasi hukum. Yaitu, Abu Bakar dengan tegas telah memerangi orang yang menolak mengeluarkan zakat sebagaimana ia memerangi orang yang mengaku sebagai Nabi atau mereka yang murtad. Contoh sejarah ini menunjukkan bahwa salah satu peran pemerintahan adalah bertanggung jawab atas penerapan zakat.³¹³

Peran pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap berjalannya penerapan zakat adalah sebagai wujud bertanggungjawabnya pemerintahan terhadap kaum miskin. Dengan penerapan zakat maka distribusi harta kekayaan tidak hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. Akan tetapi dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan dengan melakukan proses sirkulasi dan distribusi yang adil. Sehingga hak konsumsi orang-orang miskin dapat terlindungi oleh pemerintahan melalui kebijakan swasembada ummat.³¹⁴

Dalam konteks yang lain, dijelaskan oleh Qardhawi bahwa pemerintahan berperan dan bertanggungjawab pula menerapkan larangan riba sebagai norma dan akhlak di bidang perekonomian. Sebagaimana al-qur'an menegaskan: "Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu..."

³¹³ Qardhawi, Dauru! qiyam op.cit, nal 251-254

³¹⁴ Qardhawi, Malumin A-Mujtama op.cit, hal 203-209 Ditegaskan bahwa peran pemerintahan harus ditujuakan pada swasembada dan kemandirian ekonomi umma:, Raik itu dalam tingkat planingnya yang harus sesuai dengan realitas ummat sehingga program-program yang diciptakan memiliki skala prioritas dan kepentingan yang jelas, seperti mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan duimbangi ispangan kerja yang proposional dapat memfungsikan aset-aset yang ada seefektif mungkin, dapat mengembangkan kekayaan finansial umat, dan dapat mengkoordinasikan antar sektor-sektor produksi

Perang yang dianjurkan pada ayat ini bukan saja dilakukan oleh Allah tetapi juga oleh rasul-Nya. Sebagaimana pada waktu khutbah wada Nabi menyampaikan pesan tentang bahaya riba. Beliau berkata. Sesungguhnya riba jahiliyyah telah dihapuskan dan pertama kali riba yang dihapuskan adalah riba pamanku Abbas”.

Teks-teks Islam di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pelarangan riba karena di dalamnya terdapat unsur kezaliman, ketidakjujuran dan ketidakadilan yang dapat memiskin orang lain. Menurut Qardahwi, Rasulullah telah menilai riba sebagai "tujuh mubiqat" yang dapat membinasakan perorangan dan masyarakat Artinya adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko, kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin, serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang.

Kemudian peran pemerintahan dalam menetapkan norma dan akhlak di bidang ekonomi adalah membuat kebijakan yang melarang menimbun kekayaan Hal ini pernah di contohkan oleh Rasulullah dengan melarang menyimpan daging kurban apabila orang-orang sangat membutuhkannya atau adanya kebutuhan mendadak. Beliau bersabda "Aku melarang kamu sekalian menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, agar yang punya memberinya kepada orang yang tak punya.

Seperti dalam peristiwa terjadinya krisis pangan, maka peran pemerintahan adalah menegaskan ketegasan hukum larangan menimbun. Hal ini diciptakan untuk mengantisipasi kemiskinan di kalangan masyarakat Islam, baik akibat pengungsian dari peperangan ataupun mencukupi kebutuhan fakir miskin.³¹⁵

Peran pemerintahan selanjutnya adalah menciptakan kebijakan pengawasan terhadap pasar. Dalam hal ini, Rasulullah memberikan contoh seperti seringnya beliau mengunjungi pasar. Kadang-kadang memberi nasihat, kadang kadang memberi teguran atau pendidikan. Tidak sampai di situ saja, Nabi juga menempatkan Sa'id bin Said Ibnul Aash di pasar Mekkah sebagai kepala pasar. Peran pemerintahan dalam pengawasan pasar ini adalah agar tidak terjadi praktek

³¹⁵ Ibid, bat. 199-202.

riba dan monopoli yang dapat merugikan setiap konsumen. Bahkan lebih jauhnya agar tidak terjadi kenaikan harga sandang pangan yang tidak dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat tidak mampu.

Oleh karena itu, Qardhawi dengan berpijak pada pernyataan Ibnu Taimiyyah, pemerintahan memiliki hak untuk menetapkan harga dalam upayanya mencegah manusia menjual makanan barang orang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati atau berperilaku monopoli. Hal ini merupakan kezaliman di muka bumi. Demi tercapainya kemaslahatan, wajib pemerintahan menerapkan penetapan harga. Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana.

Dengan demikian peran pemerintah untuk menerapkan norma dan etika dalam ekonomi Islam merupakan upaya mengantisipasi secara dini terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat Islam, baik itu dalam tanggungjawab untuk meningkatkan produksi, membimbing konsumen, memelihara sirkulasi serta mendistribusikan barang dengan adil.³¹⁶

³¹⁶ Qardhawi, Daurul qiyam, op.cit., hal. 255-256. Dalam analisa sosiologi fungsional, peran pemerintahan yang telah diinterpretasi oleh Qardhawi secara tersirat mengimplementasikan strategi strategi penanggulangan kemiskinan sebagai berikut pertama, strategi de-lingking Asumsi dasar strategi ini adalah bahwa salah satu sumber utama kemiskinan adalah bersifat struktural, yaitu adanya hubungan depedensi antara kaum miskin dan elit masyarakat, rentenir, dan birokrat Dalam gambaran Qardhawi adalah perilaku ekonomi monopoli, perilaku menimbun produksi, dan perilaku tibia yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Kalau dibiarkan hal ini terus terjadi menurut Qardhawi, maka hubungan depedensi tersebut akar mengakibatkan lestarinya kemiskinan. Oleh karena itu satu-satunya jalan adalah dengan "menatahkan" (de-lingking) setiap perilaku menyimpang dan mendzalimi itu dengan kebijakan dan sarksi hakun yang tegas. Melalui strategi ini diharapkan potensi kaum miskin unul: unabh dengan kekuatan sendiri (kemandirian) dan senantiasa berkembang, kedua, strategi desentralisasi. Yaitu dengan menempatkan pusat pengarabilan keputusan pada unit yang paling dekat dengan kelompok sasaran (kaum miskin) Melalui pendekatan ini akan terwujud keputusan-keputusan yang dapat merefleksikan aspirasi dan kepentingan objektif kaum miskin Contoh yang representatif dalam hal ini adalah pedelegasian kebijakan zakat yang sepenuhnya kepada al-amilina alaihu (lembaga legal pengambilan zakat) di setiap daerah kekuasaan Islam pada masa lalu, dan ketiga strategi integrasi spasial Strategi ini merghendaki keterpaduan antara program pembangunan di tingkat daerah dengan desa atau kota sebagai subsistemnya Strategi ini selarguniya akan memungkinkan terjadinya hubungan kota-desa dalam perencanaan pengentasan kemiskinan, yaitu dengan memperhatikan siruktur dan peran mekanisme pasar. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan kebijakan penetapan harga dan pengawasan pasar

3. Keharusan Partisipasi Masyarakat Islam dalam Menanggulangi Kemiskinan yang terjadi di Sekitarnya

Menurut Qardhawi, masyarakat muslim adalah masyarakat yang saling mendorong dan saling menyanyangi, tidak membiarkan si miskin kelaparan sedangkan ia sanggup memberinya makan. Dalam hal ini, setiap orang beriman dibebani dua kewajiban terhadap fakir miskin Pertama, memberi makan dan merawatnya jika ia sanggup. Kedua, menganjurkan orang lain untuk menyantuni orang miskin jika ia termasuk orang yang hidup pas-pasan dan kalau tidak, maka Allah memasukkannya ke dalam golongan pendusta agama. "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin."³¹⁷

Menurut Qardhawi, Islam telah mengajarkan bahwa seorang mukmin harus berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi pada saudaranya sendiri. Artinya seorang mukmin harus dapat menjamin secara sosial bagi bagi mukmin lainnya yang mendapat musibah kemiskinan secara materiil. Dalam hal ini, partisipasi tersebut adalah meliputi:

- a) memberikan nafkah kepada sanak kerabat yang membutuhkannya.
- b) menunaikan kewajiban zakat bagi muslim yang berkecukupan dalam rangka mengeluarkan muslim lainnya yang mengalami musibah kemiskinan.
- c) mengusahakan turunnya distribusi bantuan dana dari kus negara kepada mereka yang mengalami musibah kemiskinan secara aktif Dalam konteks ini berposisi sebagai mitra pemerintahan dalam mengusahakan terjadinya distribusi yang benar kepada yang lebih berhak.
- d) mengajak orang lain yang kaya untuk ikut berpartisipasi dalam memperhatikan kaum yang lemah atau miskin.
- e) memberikan sedekah-sedekah yang bersifat sunnah kepada fakir miskin³¹⁸

³¹⁷ Ibid, hal 254-255.

³¹⁸ Qardhawi, Malamih A-Mujtama, op. cit., hal 216-220

Inilah yang disebut dengan "takaful ijtima'i", yang di dalamnya terdapat unsur ta'awun (saling tolong menolong sesama muslim), tanaasur (daling mendukung), dan taraahum (saling berkasih sayang). Dalam sejarah Islam, sejak awal munculnya dakwah Islam di Makkah, al-qur'an telah secara tegas menyerukan kepada takaful dengan menjadikan struktur masyarakat bagaikan satu keluarga dimana orang yang kaya mencukupi dan menanggung orang yang fakir miskin. Oleh karena itu menurut Qardhawi, Islam telah mensejajarkan sikap orang mukmin yang tidak ikut berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan saudaranya semukmin atau menelantarkan orang miskin dengan sikap kufur kepada Allah.³¹⁹

Dalam perspektif struktur fungsional, hal di atas termasuk pada teori hak dan kewajiban. Menurut pandangan ini, kaum miskin memiliki hak untuk dibantu, sementara kewajiban membantu ada dalam masyarakat dan merupakan tuntutan masyarakat bagi dirinya sendiri. Logika dasarnya adalah bahwa setiap makhluk manusia miskin memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum masing-masing dan hak untuk dibantu, terlepas dari kesediaan atau ketidaksediaan mereka untuk menerimanya.³²⁰

Selanjutnya, menurut Qardhawi dalam kitabnya "Madkhal Lima'rifatil Islam", seorang muslim bukanlah seorang biarawan atau pendeta yang mendekam di dalam biaranya, melainkan ia sebagai insan alam dan produksi bagi kehidupan, yang harus memberikan kontribusi kepada kehidupan sebagaimana ia mengambil mampaat darinya, dan memakmurkan kehidupan. Hal ini merupakan potensi yang di miliki seorang mukmin dalam konteks salah satu tujuan penciptaan manusia dan pengangkatannya sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, seorang mukmin harus melakukan amar ma'ruf dalam upayanya membangun potensi yang dimiliki saudaranya sendiri agar mereka dapat mengetahui eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi. Yang sebelumnya tertutup sehingga mengalami kemiskinan akibat hilangnya motivasi untuk ikut berperan dalam memakmurkan kehidupan ini.³²¹

³¹⁹ Ibid, hal. 131.

³²⁰ Suryawasita, "Analisa Sosial", Jalam J.B. Banawiratma, SJ, op Cit. h. 30-32

³²¹ Qardhawi, Madkhal Lima'rifatil Islam, op cit, hal, 263-267

Dalam pandangan sosiologi umum, hilangnya potensi memakmurkan kehidupan merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Hal ini akan melahirkan "sikap mental atau budaya seseorang atau masyarakat yang tidak memiliki sikap aktif untuk membangun; seperti tidak memiliki sikap wiraswasta, apatis, pasrah, tidak percaya diri dan sebagainya. David C. McClelland menyebutnya dengan nama "n Ach" (singkatan dari need for achievement) yaitu kebutuhan untuk meraih hasil atau prestasi. N Ach ini semacam virus mental yang apabila terjadi pada diri seseorang, cenderung akan menyebabkan orang itu bertindak laku secara giat.³²²

Dalam konteks inilah, dengan pijakan saling kerjasama dan memberikan solidaritas, seorang mukmin yang kuat potensinya memiliki kewajiban berpartisipasi membangkitkan saudaranya yang lemah, sehingga ia memiliki kembali kesadaran untuk berusaha terlibat dalam memakmurkan kehidupan alam ini. Dalam interpretasi Qardhawi, ini termasuk kegiatan dakwah. Artinya, kaum muslimin bukan umat yang egois yang memonopoli kebenaran, kebaikan dan petunjuk untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, kaum muslimin adalah umat yang selalu empati kepada setiap masalah yang dimiliki saudaranya sendiri.³²³

Bahkan lebih jauhnya, Qardhawi telah menegaskan bahwa partisipasi seorang mukmin kepada saudaranya itu harus mengarah pada potensi untuk melakukan produktifitas, meningkatkan produktifitas dan menjaga kualitas produktifitasnya. Dengan potensi-potensi inilah, kemiskinan yang di alaminya dapat diantisipasi oleh dirinya sendiri.³²⁴

³²² David C. McClelland, *Dorongan Hani Menuju Modamisesi*, dalam Myron Weiner (ed), *Modema Dinamika Pertumbuhan*. (Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1980), h.2-13.

³²³ Qardhawi, *op.cit.*, hal. 3:4

³²⁴ Qardhawi, *Al-Sunnah Mushdaratan is al-Ma'rifah mr al-Healarah*, terjemahan (Surabaya. Duma Ilmu, 1997), hal 225-226. Dalam analisa sruktur fungsional, upaya penanggulangan kemiskinan ini hampir menyerupai pendekatan strategi pembangunan kultural Yang menyatakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya juga berakar pada kultur masyarakat. Oleh karenanya dalam pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan aspek kultural (budaya) yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Strategi ini lebih memusatkan pada pembangunan kualitas sumber daya manusianya, baik itu mengenai kebutuhan-kebutuhannya, kemampuan-kemampuannya, dan penguasaan atas sumberdaya dan nasib mereka sendiri. Pusat perbaikannya pendekatan ini terletak pada pemberian kekuatan (pemberdayaan), yaitu kemampuan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya produktif di dalam rangka kepentingan masyarakat miskin Adalah logis apabila aplikasinya mempersyaratkan partisipasi yang dalam dari mayoritas penduduk miskin di dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, keharusan partisipasi masyarakat Islam dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di sekitarnya juga termasuk prasyarat utama. Dalam hal ini, bentuk partisipasi bukan hanya bersifat materiil melainkan juga dalam bentuk membangun motivasi kepada orang miskin untuk menumbuhkan potensi-potensinya agar memiliki kuasa untuk memakmurkan alam dan kehidupannya.

BABV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam interpretasi Qardhawi, Islam sangat menaruh perhatian terhadap masyarakat (mujtama) seperti perhatiannya terhadap individu (jard) Secara fungsional struktural, masyarakat yang dipaliami Islam adalah unit-unit sosialnya yang satu sama lain saling mempengaruhi dan memiliki ketergantungan secara dominan. Secara tegas ditafsirkan oleh Qardhawi bahwa tidak ada kebaikan bagi individu kecuali berada dalam suatu masyarakat yang membantunya untuk tumbuh "sehat", proses sosialisasi yang benar dan berperilaku lurus. Islam tidak memandang manusia secara terpisah, akan tetapi melihatnya sebagai satu anggota dalam suatu masyarakat.

Qardhawi telah menafsirkan sistem masyarakat Islam sebagai perpaduan peran dan fungsi secara holistik dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Apabila terjadi pemisahan maka akan berdampak pada disfunksinya sistem secara keseluruhan. Dalam hal ini, kaum muslimin harus memahami bahwa tabiat sistem Islam merupakan manhaj sosial yang dapat menuntun, menyetir, mengarahkan dan menetapkan hukuin, mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bersosial Oleh karena itu, apabila terjadi pengadopsian sistem lain selain Islam atau memakai sistem Islam secara parsial untuk kehidupan kaum muslimin, maka yang terjadi

adalah kekacauan, kesengsaraan bahkan kemiskinan yang akut di kalangan masyarakat Islam.

Masyarakat Islam adalah suatu kehidupan sosial yang diarahkan oleh sistem-sistem berupa akidah, ibadah-ibadah yang dapat menyucikan, manhaj dan fikrah yang menyelamatkan, cita-cita mulia dan mengerakkan semangat hidup, akhlak (moralitas) yang mengontrol, dan undang-undang yang berkeadilan, dan kepemimpinan sosial (khalifah).

Sistem akidah dapat berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat Islam. Qardhawi telah menafsirkan bahwa substansi dari akidah dapat memancarkan karakter membangun (konstruktif) dan tidak menghancurkan (destruktif), mengalang dan tidak menceraiberaikan setiap proses sosial. Simbol akidah adalah “Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah dapat melahirkan gerak deklarasi sebuah revolusi terhadap para rezim yang lalim di muka bumi dan para thogut jahiliyah. Sebuah revolusi untuk menumbangkan setiap penindasan dan ketidakadilan sosial.

Sistem Ibadah dan Dakwah dalam Masyarakat Islam merupakan pilar inti kedua bagi masyarakat Islam. Ia merupakan syiar ritual yang bersifat praktis fungsional dalam hubungannya dengan fungsi identitas dan fungsi kontrol sosial. Semisa! shalat sebagai syiar ritual Islam, menginterpretasikan fungsi identitas sosial antara masyarakat Muslim dengan Kufur. Dalam simbol ritual shalat. manusia diajarkan hidup bersosial secara tertib (berjama'ah) yang mencerminkan nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah), persamaan (musawamali), gotong royong (takaful) dan kebebasan. Kemudian simbol lainnya adalah pelaksanaan zakat. Zakat ini merupakan sistem kontroi kepemilikan harta yang harus dijalankan oleh pihak yang berwenang (birokrasi pemerintahan) dan sisteir distribu kekayaan yang berkarakter keadilan. Adapun mengenai fungsi dakwah adalah untuk melakukan kontrol, pemeliharaan dan ketertiban sosial Dalam konteks kenegaraan, Qardhawi mengaskan bahwa aplikasi dakwah dalam masyarakat Islam adalah termasuk melakukan upaya pemeliharaan atas kehormatan rakyat, mengontrol proses distribusi dan alokasi program pembangunan, mekanisme penerimaan pekerja pemerintahan, mekanisme pelaksanaan hukum dan pengadilan, menertibkan para

provokator sosial, yang akan mengakibatkan hilangnya hak-hak keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Sistem akhlak dapat berfungsi mengarahkan dan membimbing suatu masyarakat untuk mencapai martabat sosial yang tinggi. Bahkan lebih jauhnya berfungsi melindungi anggota-anggota masyarakat Islam dalam segala tindakan penyelewengan atau kebathilan yang akan merusak citra dirinya sebagai Muslim.

Sistem kemanusiaan (al-Qiyam al-Insaniyah') memiliki prinsip perlindungan dan pemeliharaan sosial, baik terhadap sedarah, kehormatan hak milik, kesehatan akal pikiran dan keturunan manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Secara fungsional, nilai-nilai kemanusiaan akan berdampak pada nilai persaudaraan yang berimplikasi pada persatuan (integrasi) yang dilamari oleh saling tolong menolong (ta'awun). saling mendukung (tanaasur) dan saling berkasih sayang (taraahim).

Sistem politik memiliki reiasi dengan usaha menangani urusan manusia dengan cara sebaik-baiknya maka ia merupakan mekanisme untuk mengatur serta mengontrol proses interaksi dan komunikasi sosial, agar kehidupan manusia dalam masyarakat berjalan dengan efektif dan dapat mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan cita-citanya. Baik itu mengenai, urusan kepemimpinan dan kekuasaan umat, penetapan undang-undang yang mengatur semua aspek kehidupan sosial, maupun urusan kenegaraan dan kewarganegaraan. Sedangkan fungsi hukum adalah mengontrol agar tidak terjadi distrosi fungsi sosial.

Sistem ekonomi berfungsi mengarahkan kaum Muslimin untuk mempersiapkan jumlah yang terlatih dan mencukupi untuk setiap profesi yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga kaum Muslimin bisa mandiri mencukupi kebutuhannya. Mendorong terjadinya etos kerja yang tinggi bagi kaum Muslimin sehingga dapat melahirkan kemandirian ekonomi ummat. Menutup praktek ekonomi riba, risywah (suap), ihtikar (menimbun di saat orang membutuhkan),

penipuan, berdagang barang-barang yang diharamkan dan menetapkan konsekuensi prinsip istikhlaf (pengamanan kepemilikan pribadi).

Menurut Qardhawi, penyebab terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat Islam diakibatkan berkembangnya al-Khalal (kelemahan umat dari tujuan Islam). Semakin merebaknya 'al-khalal tersebut, membuat ummat Islam mengalami krisis kesadaran dan kehilangan identitasnya. Qardhawi menegaskan bahwa ummat Islam pada zaman-zaman terakhir ini telah tercerabut kekuatannya dihegemoni oleh bias-bias faham kehidupan materialisme, kapitalisme, fatalisme.

Faham sosialisme-materialisme telah menyebabkan semakin hilangnya nilai-nilai kesatuan ummat yang didasarkan pada prinsip tauhid. Persaudaraan universal (ukhuwah Islamiyah) semakin terkikis oleh kedengkian, rasa iri dan dendam sosia! Hal ini mengakibatkan setiap upaya melahirkan kesejahteraan ummat berdasarkan visi kemandirian ekonomi terhambat oleh kediktatoran penguasa

Pengaruh faham kapitalisme mengakibatkan lahirnya egoisme pribadi, bebas menumpuk kekayaan, mengembangkan dan membelanjakannya. Orientasi kepentingan individualisme mengejala di kalangan ummat Islam tanpa diiringi memperhatikan kepentingan orang lain. Akhirnya banyak ummat Islam yang tertindas, yakni kelompok yang terbuang dan miskin karena tidak memiliki akses dalam setiap pembangunan di era globalisasi saat ini.

Pengaruh hegemoni faham-faham di atas adalah lahirnya fenomena kemiskinan secara menyeluruh, baik itu karena adanya disfungsi motivasi dan kemampuan, disfungsi akal dan pemahaman, disfungsi ilmu dan amal, disfungsi perekonomian dan kekuatan kaum muslimin, dan disfungsi spritual.

Adapun bentuk-bentuk kemiskinan di kalangan masyarakat Islam dalam interpretasi Qardhawi meliputi: a) Kemiskinan individual atau yang menimpa

segelintir orang di dalam masyarakat Islam. Bentuk kemiskinan individual di kalangan masyarakat Islam lebih bersifat miskin secara temporal, yakni diakibatkan oleh adanya kelemahan jiwa atau mental sehingga dia tidak produktif dalam bekerja atau tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam pandangan Qardhawi, faham fatalisme dan materialisme merupakan penyebab utamanya. Dalam perspektif ini, Qardhawi menyebutnya sebagai bentuk kemiskinan spritual. Yang mana, segelintir orang di kalangan masyarakat Islam tidak memiliki motivasi melakukan perubahan diri maupun merubah perjalanan sejarahi hidupnya; b) bentuk kemiskinan struktural yang bertolak dari sebab keadaan struktur sosial yang eksploitatif dalam pola hubungan atau interaksi kaum muslimin dengan institusi-institusi ekonomi, politik, agama, keluarga, budaya dan sebagainya di luar akidah Islam. Dalam hal ini, menurut Qardhawi, penyebab utamanya adalah selain faham matrialisme juga faham pembangunan kapitalis

Selanjutnya, upaya penanggulangan kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam dalam interpretasi Qardhawi, meliputi: a) Keharusan Merealisasikan Sistem Islam Sebagai Prasyarat Mutlak dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kalangan Masyarakat Islam. Dengan merealisasikan sistem Islam secara komprehensif memungkinkan lahirnya bangunan kaidah normatif sosial, ekonomi maupun politik yang berpihak pada masyarakat Islam yang miskin. Sistem Islam yang telah diinterpretasikan oleh Qardhawi, bahwa ia akan melahirkan kaidah-kaidah normatif yang dapat menciptakan keselamatan, keseimbangan dan ketertiban sosial; b) Keharusan Peran Pemerintahan dalam Mengantisipasi Terjadinya Kemiskinan di Kalangan Masyarakat Islam. Dalam interpretasi Qardhawi, bahwa salah satu pemerintahan adalah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi praktek sehari-hari. Seperti, peran pemerintah membuat satu badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi, mengadili orang yang melanggar, dan menegur orang yang lalai. Peran pemerintah untuk menerapkan norma dan etika dalam ekonomi Islam merupakan upaya mengantisipasi secara dini terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat Islam, baik itu dalam tanggungjawab untuk meningkatkan produksi, membimbing

konsumen, memelihara sirkulasi serta mendistribusikan barang dengan adil; c) Keharusan Partisipasi Masyarakat Islam dalam Menanggulangi Kemiskinan yang terjadi di Sekitarnya. Dalam hal ini, Islam telah mengajarkan bahwa seorang mukmin harus berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi pada saudaranya sendiri. Artinya seorang mukmin harus dapat menjamin secara sosial bagi bagi mukmin lainnya yang mendapat musibah kemiskinan secara materiil. Inilah yang disebut dengan "takaful ijtima't", yang di dalamnya unsur ta'awun (saling tolong menolong sesama muslim), tanaasur (daling mendukung), dan taraalum (saling berkasih sayang).

B. Rekomendasi

Berpijak dari analisa penelitian yang dihasilkan maka terdapat beberapa hal yang perlu untuk dijadikan sebuah rekomendasi dalam memandang kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam penanggulangannya dalam interpretasi Qardhawi. Di antaranya dan upaya

1. Untuk Kepentingan Praktis

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kaum muslimin harus mulai melepaskan ketergantungannya pada negara-negara kapitalis dan sosialis materialis. Sebab secara empiris sudah terbukti tidak bisa menjadi solusi bagi pemecahan setiap prolematika ummat Islam. Kaum muslimin harus kembali pada fungsi ajaran yang diyakininya. Sebab sejarah telah membuktikan pada masa Rasulullah dan Khilafah, sistem Islam telah mampu melepaskan ummat dan belunggu penindasan sosial yang menyengsarakan ummat ke jarang kemiskinan. Sistem Islam harus mulai dipandang sebagai alternatif pasti dalam memecahkan setiap problematika ummat dewasa ini.

2. Untuk Kepentingan Akademis

Semakin berkembangnya problematika yang dihadapi ummat merupakan tantangan bagi kalangan akademisi muslim untuk mentransformasikan kembali prinsip-prinsip Islam dalam membangun setiap paradigma sains sosial. Paradigma sains sosial tersebut harus menafsirkan substansi nilai-nilai Islam menjadi aplikatif dan lebih bersifat holistik-integralistik. Sehingga mampu menjadi fondasi analisa

dalam menjaga keajegan dan keseimbangan proses-proses sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Islam.

3. Untuk Kepentingan Penelitian

Sebuah penelitian dapat bersifat linier, artinya bisa berkaitan dan berkelanjutan dengan masalah-masalah penelitian yang lain. Aplikasi penelitian ini mungkin lebih bersifat analisa implikatif Artinya berupaya mencari solusi pemikiran yang lebih komprehensif yang sarat dengan nilai-nilai etis Islam. oleh karena itu, hal-hal yang belum tersentuh dalam analisa-analisa penelitian ini, baik dari sisi metodologis maupun substansi permasalahannya dapat disempurnakan dan disinergikan dengan penelitian-penelitian lain yang berkaitan

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an
2. Abdullah, Taufik. (ed). 1897 "Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia".
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
3. Abdullah, Taupik. (ed). 1993
"Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi", Jakarta: LP3ES
4. Al-Busyra, Thariq. 2002 "Syakhshiyat wa Qadhaya Mu'asharah". Kairo: Al-Hilal
5.
Asy'arie, Musa. 1997
"Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat". Yogyakarta
Lesfi
6. Assiba'i, Musthafa Husni. 1993
"Syrakiyyatul Islam". Bandung: Diponegoro
7. Ath-Thawil, Nabil Subhi.
1985
"Kemiskinan dan Keterbelakangan, Bandung Mizan

8. Ali, Muhammad. tt. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern". Jakarta: Pustaka Amani
9. Al-Khurasany, Sulaiman. Bin Shalih. 2003
"Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Timbangan". Bogor: Pustaka Imam Syafe'i
10. Al-Buraey, Muhammad A. 1986.
"Islam, Landasan Alternatif, Administrasi Pembangunan". Jakarta: Rajawali Pers
11. Ahmad, Amrullah et.al. (ed). 1985
"Islamisasi Ekonomi". Yogyakarta: PLP2M
12. Areil, Ibnu. Hilmi.(ed). 1993.
"Da'wah Manhaji". Jakarta: Tanzhim Pres
13. Ali, Fachry. 1984.
"Islam Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural". Bandung Mizan
1984 "Islam Keprihatinan Universal dan Politik di Indonesia". Kota
15. Al-Sharqawi, Effat. 1986
Jakarta: Antar
- "Filsafat Kebudayaan Islam". Bandung: Pustaka
16. Atmadilaga, Didi. 1989
"Menghayati Ilmu dari Segi Filsafat Ilmu, Metodologi dan Sosialisasi Ilmu". Bandung: Paska Sarjana UNPAD
- 17/AL-Ahsan, Abdullah 1992
"Ummah or Nation? Identity Crisis in Contemporary Muslim Society". United Kingdom: Islamic Foundation
18. Al-Syaibani. 1979 "Falsafah Pendidikan Islam". Jakarta Bulan Bintang
- 19 Almisri, Amin. 1987 "al-Mujtama al-Islami". Bandung Husaini
20. Banawiratman, S.B. (ed). 1987.
"Kemiskinan dan Pembebasan". Yogyakarta: Kanisius
21. Bakker, Anton. 1984

"Metode-Metode

Penelitian Filsafat". Jakarta: Ghalia

Indonesia 22. Campbell, Tom. 1994 "Seven Theories of Human Society". Yogyakarta: Kanisius

23. Chenery, et al. 1974 "Redistribution With Growth". Great Britanian: Oxford University Press

24. Cohen dan Uphoff. 1984 "Rural Development Participation". Ithaca: Cornell University

25. Eisenstadt, S.N. 1986

"Revolusi dan Transformasi Masyarakat". Jakarta Rajawali

26. Effendi, Sopian. 1987.

"Debirokrasi dan Deregulasi: Upaya Meningkatkan Kemampuan Administrasi Untuk Melaksanakan Pembangunan". Yogyakarta:

Mimeograph

27. Esman, Milton J. 1991 "Management Dimentions of Development". West Hartford Connecticut:

Kumarian press

28. Ehlich, Paul. R "Ledakan Penduduk". Jakarta:PT Gramedia, Jakarta

29. Fromm, Erich 1995

"Masyarakat yang Sehat" Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 30. Galbraith, John. Kenneth. 1983

"Hakikat Kemiskinan Massa, terjemahan Tom Anwar". Jakarta: Sinar

Harapan 31. Garna, Judistira K. 1996

"Ilmu-Ilmu Sosial". Bandung: Program Pascasarjana UNPAD

32 2001

"Teori Sosial". Bandung Program Pascasarjana UNPAD 33. Galzaba, Sidi.

- "Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi". Jakarta: Bulan Bintang 34. Haque, Ziaul. 2000
- "Wahyu dan Revolusi" Yogyakarta: I kis
35. Hag, Mahbub ul. 1983 "Tirai Kemiskinan: Tantangan-Tantangan untuk Dunia Kenga". Jakarta:
Yayasan Obor
36. <http://islamlib.com/TOKOH/qardhawi.html>.
37. <http://media.isnet.org/islam/qardhawi.html>. 38
<http://members.tripod.com/-tesut/islam/qardhawi>.
- 39 <http://www.islam.gov.my/e-rujukan/aula.html>.
- 40, [http://www. Yahoo /2001/10/artikel.ridho.shtml](http://www.Yahoo/2001/10/artikel.ridho.shtml)
41. Imarah, Muhammad, 2001
- "al-Mausu'ah al-Islamiyah al-Amah". Kairo: Wazarah al-Augaf
42. Iqbal, Muhammad. 1983 "Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam". Jakarta Bulan Bintang
- 43, Jhonson, Doyle. Paul. 1990
- "Teori Sosiologi dan Klasik". Jakarta: Gramedia 44. Kahmad, Dadang Kahmad, 2000.
- "Sosiologi Agama", Bandung. Rosdakarya
45. Klauss, Rudi & Korten, David C, (ed). 1984 "People Centered Development". Connecticut: Kumarian Press
46. Kinlich, Graham. C. t.t.
- "Sociological Theory Its Development and Major Paradigms". Florida:
Florida State University
47. Kleden, Ignas 1987
- "Dialog Antar Agama: Kemungkinan dan Batas-batasnya". LP3ES

48. Kuncontjoroningrat. 1989 "Metode-Metode Penelitian Masyarakat". Jakarta: Jakarta
Gramedia "Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia". Yogyakarta Solahudin
49. Kontowijoyo. 1985.
Press
50.
1994
"Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi". Bandung: Mizan
51. Lele, Uma. 1975
"The Design of Rural Development". Washinton DC: Jhon Hopkins University Pers
52. Lauer, Robert. 1993
"Perspective on Social Change" Jakarta: Rineka Cipta
53. Maududi, Abul A'la. 1984
"Langkah-Langkah Pembaharuan Islam". Penerbit Pustaka: Bandung
54. McClelland, David C. 1980
"Dorongan Hati Menuju Modernisasi, dalam Myron Weiner (ed), Modernisasi, Dinamika, Pertumbuhan". Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Martindale, Don, 1990)
"The Nature and Types of sociological Theory. Cambridge: The Reverside
- 55.

56. Moleong. Lexy. J. 1996

"Metodelogi Penelitian Kualitatif Bandung: Rosdakarya

57. Myrdal, Gunnar Myrdal. 1980 "Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin". Jakarta: PT. Gramedia 58. Mardjono, Hartono. 1997

"Menegaskan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan". Bandung Mizan

49 Manzhur, Ibn. 1994

"Lisan al-Arab". Beirut: Dar Shadr 60 Maitre, Claude-Luce. M. 1995 Pengantar Kepemikiran Iqbal". Bandung Mizan

ol. M, Dahlan. Muhibudin, (ed). 2002 "Sosialisme Religius". Yogyakarta Kreasi Wacana

62 Muthahari, Murthada. 1985 "Manusia dan Agama". Bandaung. Mizan

63. Mursito, Ndaru. Sunarto, S. 1979

"Meningkatkan Pendapatan Sektor Pertanian di Indonesia". Jakarta:

CSIS

64, Muhammad, Sahri: 1982 "Pengembangan Zakat

dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Malang. Yayasan Pusat Studi Aveicenna 65. Muhadjir, Noeng 1998

"Metodelogi Penelitian Kualitatif". Yogyakarta: Rake Sarasin

66 Notosusanto, Noegroho. 1978

"Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer". Jakarta Yayasan Idayu

67. Nazir, M. 1984.

"Metode Penelitian". Jakarta: Ghalia Indonesia

68. Nadvi, Syed. Habibul Haq 1984 "Dinamika Islam". Bandung: Pustaka Risalah.

69. Nottingham, Elizabeth K. 1985 "Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama", Jakarta

Rajawali

70. Nasution, S. 1982

*Metode Research". Jakarta: Jemars 71. Ode'a, Thomas. F. 19961

"Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal". Jakarta: Rajawali Pers

72. Poerwadarminta, W.J.S. 1986 "Kamus Umum Bahasa Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka

73. Poloma, Margaret Poloma. 1979

"Contemporary Sociological Theory". Newyork: Macmillan 74. Qohar, Mas'ud. Khasan Abdul. Lt.

"Kamus Ilmiah Populer". 75. Qardhawi, Yusuf. 2001

76.

77.

Jakarta: Bintang Pelajar

"Ainai Khalel?" Jakarta: Penebar Salam

2000

"Al-Iman wal Hayar". Yogyakarta: Mitra Pustaka

1997

"Al-Sunnah: Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah". Surabaya 1997 78

Dunia limu

"Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami, terjemahan". Jakarta:

Gema Insani Press

19 "Karakteristik Islam". Surabaya: Risalah Gusti

2001

1985

"Kritik dan Saran Untuk Para Dai". Jakarta: L.L.F.S.O 1997 "Madkhal Li Ma'rifatil Islam Muqawwumatuhu". Jakarta: Al-Kautsar

1999

82.

"Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nasyuduhu". Jakarta: Al

Kautsar 1998

\$3.

"Min Fighid Daulah Fil Islam". Jakarta: Al-Kautsar

1995

84.

"Musykilah Al-Faqr wakaifa Aalajaha al-Islam". Jakarta. Gema Insani

Press

2003

85

Perjalanan hidupku". Jakarta Pustaka al-Kautsar 1993

86.

"Syari'atu al-Islamiyak khuluduhu wa Sholahiha it tatbhbiqi li kuli

Zamaninn wa makanin". Surabaya: Pustaka Progressif 2000

87

"Ummatuna baina Qarnar. Kairo: Dar al-Syuruq 1999

88.

"Al-Ikhwana Al-Muslimun Sab'una Aman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyah

wa al-Jihad". Kairo: Maktabah Wahbah 1402 H

89.

"al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhid wa al-Tatharruf". tt: Bank al
Taqwa. 90.

1999

"Al-Siyasah al-Syar'iyah fi dhau'i nushuh al-Syari'ah wa
magashidiha". Jakarta: Pustaka al-Kautsar 1997

91.

"Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah al
Mu'assasah". Beirut:

Mu'assasah Risalah

92. "Min ajli Shahwah Rasyidah. Kairo: Dar al-Syurq

2001

93.

LE

"Syari'ah al-Islam". Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah

94. Raharjo, M. Dawam. 1995 "Eser-esei Ekonomi Politik". Jakarta, LP3ES

95. Rebenson, Roland. (cd). tt.

"Agama: dalam Analisa dan Interpretas: Sosiologis". Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada 96. Raharjo, M. Dawam 1981"

"Pembangunan dan Kekerasan Struktural: Agenda Riset Perdamaian"

Jakarta: LP3ES

97. Sasono, Adi dan Arif, Sirtua. 1984 "Indonesia, Ketergantungan

98 Soedjatmoko. 1984

dan Keterbelakangan". Jakarta: Rajawali

Etika Pembebasan". Jakarta: LP3ES

99 Sockanto, Soerjono, 1993 "Beberapa Teori Sosiologi tentang Masyarakat". Jakarta: Rajawali Pers

1986 Pengantar Sosiologi Kelompok". Bandung Remaja Karya 100

101. Soeharto, Bonar, 1989

"Menyiapkan Penelitian dalam Penulisan Karya Ilmiah".

Tarsito

102. Shahab, M. Quraish. 1996

Wawasan Al-Qur'an". Bandung: Mizan

103. Syarif. M.M. 1985

"Iqbal tentang Tuhan dan Keindahan". Bandung Mizan 104. Simatupang, TB. et.al. 1987

"Peranan Agama-agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Negara Pancasila yang Membangun". Jakarta BPK Gunung

Mulis

105. Sanusi, Ahmad Sanusi. 1999

"Agama dan Kemiskinan". Jakarta: Logos 106. Sophian, Ainur R. (ed), 1997

"Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan

Masyarakat Islam". Surabaya Risalah Gusti "Ummah dan Imamah: Suatu Tinjauan Sosiologis" Bandung:

107. Syari'ati, Ali. 1989

Hidayah

108, Soekanto, Soerjono. 1990 "Sosiologi Suatu Pengantar". Jakarta, Rajawali Pers

109. Sastrapratedja, M, et.al... 1986 "Menguak Mitos-Mitos Pembangunan". Jakarta:

110. Sumaryono, E. 1993

"Filsafat Hermeneutik". Yogyakarta: Kanisius 111. Suparlan, Parsudi Suparlan. (ed). 1984

"Kemiskinan di Perkotaan". Jakarta: Sinar Harapan 112. Todaro, Michael Todaro. 1977

"Economic Development in the Third World" New York. Logman

113. Turner, Bryan S. 2003 "Agama dan Teori Sosial" Yogyakarta: IRCISod

114. Veeger, K.J. 1993 "Realitas Sosiasl: Refeleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi". Jakarta: Gramedia

115. Varma, S.P. 1995

"Teori Politik Modern" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 116. Wahid, Abdurahman 1981 "Muslim di Tengah Pergumulan". Jakarta: LEPPENAS

117. Yafie, Ali. 1986.

"Islam dan Problema Kemiskinan". Jakarta: P3M 118. Zahrah, Muhammad. Abu. 1994 "Membangun Masyarakat Islam". Jakarta Pustaka Firdaus 119. Zainuddin, A. Rahman, 1992

"Kekuasaan dan Negara". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama